



LAPORAN TAHUNAN 2012

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat menyampaikan “**Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2012**”.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2012 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan dan tugas di Sub Sektor Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai Desember 2012, yang menyajikan berbagai informasi mengenai moda transportasi darat, yang meliputi bidang lalu lintas jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan dan keselamatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi darat pada khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas untuk kemajuan transportasi dan

Jakarta, April 2013

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. MAKSUD DAN TUJUAN	I-2
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	I-2
C. VISI DAN MISI	I-3
D. RUANG LINGKUP	I-4
BAB II KEGIATAN PELAYANAN DAN ADMINISTRATIF	II-1
A. BIDANG PERENCANAAN	II-1
B. BIDANG KEUANGAN	II-4
C. BIDANG HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	II-14
D. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	II-36
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012	III-1
A. BIDANG PEMERINTAHAN	III-1
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	III-1
2. DIREKTORAT LLAJ	III-13
3. DIREKTORAT LLASDP	III-44
4. DIREKTORAT BSTP	III-55
5. DIREKTORAT KTD	III-69
B. BIDANG PEMBANGUNAN	III-79
C. BANTUAN LUAR NEGERI	III-81
BAB IV OPERASIONAL PERHUBUNGAN DARAT	IV-1
A. LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	IV-1
1. Umum	IV-1
2. Perkembangan Prasarana LLAJ	IV-2
3. Perkembangan Sarana LLAJ	IV-6
4. Penegakan Hukum Bidang LLAJ dan PPNS Bidang LLAJ	IV-7

5. Kegiatan-kegiatan Strategis	IV-11
6. Permasalahan Yang Dihadapi	IV-12
7. Upaya Pemecahan	IV-14
B. LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN	IV-15
1. Umum	IV-15
2. Perkembangan Prasarana LLASDP	IV-16
3. Perkembangan Sarana LLASDP	IV-25
4. Perkembangan Kinerja Angkutan Penyeberangan	IV-27
5. Kegiatan-kegiatan Strategis	IV-27
6. Permasalahan yang dihadapi	IV-33
7. Upaya Pemecahan	IV-34
C. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN	IV-34
1. Umum	IV-34
2. Perkembangan Prasarana Angkutan Perkotaan	IV-41
3. Perkembangan Sarana Angkutan Perkotaan	IV-47
4. Kinerja Angkutan Perkotaan	IV-48
5. Kegiatan-kegiatan Strategis	IV-49
6. Permasalahan yang dihadapi	IV-49
7. Upaya yang dilakukan	IV-49
D. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	IV-50
1. Umum	IV-50
2. Perkembangan Kecelakaan Transportasi Jalan	IV-52
3. Kegiatan Keselamatan Transportasi Jalan	IV-55
4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan	IV-92
 BAB V KINERJA BALAI, K-OPP DAN UPT PENYEBERANGAN	 V-1
A. KINERJA BALAI	V-1
1. BLJSKB BEKASI	V-1
2. BLLAJSDP JAMBI	V-7
3. BLLAJSDP PALANGKARAYA	V-22
4. BLLAJSDP PALU	V-28
5. BLLAJSDP DENPASAR	V-35
B. KINERJA OPP	V-50

1. KANTOR OPP MERAK	V-50
2. KANTOR OPP GILIMANUK	V-54
3. KANTOR OPP LEMBAR	V-59
4. KANTOR OPP PAGIMANA	V-62
C. KINERJA UPT PENYEBERANGAN	V-67
1. UPT. Penyeberangan Kalabahi	V-67
2. UPT. Penyeberangan Kariangau	V-70
3. UPT. Penyeberangan Gorontalo	V-78
BAB VI PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN	
I. Laporan Sementara Analisa Dan Evaluasi Angkutan Lebaran Tahun 2012 (1433 H) Pada H-7 S.D H+6	
II. Indikator Kinerja Utama Dan Penetapan Kinerja	
III. Laporan Evaluasi Realisasi Daya Serap DIPA TA. 2012	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Pembahasan RPP LLAJ antar Kementerian dan 5 Instansi Pembina	II-19
Gambar II-2	Sosialisasi Peraturan Bidang LLAJ dan LLASDP	II-20
Gambar II-3	Pembekalan Teknis Satker di Lingkungan Ditjen Hubdat Pada Tanggal 24 Januari 2012	II-26
Gambar II-4	Press Background Keselamatan Jalan	II-26
Gambar II-5	Penghargaan ISO 9001 2008	II-27
Gambar II-6	Rakernis PPNS Bidang LLAJ 2012	II-27
Gambar II-7	Pembinaan Pengemudi Bus AKAP di Bogor	II-28
Gambar II-8	Seminar Intelligent Transport System di Jakarta	II-28
Gambar II-9	Jumpa Pers Persiapan Angkutan Lebaran 2012	II-29
Gambar II-10	Konferensi Pers Kecelakaan KMP Bahuga Jaya	II-29
Gambar II-11	Peresmian Pelabuhan Penyeberangan Marisa Gorontalo	II-30
Gambar II-12	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2012	II-30
Gambar II-13	Kegiatan Pemetaan Profile Potensi Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat Hotel Red Top Jakarta, 13 November 2012	II-41
Gambar II-14	Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat Hotel Kinasih, Sukabumi 12 – 13 Oktober 2012	II-41
Gambar II-15	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, 5 September 2012	II-41
Gambar II-16	Sosialisasi Ketatausahaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	II-43
Gambar III-1	Pembangunan Terminal Wonosari	III-16
Gambar III-2	Pembangunan Terminal Barru	III-16
Gambar III-3	Pembangunan Terminal Wonogiri	III-17
Gambar III-4	Monitoring Posko Angkutan Lebaran	III-18
Gambar III-5	Penyuluhan Kepada Perusahaan Karoseri	III-24
Gambar III-6	Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum AKAP Tahun 2012	III-30
Gambar III-7	Kegiatan Herregistrasi Perusahaan Angkutan Umum AKAP Tahun 2012	III-31

Gambar III-8	Kegiatan Monitoring Tarif Angkutan AKAP Tahun 2012	III-32
Gambar III-9	Kegiatan Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2012	III-33
Gambar III-10	Kegiatan Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan	III-34
Gambar III-11	Kegiatan Semiloka Angkutan Barang Tahun 2012	III-39
Gambar III-11	Stiker Pelanggaran Perizinan Angkutan	III-41
Gambar III-12	Pengecekan buku uji kendaraan bermotor	III-42
Gambar III-13	Pengujian di Kab. Bantul	III-42
Gambar III-14	Kegiatan Penyuluhan Penegakan Hukum	III-43
Gambar III-15	Pelaksanaan Penyidikan Bidang LLAJ	III-43
Gambar III-16	Pelaksanaan Penyidikan Bidang LLAJ	III-43
Gambar IV-11	Perusahaan Kendaraan Umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching	
	Jumlah Pelanggaran di Jembatan Timbang	IV-4
Gambar IV-12	Jumlah Pelanggaran Operasional Tahun 2011	IV-6
	Jumlah Pelanggaran Perizinan, Operasional dan Persyaratan Teknis	IV-7
Gambar IV-13	Laik Jalan	
	Daftar PPNS Bidang LLAJ Tahun 2007 - 2011	IV-8
	Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tarif Tahun 2006 - 2011	
Gambar IV-14	Rekap Penjatuhan Sanksi Angkutan Lebaran Tahun 2011 Berdasarkan Domisili Perusahaan Angkutan AKAP	IV-8 IV-10
	Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan	
Gambar IV-15	Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan	IV-10
	Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota	IV-11 IV-12
Gambar IV-16	Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	
Gambar IV-17	Lintas Penyeberangan Komersil	IV-13
	Lintas Penyeberangan Bersubsidi	IV-14
	Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan	
Gambar IV-18	Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP	IV-15
	Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau	
Gambar IV-19	Jumlah Kapal SDP yang beroperasi	IV-15 IV-17

Gambar IV-20	Jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi berdasarkan Kepemilikan	IV-18
Gambar IV-21	Subsidi Kapal Perintis Tahun 2005 - 2010	IV-18
Gambar IV-22	Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai	IV-19
Gambar IV-23	Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan	IV-20
Gambar IV-24	Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2005-2011	IV-21
Gambar IV-25	Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil seluruh Lintas Tahun 2011	IV-24
Gambar IV-26	Produksi Angkutan Penyeberangan Perintis seluruh Lintas Tahun 2011	IV-25
Gambar IV-27	Kinerja Ruas Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	IV-25
Gambar IV-28	Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	
Gambar IV-29	Data Pelayanan Taksi di Kawasan Perkotaan	IV-26
Gambar IV-30	Rekapitulasi Data Angkutan Pemandu Moda, Angkutan Jalan Dengan Angkutan Udara Per 31 Desember 2011	IV-26
Gambar IV-31	Data Prasarana Tahun 2011	IV-26
Gambar IV-32	Fasilitas Pendukung LLAJ dan Persimpangan dengan APILL	IV-27
Gambar IV-33	Data Lalu Lintas Tahun 2011	IV-27
Gambar IV-34	Jumlah Angkutan Umum	IV-27
Gambar IV-35	Gasifikasi Pada Angkutan Umum	
Gambar IV-36	Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotor berdasarkan tingkat kecelakaan Tahun 2007-2011	IV-28
Gambar IV-37	Jumlah Korban Kecelakaan Berdasarkan Usia	IV-39
Gambar IV-38	Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2004-2010	IV-39
Gambar IV-39	Korban Kecelakaan berdasar Tingkat Pendidikan Korban Tahun 2004-2010	IV-41
Gambar IV-40	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop Komunitas Keselamatan	IV-44
Gambar IV-41	Peserta Workshop Komunitas Keselamatan	IV-46
Gambar IV-42	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan	IV-47
Gambar IV-43	Peserta Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan	IV-48
Gambar IV-44		IV-50
Gambar IV-45		IV-54

33	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. Pelabuhan	IV-55
Gambar IV-	Penyeberangan Kalabahi	
34	Data Produksi Angkutan Penyeberangan Ferry Tahun 2010	IV-55
	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. Pelabuhan	
Gambar IV-	Penyeberangan Kariangau	IV-56
35		
Gambar IV-		IV-71
36		IV-71
Gambar IV-		
37		IV-72
Gambar IV-		IV-72
38		
Gambar IV-		
39		V-10
Gambar IV-		V-12
39		
		V-17
Gambar IV-		
40		
Gambar IV-		
41		
Gambar IV-		
42		
Gambar IV-		
43		
Gambar IV-		
44		
Gambar IV-		
45		

Gambar IV-
46

Gambar V-2

Gambar V-3

Gambar V-3

D A F T A R T A B E L

Tabel 2-1	Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2012	II-5
Tabel 2-2	Posisi Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ	II-18
Tabel 2-3	Kesepakatan bidang Transportasi Darat	II-22
Tabel 2-4	Kunjungan Luar Negeri Ditjen Perhubungan Darat	II-31
Tabel 2-5	Agreement/MoU Ditjen Perhubungan Darat	II-34
Tabel 2-6	Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	II-37
Tabel 2-7	Pegawai Berdasarkan Golongan	II-37
Tabel 2-8	Pegawai Berdasarkan Pendidikan	II-38
Tabel 2-9	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II-38
Tabel 2-10	Pegawai Berdasarkan Golongan	II-38
Tabel 2-11	Pegawai Berdasarkan Eselonering	II-38
Tabel 3-1	Penerbitan SUT	III-21
Tabel 3-2	Penerbitan SRUT	III-21
Tabel 3-3	Penguji Kendaraan Bermotor	III-22
Tabel 3-4	Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	III-24
Tabel 3-5	Sertifikasi Bengkel BBG	III-25
Tabel 3-6	Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	II-36
Tabel 3-7	Penerbitan Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa	II-37
Tabel 3-8	Kendaraan Bermotor	III-21
	Bengkel BBG yang telah mendapat sertifikasi	III-22
Tabel 3-9	Proyek Sub Sektor Perhubungan Darat T.A. 2011	III-22
Tabel 3-10	Proyek Sub Sektor Perhubungan Darat T.A. 2011	
Tabel 3-11	Progres APBN TA. 2011 per 31 Desember 2011 Sub Sektor	III-24
Tabel 3-12	Perhubungan Darat	III-25
Tabel 4-1	Program dan Realisasi Pembangunan LLAJ	III-70
	Program dan Realisasi Pembangunan Bidang Perkotaan	III-70
Tabel 4-2	Trayek Perintis Angkutan Jalan Di Seluruh Indonesia	
	Program dan Realisasi Pembangunan LLASDP	III-70
Tabel 4-3	Kepadatan Penduduk	III-71

Tabel 4-4		III-71
Tabel 4-5	Aset Jalan Jembatan Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Jumlah Penduduk/ Luas Wilayah	III-72 III-73
Tabel 4-6	Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata Tahun 2011 Jumlah Pengangkutan Alat Berat dan B3 Tahun 2011	IV-1
Tabel 4-7	Perusahaan Kendaraan Umum yang berdomisili di Kuching untuk melayani trayek Kuching - Pontianak	IV-4
Tabel 4-8	Perusahaan Kendaraan Umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching	IV-6 IV-7
Tabel 4-9	Pengesahan dan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	
Tabel 4-10	Perusahaan Kendaraan Umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching	IV-8
Tabel 4-11	Jumlah Pelanggaran di Jembatan Timbang	IV-8
Tabel 4-12	Jumlah Pelanggaran Operasional Tahun 2011 Jumlah Pelanggaran Perizinan, Operasional dan Persyaratan Teknis	IV-10
Tabel 4-13	Laik Jalan Daftar PPNS Bidang LLAJ Tahun 2007 - 2011	IV-10 IV-11
Tabel 4-14	Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tarif Tahun 2006 - 2011	IV-12
Tabel 4-15	Rekap Penjatuhan Sanksi Angkutan Lebaran Tahun 2011 Berdasarkan Domisili Perusahaan Angkutan AKAP	IV-13
Tabel 4-16	Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan	IV-14
Tabel 4-17	Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan	
Tabel 4-18	Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota	IV-15
Tabel 4-19	Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	IV-15
Tabel 4-20	Lintas Penyeberangan Komersil	IV-17
Tabel 4-21	Lintas Penyeberangan Bersubsidi	IV-18
Tabel 4-22	Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP	IV-18
Tabel 4-23	Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau Jumlah Kapal SDP yang beroperasi	IV-19 IV-20
Tabel 4-24		IV-21
Tabel 4-25	Jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi berdasarkan	IV-24

Tabel 4-28	Kepemilikan	IV-24
Tabel 4-29	Subsidi Kapal Perintis Tahun 2005 - 2010	IV-25
Tabel 4-30	Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai	IV-25
	Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan	
Tabel 4-31	Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2005-2011	
	Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil seluruh Lintas Tahun	IV-26
Tabel 4-31	2011	IV-26
Tabel 4-32	Produksi Angkutan Penyeberangan Perintis seluruh Lintas Tahun	IV-26
Tabel 4-33	2011	IV-27
Tabel 4-34	Kinerja Ruas Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	IV-27
	Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	
Tabel 4-35	Data Pelayanan Taksi di Kawasan Perkotaan	IV-27
Tabel 4-36	Rekapitulasi Data Angkutan Pemandu Moda, Angkutan Jalan Dengan	
Tabel 4-37	Angkutan Udara Per 31 Desember 2011	IV-28
Tabel 4-38	Data Prasarana Tahun 2011	IV-39
Tabel 4-39	Fasilitas Pendukung LLAJ dan Persimpangan dengan APILL	IV-39
Tabel 4-39	Data Lalu Lintas Tahun 2011	IV-40
	Jumlah Angkutan Umum	
Tabel 4-40	Gasifikasi Pada Angkutan Umum	IV-41
Tabel 4-41	Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotor berdasarkan	IV-44
	tingkat kecelakaan Tahun 2007-2011	IV-46
Tabel 4-42	Jumlah Korban Kecelakaan Berdasarkan Usia	IV-47
	Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenis	IV-48
Tabel 4-43	Kendaraan Tahun 2004-2010	IV-50
	Korban Kecelakaan berdasar Tingkat Pendidikan Korban Tahun 2004-	
Tabel 4-44	2010	IV-54
Tabel 4-45	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop Komunitas Keselamatan	IV-55
	Peserta Workshop Komunitas Keselamatan	
Tabel 4-46	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop Manajemen Kampanye	IV-55
	Keselamatan	
Tabel 5-1	Pencapaian PNBK BPLJSKB Bekasi	V-5
Tabel 5-2	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. BLLAJSDP	
	Jambi	V-9

Tabel 5-3	Program dan Kegiatan UPT. BLLAJSDP Jambi	V-10
Tabel 5-4	Pegawai Negeri Sipil di BLLAJSDP Palangkaraya	V-22
Tabel 5-5	Jumlah Surat Masuk	V-23
Tabel 5-6	Jumlah Surat Keluar	V-24
Tabel 5-7	Penyerapan Dana BLLAJSDP Palangkaraya	V-24
Tabel 5-8	Jumlah dan Kualifikasi PNS	V-30
Tabel 5-9	Rincian realisasi keuangan Per Jenis Belanja	V-31
Tabel 5-10	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. BALAI LLAJSDP Denpasar	V-37
Tabel 5-11	Program dan Kegiatan UPT. Balai LLAJSDP Denpasar	V-38
Tabel 5-12	Rincian Jumlah Pegawai KOPP Gilimanuk	V-55
Tabel 5-13	Rincian Jumlah Pegawai KOPP Gilimanuk berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	V-55
Tabel 5-14	Lintas Penyeberangan yang Merupakan Lingkup KOPP Gilimanuk	V-56
Tabel 5-15	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan Satker Kantor OPP Pagimana	V-65
Tabel 5-16	Program dan Kegiatan Satker OPP Pagimana	V-65
Tabel 5-17	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	V-69
Tabel 5-18	Data Produksi Angkutan Penyeberangan Ferry Tahun 2012	V-69
Tabel 5-19	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	V-72

BAB I

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pencapaian tujuan pembangunan adalah negara-negara yang memiliki sistem transportasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dinamis penduduknya, *vice versa*. Namun demikian, agar pembangunan transportasi nasional lebih efisien, efektif dan memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan rencana pembangunannya.

Kemajuan transportasi memiliki korelasi erat dengan pembangunan peradaban, dan keberhasilannya sangat berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas dari faktor-faktor lainnya, seperti kualitas, biaya dan tingkat pelayanan sistem transportasi itu sendiri. Tanpa perhatian terhadap faktor-faktor ini, maka hampir dipastikan kemajuan transportasi nasional dapat menimbulkan berbagai biaya sosial (*social costs*) baik berupa kecelakaan, kemacetan, kebisingan, dan polusi.

Untuk mengurangi paradoks atau dampak negatif dari pengembangan sistem transportasi pada pembangunan peradaban dimaksud, maka perlu disusun rumusan rencana pengembangan sistem transportasi nasional. Pentingnya rumusan rencana ini tidak saja dimaksudkan agar langkah pencapaian tujuan yang diharapkan dapat lebih terarah dan sistematis, namun juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pencapaian tujuan pengembangan transportasi nasional yang diinginkan.

Hingga saat ini transportasi jalan masih mempunyai peran yang sangat dominan hampir 84% total perjalanan antar propinsi menggunakan transportasi jalan, sedangkan peran angkutan kereta api masih sangat kecil sekitar 7% karena jasa angkutan penumpang kereta api nasional hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sementara peran angkutan sungai danau dan penyeberangan juga masih relatif kecil yakni berkisar 5%.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah berupaya meningkatkan kinerjanya melalui capaian (*out-come*) selama satu tahun anggaran sejalan dengan Sistem Transportasi Nasional pada bidang Angkutan Jalan maupun bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setiap tahun menyampaikan hasil pelaksanaan tugas yang disusun dalam bentuk laporan tahunan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2012 disusun dengan maksud sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2. Tujuan

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2012 disusun dengan tujuan untuk melaporkan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

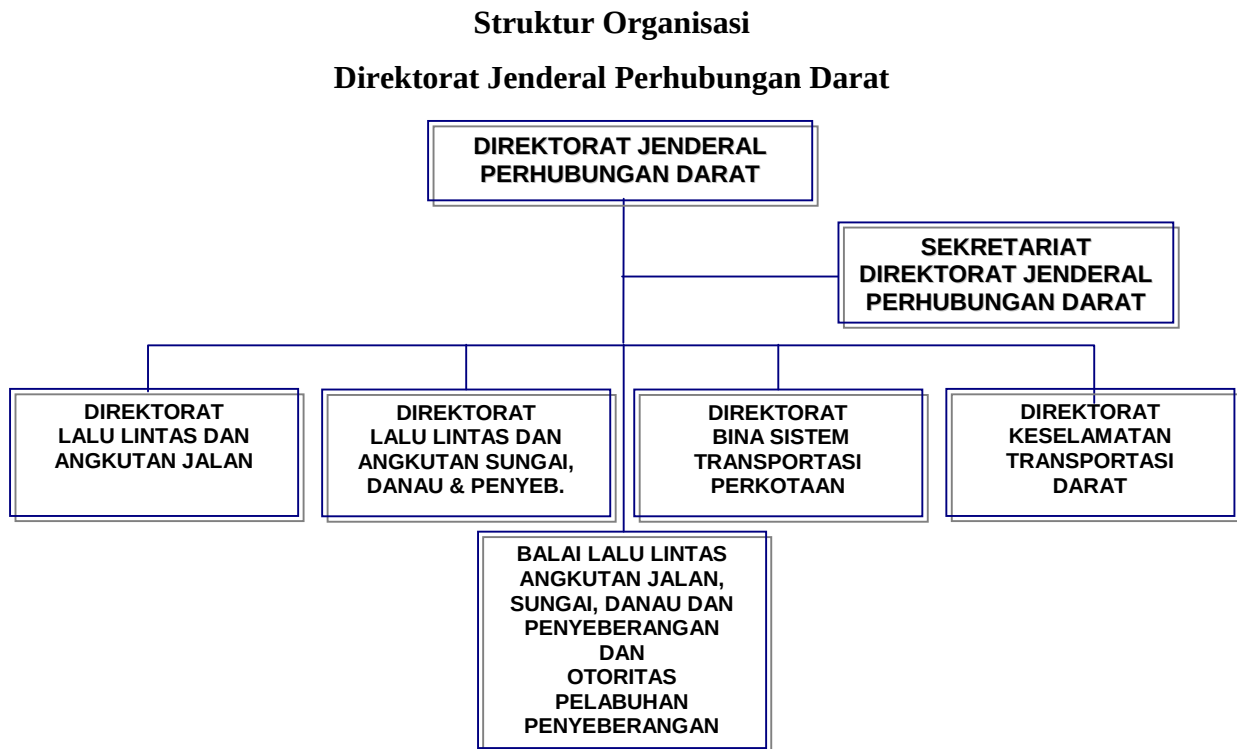
Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Selanjutnya, pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengembangkan organisasi dengan dibentuknya Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) di 8 (delapan) lokasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 dan 86 Tahun 2011.

Adapun Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :



C. VISI DAN MISI

1. Visi

“Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggung-jawabkan”

2. Misi

- a. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
- b. Menciptakan dan mengorganisasikan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan, keselamatan transportasi darat yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
- c. Mendorong berkembangnya tata niaga dan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
- d. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

D. RUANG LINGKUP

Penyusunan buku ini mencakup pelaksanaan kegiatan Sub Sektor Perhubungan Darat, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Kegiatan di bidang pemerintahan mencakup kegiatan non fisik yang bersifat rutin maupun kegiatan-kegiatan fisik, seperti : penyusunan petunjuk dan pedoman teknis, kebijakan-kebijakan dan lain-lain.

2. Bidang Pembangunan

Kegiatan di bidang pembangunan mencakup kegiatan fisik, dimana pendanaannya baik rutin dan pembangunan dibiayai oleh APBN yang tersusun dalam Rencana Kerja Anggaran.

3. Bidang Operasional

Kegiatan di bidang operasional mencakup perencanaan teknis, fasilitas perlengkapan ataupun pendukung yang mana kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut pada pembinaan teknis.

BAB II

KEGIATAN PELAYANAN DAN ADMINISTRATIF

A. BIDANG PERENCANAAN

Berdasarkan proses perencanaan yang tertuang dalam Pedoman Perencanaan KM. 31 Tahun 2006 di lingkungan Kementerian Perhubungan, di bidang Perencanaan telah dilakukan kegiatan tahun 2012, antara lain :

1. Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2012;

Dalam penetapan kinerja berdasarkan pada prioritas program transportasi darat tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- b. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
- c. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
- d. Peningkatan Kualitas SDM dan Peraturan Perundangan.
- e. Peningkatan Penggunaan Teknologi yang Efisien dan Ramah Lingkungan di Bidang Transportasi Darat.

2. Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK Tahun 2012;

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat untuk tahun 2012.

3. Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2012;

Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi tugas pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pepaduan jaringan transportasi darat tahun 2012.

4. Pemantauan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2012;

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) pada tahun 2011 dengan total pagu sebesar Rp.

5.000.000.000,- tetapi, tidak dapat terserap dikarenakan terdapat permasalahan pada Proses Pencairan dan Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

5. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2012;

LAKIP disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada tahun 2012, ada beberapa kegiatan yang belum dapat dinilai hasil kinerjanya dikarenakan ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap.

6. Menyusun Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2012;

Sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan bertujuan untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

7. Penyusunan Data Statistik Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2012;

- a. Menyusun format struktur data dan informasi perhubungan darat.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder.
- c. Melakukan updating data perhubungan darat.
- d. Melakukan kompilasi data dan informasi.
- e. Melakukan pemetaan data dan informasi kondisi dan perkembangan perhubungan darat.
- f. Melakukan editing dan pengelompokan data terhadap data yang sifatnya tahunan (*time series*).

8. Pengembangan Sistem Informasi;

- a. Melakukan *review* terhadap Master Plan Teknologi Informasi Perhubungan Darat.
- b. Melakukan pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN) Ditjen Perhubungan Darat secara bertahap dan berkelanjutan.
- c. Melakukan pembangunan Sistem Monitoring Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keselamatan Transportasi Darat.
- d. Melakukan pembangunan Sistem Informasi Studi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas Web-Server Ditjen Perhubungan Darat.
- f. Melakukan Pengembangan Data Perhubungan Darat pada Profildan Kinerja Perhubungan Darat Tahun 2012.

- g. Menyusun Konsep Peraturan Perundangan terkait Tata Kelola Sistem Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
- 9. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2012;

Rakornis Ditjen Hubdat dilaksanakan di Sheraton Mustika Hotel, DI Yogyakarta pada tanggal 6 s.d 8 November 2012 dan diikuti oleh 632 peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kemenhub, Dishub Propinsi, Kabupaten/Kota, BUMN dan UPT di lingkungan Ditjen Hubdat.

Hasil Rumusan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2012 yang telah disepakati antara lain :

- a. Dalam menciptakan transportasi yang berkelanjutan perlu adanya komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang didukung dengan kapasitas kelembagaan yang handal dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan aspek pendanaan.
- b. Sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan bahwasanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Pembina sekaligus penyelenggara perhubungan harus melakukan perubahan-perubahan/reformasi transportasi melalui baik perbaikan dan pengembangan sistem maupun reformasi kebijakan secara lebih efektif dan konsisten.
- c. Pembangunan di bidang perhubungan darat harus saling terintegrasi untuk menciptakan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat.
- d. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pokok dalam penyelenggaraan perhubungan baik di pusat maupun di daerah.
- e. Perlu dilakukan penyusunan regulasi yang mampu mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan efisien dan efektif serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
- f. Perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan peralatan pengujian kendaraan bermotor termasuk pembangunan sistem informasi yang dengan menyiapkan terlebih dahulu Road Map Pengujian Kendaraan Bermotor Nasional.
- g. Pemisahan antara regulator dan operator pelabuhan penyeberangan perlu segera dilakukan pengkajian lebih mendalam diantaranya melalui MoU antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan PT. ASDP Aneka Pelabuhan dan Perairan.

KM11Tahun2002tentangPelaksanaan

KegiatanPemerintahandiPelabuhanPenyeberanganYangDiusahakan
terutamadalam masatransisi saatini.

- h. Perlupengkajian lebih mendalam mengenai pengelolaan pengoperasian hasil pembangunan sarana dan prasarana SDP untuk pemanfaatansecara maksimal.
- i. Perlusegeraditerbitkanregulasiyangmengaturtentangpenyelenggaraan ManajemenRekayasaLaluLintas, penyelenggaraan AnalisisDampakLalu Lintas(AndalLalin) sertaStandardanSertifikasiKompetensiPenyusunan PersyaratanTimEvaluasiAnalisis DampakLaluLintas (Andal Lalin).

B. BIDANG KEUANGAN

1. Pelaksanaan Anggaran

- a. Pagu Anggaran dan Realisasi

Dana Anggaran Belanja tahun 2012Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebesar **Rp. 2.840.395.219.000.-**yang terdiri dari RM **Rp. 2.834.805.219.000,-**PNBP **Rp. 5.590.000.000,-** dan PHLN **Rp. 25.000.000.000,-**Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 2.601.022.173.918,-**yang terdiri dari RM **Rp. 2.589.613.928.114,-** dan PNBP **Rp. 11.408.245.804,-**.Selanjutnya untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel II.1 :

Tabel II.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2012

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
DIPA Reguler		
1 Rincian Sumber Dana		
a RM	Rp. 2.834.805.219.000,-	Rp. 2.589.613.928.114,-
b PNBP	Rp. 5.590.000.000,-	Rp. 11.408.245.804,-
c PHLN	Rp. 25.000.000.000,-	NIHIL
2 Rincian Belanja		
A Belanja Pegawai	Rp. 40.813.468.000,-	Rp. 35.148.936.588,-
B Belanja Barang	Rp. 1.813.485.255.000,-	Rp. 1.646.274.995.151,-
C Belanja Modal	Rp. 980.506.496.000,-	Rp. 908.189.996.375,-
D PHLN	Rp. 25.000.000.000,-	NIHIL
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)		
DIPA PNBP TA. 2011		
1 UPT BPLJSKB	Rp. 4.500.000.000,-	Rp. 6.196.264.700,-
2 UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangu	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 907.039.245,-
3 UPT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo	Rp. 70.000.000,-	Rp. 52.207.201,-
4 UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	Rp. 20.000.000,-	Rp. 23.820.870,-

Sumber : Bagian Keuangan Ditjen Hubdat, 2012

b. Kegiatan yang tidak Terserap T.A 2012

Total Sisa Anggaran yang tidak terserap pada T.A 2012 yaitu Rp. 289.039.146.000,- yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1) Dana Blokir / Bertanda Bintang Reguler sebesar Rp. 34.669.585.000

yang terdiri dari :

- a) Output cadangan (operasional Satker Rp. 1.169.585.000,-
UPT Baru) pada Satker Setditjen
Perhubungan Darat
- b) Peningkatan/rehabilitasi Terminal Rp. 7.000.000.000,-
Kebumen pada Satker Pengembangan LLAJ
Jawa Tengah
- c) Pembangunan Terminal Kab. Simalungun Rp. 2.500.000.000,-
pada Satker Pengembangan LLAJ Sumatera
Utara
- d) Pembangunan Terminal Berkah Rp. 5.000.000.000,-
(Kadubanen) pada Satker Pengembangan

LLAJ Banten

- e) Pembangunan Jembatan Timbang Gerem Rp. 5.000.000.000,-
Merakpada Satker Pengembangan LLAJ
Banten
- f) Loan ADB (*Road Safety Awareness* Rp. 10.000.000.000,-
Campaign And Training) pada Satker
Direktorat JenderalPerhubungan Darat
- g) Loan ADB (*Integrated Vehicle* Rp. 4.000.000.000,-
Overloading Control Strategy) pada Satker
DirektoratJenderal Perhubungan Darat
- 2) Kegiatan blokir/tanda bintang SAL sebesar Rp. 56.810.496.000,-
yang terdiri dari :
 - a) Operasional Pelaksanaan MTQ pada Rp. 1.200.000.000,-
SatkerDirektorat LLAJ
 - b) Operasional Pelaksanaan Sail Morotai Rp. 1.405.000.000,-
padaSatker Direktorat LLAJ
 - c) Subsidi Operasional Lintas Rp. 8.500.000.000,-
PenyeberanganPerintis pada Satker
Direktorat LLASDP
 - d) Output cadangan SAL pada Dit. LLAJ Rp. 6.000.000.000,-
 - e) Pembangunan Kapal Penyeberangan Rp. 34.000.000.000,-
padaSatker Direktorat LLASDP
 - f) Subsidi Operasional Lintas Rp. 705.496.000,-
PenyeberanganPerintis KMP Lohoraung
lintas Tagulandang -Biaro & Biaro -
Likupang pada SatkerPengembangan
LLASDP Sulawesi Utara
 - g) Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 Rp. 5.000.000.000,-
GTThp I (termasuk supervisi) pada
SatkerPengembangan LLASDP NTT
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 28.486.948.000,- yang
terdiri dari :
 - a) Rehab Dermaga Penyeberangan Rp. 6.000.000.000,-

- Saubabe Akibat gempa bumi pada Satker
Pengemb.LLASDP Papua
- b) Peningkatan Dermaga Cabang Sungai Wayseputih pada Satker Pengembangan LLASDP Lampung Rp. 1.820.860.000,-
- c) Subsidi Operasional Perintis Penyeberangan Badaleon lintas Namlea-Sanana pada Satker Pengembangan Sarana LLASDP Maluku Rp. 1.916.088.000,-
- d) Pengerukan Kolam Alur Pelabuhan Penyeb.Merak pada Satker Pengemb. Transportasi SDP Rp. 3.250.000.000,-
- e) IBRD 4834-IND untuk kegiatan Strategic Road Infrastructure Project (SRIP) pada Satker Direktorat KTD Rp. 11.000.000.000,-
- f) Pengadaan Peralatan Penyidikan Tindak Pelanggaran Bidang LLAJ pada Satker Direktorat LLAJ Rp. 500.000.000,-
- g) Studi Lingkungan (UKL/UPL) pada Penyeberangan Tagulandang, Musi, Marampit pada Satker Pengemb.LLASDP Sulawesi Utara Rp. 1.500.000.000,-
- h) Pembangunan Jembatan Timbang Terantan Manuk Tahap IV pada Satker Pengemb. LLAJ Riau Rp. 2.500.000.000,-
- 4) Sisa Dana Kegiatan sebesar Rp. 80.205.368.000 yang terdiri dari :
- a) Dana Transito pada Satker Setditjen Perhubungan Darat Rp. 1.375.000.000,-
- b) Sisa Dana Belanja Pegawai Rp. 4.274.000.000,-
- c) Sisa Dana Belanja Barang Rp. 47.688.731.000,-
- d) Sisa Dana Belanja Modal Rp. 26.866.694.000,-
- 5) Sisa Kontrak sebesar Rp. 88.866.749.000 yang terdiri dari :
- a) Sisa Dana Belanja Barang Rp. 54.625.617.000,-

b) Sisa Dana Belanja Modal

Rp. 34.241.132.000,-

2. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

Dalam rangka penatausahaan barang inventaris milik negara, telah dilaksanakan kegiatan Pencatatan Atas Laporan Barang Milik Negara yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Ringkasan Laporan Barang

1) Tanah

Saldo Tanah pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 488.149.713.669,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 495.331.713.669,- mutasi tambah Rp. 1.080.000.000,- dan mutasi kurang Rp. 8.262.000.000,-

2) Peralatan dan Mesin

Saldo BMN berupa Peralatan dan Mesin Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.228.545.938.909,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 1.161.761.215.173,- mutasi tambah Rp. 1.384.967.409.319,- dan mutasi kurang Rp. 1.318.182.685.853,-

3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 357.541.529.471,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 385.468.324.083,- mutasi tambah Rp. 207.550.263.202,- dan mutasi kurang Rp. 235.477.057.814,-

4) Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 729.112.283.429,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 642.823.574.807,- mutasi tambah Rp. 985.742.631.327,- dan mutasi kurang Rp. 899.453.922.705,-

5) Irigasi

Saldo Irigasi pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 193.957.701.019,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 198.044.726.019,- mutasi tambah Rp. 446.048.238.790,- dan mutasi kurang Rp. 454.307.413.500,-

6) Jaringan

Saldo Jaringan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.878.053.713,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 2.053.702.713,- mutasi tambah Rp. 1.406.351.000,- dan mutasi kurang Rp. 1.582.000.000,-

7) Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 23.640.961.249,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 30.743.321.849,- mutasi kurang Rp. 7.102.360.600,-.

8) Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo aset dalam renovasi pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 144.994.305.572,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 71.578.110.072,- mutasi tambah Rp. 73.416.195.500,-.

9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Saldo aset tak berwujud yang tidak digunakan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 372.284.176.047,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 339.061.283.645,- mutasi tambah Rp. 106.392.334.547,- dan mutasi kurang Rp. 73.169.442.145,-.

b. Informasi Tambahan

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Disamping aset tetap yang tertuang dalam Laporan BMN pada tanggal 31 Desember 2012 pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2012 juga menguasai sejumlah aset tetap berbentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 3.781.501.708.846,-.

2) Persediaan

Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp. 7.673.173.505,-

c. Informasi Lainnya

1) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan atau dalam proses serah terima hasil

pekerjaan, sehingga belum dikatakan sebagai aset definitif yang tercatat dalam SABMN.

Pengakuan aset konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset definitif apabila telah terjadi proses serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor kepada KPA setempat.

Pada pekerjaan T.A 2011 serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan pada tahun 2011, sehingga pada laporan BMN T.A 2011 hasil pekerjaan tersebut belum termasuk dalam aset definitif. Baru pada tahun 2011. (setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan), hasil pekerjaan tersebut akan tercatat sebagai aset definitif pada mutasi tambah berupa penyelesaian pembangunan.

2) Persediaan

Persediaan yang dimaksud disini adalah berupa perlengkapan habis pakai yang digunakan dalam rangka menunjang pekerjaan administratif Ditjen Perhubungan Darat. Kebanyakan persediaan akan habis (saldo 0) pada akhir periode pelaporan. Persediaan yang tercatat pada laporan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp. 7.673.173.505,-

d. Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2012 untuk pekerjaan T.A 2011, adalah sebagai berikut :

- 1) Program LLAJ terdapat 25 Satker yang telah melakukan serah terima sebagai berikut :
 - a) Satker Pengembangan LLAJ Nanggroe Aceh Darussalam
 - b) Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Utara
 - c) Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Barat
 - d) Satker Pengembangan LLAJ Riau
 - e) Satker Pengembangan LLAJ Jambi
 - f) Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Selatan
 - g) Satker Pengembangan LLAJ Bengkulu
 - h) Satker Pengembangan LLAJ Lampung
 - i) Satker Pengembangan LLAJ Banten
 - j) Satker Pengawasan Operasional dan Keperintisan Angkutan LLAJ
 - k) Satker Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

- l) Satker Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat
 - m) Satker Pengembangan Sarana Angkutan Perkotaan
 - n) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Perkotaan
 - o) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Barat
 - p) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah
 - q) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Timur
 - r) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat
 - s) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Selatan
 - t) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah
 - u) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tenggara
 - v) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat
 - w) Satker Pengembangan LLAJ Maluku Utara
 - x) Satker Pengembangan LLAJ Papua
 - y) Kantor Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
- 2) Program LLASDP terdapat 21 Satker yang telah melakukan serah terima sebagai berikut :
- a) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Utara
 - b) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Barat
 - c) Satker Pengembangan LLASDP Riau
 - d) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Selatan
 - e) Satker Pengembangan LLASDP Bengkulu
 - f) Satker Pengembangan LLASDP Lampung
 - g) Satker Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Transportasi SDP
 - h) Satker Perencanaan Teknik dan Pengawasan Transportasi SDP
 - i) Satker Pengembangan Sarana Transportasi SDP
 - j) Satker Pengembangan Transportasi SDP
 - k) Satker Penunjang Keperintisan
 - l) Satker Pengembangan Keperintisan
 - m) Satker Pengembangan LLASDP Daerah Istimewa Yogyakarta
 - n) Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Barat
 - o) Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur
 - p) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Tengah

- q) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur
- r) Satker Pengembangan Sarana LLASDP Maluku
- s) Satker Pengembangan LLASDP Maluku Utara
- t) Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau
- u) Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

3. Verifikasidan Akuntansi

- a. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan anggaran, Usulan calon pengelola anggaran dan proses tindak lanjut LHA yang dilakukan oleh instansi/ Badan Pemeriksa/ Pengawas Keuangan Negara, secara rinci meliputi kegiatan:
 - 1) Menyiapkan Rencana Jaringan Kerja (*Network Planning*), Bagan Balok (*Barchart*) dan Kurva S, Sub. Sektor Transportasi Darat;
 - 2) Meneliti dan mengevaluasi Usulan Calon Pengelola Anggaran di lingkungan Sub. Sektor Transportasi Darat meliputi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran;
 - 3) Meneliti dan memverifikasi serta mengevaluasi data dukung tindak lanjut Laporan Hasil Audit Badan/Instansi Pemeriksa dan menyiapkan surat kepada KPA Satker baik Surat Teguran maupun pengembalian Indikasi Kerugian Negara (TGR);
 - 4) Meneliti/memverifikasi dan mengevaluasi Surat Sanggahan Banding maupun Surat Pengaduan dari Peserta Lelang/LSM.
- b. Pembahasan Usulan Calon Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2012
 - 1) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (SATKER) meliputi:
 - 2) Program LLAJ : 34 Satuan Kerja
 - 3) Program LLASDP : 35 Satuan Kerja
 - 4) Balai / UPT / Kantor Pusat : 13 satuan Kerja
 - 5) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima/pengeluaran UPT meliputi:
 - a) Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
 - b) UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

- i. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
 - ii. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;
 - iii. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo;
 - iv. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan
 - 1) ITJEN

Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2012 sebanyak 188 temuan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 527.913.943,-

Dari 188 temuan tersebut, telah tuntas sebanyak 88 temuan dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 505.799.908,- sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 40 temuan dari 12 satker diantaranya adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------|
| a) Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Utara | 5 temuan |
| b) Satker Pengembangan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan | 5 temuan |
| c) Satker Pengawasan Operasional dan Keperintisan LLAJ | 4 temuan |
| d) Satker Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat | 1 temuan |
| e) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur | 3 temuan |
| f) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tenggara | 1 temuan |
| g) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara | 1 temuan |
| h) Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi-NTT | 3 temuan |
| i) Satker Pengembangan LLAJ Kepulauan Riau | 5 temuan |

Laporan Hasil Audit (LHA) yang belum ditindaklanjuti sebanyak 59 temuan, hal ini disebabkan belum adanya tanggapan dari satker yang bersangkutan.

- 2) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI

Terdapat sisa LHA BPK-RI pada Satker Standarisasi Perencanaan Jaringan dan Transportasi Jalan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 133.240.085,11

3) **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sampai dengan tahun 2012 terdapat 2 (dua) Temuan Hasil Pengawasan BPKP pada Satker Standarisasi Perencanaan Jaringan dan Keselamatan Transportasi Jalan dengan nilai Rp. 133.240.085,11.

C. BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA

1. Bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pada Tahun 2012 untuk Peraturan Perundang-Undangan di Sub Sektor Perhubungan Darat yang telah ditetapkan, meliputi :

a. Peraturan Pemerintah :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

b. Peraturan Menteri Perhubungan:

1) **Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan :**

- a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat;
- b) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor: IM 3 Tahun 2012 tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi untuk Pelaksanaan Teknis dengan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;

- d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
 - e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika di sektor transportasi;
 - f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM37 tahun 2012 tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 39 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) Pada Kendaraan Bermotor;
 - h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2) **Bidang LLASDP :**
- a) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
 - b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
 - c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 - d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayanan Sungai dan Danau.
- c. **Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :**
- 1) **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
- a) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 55/AJ.206/DRJD/2012 tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Taksi dan Ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tahun 2010-2012;

- b) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 959/AJ.401/DRJD/2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah, Larangan, Petunjuk dan Peringatan pada Jalan Tol Semarang – Solo Seksi I (Semarang - Ungaran);
- c) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 1241/AJ.401/DRJD/2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah, Larangan, Petunjuk dan Peringatan pada Jalan Tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C;
- d) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.706/KP.105/DRJD/2012 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
- e) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.77/AJ.401/DRJD/2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah, Larangan, Petunjuk dan Peringatan pada Jalan Tol Purbaleunyi;
- f) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.4070/AJ.401/DRJD/2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah, Larangan, Petunjuk dan Peringatan pada Jalan Tol Surabaya – Mojokerto seksi 1A-1;
- g) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.4330/KP.804/DRJD/2012 tentang Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Ditjen hubdat.

2) **Bidang LLASDP**

- a) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 4608 / AP.005 / DRJD / 2012

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan (berkelanjutan) :

a. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
 - (a) RPP tentang Angkutan Jalan;
 - (b) RPP tentang Dampak Lingkungan LLAJ
 - (c) RPP tentang Keamanan dan Keselamatan LLAJ;

- (d) RPP tentang Jaringan;
 - (e) RPP tentang Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ;
 - (f) RPP tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ.
- 2) Rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :
- (a) RPM tentang Analisis Dampak Lingkungan;
 - (b) RPM tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan;
 - (c) RPM tentang Angkutan Taxi
 - (d) RPM tentang Terminal
 - (e) RPM tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Perkotaan
 - (f) RPM tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - (g) Rpm tentang persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikasi analisis dampak lalu lintas.
 - (h) RPM tentang tata cara pelaksanaan pembatasan ruang parkir.
 - (i) RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum;
 - (j) RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - (k) RPM tentang Tarif Penumpang;
- 3) Rancangan Peraturan Dirjen sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri yang berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :
- (a) RPD tentang Standar Operasional dan Prosedur Unit Pelaksanaan Peninbangan KB;
 - (b) RPD tentang Angkutan Barang Berbahaya
 - (c) RPD tentang Kendaraan Listrik di Jalan;
 - (d) RPD tentang Wahana Tata Nugraha
- b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan** sebagai pelaksana UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sedangkan untuk penyusunan Peraturan pemerintah sudah ditetapkan dan sebagai

tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah maka perlu disusun Peraturan Menteri dan peraturan Dirjen antara lain :

- 1) Rancangan Peraturan Menteri :
 - (a) RPM Tentang Pelabuhan yang di gunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
 - (b) RPM tentang standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan.
 - (c) RPM tentang subsidi angkutan di perairan.
- 2) Rancangan Peraturan Dirjen :
 - (a) RPD tentang Alur Pelayaran dan Lalu Lintas Sungai dan Danau;
 - (b) RPD tentang Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan;

Dengan telah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Sedangkan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang LLAJ direncanakan akan disusun 12 Rancangan Peraturan Pemerintah menjadi 8 Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas untuk posisi masing-masing RPP antara lain :

Tabel II.2. Posisi Rancangan Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan
UU NO.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

No.	Judul RPP	Posisi Saat Ini	Keterangan
1.	RPP Kendaraan	Telah disahkan PP 55/2012 tentang Kendaraan	15 Mei 2012
2.	RPP Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan Bermotor di jalan	Telah disahkan PP 80/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	12 Oktober 2012
3.	RPP Jaringan LLAJ	Kelompok Kerja (5 Instansi Pembina LLAJ) Perhubungan, PU, Polri, Ristek, dan	Masih dalam pembahasan secara rutin yang dilakukan di Kementerian

No.	Judul RPP	Posisi Saat Ini	Keterangan
		Perindustrian.	Perhubungan. Dana preservasi jalan ditampung dalam RPP Jaringan LLAJ, menunggu masukan final dari Kementerian PU.
4.	RPP Dampak Lingkungan LLAJ	Kelompok Kerja (5 Instansi Pembina LLAJ) Perhubungan, PU, Polri, Ristek, dan Perindustrian.	Masih dalam pembahasan secara rutin yang dilakukan di Kementerian Perhubungan.
5.	RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ	idem	idem
6.	RPP Angkutan	idem	idem
7.	RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ	idem	idem
8.	RPP Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ	Kementerian Perindustrian dan Kementerian riset dan teknologi.	Menunggu Draft dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian riset dan teknologi sebagai penanggung jawab materi RPP

Sumber : Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen Hubdat, 2012



Gambar II.1. Pembahasan RPP LLAJ antar Kementerian dan 5 Instansi Pembina LLAJ

Untuk penelaahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Transportasi Darat, Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan Asistensi PERDA dan Raperda yang berkaitan dengan Ditjen Perhubungan Darat dari seluruh Indonesia dimana kegiatannya berkelanjutan.

2. Pelaksanaan dokumentasi dan bantuan hukum.

Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum serta pertimbangan hukum, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut :

- a. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain :
 - 1) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dibidang LLAJ dan LLASDP dilaksanakan di 2 (dua) kota yaitu Kota Yogyakarta dan Batam, yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait lainnya. Adapun penyuluhan peraturan perundang-undangan yang dilakukan antara lain :
 - a) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b) Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan;
 - c) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - d) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Maritim;
 - g) Peraturan Menteri Nomor PM. 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.



Gambar II.2. Sosialisasi Peraturan Bidang LLAJ dan LLASDP

- 2) Pemberian bantuan hukum dalam perkara :

- a) Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang LLAJ terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
- b) Gugatan Perkara Perdata No.131/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM antara Agus Lasmono Dkk (eks pegawai Perum Damri) melawan Perum Damri, Pemerintah Republik Indonesia C.q Presiden RI, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan;
- c) Tindak Pidana Pencurian dan/atau Perusakan Atas Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1987 yang Berlokasi di Desa Gandasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, di Balai PLJSKB – Bekasi, milik Kementerian Perhubungan;
- d) Kasus Tanah Pelabuhan Penyeberangan Rakyat Klademark – Sorong – Papua Barat
- e) Kasus antara PT. ASDP (persero) sekarang Ferry Indonesia dengan PT. Infiniti Indosakti terkait dengan dermaga IV Merak;
- f) Perkara Perdata No. 26/Pdt.6/2001/PN.AB (kasus pelabuhan penyeberangan Hunimua Ambon);

3) Pemberian pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum diberikan dalam rangka permasalahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas surat-surat sanggahan, pengaduan masyarakat, ataupun permasalahan teknis lainnya yang memerlukan tanggapan dan jawaban yang memerlukan dukungan pertimbangan dan kajian dari sisi legal atau peraturan perundangan yang berlaku.

b. Kegiatan yang sedang dilaksanakan (berkelanjutan)

Pemberiaan bantuan hukum :

- 1) Kasus antara PT. ASDP (persero) sekarang Ferry Indonesia dengan PT. Infiniti Indosakti terkait dengan dermaga IV Merak, Pemerintah menunggu proses penyelesaiannya antara PT. ASDP dengan PT. Infiniti;

- 2) Perkara Perdata No. 11/Pdt.6/2007/PN Jaksel (Perkara perdata dalam kasus Steve Sugita), kelanjutan proses Kasasi di Mahkamah Agung masih berjalan dan menunggu putusan Kasasi.
- 3) Gugatan Perkara Perdata No.131/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM antara Agus Lasmono Dkk (eks pegawai Perum Damri) melawan Perum Damri, Pemerintah Republik Indonesia C.q Presiden RI, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan
- 4) Tindak Pidana Pencurian dan/atau Perusakan Atas Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1987 yang Berlokasi di Desa Gandasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, di Balai PLJSKB – Bekasi, milik Kementerian Perhubungan.

Hambatan yang dialami oleh bagian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum maupun penyusunan peraturan masih perlu dukungan peningkatan kualitas SDM yang dapat melakukan penanganan kasus-kasus yang ada dilingkungan Ditjen Hubdat, serta dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan penelaahan peraturan perundangan di mana memerlukan kecermatan, ketelitian serta kemampuan dalam penguasaan penerapan peraturan perundangan dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Upaya yang dilakukan oleh bagian hukum yaitu perlunya peningkatan potensi SDM melalui Diklat/kursus di bidang bantuan hukum, bidang penyusunan maupun kursus-kursus lain yang berkaitan dengan bidang Hukum secara berkelanjutan.

c. Data kesepakatan bersama di bidang transportasi darat :

Data Perjanjian, MoU, antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011:

Tabel II. 3. Kesepakatan bidang Transportasi Darat

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
1	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Bogor	Ditjen Hubdat dan Pemkot Bogor	Bogor, 3 Oktober 2005	5 Tahun
2	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal	Dephub dan Pemkab Malang, Pemkot Malang	Jakarta, 24 Maret 2006	5 Tahun

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
	Berbasis Jalan di Malang Raya	dan Pemkot Batu		
3	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Bandung	Ditjen Hubdat dan Pemkot Bandung	Bandung, 7 Juli 2005	5 Tahun
4	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Yogyakarta	Ditjen Hubdat dan Pemkot Yogyakarta	Yogyakarta, 13 Desember 2005	36 Bulan
5	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Pekanbaru	Dephub dan Pemkot Pekanbaru	Pekanbaru, 9 Maret 2007	5 Tahun
6	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pendanaan Transportasi Perkotaan di Kota Batam, Propinsi Riau Kepulauan sebagai Kota Percontohan	Ditjen Hubdat dan Pemkot Batam	Jakarta, 27 Agustus 2004	5 Tahun
7	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Surakarta	Dephub dan Pemkot Surakarta	Surakarta, 11 Desember 2006	48 Bulan
8	Pengembangan Transportasi Perkotaan di Propinsi DI Yogyakarta	Dephub, Pemprop DIY dan Universitas Gajah Mada	Yogyakarta, 21 Agustus 2007	5 Tahun
9	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Makasar	Dephub dan Pemkot Makasar	Makasar, 14 Agustus 2007	5 Tahun
10	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Pontianak	Dephub dan Pemkot Pontianak	Jakarta, 12 Februari 2008	5 Tahun
11	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Surabaya	Dephub dan Pemkot Surabaya	Surabaya, 7 Juli 2006	5 Tahun
12	Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus	Ditjen Hubdat dan Kepolisian Negara RI	Jakarta, 26 Juli 2007	-

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
13	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Semarang	Dephub dan Pemkot Semarang	Jakarta, 31 Juli 2008	5 tahun
14	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Gorontalo	Dephub dan Pemkot Gorontalo	Jakarta, 23 Juni 2009	5 tahun
15	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Padang	Dephub dan Pemkot Padang	Jakarta, 23 Juni 2009	5 tahun
16	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Manado	Dephub dan Pemkot Manado	Jakarta, 1 Juli 2009	5 tahun
17	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Palembang	Dephub dan Pemkot Palembang	Jakarta, 4 Desember 2009	5 tahun
18	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di Kawasan Transmigrasi	Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jakarta, 22 September 2010	
19	Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Bdgung, Gianyar dan Tabanan (Serbagita) Propinsi Bali	Kementerian Perhubungan dengan Gubernur Bali	Denpasar 6 Desember 2010	5 Tahun
20	Penyusunan Kebijakan dan Standar Interkoneksi dan Interoperabilitas Uang Elektronik di Sektor Transportasi	BI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jakarta 14 Nopember 2011	3 Tahun
21	Pelaksanaan Pengoperasian Angkutan Pemandu Moda Perumahan Batununggal Indah (Bandung) – Bandara	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan PT.	Jakarta 15 Juni 2011	

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
	Soekarno Hatta (Tangerang)	Primajasa Perdanaraya Utama		
22	Pertukaran Data Secara Online dalam sistem analisis penumpang pada sarana Transportasi	Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Perhubungan	Jakarta 20 Desember 2011	5 Tahun
23	Pengembangan Kawasan Transportasi Terpadu Merak Kota Cilegon Propinsi Banten	Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemerintah Kota Cilegon dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Jakarta, 9 Februari 2012	2 Tahun
24	Wajib Prioritas Angkutan Layanan Pos Universal.	Kesepakatan Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perhubungan	Jakarta 25 Januari 2012	5 Tahun
25	Kerjasama dalam kegiatan Konsverensi anak Indonesia tahun 2012	Ditjen Hubdat dengan PT. Penerbitan Sarana Bobo	Agustus 2012	1 Tahun

Sumber : Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen Hubdat, 2012

3. Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri

Kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri merupakan bidang tugas Sub Bagian Humas dan Kerjasama Luar Negeri. Beberapa kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri yang telah dilaksanakan tahun 2012 yang berhubungan dengan kegiatan Peliputan dan Dokumentasi antara lain kegiatan Dokumentasi, jumpapers/siaranpers, pameran/visualisasi, langganankoran untuk keperluan kliping dan penerbitannews letterinfoHUBDAT.

Beberapa kegiatan kehumasan yang telah dilakukan selama tahun 2012 yaitu antara lain:



Gambar II.3. Pembekalan Teknis Satker di Lingkungan Ditjen Hubdat pada tanggal 24 Januari 2012



Gambar II.4. Press Background Keselamatan Jalan



Gambar II.5. Penghargaan ISO 9001 2008



Gambar II.6. Rakernis PPNS Bidang LLAJ 2012



Gambar II.7.Pembinaan Pengemudi Bus AKAP di Bogor



Gambar II.8.Seminar Intelligent Transport System di Jakarta



Gambar II.9.Jumpa Pers Persiapan Angkutan Lebaran 2012



Gambar II.10.Konferensi Pers Kecelakaan KMP Bahuga Jaya



Gambar II.11. Peresmian Pelabuhan Penyeberangan Marisa Gorontalo



Gambar II.12. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2012

Tabel II.4. Kunjungan Luar Negeri Ditjen Perhubungan Darat

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
1	<i>The AISI-JAMA Motorcycle Meeting and WMTC Test Demonstration at Honda Motor Company</i>	Tokyo dan Kumamoto Jepang 18-20 Januari 2012	Dit. LLAJ
2	<i>The 35th APEC Transportation Working Group Meeting</i>	Bangkok, Thailand 20-24 Februari 2012	1. Dit. LLAJ 2. Dit. BSTP 3. Dit. KTD 4. Setditjen
3	<i>Workshop on Transport Sector and NAMAs :Assessing Data Readiness for MRV</i>	Manila, Filipina 9 Februari 2012	Dit. BSTP
4	<i>GRSP (Global Road Safety Partnership)Asia Road Safety Seminar</i>	Bangkok, Thailand 7-9 Maret 2012	Dit. KTD
5	<i>Training Invitation Jabodetabek Public TransportationPolicy ImplementationStrategy (JAPTraPIS)</i>	Tokyo, Jepang 5-12 Februari 2012	1. Dit. BSTP 2. Setditjen
6	<i>The 3rd Experts Group Meeting on ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement Experts Group Meeting on Logistics</i>	Bangkok, Thailand 22-24 Februari 2012	1. Setditjen 2. Dit. LLAJ
7	<i>Seminar ASEAN Initiative on Inland Water Management</i>	Phnomh Penh, Cambodia 26 Februari - 1 Maret 2012	1. Dit. LLASDP 2. Setditjen
8	<i>Pre Project Review Group (PRG) Indonesian Transport Safety Assistance Package (ITSAP) Meetingdan The 10th PRG ITSAP Meeting</i>	Jakarta, Indonesia 29 Februari - 1 Maret 2012	Setditjen
9	<i>UN ESCAP Ministerial Conference on Transportation Meeting (MCT)</i>	Bangkok, Thailand 12-16 Maret 2012	1. Dit. LLAJ 2. Setditjen 3. Dit. KTD
10	<i>The 23rd ASEAN Maritime TransportationWorking Group (AMTWG)</i>	Yangon, Myanmar 19-21 Maret 2012	1. Dit. LLASDP 2. Setditjen
11	<i>The 5th IMT-GT Working Group on Infrastructure and Transportation</i>	Batam, Indonesia 11-12 April 2012	Setditjen
12	<i>The 12th Intelligent Transport System (ITS) Asia-Pacific Forum and Exhibition</i>	Kuala Lumpur, Malaysia 16-18 April 2012	Dit. BSTP
13	<i>The Natural Gas Vehicle (NGV) Cooperation Meeting</i>	Seoul, Korea 16-21 April 2012	Dit. BSTP
14	<i>The 15th Meeting of the ACCSQ APWGand Its Related Meetings</i>	Siem Reap, Kamboja 24-26 April 2012	1. Dit. LLAJ 2. BPLJSKB

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
15	<i>The 23rd ASEAN Transport Facilitation Working Group (ASEAN TFWG)</i>	Kuala Lumpur, Malaysia 2-4 Mei 2012	1. Setditjen 2. Dit. LLAJ
16	<i>The 7th Jeju Forum for Peace and Prosperity</i>	Jeju, Korea 31 Mei s/d 2 Juni 2012	Dit. BSTP
17	<i>The 9th BIMP EAGA TIICTD Cluster Meeting</i>	Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam 12-14 Juni 2012	1. Dit. LLAJ 2. Setditjen
18	KTT Rio+20 (UNSCD 2012)	Rio De Janeiro, Brasil 20-22 Juni 2012	1. Dit. LLAJ
19	<i>10th ASEAN-Japan STOM Leader Conference</i>	Okinawa, Jepang 25-27 Juni 2012	Dit. LLASDP
20	<i>The 3rd ASEAN MRSSWG dan the 21st ASEAN LTWG</i>	Vientiane, Lao PDR 3-5 Juli 2012	1. Dit. LLAJ 2. Setditjen 3. Dit. KTD
21	<i>The 36th APEC Transportation Working Group (TPTWG) Meeting</i>	St. Petersburg, Russia 29 Juli - 2 Agustus 2012	1. Dit. KTD 2. Dit. LLAJ 3. Dit. BSTP
22	<i>The Second Working Group Meeting on the Implementation of the Strategic Plan for China-ASEAN Transport Cooperation</i>	Guilin, China 3-7 September 2012	1. Dit. LLAJ 2. Setditjen
23	<i>Pertemuan the 16th Meeting of the ACCSQ Automotive Product Working Group (APWG) and Task Force for MRAs on Automotive Meeting</i>	Bandung, Indonesia 19-21 September 2012	Setditjen
24	<i>the 7th BIMP-EAGA Transport Ministers Meeting</i>	Sarawak, Malaysia 26 September 2012	Dit. LLAJ
25	<i>the 3rd Session of the Committee on Transport Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP)</i>	Bangkok, Thailand 10-12 Oktober 2012	1. Dit. LLAJ 2. Setditjen
26	<i>Pertemuan tingkat Menteri Pada Kongres ITS Sedunia</i>	Vienna, Austria 22 s/d 26 Oktober 2012	1. Dit. LLAJ 2. Dit. BSTP
27	<i>High Level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons</i>	Incheon, Korea 29 Oktober-2 November 2012	1. Dit. LLAJ 2. Dit. BSTP 3. Setditjen
28	<i>Pertemuan ke-11 ITSAP PRG dan Pre-PRG Meeting</i>	Bali, Indonesia 30 Oktober-2 November 2012	1. Dit. KTD 2. Setditjen

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
29	Studi Lapangan <i>Sustainable Urban Transport ke Jerman</i>	Jerman 24 November s/d 3 Desember 2012	1. Ditjen Hubdat 2. Dit. LLAJ 3. Dit. BSTP 4. Dit.KTD 5. Dit. LLASDP
30	<i>34th ASEAN STOM dan 18th ATM</i>	Bali, Indonesia 25 November- 1 Desember 2012	1. Setditjen 2.Dit. LLAJ
31	<i>BAQ Conference “Growing Cities</i>	Hongkong, China 2 s/d 7 Desember 2012	1.Dit. Setditjen 2. Dit. BSTP 3. Dit. LLAJ
32	<i>The 3rd Public and Private Joint Forum in Asian Region (the 17th JASIC Asia Government and Industry Meeting)</i>	Manila, Filipina 4-6 Desember 2012	1. Dit. LLAJ 2. Setditjen

Sumber : Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen Hubdat, 2012

Kegiatan KSLN tahun 2012 yang tidak dapat dihadiri oleh wakil Ditjen Hubdat :

- a. The 3rd Experts Group Meeting on ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement Experts Group Meeting on Logistics Bangkok, Thailand 22-24 Februari 2012;
- b. Seminar ASEAN Initiative on Inland Water Management Phnomh Penh, Cambodia 26 Februari - 1 Maret 2012;
- c. UN ESCAP Ministerial Conference on Transportation Meeting (MCT) Bangkok, Thailand 12-16 Maret 2012
- d. The Second Working Group Meeting on the Implementation of the Strategic Plan for China-ASEAN Transport Cooperation Guilin, China 3-7 September 2012

Proyek kegiatan yang dihasilkan berdasarkan program kerjasama luar negeri :

- a. Dari kerjasama RI – Australia dibawah program ITSAP dihasilkan Road Safety Management Workshop yang terdiri dari 2 paket kegiatan yaitu :
 - 1) Paket 1, undangan 2 (dua) orang Indonesia untuk menghadiri Seminar di Sidney.
 - 2) Paket 2, Workshop 1 bulan Juli 2012 dan Workshop 2 bulan Nopember 2012 di Makasar, Road Safety Management, yang diikuti oleh Dishub Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara,

Gorontalo, Maluku utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, NTB dan NTT, POLRI serta Dinas Kesehatan.

Data Perjanjian, MoU, Arrangement, Delaration yang terkait dengan sub sector transportasi darat secara bilateral, regional maupun multilateral sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2012:

Tabel II.5. Agreement/MoU Ditjen Perhubungan Darat

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Ket.
1	Agreement on the Recognition of Domestic Driving Licenses Issued by ASEAN Countries	Negara Anggota ASEAN	Kuala Lumpur, Malaysia 9 Juli 1985	-	Ratifikasi
2	Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Service Vehicle Issued by ASEAN Member Countries	Negara Anggota ASEAN	Singapura, 10 September 1998	-	Ratifikasi
3	ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 16 Desember 1998	-	Ratifikasi
4	Protocol 3 AFAFGIT, Types and Quantity of Road Vehicle	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 15 September 1999	-	Ratifikasi
5	Protocol 4 AFAFGIT, Types and Quantity of Road Vehicle	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 15 September 1999	-	Ratifikasi
6	Protocol 5 AFAFGIT, ASEAN Scheme On Compulsory Motor Vehicle Insurance	Negara Anggota ASEAN	Kuala Lumpur Malaysia 8 April 2001	-	Ratifikasi
7	Protocol 9 AFAFGIT, Dangerous Goods	Negara Anggota ASEAN	Jakarta, Indonesia 20 September 2002	-	Ratifikasi
8	ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport	Negara Anggota ASEAN	Vientien, Lao PDR, 7 November 2005	-	Proses Ratifikasi
9	ASEAN Tourism Agreement	Negara Anggota ASEAN	Phnompenh, Cambodia 4 November 2002	-	Ratifikasi
10	MoU Between The Government of The Member of Association	Negara Anggota ASEAN	Vientien, Lao PDR, 27 November 2004	-	-

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Ket.
	of South –East Asian Nations and The Government of China on Transport Cooperation	dan China			
11	ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response	Negara Anggota ASEAN	Vientien, Lao PDR 26 Juli 2005	-	Ratifikasi
112	Intergovernmental Agreement on Asian Highway Network (UN- ESCAP)	Negara Anggota ESCAP	Shanghai, China 4 Juli 2005	-	Proses Ratifikasi
13	Busan Declaration on Transport Development in Asia and the Pacific	Negara Anggota ESCAP	Busan,Korea, 11 November 2006	-	-
14	Protocol 1 AFAFGIT, Designation of Transit Transport Roads and Facilities	Negara Anggota ASEAN	Bangkok, Thailand 8 February 2007	-	Ratifikasi
15	Memorandum of Understanding Between the Governments of Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia and Philippines on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches	Negara Anggota BIMP- EAGA	Singapore, 2 November 2007	-	-
16	ASEAN Framework Agreement on Interstate Transit Transport	Negara Anggota ASEAN	2008	-	-
17	Memorandum of Understanding Between The Government of Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia and Philipines on Transit and Inter-stateTransport of Goods	Negara Anggota BIMP- EAGA	Manado, Indonesia, 25 Juni 2009	-	-
18	Arrangement Between The Minister of Finance of The Government of Indonesia and The Minister of Economy, Industry and Employment of The Government of France Relating To The Bandung Integrated Transport Nerwork	Indonesia- Perancis	Jakarta, 15 Juli 2009	31 Desember 2011	-

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Ket.
	Planning Study				
19	Implementation Arrangement (on Integrated Public Transportation Masterplan for Bandung Metropolitan Area)	Ditjen Perhubungan Darat dan SNCF Perancis	Jakarta, Nopember 2009	-	-
20	Moscow Delaration (on Global Road Safety)	UN	Moscow, Rep. Federasi Rusia 20 November 2009	-	-
21	Bangkok Declaration on Transport Development in Asia	Negara Anggota ESCAP	Bangkok, Thailand 18 Desember 2009	-	-
22	Memorandum Of Cooperation Between The Ministrry of Transportasi of The Ministry of Land, Infrastructure and Tourism of Japan in The Transport Sector	Indonesia - Jepang	Bali, 3 Desember 2010	-	-
23	Arrangement Between The Ministry Of Transportation of The Republic Of Indonesia and The Departement of Infratructure and Transport Of Australia on The Indonesia Transport Safety Assistance Package,	Indonesia – Australia	Bali, 11 Desember 2012	-	-
	ANNEX On Transport Security	Australia - Indonesia	Australia, 7 Februari 2013		

Sumber : Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen Hubdat, 2012

D. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dalam pelaksanaan program kerja di bidang Kepegawaian dan Umum telah dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui keikutsertaan pegawai pada diklat-diklat teknis.

Pengembangan SDM melalui diklat-diklat teknis guna meningkatkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan unit

kerjadimanapegawaiditempatkan tersebut diatas, tidakhanya yang diselenggarakanoleh unit kerjadilingkunganBadanPengembangan SDM Perhubungan, tetapijuga yang dilaksanakanolehinstitusilainnyabaiklembagapendidikandanpelatihan Pemerintahmaupunswasta yang terkaitdengansubstansiperhubungandarat.

1. Data PegawaiDitjenPerhubunganDarat

PegawaiDitjenPerhubunganDarat posisi tahun 2012 diklasifikasikan menurut unit kerja, golongan, pendidikanumum, jeniskelaminmasing-masingsebanyak 644pegawai, dimana yang sudah mengikuti diklatpenjenjanganstructuralsebanyak 144pegawai dan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 124 pegawai. Untukperinciannyadapatdilihat pada tabel dibawahini :

Tabel II.6. Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Setditjen	140	137	140	140	139	130
2.	Direktorat LLAJ	99	98	105	129	141	128
3.	Direktorat LLASDP	85	78	78	95	95	71
4.	Direktorat BSTP	62	63	66	83	89	78
5.	Direktorat KTD	56	57	59	57	64	62
6.	UPT. BPLJSKB Bekasi	49	43	44	56	63	55
7.	UPT. PelabuhanPenyeberangan	64	57	63	56	69	59
8.	DAMRI	18	15	14	11	9	7
9.	Dishub/TugasPerbantuan Daerah (D-III ALL/LLASDP)	62	29	6	1	0	0
10.	OPP Merak	-	-	-	-	-	11
11.	OPP Gilimanuk	-	-	-	-	-	6
12.	OPP Lembar	-	-	-	-	-	7
13.	OPP Pagimana	-	-	-	-	-	5
14.	BLLAJSDP Jambi	-	-	-	-	-	4
15.	BLLAJSDP Denpasar	-	-	-	-	-	11
16.	BLLAJSDP Palangkaraya	-	-	-	-	-	6
17.	BLLAJSDP Palu	-	-	-	-	-	4
Jumlah		635	577	575	628	669	644

Sumber :BagianKepegawaian,DitjenHubdat, 2012.

Tabel II.7. Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Golongan IV	48	53	49	50	50	55
2.	Golongan III	454	404	399	419	441	436
3.	Golongan II	132	119	126	158	177	152
4.	Golongan I	1	1	1	1	1	1
Jumlah		635	577	575	628	669	644

Sumber :BagianKepegawaian, DitjenHubdat, 2012.

Tabel II.8. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Doktoral/S3	1	1	1	1	1	1
2.	Pasca Sarjana/S2	74	83	85	95	112	135
3.	Spesialis	3	3	4	4	3	3
4.	Sarjana/S1	176	154	175	197	215	214
5.	Diploma IV	44	33	21	28	37	42
6.	Diploma III/Sarjana Muda	73	66	70	105	121	100
7.	Diploma I/II	11	8	8	17	21	20
8.	SMU	237	214	196	175	152	124
9.	SLTP	9	9	9	4	5	4
10.	SD	7	6	6	2	2	1
Jumlah		635	577	575	628	669	644

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat, 2012.

Tabel II.9. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Perempuan	131	125	122	156	177	167
2.	Pria	504	452	453	472	492	477
Jumlah		635	577	575	628	669	644

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat, 2012.

Tabel II.10. Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Diklat Penjenjangan Struktural	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Lemhanas	2	1	1	-	0	0
2.	Sepati/Dikpim I	1	2	2	1	1	2
3.	Sespa/Spamen/Dikpim II	15	17	19	16	14	14
4.	Sepadya/Spama/Dikpim III	49	48	52	49	44	45
5.	Sepala/Adum/Dikpim IV	47	62	65	60	63	76
Jumlah		144	130	139	126	122	137

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat, 2012.

Tabel II.11. Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Eselonering	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Eselon I	1	1	1	1	1	1
2.	Eselon II	5	5	5	5	5	5
3.	Eselon III	24	24	24	24	24	31
4.	Eselon IV	60	60	60	60	60	83
5.	Eselon V	4	4	4	4	4	4
Jumlah		94	94	94	94	94	124

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat, 2012.

Dari data diatas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir perubahan komposisi formasi pegawai relatif tidak banyak perubahan, terutama dari segi jumlah pegawai. Hal ini dikarenakan mulai

berimbang jumlah mutasi pegawai (pensiun, pindah unit kerja, termasuk tugas perbantuan daerah) dengan pengadaan pegawai baru di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2. Posisi Pelaksanaan Tugas

a. Bidang Kepegawaian dan Organisasi

1) Realisasi Kepangkatan PNS

Dalam periode April sampai dengan Oktober 2012 terdapat formasi kenaikan pangkat (KP) sebanyak 92 pegawai, dengan rincian:

- a). Kenaikan Pangkat Reguler : 58 pegawai
- b). Kenaikan Pangkat Pilihan : 10 pegawai
- c). Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah : 24 pegawai

2) Pensiun Pegawai

Dalam tahun anggaran 2012, jumlah pensiun pegawai sebanyak 28 orang, dengan rincian :

- a). Golongan IV : 2 pegawai
- b). Golongan III : 25 pegawai
- c). Golongan II : 1 pegawai

Sedangkan pegawai yang meninggal dunia ada 5 orang pegawai pada tahun anggaran 2012.

3) Pemberian Tanda Penghargaan

Dalam upaya pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun anggaran 2012, telah diberikan tanda penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Karya Satya kepada 20 pegawai dengan rincian :

- a). Satyalancana Wira Karya : - pegawai
- b). Satyalancana Karya Satya 30 tahun : 10 pegawai
- c). Satyalancana Karya Satya 20 tahun : 2 pegawai
- d). Satyalancana Karya Satya 10 tahun : 8 pegawai

Tanda penghargaan dimaksud merupakan wujud penghargaan Pemerintah atas pengabdian PNS dalam melaksanakan tugasnya.

4) Diklat Teknis Fungsional

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun 2012

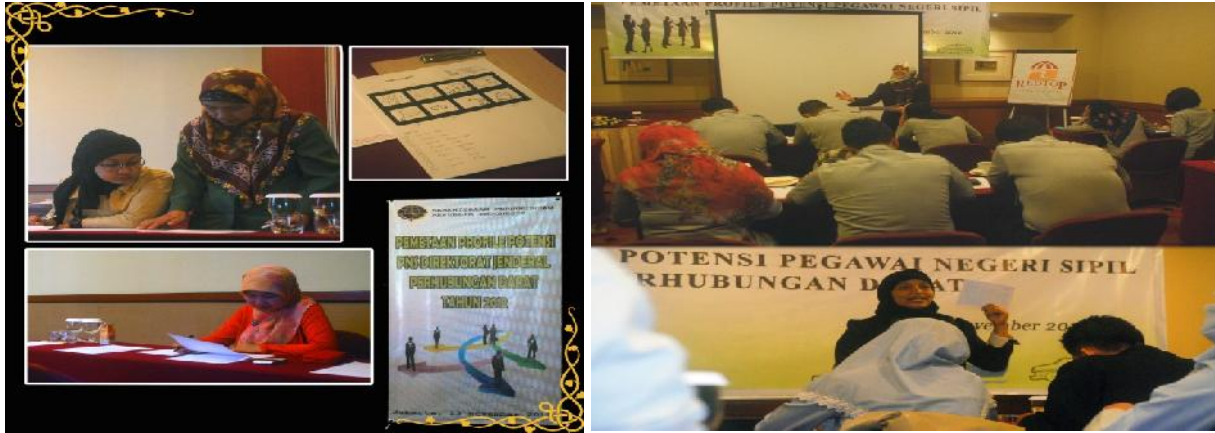
dilakukan penyiapan dan pendaftaran pegawai yang harus mengikuti diklat teknis fungsional dan realisasinya telah dikirim 216 pegawai untuk mengikuti diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh unit pelaksana diklat baik di lingkungan Badan Diklat Perhubungan maupun instansi/kementerian lainnya, dengan rincian :

- a). Diklat Kepemimpinan : 26 pegawai
- b). Diklat Luar Negeri : 18 pegawai
- c). Diklat Dalam Negeri : 172 pegawai

Selain hal tersebut diatas, sepanjang tahun 2012 juga terdapat kegiatan yang diselenggarakan sebagai upaya dalam pembinaan kepegawaian dan tata kelola organisasi yang baik, yang meliputi :

- 1) Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Terpadu.
- 2) Penyusunan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013
- 3) Penyertaan Diklat Struktural, Diklat Teknis Fungsional dan Short Courses baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun diluar Kementerian Perhubungan.
- 4) Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- 5) Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
- 6) Workshop manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
- 7) Pemetaan Profile Potensi Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat.
- 8) Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat.
- 9) Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian.
- 10) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Teknis di Bidang Perhubungan Darat.
- 11) Penataan Nomenklatur Jabatan Teknis dan Penyempurnaan Uraian Jabatan /Pekerjaan Direktorat Jenderal.
- 12) Penyusunan dan Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan KM 60 Tahun 2010.
- 13) Penyusunan sistem penilaian kinerja individu Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat.

- 14) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan usulan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat.
- 15) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor.



Gambar II.13. Kegiatan Pemetaan Profile Potensi Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat Hotel Red Top Jakarta, 13 November 2012



Gambar II.14. Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat Hotel Kinasih, Sukabumi 12 – 13 Oktober 2012



Gambar II.15. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, 5 September 2012

b. Bidang Ketatausahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2012 di bidang ketatausahaan meliputi :

- 1) Pencatatan surat masuk dan surat keluar baik secara manual maupun dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SITU);
- 2) Penyiapan dan penyusunan daftar gaji pegawai;
- 3) Penyusunan daftar uang makan dan uang lembur pegawai;
- 4) Penyusunan Rapel Kenaikan Gaji Pegawai;
- 5) Penyusunan Gaji ke 13 Pegawai;
- 6) Penyempurnaan dan updating data kepegawaian;
- 7) Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai;
- 8) Penataan dan pemeliharaan arsip;
- 9) Pengiriman berkas arsip ke depo arsip di Bandung;
- 10) Penyusutan Berkas Arsip
- 11) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (DPA);
- 12) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
- 13) Memproses Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS yang diwajibkan sesuai peraturan perpajakan;
- 14) Melakukan Proses Pendigitalisasian Arsip;
- 15) Penyiapan Sistem Absensi Elektronik;
- 16) Sosialisasi ketatausahaan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi Keadministrasian tata persuratan, Kearsipan serta Disiplin Pegawai;



Gambar II.16. Sosialisasi Ketatausahaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

c. Bidang Rumah Tangga

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2012 di bidang kerumah tanggaan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal, meliputi :

- 1) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, meliputi ; pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan membuat laporan barang milik negara tiap semester;
- 2) Pengadaan Keperluan Operasional Kantor seperti alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga;
- 3) Pengadaan pakaian dinas harian sesuai jumlah pegawai;
- 4) Pengadaan pakaian kerja satpam;
- 5) Pengadaan obat-obatan dan honorarium dokter dan perawat pada poliklinik;

- 6) Pengadaan barang inventaris kantor seperti ; notebook, meja rapat, LCD proyektor, AC split, alat penghancur kertas, komputer, mesin fax, telepon, mesin ketik elektronik, mesin ketik manual, printer, eksternal hardisk, lemari brankas, locker, area parkir sepeda, lemari penyimpanan arsip, dan Mobiler;
- 7) Pengadaan software aplikasi perkantoran dan operating system;
- 8) Pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4;
- 9) Perbaikan barang inventaris kantor;
- 10) Pemeliharaan dan Pengaturan pemakaian ruang rapat;
- 11) Pemeliharaan Gedung Kantor Ditjen Hubdat;
- 12) Pemeliharaan Kamar Mandi;
- 13) Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional Roda 4 dan Roda 6;
- 14) Penyediaan jasa outsourcing tenaga keamanan;
- 15) Pelayanan urusan dalam lainnya;

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2012

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan berorientasi pada tugas-tugas pokok dibidang pemerintahan yang meliputi pekerjaan non fisik (baik pekerjaan rutin maupun yang bersifat peraturan perundang-undangan/kebijakan), baik yang didanai oleh DIPA. Program kerja pada bidang pemerintahan disusun sesuai dengan bagian dan sub direktorat masing-masing yang ada di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

a. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan, penelaahan dan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan sistem informasi serta pepaduan sistem transportasi darat serta penyusunan anggaran dan Laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 2) penyiapan bahan pepaduan jaringan transportasi darat;
- 3) penyiapan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5) penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Program kegiatan pada Bagian Perencanaan dirinci sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain :

1) Sub Bagian Rencana dan Program

Pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Ditjen Hubdat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat, antara lain :

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Perhubungan Darat.
- b) Pembinaan Program dan Rencana Kerja Perhubungan Darat.
- c) Penyusunan standar, petunjuk/kebijakan teknis, pedoman dan kajian teknis di bidang Perhubungan Darat.
- d) Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK yang ada di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat.
- e) Penyusunan Revisi RPJM dan RPJP.
- f) Penyusunan Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat.
- g) Penyusunan Petunjuk Teknis Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012.

2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja, meliputi :

- a) Integritas perencanaan, pelaksanaan rencana dan evaluasi.
- b) Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja.
- c) Pemantauan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri.
- d) Penyusunan LAKIP Ditjen Perhubungan Darat.

3) Sub Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan

Pada Sub bagian ini dijadwalkan kegiatan yang bertitik tolak pada penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan Ditjen Hubdat, meliputi :

- a) Pengembangan dan konsolidasi Sistem Informasi melalui pengembangan dan pembangunan sistem.
- b) Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat.
- c) Penyusunan Perhubungan Darat Dalam Angka.
- d) Penyusunan Pengembangan Profil Perhubungan Darat.
- e) Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan LAN dan Website.
- f) Penyusunan pedoman teknis bidang sarana dan prasarana LLAJ sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009.
- g) Penyiapan bahan Draft RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
- h) Penyusunan MasterPlan Teknologi Informasi Perhubungan Darat.
- i) Memantau dan melaporkan pelaksanaan beberapa Rencana Aksi UKP4 Tahun 2012.

Disamping kegiatan yang telah dijadwalkan pada masing-masing sub bagian, terdapat juga kegiatan yang melibatkan ketiga sub bagian tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2012.

b. Bagian Keuangan

Berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010, Bagian Keuangan memiliki tugas pokok yaitu Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara (BMKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 2) pelaksanaan perbendaharaan anggaran direktorat jenderal dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BMKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 3) pelaksanaan verifikasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, bagian keuangan telah menjadwalkan beberapa substansi kegiatan yang sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain :

1) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran

Pada Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Sub Sektor Perhubungan Darat, yang dimulai dari penyiapan bahan penyusunan anggaran bersama Bagian Perencanaan, penyiapan bahan penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan/ Indeks Harga (HSPK) bersama Biro Keuangan, monitoring dan pembinaan Laporan Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1), yang secara rinci meliputi :

- a) Monitoring dan melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Anggaran pada Satker/UPT serta PNBPN di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat;
- b) Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-E1 dan melaksanakan Rekonsiliasi/ Konsolidasi Laporan Keuangan dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Perhubungan setiap triwulan, semester dan tahunan;
- c) Melaksanakan Proses Revisi DIPA dan POK yang ada di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat.

2) Sub Bagian Perbendaharaan dan BMN

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada Urusan Tata Keuangan Ditjen Hubdat dan Administrasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Sub Sektor Perhubungan Darat, yang meliputi :

- a) Melakukan pencatatan pembukuan meliputi semua penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin serta menyusun laporan bulanan Keuangan Rutin Ditjen Hubdat.
- b) Melaksanakan administrasi pengelolaan barang BMN dilingkungan Ditjen Hubdat.
- c) Memproses penghapusan barang-barang Inventaris dilingkungan kantor pusat Ditjen Hubdat.
- d) Menyiapkan administarsi Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- e) Memproses penyertaan modal Negara ke BUMN di lingkungan Ditjen Hubdat.

3) Sub Bagian Verifikasi Anggaran

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada Realisasi pelaksanaan Anggaran; Usulan calon pengelola Anggaran (KPA dan Bendahara); dan juga Monitoring tindak lanjut LHP, TP/TGR yang dilakukan oleh Instansi Pengawas Keuangan Negara, yang secara rinci meliputi :

- a) Memonitor,mengevaluasi pelaksanaan anggaran serta kesiapan pekerjaan. Menyusun Laporan Berkala dan teguran terhadap keterlambatan pelaporan pelaksanaan anggaran.
- b) Meneliti usulan Calon pengelola anggaran (KPA dan bendahara).
- c) Penyusunan usulan beserta kelengkapan ke tingkat Kementerian.
- d) Memonitor tindak lanjut LHP Tim pemeriksa, Memonitor dan evaluasi LHP,TP dan TGR dilingkungan Ditjen Hubdat dan membuat teguran terhadap keterlambatan tindak lanjut LHP,TP dan TGR.

c. Bagian Hukum

Berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan

masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang transportasi darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat;
- 2) pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat;
- 3) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta urusan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat.

Pada Bagian Hukum dan Kerjasama, pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 tidak terlepas dari program kerja tahun sebelumnya yang telah ditetapkan, belum terlaksana maupun sedang dalam proses penyelesaian serta kegiatan yang berkelanjutan dan terjadwal setiap tahun. Program kerja pada Bagian Hukum dan Kerjasama dirinci sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain yaitu :

1) Sub Bag. Peraturan Perundang-undangan

Untuk kegiatan 2012 dalam rangka *Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Dirjen sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran* yang antara lain banyak menitik beratkan pada perlunya suatu pengaturan baru ataupun perlunya pembaharuan pengaturan, yang meliputi :

- a) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan Revisi Peraturan Pemerintah bidang LLAJ sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri bidang LLAJ, LLASDP, KTD, dan BSTP;
- c) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan Rancangan Peraturan Dirjen bidang LLAJ, LLASDP, KTD, dan BSTP;
- d) Penyusunan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e) Penyusunan dan Penelaahan Perjanjian;
- f) Verifikasi Raperda di Bidang Perhubungan Darat;
- g) Pembuatan buku peraturan pelaksanaannya.

2) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan bertitik tolak pada pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan penyiapan dan pengandaan dokumentasi hukum untuk keperluan informasi dan referensi antara lain :

- a) Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum atas perkara-perkara yang timbul dalam rangka penyelenggaraan transportasi darat termasuk mengikuti persidangan di Peradilan;
- b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyempurnaan aplikasi terhadap system Dokumentasi Hukum;
- c) Penyebarluasan produk hukum Ditjen Hubdat kepada masyarakat dan instansi Pemerintah baik melalui distribusi secara langsung maupun melalui penyuluhan;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyuluhan peraturan perundangan yang terkait dengan bidang transportasi darat;
- e) Melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang transportasi darat.

3) Sub Bag. Humas dan Kerjasama

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada hubungan dengan masyarakat secara langsung (internal dan

eksternal), hubungan dengan masyarakat melalui media, hubungan antar lembaga dan kerjasama luar negeri antara lain:

- a) Penyiapan bahan, perencanaan dan pelaksanaan komunikasi dan evaluasi dalam bentuk pertemuan (formal/informal), Penerangan, Penyuluhan, Konferensi Pers, Jumpa Pers, Liputan Pers, Analisis maupun pelurusan berita/tulisan dan pembinaan hubungan baik dengan wartawan/media, serta melaksanakan kliping / guntingan berita sebagai bahan informasi dan pertimbangan pimpinan Eselon I dan Eselon II;
- b) Menyiapkan bahan, mengkoordinir dan mengikuti pameran yang berkaitan dengan bidang transportasi telah diikuti pameran sebanyak 3 kegiatan;
- c) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga / Institusi baik Pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan antar lembaga, termasuk mengikuti rapat dengar pendapat di DPR;
- d) Melaksanakan dokumentasi audio dan visual tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilingkungan Ditjen Perhubungan Darat maupun yang terkait;
- e) Memberikan informasi kebijakan dan informasi lain dilingkungan Ditjen Hubdat dengan menerbitkan info Hubdat setiap 3 bulan sekali yang disebarkan kepada Stakeholder baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun di luar Dephub serta Dinas Perhubungan propinsi dan Dinas perhubungan Kab/Kota;
- f) Penyiapan dan analisis bahan untuk rapat konsultasi, rapat koordinasi, serta rapat persiapan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan pertemuan KSLN baik di dalam maupun di luar negeri;
- g) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan delegasi untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dalam rangka

kegiatan KSLN, termasuk proses administrasinya baik di dalam maupun di luar negeri;

- h) Mengkordinasikan tindak lanjut hasil pertemuan dan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama luar negeri, termasuk *agreements* / perjanjian-perjanjian dan *MOU* yang bersifat regional, bilateral atau internasional.

d. Bagian Kepegawaian Dan Umum

Berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana serta tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat;
- 2) Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pada Bagian Kepegawaian dan Umum, untuk tahun 2012 telah dijadwalkan beberapa kegiatan yang secara garis besar meliputi penataan, pemeliharaan dan pengembangan serta pelayanan administratif kepegawaian, sarana dan prasarana kerja serta sumberdaya manusia. Kegiatan tersebut dapat dirinci sesuai dengan pembagian sub bagian yang ada, antara lain :

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Selain menyiapkan tenaga-tenaga sesuai dengan kebutuhan, penyempurnaan organisasi, meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi dan

keterampilan pegawai, juga kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian dengan rincian :

- a) Melakukan monitoring mengenai Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- b) Melakukan monitoring UPT dan Eks UPT Ditjen Hubdat;
- c) Menyiapkan dan mengirimkan peserta Diklat Struktural, Fungsional maupun Diklat Teknis Dalam dan Luar Negeri serta program beasiswa S2 transportasi;
- d) Memproses Pengangkatan Jabatan fungsional, Mutasi, Promosi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penghargaan, Pengangkatan PNS, dan Pensiun Pegawai;
- e) Melakukan Penataan nomenklatur jabatan teknis dan penyempurnaan uraian jabatan/pekerjaan Ditjen Hubdat;
- f) Penyusunan standar kompetensi jabatan aparatur perhubungan bidang lalu lintas;
- g) Memproses penerbitan Surat Keputusan Kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
- h) Menyusun formasi Tahun Anggaran 2012 dan menyempurnakan daftar susunan kebutuhan pegawai (DSP);
- i) Menyiapkan proses pengadaan CPNS Ditjen Perhubungan Darat formasi tahun 2013;
- j) Melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kinerja SDM Hubdat bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k) Melakukan kegiatan peningkatan disiplin dan jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- l) Menyiapkan bahan usulan, fasilitasi dan koordinasi rencana pembentukan UPT Ditjen Perhubungan Darat di daerah, termasuk yang belum sanggup untuk dikelola dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah;

- m) Memfasilitasi pengurusan Kartu Taspen, Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU);
- n) Melakukan pembekalan kepada para pegawai yang akan memasuki masa purna bhakti (pensiun);
- o) Melakukan pembekalan keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilanjutkan dengan ujian sertifikasi bagi para pegawai.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Untuk Sub Bagian Tata Usaha dengan harapan terwujudnya pelayanan dan akurasi data kepegawaian yang optimal maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012, antara lain :

- a) Pencatatan surat masuk dan surat keluar baik secara manual maupun dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SITU);
- b) Penyiapan dan penyusunan daftar gaji pegawai;
- c) Penyusunan daftar uang makan dan uang lembur pegawai;
- d) Penyusunan Rapel Kenaikan Gaji Pegawai
- e) Penyusunan Gaji ke 13 Pegawai
- f) Penyempurnaan dan *updating* data kepegawaian;
- g) Penataan dan pemeliharaan arsip;
- h) Pengiriman berkas arsip ke depo arsip di Bandung
- i) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (DPA);
- j) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
- k) Memproses Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS yang diwajibkan sesuai peraturan perpajakan;
- l) Melakukan Proses Pendigitalisasian Arsip;
- m) Sosialisasi ketatausahaan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- n) Sosialisasi ketatausahaan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi.

3) Sub Bagian Rumah Tangga

Kegiatan yang dilaksanakan bertitik tolak pada terwujudnya sarana dan prasarana kerja yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, demikian pula dengan optimalisasi penyediaan kebutuhan medis bagi pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, antara lain:

- a) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, meliputi ; pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan membuat laporan barang milik negara tiap semester.
- b) Pengadaan Keperluan Operasional Kantor seperti alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga.
- c) Pengadaan pakaian dinas harian sesuai jumlah pegawai.
- d) Pengadaan pakaian kerja satpam.
- e) Pengadaan obat-obatan dan honorarium dokter dan perawat pada poliklinik.
- f) Pengadaan barang inventaris kantor seperti ; notebook, meja rapat, LCD proyektor, AC split, alat penghancur kertas, komputer, mesin fax, telepon, mesin ketik elektronik, mesin ketik manual, printer, eksternal hardisk, lemari brankas, locker, area parkir sepeda, lemari penyimpanan arsip, dan Mobiler.
- g) Pengadaan software aplikasi perkantoran dan operating system.
- h) Pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4.
- i) Perbaikan barang inventaris kantor.
- j) Pemeliharaan dan Pengaturan pemakaian ruang rapat.
- k) Pemeliharaan Gedung Kantor Ditjen Hubdat.
- l) Pemeliharaan Kamar Mandi

- m) Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional Roda 4 dan Roda 6.
- n) Penyediaan jasa outsourcing tenaga keamanan.
- o) Pelayanan urusan dalam lainnya.

2. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penguji kendaraan bermotor serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- g. Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- h. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan

Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan jaringan transportasi jalan, penyusunan jaringan transportasi jalan primer, penetapan kelas jalan di jaringan jalan primer, penyusunan jaringan trayek antar kota antar propinsi, jaringan trayek lintas batas negara dan jaringan lintas di jaringan jalan primer, penetapan lokasi terminal tipe A dan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penentuan lokasi terminal, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan Jalan Propinsi, Kota dan Kabupaten, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk penumpang dan barang, penentuan lokasi terminal penumpang tipe B dan tipe C, penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang, sistim informasi dan

komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;

- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, jaringan trayek antar propinsi, lintas batas negara, angkutan perintis, jaringan lintas angkutan barang di jalan nasional, lokasi terminal penumpang tipe A, lokasi terminal penumpang tipe utama dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) Penyiapan bahan perumusan pengembangan sistim informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi jalan.

1) Seksi Jaringan Prasarana Dan Pelayanan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis dan Penyusunan Kompetensi Petugas Terminal
- b) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis dan Interkoneksi Manajemen Operasional Terminal Tipe A
- c) Perencanaan teknis penyusunan rencana induk jaringan LLAJ
- d) Master plan atau grand desain kebutuhan terminal penumpang type A
- e) DED terminal di kawasan terpadu mandiri
- f) Perencanaan teknis pola transportasi terpadu di kawasan perbatasan entikong, kalimantan barat

- g) Pembangunan terminal penumpang di Wonosari tahap V (beserta supervisinya).



Gambar 3.1. Pembangunan Terminal Wonosari

- h) Rehabilitasi terminal purbaya tahap IV (beserta supervisinya).
- i) Rehabilitasi terminal solo tahap IV (beserta supervisinya).
- j) Pembangunan terminal penumpang di Kab. Barru tahap III (beserta supervisinya).



Gambar 3.2. Pembangunan Terminal Barru

- k) Pembangunan terminal penumpang di kab. Wonogiri tahap III (beserta Supervisi)



Gambar 3.3. Pembangunan Terminal Wonogiri

- l) Pembangunan gedung arsip perhubungan tahap II(beserta Supervisi)
- m) Pembangunan terminal tipe A Depok tahap II (beserta supervisi)
- n) Pembangunan terminal penumpang di Kab.Pacitan tahap III (beserta Supervisi)
- o) Rehabilitasi terminal penumpang di kota Bandar Lampung tahap III (beserta Supervisi)
- p) Penyelenggaraan Workshop Sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
- q) Penyusunan Konsep RPP Jaringan LLAJ
- r) Pembekalan Teknis Kepala Terminal (peserta 100 orang).
- s) Survei Inventarisasi Jaringan dan Prasarana Provinsi Bali.

2) Seksi Pengembangan Transportasi Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Pengembangan Transportasi Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Sewa Jaringan CCTV Di 22 Lokasi(Terminal Merak, Pintu Tol Merak, ASDP Merak, Cikampek, Simpang Jomin, JT Balonggandu, Patrol, Losarang, Pasar Tegal

Gubuk, Cirebon, Losari JT Tanjung (Brebes), Padalarang, Cileunyi, Nagrek, JT Gentong, Sadang, Kadipten, Sumpiuh, Ciamis, Comal, Karanganyar, JT. Kulwaru).

- b) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi (VMS,CCTV,SMART CARD Terminal).
- c) Sewa *Backhaul Internet* Operasional RTTMC, VMS, CCTV, SMART CART.
- d) Pengembangan RTTMC.
- e) Pembangunan LPJU solar cell pada 24 lokasi CCTV angkutan lebaran.
- f) Penyusunan Penentuan kinerja (PK) Tahun 2012.
- g) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.
- h) Penyusun Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) Tahun 2012.
- i) Penyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2012.
- j) Monitoring CCTV Angkutan Lebaran Tahun 2012, Angkutan Natal Tahun 2012 dan Angkutan Tahun Baru 2012.



Gambar 3.4. Monitoring Posko Angkutan Lebaran

- k) Penyusunan RKAKL bidang LLAJ tahun 2013

- l) Melaporkan hasil evaluasi Satker daerah Provinsi untuk triwulan III tahun 2012.
- m) Penyusunan Konsep RPP Sistem Informasi LLAJ
- n) Monitoring dan Evaluasi Simpul.
- o) Monitoring kinerja pelayanan terminal tipe A.

b. Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan

Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor; serta harmonisasi dan standarisasi regulasi;
- 3) Penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji

kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengujian tipe dan berkala kendaraan bermotor;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan.

1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2012.
- b) Pembahasan RPD tentang Pengujian Kebisingan Kendaraan Bermotor;
- c) Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012.
- d) Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e) Pembangunan *multipurpose test track* untuk pengujian rem dan pengujian kebisingan kendaraan bermotor sesuai *UN ECE R41 & UN ECE R51* di Balai Pengujian laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Hingga akhir tahun 2012.
- f) Penerbitan sertifikat uji tipe (SUT) kendaraan bermotor.

Selama tahun 2012 telah diterbitkan sebanyak 1.014 sertifikat uji tipe kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penerbitan SUT

No	Jenis	Jumlah
1.	Sepeda motor	154
2.	Kendaraan bermotor roda 3	12
3.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	728
4.	Landasan kendaraan bermotor	73
5.	Kendaraan impor CBU Bukan Baru	37
TOTAL		1.004

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2012.

g) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT)

Untuk tahun 2012 telah diterbitkan sebanyak 296.515 lembar SRUT meliputi kebutuhan untuk ATPM, Importir, dan Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana rincian berikut:

Tabel 3.2 Penerbitan SRUT

No	Bulan	Blangko Kosong	CBU Bekas	Uji Tipe Baru	Rusak	Total
1.	Januari	8.000	127	1.001	67	9.128
2.	Februari	29.300	222	1.686	131	31.208
3.	Maret	21.500	32	738	61	22.270
4.	April	23.000	92	1.000	117	24.092
5.	Mei	17.413	32	765	179	18.210
6.	Juni	42.000	7	1.109	403	43.116
7.	Juli	22.000	49	1.013	297	23.062
8.	Agustus	13.000	29	1.066	154	14.095
9.	September	34.500	29	1.248	33	35.777
10.	Oktober	15.250	44	1.249	91	16.543
11.	November	29.000	4	1.598	52	30.602
12.	Desember	27.500	20	892	34	28.412
TOTAL		282.463	687	13.365	1.619	296.515

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2012.

h) Penerbitan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor.

Selama tahun 2012 telah diterbitkan sebanyak 2.659 sertifikat dan tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Penguji Kendaraan Bermotor

No	Jenjang Kompetensi	Jumlah
1.	Pelaksana Pemula	558
2.	Pelaksana	735
3.	Pelaksana Lanjutan	898
4.	Penyelia	468
TOTAL		2.659

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2012.

- i) Partisipasi dalam pertemuan ACCSQ-APWG (Asean Consultative Commite Standard and Quality Automotive Product Working Group) ke-16 di Bandung, Jawa Barat.
- j) Data Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
- k) Untuk tahun 2012 dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi data unit pengujian kendaraan bermotor adalah :
Alat uji non mekanik : 285 unit
Alat uji mekanik : 347 unit
Alat uji keliling : 25 unit
Taman kendaraan : 2.164.316 unit.
- l) Menyusun SK Dirjen Nomor : 2105/KP.801/DRJD/2011 tentang pembentukan tim Indonesian Automotive Standard Internationalization Forum (IASIF). Forum ini merupakan wahana bagi stake holders bidang otomotif di Indonesia yang terdiri dari unsur pemerintah (Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan BPPT), industri (ATPM, importir, karoseri, dan bengkel rekondisi), serta akademisi untuk membahas masalah regulasi otomotif, harmonisasi peraturan sektor otomotif Indonesia dan dunia (regional maupun internasional).
- m) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetakan buku uji;
- n) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang rekomendasi distribusi buku uji;
- o) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetak stiker tanda samping;

- p) Melakukan witness uji emisi kendaraan bermotor di Jepang, Thailand dan Vietnam.

2) Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pembahasan/finalisasi RPP Kendaraan;
- b) Finalisasi konsep RPD (Rancangan Peraturan Dirjen) tentang Spesifikasi Teknis Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c) Pembinaan dan penyuluhan rancang bangun serta penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Kegiatan ini ditujukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi terkait SRUT yang diterbitkan atas kendaraan bermotor hasil rancang bangun dan rekayasa. Dilaksanakan di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2012 dihadiri 32 peserta dari Dinas Perhubungan se - Indonesia.

- d) Pembinaan dan penyuluhan produksi kendaraan bermotor serta penerbitan SRUT.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke beberapa industri karoseri, ATPM, importir, dan pemodifikasi kendaraan bermotor. Tujuannya ialah memonitor apakah produk kendaraan bermotor yang ada di perusahaan-perusahaan yang dikunjungi telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk tahun 2012, kunjungan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan dilakukan terhadap beberapa perusahaan karoseri di Jawa Barat.



Gambar 3.5. Penyuluhan kepada Perusahaan Karoseri

- e) Pelaksanaan Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;
Total surat keterangan kegiatan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor yang dikeluarkan selama tahun 2012 berjumlah 115 surat keterangan.
- f) Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
Selama tahun 2012 telah dihasilkan sebanyak 997 Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Rancang bangun kereta tempelan	50
2.	Rancang bangun kereta gandengan	7
3.	Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	947
	TOTAL	997

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2012.

- g) Sertifikasi bengkel instalasi BBG pada kendaraan bermotor.
Terkait fungsi pemerintah dalam menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, salah satunya berupa sertifikasi bengkel instalasi bahan bakar gas pada kendaraan bermotor. Tujuan sertifikasi bengkel BBG ini adalah untuk memastikan

terpenuhinya semua persyaratan menyangkut fasilitas peralatan yang dimiliki dan teknisi pelaksana instalasi sistem BBG. Hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 15 bengkel instalasi BBG yang telah mendapat sertifikasi.

Tabel 3.5 Sertifikasi Bengkel BBG

No	Nama Bengkel BBG
1.	PT. PUTRAJAYA DAMAI SEJAHTERA
2.	PT. BINA TERA JASINDO
3.	PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
4.	PT. AUTO GAS INDONESIA
5.	PT. TRIENERGIE WAHANA
6.	PT. AEDICO DHARMA NUSANTARA
7.	PT. APTO GAZ INDONESIA
8.	PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
9.	PT. PETROSS GAS
10.	PT. CNG GLOBAL
11.	PT. MERINDO INDAH LESTARI
12.	PT. ABDI RAHARJA, BAJAJ
13.	PT. ITOCHU
14.	PT. IKEMADA BERKAT ABADI
15.	PT. TUNAS RIDEAN

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2012.

- h) Penilaian fisik kendaraan dalam rangka penghapusan kendaraan dinas milik instansi pemerintah.

Selama tahun 2012 terdapat 127 unit kendaraan dinas milik kementerian dan BUMN telah dinilai kondisi teknisnya dalam rangka penghapusan dari daftar inventaris negara. Penilaian kondisi teknis merupakan salah satu syarat penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah.

c. Sub Direktorat Lalu Lintas Jalan

Subdirektorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor, serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional,

akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan di jalan nasional dan pengoperasian alat penimbangan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan, dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyusunan sistem informasi manajemen rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta analisa dampak lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;

- 7) Penyiapan bahan perumusan pemberian kualifikasi teknis petugas alat penimbangan; dan
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Bimbingan Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Makassar;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- c) Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2012/1433 H;
- d) Penetapan Petunjuk Peringatan,Perintah atau Larangan Pada Jalan Nasional Tahap II (Karawang – Subang);
- e) Penetapan Petunjuk Peringatan,Perintah atau Larangan Pada Jalan Tol Tahap III (Cirebon dan Medan);
- f) DED Manajemen Lalu Lintas Jalan Nasional Pansela di Pulau Jawa Segmen Purwokerto – Yogyakarta;
- g) DED Manajemen Lalu Lintas Jalan Nasional Pansela di Pulau Jawa Segmen Tasikmalaya – Purwokerto Tahap III;
- h) DED Manajemen Lalu Lintas di Jalur Trans di Pulau Kalimantan Tahap III;
- i) DED Manajemen Lalu Lintas di Jalur Trans di Pulau Sulawesi Tahap III;
- j) Pembangunan Sistem Informasi Lalin di Jalan Nasional Tahap V.

2) Seksi Perlengkapan Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Perlengkapan Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Semiloka Perlengkapan Jalan di Medan;
- b) Pembinaan dan Sosialisasi Jembatan Timbang di Lampung dan Surabaya;
- c) Pembangunan laboratorium fasilitas perlengkapan jalan tahap III;
- d) Pengadaan dan pemasangan LPJ Solar Cell Tahap IV di Jalur Pantura;
- e) Pengadaan dan Pemasangan LPJ Solar Cell Tahap IV di Jalur Pansela;
- f) Pengadaan dan pemasangan LPJ Solar Cell Tahap IV di Jalur Lintas Timur Pulau Sumatera;
- g) Pemeliharaan Alat Kinerja Lalu Lintas;
- h) Rehabilitasi Peralatan Operasional Jembatan Timbang Tahap IV di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara;
- i) Rehabilitasi APILL di jalan Nasional di Pulau Jawa Berbasis solar cell - Tahap IV;
- j) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell di Jalur Pantura Tahap III;
- k) Penetapan Nomor Rute di Jalan Nasional di Pulau Sulawesi;
- l) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas LLAJ di Daerah;
- m) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Operasional Jembatan Timbang di Pulau Jawa;
- n) Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi E-Enforcement Penanganan Angkutan Barang di PKB dan JT di P. Jawa.
- o) Inventarisasi Kebutuhan Perlengkapan Jalan untuk Asia dan ASEAN Highway;
- p) Survey TC Angkutan Lebaran Tahun 2012;

- q) Survey Sarana dan Prasarana kegiatan Angkutan Lebaran 2012.

d. Sub Direktorat Angkutan Jalan

Subdirektorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang, pemberian izin angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta perhitungan tarif angkutan umum di jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan pemberian izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata, taksi tertentu dan angkutan sewa, penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, serta pengendalian angkutan barang tertentu;
- 4) Penyiapan bahan penilaian kinerja perusahaan angkutan umum, pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum dan pemberian subsidi angkutan umum;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi di bidang angkutan jalan; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

1) Seksi Angkutan Penumpang

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Angkutan Penumpang melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Tahun 2012 di Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Kalimantan;

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan disebutkan bahwa ” Menteri melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap trayek dan wajib mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap jaringan trayek yang sudah ada maupun yang perlu dikembangkan serta evaluasi kebutuhan angkutan AKAP sebagai pedoman dalam penetapan jaringan trayek dan kebutuhan angkutan. Untuk Tahun 2012, dilaksanakan Evaluasi Jaringan Trayek AKAP di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan.



Gambar 3.6. Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum AKAP
Tahun 2012

- b) Herregistrasi Perusahaan Angkutan AKAP di Pulau Jawa;

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum AKAP dan melaksanakan amanat

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penyelenggaraan pemberian perizinan angkutan umum dalam trayek, dilakukan kegiatan pendataan ulang atau Her-Registrasi kepada perusahaan angkutan AKAP perihal kondisi manajemen perusahaan yang meliputi data administrasi perusahaan, armada serta operasional di lapangan.

Kegiatan Her-Registrasi kepada sebagian Perusahaan Angkutan AKAP di Pulau Jawa, yang direncanakan secara bertahap dan untuk tahap awal dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari Tahun 2012, dengan hasil :

- (1) Tersusunnya data perizinan angkutan AKAP yang terbaru tentang operasional dan pelayanan dari masing-masing Perusahaan AKAP;
- (2) Tersusunnya data tentang ketersediaan sarana angkutan AKAP di lapangan sebagai dasar dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
- (3) Terciptanya pelayanan angkutan umum AKAP yang lebih mengutamakan keselamatan/kualitas pelayanan kepada pengguna jasa;



Gambar 3.7. Kegiatan Herregistrasi Perusahaan Angkutan Umum AKAP
Tahun 2012

- c) Monitoring Tarif Angkutan AKAP Kelas Ekonomi;
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Melakukan inventarisasi harga kendaraan, suku cadang serta harga/biaya komponen-komponen perhitungan tarif angkutan AKAP kelas ekonomi yang lain di masing-masing daerah; Melakukan pemantauan tarif angkutan barang yang berlaku di lapangan; Melakukan analisis perhitungan tarif angkutan penumpang dan barang berdasarkan hasil inventarisasi harga dan pemantauan tersebut di atas; dan Membuat usulan kebijakan tarif angkutan antar kota antar provinsi kelas ekonomi serta angkutan barang berdasarkan hasil perhitungan tarif yang telah dilakukan.



Gambar 3.8. Kegiatan Monitoring Tarif Angkutan AKAP Tahun 2012

- d) Pelaksanaan Pemilihan Perusahaan Angkutan dengan Pelayanan Terbaik pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2012 (1432 H);
Kegiatan ini sebagai upaya Pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan antar kota antar provinsi melalui pemberian Reward bagi Perusahaan Angkutan Umum yaitu dengan melakukan Pemilihan Pengusaha Angkutan Antar Kota Antar Provinsi dan Angkutan Pariwisata yang

diharapkan tidak hanya dilakukan pada periode Angkutan Lebaran saja tapi merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sekali pada semua perusahaan angkutan di seluruh wilayah Indonesia.

- e) Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2012 di Padang;

Maksud dilaksanaannya kegiatan Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2012 di Kota Padang ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah menyangkut upaya pemerintah untuk membantu usaha angkutan dan memberikan motivasi usaha serta peningkatan performance usaha di bidang angkutan.



Gambar 3.9. Kegiatan Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2012

- f) Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan di Bandung;

Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha terkait dengan keahlian dalam manajemen pengelolaan perusahaan angkutan yang baik, efektif dan efisien dalam rangka menciptakan pelayanan angkutan cepat, aman dan nyaman.



Gambar 3.10. Kegiatan Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan

- g) Rapat Koordinasi Teknis Bidang Angkutan Jalan Tahun 2012 di Solo;
- h) Survey Load Faktor Angkutan Penumpang Umum di P. Sumatera;

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal (145) ayat (1) telah diamanatkan bahwa Menteri melakukan evaluasi kebutuhan angkutan tiap-tiap trayek sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Bahwa untuk merealisasikan kegiatan evaluasi tersebut perlu data pendukung baik data primer maupun data sekunder yang akurat serta pengamatan langsung di lapangan mengingat dengan berkembangnya teknologi informasi dan semakin tingginya biaya transportasi sebagai pendukung kegiatan pergerakan masyarakat, telah mempengaruhi pola pergerakan masyarakat saat ini.

Sangat penting bagi Pemerintah selaku regulator untuk mengetahui perkembangan perubahan paradigma yang terjadi pada masyarakat terkait kebutuhan transportasi

sebagai dasar dalam pembuatan regulasi di bidang transportasi.

- i) Monitoring dan Evaluasi Keberintisan Angkutan Jalan;
- j) Pelaksanaan Rakernis Angkutan Perintis di Surabaya;
Tema Kegiatan Rapat Kerja Teknis Angkutan Jalan Perintis Tahun 2012 di Provinsi Jawa Timur, adalah Mewujudkan Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Angkutan Perintis dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan rakernis ini dimaksudkan sebagai wahana silaturahmi antar insan perhubungan dalam rangka menyamakan visi dan misi penyelenggaraan transportasi darat, demi terwujudnya angkutan umum yang cepat, aman, nyaman dan murah. khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan jalan perintis.

- k) Kajian Teknis Klasifikasi Angkutan Umum;
Angkutan Jalan Bagian Ketiga Belas tentang Industri Jasa Angkutan Umum. Pasal 198 ayat (1) menyatakan bahwa jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat. Sedangkan ayat (2) untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah dan/ Pemerintah daerah harus :
 - (1) Menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - (2) Menetapkan standar pelayanan minimal;
 - (3) Menetapkan kriteria persaingan sehat;
 - (4) Mendorong terciptanya pasar; dan
 - (5) Mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.

Menindaklanjuti hal tersebut, dan guna mendorong serta mendukung terwujudnya persaingan usaha angkutan umum yang sehat dan berkelanjutan, maka perlu

dilakukan kegiatan Kajian Teknis Penetapan Klasifikasi Perusahaan Angkutan Umum Dalam Trayek Tahun 2012.

l) Kajian Teknis Dashboard System;

Sistem informasi dashboard sebagai alat pengukuran kinerja penyelenggaraan angkutan jalan akan memberikan informasi perkembangan kinerja sesuai dengan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pada level kebijakan. Perancangan sistem informasi dashboard dalam penyelenggaraan angkutan jalan akan berkaitan erat dengan bagaimana business system yang akan dijalankan. Perancangan proses bisnis akan menghasilkan variabel-variabel yang sesuai untuk pengukuran kinerja angkutan jalan sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

m) Pengadaan Bus Perintis;

Tahapan kegiatan Pengadaan Bus Perintis sebagai berikut :

- (1) Rancangan spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana terlampir.
- (2) Pengadaan 50 (limapuluh) unit chasis bus ukuran sedang termasuk layanan purna jual selama 10 tahun dan tersedianya jaringan bengkel di provinsi lokasi angkutan perintis.
- (3) Pembangunan karoseri untuk 50 (limapuluh) unit bus ukuran sedang.
- (4) Pemeriksaan oleh pengguna barang yang dilakukan sebelum, selama proses dan setelah pembangunan karoseri serta melakukan uji coba laik jalan (road test) untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

- (5) Pengiriman 50 (limapuluh) unit bus perintis ukuran sedang ke Perum DAMRI Pusat selaku koordinator pelaksana penyelenggara angkutan perintis di daerah.
- (6) Pengadaan ini tidak termasuk pengurusan bea balik nama, STNK, Uji Pertama dan perijinan angkutan.
- n) Aplikasi Percontohan Izin Trayek Dalam Bentuk Kartu Elektronik;
- o) Pemeliharaan dan Pengoperasian *Tracking System* Angkutan AKAP;
- p) Pengadaan Stiker Identitas Pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

2) Seksi Angkutan Barang

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2012, Seksi Angkutan Barang melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Evaluasi kinerja perusahaan angkutan B3;
Maksud dilakukannya kegiatan Evaluasi Kinerja Perusahaan Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), adalah sebagai berikut:
 - (1) Memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) saat ini;
 - (2) Menemukanali permasalahan mendasar terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - (3) Menemukan dan mengenali permasalahan mendasar pada manajemen perusahaan angkutan terkait ketahanan usaha angkutan meliputi aspek administrasi, aspek kepengusahaan, aspek operasional, aspek teknis, pengelolaan sumber daya manusia, aspek keuangan dan aspek pendukung lainnya.

Sedangkan tujuan dilakukannya kegiatan Evaluasi Kinerja Perusahaan Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui kelaikan masing-masing kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - (2) Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan prosedur perawatan, pemeliharaan dan operasional kendaraan dalam rangka mencegah dan meminimalisasi kecelakaan di jalan;
 - (3) Untuk mengetahui pemenuhan kelengkapan administrasi perizinan, teknis laik jalan kendaraan bermotor, fasilitas tanggap darurat yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan;
 - (4) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum yang aman dan selamat;
 - (5) Untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan kajian dalam perencanaan kebijakan keselamatan transportasi jalan.
- b) Pelatihan dan Audit Perijinan Angkutan Pariwisata Standard ISO;
 - c) Pelaksanaan Pelatihan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang sesuai Standar ISO;
 - d) Monitoring Tarif Angkutan Barang;
 - e) Semiloka Angkutan Barang Berbahaya;
- Sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja perusahaan angkutan barang melalui pembinaan atau penyuluhan kepada para pengusaha dalam menghadapi berbagai

kendala dalam proses pengangkutan barang di jalan. Pembinaan/penyuluhan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dalam memberikan motivasi agar penyelenggaraan angkutan barang khususnya Angkutan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dapat memenuhi aspek-aspek keselamatan sehingga para pengusaha dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengembangkan usahanya serta dapat bersaing secara sehat dengan para pengusaha asing lainnya.



Gambar 3.11. Kegiatan Semiloka Angkutan Barang Tahun 2012

f) Kajian Teknis Penyelenggaraan Angkutan Bahan Berbahaya

Sebagai implementasi terhadap amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 5 dan Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Pembinaan dan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah”. Untuk itu perlu adanya suatu Kajian Teknis Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya di Jalan guna meningkatkan kinerja sistem Pemerintahan di bidang transportasi jalan khususnya angkutan barang berbahaya, peningkatan pembangunan transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah serta mampu mencapai sasaran kebijakan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat pada umumnya

e. Sub Direktorat Pengendalian Operasional

Subdirektorat Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Penyiapan bahan perumusan pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1) Seksi Monitoring Operasional

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Monitoring Operasional melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pengawasan Operasional Angkutan Orang dan barang.
- b) Pengawasan Pelaksanaan Produksi Karoseri.
- c) Pengembangan jaringan alat komunikasi.
- d) Pemeliharaan dan Pengoperasian alat Komunikasi.
- e) Monitoring pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor.
- f) Penegakan hukum perijinan angkutan secara nasional.



Gambar 3.11. Stiker Pelanggaran Perizinan Angkutan

g) Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor



Gambar 3.12. Pengecekan buku uji kendaraan bermotor

h) Pengawasan Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.



Gambar 3.13. Pengujian di Kab. Bantul

i) Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan penumpang di Bandara Soekarno Hatta.

j) Posko Koordinasi Lapangan Angkutan

2) Seksi Bimbingan Teknis PPNS

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Bimbingan Teknis PPNS melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

a) Rakernis PPNS bidang LLAJ di Lombok Barat, Prov Nusa Tenggara Barat

- b) Kegiatan Dalops (Penyuluhan Penegakan Hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Ambon Prov Maluku dan Medan Prov Sumatera Utara.



Gambar 3.14. Kegiatan Penyuluhan Penegakan Hukum

- c) Pengadaan Buku Pedoman PPNS.
- d) Pelaksanaan Penyidikan bidang LLAJ



Gambar 3.15. Pelaksanaan Penyidikan Bidang LLAJ

- e) Pemeliharaan dan Pengoperasian Kendaraan Operasional.
- f) Penyusunan RPP Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan penyidikan di Jalan.
- g) Monitoring Komprehensif Pimpinan Ditjen Hubdat
- h) Pengadaan Kendaraan Khusus Penanganan Gangguan LLAJ akibat bencana Alam.
- i) Peningkatan Kualitas PPNS Pola 400 Jam.
- j) Peningkatan Ketrampilan (refreshing) PPNS LLAJ.



Gambar 3.16. Pelaksanaan Penyidikan Bidang LLAJ

3. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- e. pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota;
- 3) penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis,

evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

- 4) penyiapan bahan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

1) Seksi Anev Jaringan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Anev Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Analisis dan Evaluasi Kinerja Lintas Penyeberangan.
- b) Penyusunan data jaringan transportasi sungai danau.
- c) Mengelola kegiatan penyusunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
- d) Mengelola kegiatan penyusunan bahan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
- e) Mengelola kegiatan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
- f) Menyusun informasi jaringan transportasi SDP untuk bahan pembinaan.
- g) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP Provinsi.

- h) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan studi-studi bidang perencanaan, pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP.
- i) Menyusunan Penetapan Kinerja 2012, LAKIP 2012 dan Laporan Tahunan 2012 .

2) Seksi Pengembangan Jaringan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Pengembangan Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pengawasan pengembangan terhadap penetapan lintas penyeberangan antar propinsi maupun antar negara;
- b) Mengelola kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- c) Memberi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota;
- d) Mengelola kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- e) Mengelola kegiatan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f) Melaksanakan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;

- g) Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Mekanisme Penetapan Lintas Penyeberangan Baru;
- h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) Menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan.

b. Sub Direktorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan, pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun sarana sungai, danau dan penyeberangan serta perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau;
- 4) pemberian kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai dan danau;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai,

danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

1) Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Evaluasi Kinerja Sarana Angkutan Penyeberangan Tahun 2012;
- b) Pemantauan dan bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan sarana sungai danau dan penyeberangan;

2) Seksi Bimbingan Perawatan Sarana

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Bimbingan Perawatan Sarana melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Monitoring Pelaksanaan Docking Sarana Angkutan Penyeberangan Tahun 2012;
- b) Penyusunan Data Base Sarana Angkutan Penyeberangan.

c. Sub Direktorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- 3) penyiapan bahan pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
- 4) pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

1) Seksi Rancang Bangun Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Rancang Bangun Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- b) Menyusun bahan laporan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c) Memberikan bimbingan teknis terkait dengan desain dermaga kepada satker daerah;
- d) Melakukan monitoring pembangunan pelabuhan penyeberangan yang didanai oleh APBN;

- e) Melakukan inventarisasi data pelabuhan SDP di Indonesia yang sudah terbangun;
- f) Melakukan pemantauan terhadap progres-progres kegiatan pembangunan dermaga di daerah yang didanai dari APBN;
- g) Memberikan bimbingan teknis di lapangan pada waktu pelaksanaan pekerjaan.

2) Seksi Pengelolaan Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Pengelolaan Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

- a) Monitoring Pelayanan Pelabuhan SDP di Indonesia;
- b) Sosialisasi pedoman teknis yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan oleh Menteri maupun Dirjen Perhubungan Darat;
- c) Monitoring pelaksanaan bersih negeri di tujuh lokasi Pelabuhan SDP;
- d) Peningkatan SDM dengan pendidikan dan pelatihan sistem informasi berbasis spasial (GIS).

d. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;
- 2) pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau serta pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan;

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Manajemen Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyuluhan Kelaikan Sarana Angkutan Sungai Danau di 6 Lokasi
- b) Monitoring Kinerja Lalu Lintas Sungai Danau dan Penyebrangan

2) Seksi Alur dan Perambuan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Alur dan Perambuan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Penyeberangan
- b) Monitoring kinerja lalu lintas Sungai Danau dan Penyeberangan
- c) Monitoring Fasilitas Alur Pelayaran
- d) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Sungai dan Danau
- e) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

- f) Melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT dan instansi di daerah mengenai studi desain pengerukan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.

e. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keberintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta keberintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perhitungan tariff angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- 3) penyiapan bahan persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan

sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Bimbingan Usaha Angkutan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan kesiapan perangkat operasi sarana dan prasarana, pemantauan dan pengawasan angkutan penyeberangan pada angkutan lebaran tahun 2012.
- b) Penyusunan evaluasi kinerja pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas komersil.
- c) Pemeriksaan kapal angkutan penyeberangan setelah melakukan docking tahunan.
- d) Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan persetujuan pengoperasian kapal.

2) Seksi Tarif dan Keperintisan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Tarif dan Keperintisan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Monitoring penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis.
- b) Monitoring pelaksanaan docking kapal penyeberangan perintis.
- c) Pamantauan Tarif Angkutan Penyeberangan.
- d) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis (pemberian subsidi) tahun 2012.
- e) Pembahasan perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Tarif Jasa Pelabuhan
- f) Pembahasan usulan revisi tarif atas PNBP yang berlaku di Departemen Perhubungan (PP No. 6 Tahun 2009)
- g) Pembahasan RPM tentang mekanisme, jenis dan struktur tarif jasa pelabuhan.

4. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, penyelenggaraan teknis, bimbingan teknis dan bantuan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pepaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pepaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- c. Penyiapan perumusan dan penyelenggaraan teknis di bidang penyusunan rencana transportasi perkotaan, penyelenggaraan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan pepaduan moda transportasi yang wilayah pelayanannya melebihi 1 (satu) provinsi serta penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional perkotaan;
- d. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pepaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- e. Penyampaian perumusan dan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pepaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- f. Penyampaian pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- g. Penyampaian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan; dan

- h. Penyampaian pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainya, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya;
- 2) Penyiapan bahan pelaksana bimbingan teknis dibidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan system informasi manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan dan pengkoordinasian SIM transportasi perkotaan;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan moda lainnya untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya,

penyusunan system informasi manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

1) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Banjarmasin dan Sekitarnya;
- b) Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Palu dan Sekitarnya;
- c) Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Jambi dan Sekitarnya;
- d) Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Jayapura dan Sekitarnya;
- e) Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Pekanbaru dan Sekitarnya;
- f) Bimbingan Teknis Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2012 di Provinsi Aceh;
- g) Evaluasi Kinerja Jaringan jalan di Wilayah Perkotaan Tahun 2012 di Kota Padang, Kota Batam dan Kota Ambon.

2) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Bimbingan Teknis penyuluhan dan sosialisasi transportasi perkotaan.
- b) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II
- c) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II.
- d) Penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) transportasi perkotaan wilayah II
- e) Penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi wilayah II
- f) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi wilayah II.
- g) Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun 2012 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- h) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan Di Wilayah Perkotaan Tahun 2012 di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabanan dan Kota Pontianak;

b. Sub Direktorat Lalu Lintas Perkotaan

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan Mempunyai Tugas Melaksanakan Penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, penyelenggaraan, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor serta penyelenggaraan teknis manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi; dan
- 5) Penyiapan bahan penyusunan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas perparkiran, fasilitas lalu

lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi, bimbingan teknis dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

1) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Survei persepsi masyarakat terhadap Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan pada masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2012 (1433H).
- b) Pemberian bimbingan teknis Lalu Lintas di Perkotaan di wilayah I.
- c) Pelaksanaan Kegiatan Analisis Kinerja Lalu Lintas Di Kawasan Perkotaan Tahun 2012 di Wilayah I;
- d) Pelaksanaan Kegiatan Survey Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Di Wilayah Perkotaan Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2012;
- e) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2012;

2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah II;

- b) Pemberian bimbingan teknis Lalu Lintas di Perkotaan di wilayah II.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah II.
- d) Merumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah II;
- e) Pelaksanaan Kegiatan Survey Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Di Wilayah Perkotaan Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2012;
- f) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2012;

c. Sub Direktorat Angkutan Perkotaan

Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, bimbingan teknis, bantuan Teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana umum jaringan trayek serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
- 2) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
- 3) Penyiapan bahan perumusan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi;

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek berupa saran angkutan umum perkotaan dan/atau fasilitas pendukungnya;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan, pemantauan, bimbingan dan bantuan teknis, dan manajemen di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

1) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi Perkotaan;
- b) Evaluasi dan Pengembangan Alokasi Bus Bantuan (Sekolah/Kampus/Kota)
- c) Perencanaan Teknis Mekanisme Subsidi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum;
- d) Detail Engineering Design (DED) Trayek Pengumpan Terpilih Bodetabek Tahap II;
- e) Studi Perencanaan Teknis Penerapan *Free Buses* di Palembang;
- f) Detail Engineering Design (DED) Trayek Angkutan Umum Massal Terpilih Bandung Metropolitan Area;
- g) Melaksanakan Kegiatan Forum Transit di Provinsi Bali di Kota Denpasar dan Provinsi Jawa barat di Kota Bandung

2) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
- b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
- c) Penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
- d) Penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi
- e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
- f) Konsolidasi Penangan Masalah Transportasi di Wilayah Perkotaan Tahun 2012
- g) Penilaian Kinerja Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Tahun 2012
- h) Evaluasi dan Pengembangan Alokasi Bus Bantuan Angkutan Kota/Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2012
- i) Monitoring Pelayanan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Tahun 2012;

d. Sub Direktorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda,

penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek, serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda perkotaan angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal di kawasan perkotaan);
- 4) Penyiapan bahan perumusan penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek angkutan penumpang umum dan barang;

- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau berskala nasional; dan
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antara simpul transportasi, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda, serta penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau berskala nasional.

1) Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun (WTN) 2012; (Belum dilakukan serah terima penyerahan piala sampai dengan tanggal 20 Februari 2013)
- b) *Pendampingan Kegiatan Program for Improvement of Transport in Medium Sized City (SUTIP);*
- c) Pengadaan Fasilitas Integrasi Pemadu Moda di Kota Palembang;
- d) Pengadaan Fasilitas Integrasi Pemadu Moda di Kota Bogor;
- e) Analisis Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan;

- f) Perencanaan Teknis Pola Distribusi (*Origin Destination*) Angkutan Barang di Wilayah Perkotaan Jabodetabek.

2) Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2012 (WTN)
- b) Penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi Wilayah I;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pemaduan moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan / barang serta pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu propinsi Wilayah I.
- d) Bimbingan Teknis Pengoperasian Angkutan Pemadu Moda Di Wilayah Perkotaan
- e) Identifikasi Pelayanan Angkutan Barang dan Fasilitas Bongkar Muat Di Wilayah Perkotaan;
- f) Pemantauan Kinerja Pelayanan Angkutan Taksi Di Wilayah Perkotaan;
- g) Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Angkutan Taksi Di Wilayah Perkotaan ;
- h) Pemantauan Kinerja Pelayanan Angkutan Pemadu Moda.
- i) Pemantauan Kinerja Dan Identifikasi Pelayanan Angkutan Lingkungan Di Wilayah Perkotaan;

e. Sub Direktorat Dampak Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma , pedoman, riteria dan pelaporan di bidang penyelenggaran transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transporasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis damapak lalu lintas di jalan nasional di kawasan perkotaan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan dan penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis penangan dampak transportasi berupa peralatan pendukung penggunaan bahan bakar alternatif, pemanfaatan teknologi kendaraan hybrid serta peralatan pemantau emisi gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen dibidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;

- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilaian analisis dampak lalu lintas; dan
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis, pemberian bantuan teknis, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan penyelenggaraan teknis pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

1) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I meliputi daerah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Peraturan Pelaksana Bidang Dampak Transportasi Perkotaan;
- b) Evaluasi Dampak lalu Lintas pada Kawasan Jalan Nasional Perkotaan;
- c) Sosialisasi dan Pelatihan *Eco Driving* (Tata Cara Mengemudi Dengan Metode *Smart Driving*);
- d) Sosialisasi dan Pelatihan Transportasi Perkotaan;
- e) Perencanaan Teknis Penyusunan Rencana Diversifikasi bahan Bakar;
- f) Studi Metode Penetapan Bangkitan dan Tarikan Perjalanan Dalam Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

2) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II meliputi daerah Jawa, Bali,

NTB, NTT, Maluku dan Papua melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang Dampak transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
- b) Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan Dampak transportasi perkotaan;
- c) Penyusunan Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
- d) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;
- g) Kegiatan Peningkatan Efisiensi dan kualitas Emisi Kendaraan Bermotor Melalui Metode Berkendaraan Smart Driving serta Implementasinya
- h) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Converter Kit Pada Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Tahun 2012;
- i) Sosialisasi Penangan Dampak Transportasi Di Kota Mataram dan Kota Jambi Tahun 2012;
- j) Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional Perkotaan Di Kota Pekanbaru Tahun 2012;
- k) Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional Perkotaan Di Kota Manado Tahun 2012.

5. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi, audit keselamatan transportasi darat.
- b. Pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi serta audit keselamatan transportasi darat;
- c. Penyusunan kualifikasi dan pemberian teknis sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi darat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha , kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

a. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, penetapan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pengkajian keselamatan, penyusunan rencana, program, monitoring dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sistem informasi manajemen keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana

- umum dan rencana induk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem informasi manajemen keselamatan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan Propinsi, Kota dan Kabupaten, dan system informasi manajemen keselamatan;
 - 3) penyiapan bahan penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan nasional dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - 4) penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan system informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 5) penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi anggota Unit Pengkajian Keselamatan; dan
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pengkajian keselamatan.

1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keselamatan

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi data kecelakaan, kualifikasi unit pengkajian keselamatan dan penyiapan bahan pengembangan system informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Monitoring dan Evaluasi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Program Kerja Keselamatan Transportasi Darat
- b) Monitoring Evaluasi Manajemen Keselamatan
- c) Pemantauan Keselamatan Transportasi Melalui Media Cetak

- d) Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Darat Pada Masa Angkutan Lebaran
- e) Peningkatan Kapasitas dalam Pengkajian Keselamatan
- f) Pemilihan Pelajar Pelopor
- g) Penyusunan Potret Kinerja Keselamatan Transportasi Darat
- h) Peningkatan Kapasitas Pelajar Pelopor Keselamatan
- i) Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan

2) Seksi Pengembangan Keselamatan

Seksi Pengembangan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan keselamatan, dan penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan penyusunan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Pengembangan Keselamatan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pembinaan Teknis Pembentukan Forum LLAJ
- b) Workshop Manajemen Keselamatan
- c) Penyusunan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ (Sumut, Sulawesi Selatan, Kaltim dan Jateng)
- d) Manajemen Kecepatan untuk Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas
- e) Kajian Teknis Penilaian Resiko Rute Angkutan Umum AKAP

b. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan, serta pelaksanaan promosi dan kemitraan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan deseminasi, serta kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; dan
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan.

1) Seksi Promosi

Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi keselamatan dan penyiapan bahan penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Promosi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Studi Penyusunan Bahan Sosialisasi Keselamatan Jalan Usia Remaja
- b) Penyusunan Pembangunan Taman Edukatif Keselamatan Transportasi Darat
- c) Sosialisasi Keselamatan Melalui Buletin
- d) Workshop Sosialisasi Modul Keselamatan Usia 3-12 Tahun

- e) Pemantauan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat di Sekolah
- f) Sosialisasi Keselamatan Melalui Radio
- g) Penayangan di Media Televisi
- h) Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan jalan 2012
- i) Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Cetak
- j) Pelaksanaan Peringatan Hari Korban Kecelakaan
- k) Penyelenggaraan Rest Area Mudik Sepeda Motor

2) Seksi Kemitraan

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan keselamatan dan penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Kemitraan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Monitoring dan Evaluasi Pekan Keselamatan
- b) Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan
- c) Pembentukan Komunitas Keselamatan Jalan
- d) Rencana Penyusunan Pedoman Teknis Zona Selamat Sekolah
- e) Pembuatan Desain Sosialisasi Keselamatan
- f) Pengadaan Bahan Sosialisasi
- g) Pengadaan Helm
- h) Pembuatan dan Penayangan Reality Show
- i) Pengadaan Peralatan Sosialisasi
- j) Pembuatan Film Animasi Keselamatan Serial Zeta

c. Sub Direktorat Bina Keselamatan Angkutan Umum

Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan

teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dan pengembangan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum; dan
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

1) Seksi Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Seksi Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Pedoman Teknis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Perusahaan Angkutan Barang
- b) Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (AKUT dan Program Aksi)

- c) Workshop Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum

2) Seksi Sertifikasi Pengemudi

Seksi Keselamatan Awak Angkutan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Sertifikasi Pengemudi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Konsep Penilaian Unjuk Kerja Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum
- b) Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan Umum Perkotaan/Pedesaan
- c) Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi AKAP
- d) Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Taksi
- e) Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan B3
- f) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional

d. Sub Direktorat Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan serta investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan.

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang audit keselamatan, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia

dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan laik fungsi jalan;

- 2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang audit keselamatan, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan laik fungsi jalan;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, alur sungai dan danau;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit, inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan.

1) Seksi Audit Keselamatan

Seksi Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Audit Keselamatan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Pedoman Teknis Identifikasi dan Penanganan Lokasi Potensi/Rawan Kecelakaan
- b) Kajian Persyaratan Auditor Independen Keselamatan jalan
- c) Monitoring Bidang Audit Keselamatan Jalan

- d) Monitoring Bidang Audit Keselamatan ASD
- e) Pelaksanaan Audit Prasarana Jalan
- f) Pelaksanaan Audit Prasarana Alur Pelayaran Sungai dan Danau
- g) Bimbingan Teknis di Bidang Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan
- h) Rencana Penyusunan Pedoman Teknis di Bidang Audit Keselamatan Jalan
- i) Rencana Penyusunan Pedoman Teknis di Bidang Audit Keselamatan SDP
- j) Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan
- k) Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP

2) Seksi Inspeksi Keselamatan

Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta pelaksanaan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Inpeksi Keselamatan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pedoman Teknis Inspeksi Keselamatan ASD
- b) Pelaksanaan Inspeksi Prasarana Keselamatan ASD
- c) Bimbingan Teknis di Bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan
- d) Rencana Penyusunan Pedoman Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan
- e) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Prasarana Jalan
- f) Inspeksi Keselamatan Trasnportasi Darat
- g) SID dan DED DRK Provinsi Bali dan NTB
- h) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Berkeselamatan di Kab. Tulungagung

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Pembangunan Bidang LLAJ dan Perkotaan

Secara keseluruhan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Tabel 3.9. Program dan Realisasi Pembangunan LLAJ

No.	Program/Kegiatan	Program	Realisasi	Unit
1.	Pembangunan Fasilitas dan Keselamatan LLAJ di 32 Propinsi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	138	138	Paket
2.	Pembangunan Jembatan Timbang	4	4	Lokasi
3.	Pengadaan Alat PKB	1	1	Paket
4.	Pembangunan Terminal Penumpang	16	16	Lokasi
5.	Subsidi Operasi Bus Perintis	157	157	Lintas
6.	Pengadaan Bus Perintis	50	50	Unit
7.	Pengadaan Bus Pelajar dan Sedang AC	55	55	Unit

Sumber : Dit. LLAJ, Ditjen Hubdat, Tahun 2012.

Tabel 3.9. Realisasi Keperintisan LLAJ

No.	Tahun	Propinsi dan Trayek			Subsidi	
		Propinsi	Trayek	%	Jumlah (Rupiah)	%
1	2008	20	124	19,23	35.163.000.000	16,5
2	2009	21	138	11,29	47.882.551.000	36,17
3	2010	22	143	2,90	48.239.000.000	0,74
4	2011	25	157	9,79	50.188.275.464	4,04
5	2012	25	169	7,64	55.974.523.000	11,53

Sumber : Dit. LLAJ, Ditjen Hubdat, 2012.

2. Pengembangan Bidang LLASDP

Program pengembangan Bidang LLASDP terdiri dari 7 kegiatan yang meliputi : Pembangunan Dermaga Sungai, Dermaga Danau, Pelabuhan Penyeberangan, Kapal Penyeberangan, Rambu Laut/Suar, Pembangunan Bus Air, dan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis.

Tabel 3.12. Program dan Realisasi Pembangunan LLASDP

No	Program	Rencana	Realisasi
1	Pembangunan Dermaga Sungai		
	a. Baru	10	10
	b. Lanjutan	10	10

No	Program	Rencana	Realisasi
	c. Rehabilitasi	10	10
2	Pembangunan Dermaga Danau		
	a. Baru	3	3
	b. Lanjutan	0	0
	c. Rehabilitasi	5	5
3	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan		
	a. Baru	21	21
	b. Lanjutan	42	42
	c. Rehabilitasi	16	16
4	Pembangunan Kapal Penyeberangan		
	a. Baru	13	13
	b. Lanjutan	17	17
	c. Rehabilitasi	0	0
5	Pembangunan Bus Air	4	4
6	Rambu SBNP	28	28
7	Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis	135	135

Sumber : Dit. LLASDP Ditjen Hubdat, 2012.

Secara keseluruhan program pembangunan LLASDP dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

C. BANTUAN LUAR NEGERI

Proyek Bantuan Luar Negeri (BLN) yang sedang berjalan (*On – Going*) pada tahun 2012. Kegiatan tersebut dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 14.000.000.000, dimana pada tahun 2012 kegiatan tersebut adalah :

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan alokasi dana sebesar Rp.14.000.000.000,-

BAB IV

OPERASIONAL PERHUBUNGAN DARAT

A. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Umum

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luasan mencapai 9,8 juta km² (termasuk perairan) dan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 241.167 juta jiwa (tahun 2011).

Dengan jumlah penduduk demikian besarnya, maka sangat wajar apabila perjalanan penumpang dan barang yang dibangkitkan sangat besar jumlahnya yang sangat berpengaruh pada pembangunan masing – masing daerah.

Dengan melihat kondisi saat ini, dimana pergerakan lalu lintas jalan yang sangat dominan, fenomena aktual yang terjadi di masyarakat, permasalahan dan tantangan yang ada serta kondisi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diharapkan secara prospektif dapat mewujudkan suatu arah, visi, misi strategi kebijaksanaan yang lebih baik dan konsisten sehingga eksistensi Direktorat LLAJ benar-benar nyata mampu mendorong tercapainya sasaran pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan secara optimal yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi jalan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Telah banyak upaya dan peranan yang dilaksanakan oleh Direktorat LLAJ dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini telah berjalan. Namun dengan merespon setiap perubahan, perkembangan dan tantangan yang ada perlu terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan di berbagai aspek dengan disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur Direktorat LLAJ pada semua lini yang lebih profesional dan berwibawa.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan di berbagai segi seperti sosial ekonomi masyarakat, politik/pemerintahan, teknologi, globalisasi otonomi daerah akan membawa konsekwensi logis perlunya penyesuaian, perubahan, perbaikan dan penyempurnaan ‘warna’ organisasi Direktorat LLAJ agar dapat secara nyata lebih responsif/proaktif melaksanakan peranannya baik di dalam pembinaan,

pengaturan pengawasan dan advisory di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dengan demikian secara institusional Direktorat LLAJ dari waktu ke waktu dapat terus meningkatkan kinerjanya.

2. Perkembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Jaringan Jalan

Peningkatan panjang jalan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, terjadi pada status jalan Propinsi dengan prosentase peningkatan sebesar 0,6% pertahunnya. Sedangkan untuk status jalan Kabupaten/Kota prosentase peningkatan sebesar 2% pertahunnya.

Tabel 4.1. Panjang Jalan Nasional

No.	Status Jalan	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Jalan Nasional	38,570	38,570	38,570
2	Jalan Propinsi	52,957	53,291	53,642
3	Jalan Kabupaten / Kota	384,846	395,453	404,395
Total Panjang Jalan		476,373	487,314	496,607

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

b. Jaringan Trayek

1) Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Pariwisata

Sebagai titik tolak pelayanan angkutan umum antar kota antar Propinsi, Ditjen Hubdat dengan SK. No. 1200/AJ.205/DRJD/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di seluruh Indonesia. Posisi bus AKAP pada tahun 2011 sebanyak 21.157 unit bus dengan 883 perusahaan otobus, mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 21.720 unit bus dengan 907 perusahaan otobus. Sedangkan posisi bus pariwisata pada tahun 2011 sebanyak 14.897 unit bus dengan 1.082 perusahaan otobus, mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 14.984 unit bus dengan 1.220 perusahaan otobus.

Tabel 4.2. Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata Tahun 2012

No.	Propinsi	AKAP		Pariwisata	
		PO	BUS	PO	BUS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	20	635	3	39
2	Sumatera Utara	45	1.278	23	157
3	Sumatera Barat	67	882	16	108
4	Riau	24	402	15	110
5	Jambi	38	511	4	26
6	Sumatera Selatan	31	584	10	66
7	Bengkulu	21	328	5	49
8	Lampung	28	580	18	200
9	Bangka Belitung	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	8	119
11	DKI Jakarta	67	3.843	114	4.727
12	Jawa Barat	118	3.858	231	2.372
13	Jawa Tengah	147	4.008	286	2.630
14	DI. Yogyakarta	29	518	48	664
15	Jawa Timur	69	1.941	220	1.441
16	Banten	46	1.085	55	834
17	Bali	14	203	140	1.255
18	NTB	10	119	4	75
19	NTT	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	3	30	13	32
21	Kalimantan Tengah	24	158	0	0
22	Kalimantan Selatan	23	162	0	0
23	Kalimantan Timur	5	74	1	2
24	Sulawesi Utara	7	41	1	2
25	Sulawesi Tengah	24	132	5	76
26	Sulawesi Selatan	36	293	0	0
27	Sulawesi Tenggara	1	8	0	0
28	Gorontalo	9	42	0	0
29	Sulawesi Barat	1	5	0	0
30	Maluku	0	0	0	0
31	Maluku Utara	0	0	0	0
32	Papua	0	0	0	0
33	Irian Jaya Barat	0	0	0	0
Jumlah		907	21.720	1.220	14.984

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

Jumlah Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan, yang disebabkan diantaranya karena usaha pemerintah dalam melakukan pengalihan-pengalihan izin trayek dari perusahaan yang sudah tidak operasional kepada perusahaan lain, hal tersebut dalam rangka banyaknya perusahaan autobus yang mengembangkan usaha angkutannya.

Sedangkan untuk angkutan pariwisata sampai tahun 2012 terus mengalami peningkatan hal ini dikarenakan permintaan yang terus meningkat dan jumlah pengajuan permohonan perizinan angkutan pariwisata juga bertambah.

2) Trayek Pengangkutan Alat Berat dan B3

Pada tahun 2012 jumlah perusahaan Pengangkutan Alat Berat yang telah disetujui sebanyak 238 perusahaan dengan jumlah kendaraan 1.217 unit kendaraan. Sedangkan untuk jumlah perusahaan angkutan B3 sebanyak 1.242 perusahaan dengan jumlah kendaraan sebanyak 7.475 unit kendaraan.

Tabel 4.3. Jumlah Pengangkutan Alat Berat dan B3 Tahun 2011

No.	Bulan	Alat Berat		B3	
		PO	BUS	PO	BUS
1	Januari	31	214	135	841
2	Februari	20	106	90	489
3	Maret	21	78	72	582
4	April	11	33	49	421
5	Mei	18	62	78	404
6	Juni	13	56	160	825
7	Juli	32	237	84	512
8	Agustus	27	107	87	448
9	September	14	76	104	652
10	Oktober	10	44	100	647
11	Nopember	17	112	141	843
12	Desember	24	92	142	811
Jumlah		238	1.217	7.242	7.475

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

3) Trayek Lintas Batas Negara

Trayek lintas batas negara antara Indonesia dengan negara tetangga diantaranya beberapa telah ditetapkan dan dilayani dengan moda transportasi jalan dan beberapa masih dalam proses perundingan kesepakatan.

Lintas Batas Negara yang telah dilayani :

a). Pontianak-Kuching

Berdasarkan hasil kesepakatan Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), sejak tanggal 2 Januari 1993 dioperasikan perusahaan dan jumlah kendaraan umum untuk trayek Pontianak-Kuching sebagai berikut:

Tabel 4.4. Perusahaan kendaraan umum yang berdomisili Kuching untuk melayani trayek Kuching- Pontianak

No.	Nama Perusahaan	Mobil Bus	RIT	SEAT
1	Sri Tebekang	3 eksekutif	3	36
2	Kirata	3 eksekutif	3	36
3	Saphire Pacific	3 eksekutif	3	36
4	Eva Transport	5 eksekutif	5	36
5	Sri Merah	3 eksekutif	3	36
6	Bintang Jaya Ekspres	3 eksekutif	3	40
Jumlah		20 eksekutif	20	220

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

Tabel 4.5. Perusahaan kendaraan umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching

No.	Nama Perusahaan	Mobil Bus	RIT	SEAT
1	Perum DAMRI Pontianak	7 eksekutif	7	30
2	PT. Andau Kapuas	2 eksekutif	3	36
3	PO Setia Jiwana Sakti	10 eksekutif	10	36
Jumlah		19 eksekutif	20	102

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

b). Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching

Uji coba Angkutan Lintas Batas Negara Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching dilakukan sejak tanggal 16 November 2008 dan Launcing pada tanggal 15 Januari 2009. Trayek tersebut dilayani sebanyak 16 (enam belas) unit bus ditambah 2 (dua) unit bus cadangan dengan data sebagai berikut :

- (1) Perusahaan ALBN dari Indonesia, terdapat 2 (dua) perusahaan yaitu Perum DAMRI (4 unit bus) + 1 unit kendaraan cadangan dan PO. Setia Jiwana Sakti (4 unit bus) + 1 unit kendaraan cadangan.
- (2) Perusahaan ALBN dari Bandar Seri Begawan, dengan perusahaan ADBH Sdn.Bdn (4 unit bus) dan Syakirah Murni Hajisaban TS (1 unit bus)
- (3) Perusahaan ALBN dari Kuching (Malaysia), terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu Syarikah Eva Ekspres (1 unit bus), Syarikah Bintang Jaya Ekspres (1 unit bus) dan Syarikah Biaramas Ekspres (1 unit bus).

- c). Indonesia - Papua New Guinea (Jayapura-Vanimo) masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan Indonesia – Timor Leste masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan
- 4) Angkutan Tidak Dalam Trayek

Sesuai KM 84 Tahun 1999, disamping adanya angkutan dalam trayek terdapat pula angkutan tidak dalam trayek, meliputi: taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan khusus.
- 5) Untuk angkutan taksi dan angkutan khusus pengaturan izin operasinya oleh Walikota untuk dalam kota dan oleh Gubernur untuk angkutan lebih dari satu kota. Disamping mempunyai kewenangan untuk memberikan izin trayek bis AKAP, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini Direktur LLAJ mempunyai kewenangan pula kewenangan untuk memberikan izin angkutan tidak dalam trayek meliputi: taxi bandara, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan khusus.

3. Perkembangan Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Direktorat LLAJ. Dengan terbitnya PP No. 38 Tahun 2007, maka pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2012, pada 504 kabupaten/kota terdapat peralatan uji kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **347** unit uji statis
- 2) **25** unit uji keliling
- 3) **285** unit uji non mekanik

b. Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor.

Selama tahun 2012 telah diterbitkan sebanyak 683 sertifikat uji tipe kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6. Pengesahan dan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Sepeda motor	147
2.	Kendaraan bermotor roda 3	4
3.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	460
4.	Landasan kendaraan bermotor	72
5.	Kendaraan impor CBU Bukan Baru	238
	TOTAL	921

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

Untuk tahun 2012 telah diterbitkan sebanyak 96.515 lembar SRUT meliputi kebutuhan untuk ATPM, Importir, dan Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana rincian berikut :

Tabel 4.7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Tahun 2012

No	Bulan	Blangko Kosong	CBU Bekas	Uji Tipe Baru	Rusak	Total
1.	Januari	8.000	127	1.001	67	9.128
2.	Februari	29.300	222	1.686	131	31.208
3.	Maret	21.500	32	738	61	22.270
4.	April	23.000	92	1.000	117	24.092
5.	Mei	17.413	32	765	179	18.210
6.	Juni	42.000	7	1.109	403	43.116
7.	Juli	22.000	49	1.013	297	23.062
8.	Agustus	13.000	29	1.066	154	14.095
9.	September	34.500	29	1.248	33	35.777
10.	Oktober	15.250	44	1.249	91	16.543
11.	November	29.000	4	1.598	52	30.602
12.	Desember	27.500	20	892	34	28.412
	TOTAL	282.463	687	13.365	1.619	296.515

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

4. Penegakan Hukum Bidang LLAJ dan Penyidik Negeri Sipil Bidang LaLu Lintas dan Angkutan (PPNS LLAJ)

a. Pelanggaran Operasional

Jumlah pelanggaran operasional pada tahun 2012 sebanyak 13.432 kendaraan dengan jumlah kendaraan yang melanggar sebanyak 3.242 Kendaraan sehingga prosentase tingkat pelanggaran sebesar 24,14 %. Untuk selengkapnya jumlah pelanggaran operasional bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat pada table 4.10 dan 4.11

Tabel 4.8. Jumlah Pelanggaran Operasional Tahun 2012

No	Provinsi	Jumlah Kend. Diperiksa	Jumlah Kend. Melanggar	Prosentase Pelanggaran
1	Aceh	446	71	15,92%
2	Sumatera Utara	2.113	853	40,37%
3	Kepulauan Riau	75	42	56%
4	Riau	122	44	36,7%
5	Jambi	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
6	Bengkulu	223	64	28,7%
7	Bangka Belitung	75	8	10,67
8	Sumatera Barat	664	188	28,31%
9	Sumatera Selatan	696	145	20,83%
10	Lampung	564	96	17,01%
11	Banten	615	114	18,54%
12	DKI Jakarta	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
13	Jawa Barat	2.340	491	20,98%
14	Jawa Tengah	625	106	16,96
15	D.I Yogyakarta	457	57	12,47%
16	Jawa Timur	229	64	27,95%
17	Kalimantan Timur	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
18	Kalimantan Tengah	90	49	54,44%
19	Kalimantan Selatan	326	32	9,82%
20	Kalimantan Barat	314	61	19,43%
21	Sulawesi Selatan	778	57	7,33%
22	Sulawesi Utara	375	116	30,93%
23	Sulawesi Tengah	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
24	Sulawesi Barat	811	263	32,43%
25	Sulawesi Tenggara	424	63	14,86%
26	Gorontalo	173	34	19,65%
27	Bali	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
28	NTB	35	7	20%
29	NTT	161	78	48,45%
30	Maluku	176	84	47,73%
31	Maluku Utara	505	55	10,89%
32	Papua Barat	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
33	Papua	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
TOTAL		13.432	3.242	24,14%

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

Tabel 4.9 Jumlah Pelanggaran Perijinan, Operasional dan Persyaratan Teknis Laik Jalan

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran				
		2008	2009	2010	2011	2012
A.	Pelanggaran Perizinan dan Operasional					
1	Dokumen perizinan palsu	-	10	6	54	47
2	Tidak ada dokumen perizinan/Masa berlaku dokumen perizinan habis	75	509	497	1.033	765
3	Nama PO tidak sesuai dengan dokumen perizinan	-	36	1	30	12
4	Nomor kendaraan tidak sesuai dengan dokumen perizinan	-	3	0	10	5
5	Trayek yang dilayani tidak sesuai dengan dokumen perizinan	98	105	98	284	187
6	Waktu pelayanan tidak sesuai dengan dokumen perizinan	-	76	13	6	2
7	Belum melunasi asuransi kecelakaan Jasa Raharja	-	163	143	491	287
8	Menggunan izin insidentil	-	56	48	10	18
9	Pelanggaran perizinan dan operasional lainnya	41	50	41	91	185
B.	Pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan					
1	Buku Uji Palsu	-	2	0	8	11
2	Tidak ada buku uji/masa berlaku uji habis	56	190	176	408	541
3	Jumlah tempat duduk tidak sesuai dengan buku uji	-	2	0	118	104
4	Tidak ada sabuk keselamatan	-	20	20	380	421
5	Tidak ada alat pemadam kebakaran	-	9	51	196	143
6	Tidak ada pintu keluar darurat	-	7	47	970	532
7	Tidak ada Petunjuk keluar darurat	-	18	53	958	764
8	Tidak ada pemecah kaca	-	68	41	969	986
9	Tida ada petunjuk pemecah kaca	-	54	49	951	971
10	Pelanggaran persyaratan Teknis dan Laik Jalan lainnya	41	-	13	598	781
C.	Pelanggaran Pemeriksaan Muatan Lebih					
1	Pelanggaran Teknis Kendaraan	0	0	0	797	801
2	Pelanggaran Operasi/Muatan	0	0	0	267	336
TOTAL		311	1.378	1.297	8.629	7.899

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang LLAJ

Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2012 adalah 2.566 orang. Untuk data PPNS daerah dapat dihimpun dari 33 Propinsi.

Tabel 4.10. Daftar PPNS Bidang LLAJ Tahun 2008 - 2012

No	Provinsi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pusat (Kementerian Perhubungan)	54	57	57	57	59
2	Nangroe Aceh Darussalam	28	43	43	52	61
3	Sumatera Utara	146	152	152	167	179
4	Kepulauan Riau	5	6	6	8	9
5	Riau	54	69	69	79	85
6	Jambi	21	27	27	36	36
7	Bengkulu	11	15	17	17	20
8	Bangka Belitung	14	18	18	19	21
9	Sumatera Barat	123	128	128	131	132
10	Sumatera Selatan	108	124	124	132	140
11	Lampung	68	68	68	70	80
12	Banten	70	72	72	84	91
13	Dki Jakarta	128	117	117	117	117
14	Jawa Barat	165	183	183	196	208
15	Jawa Tengah	220	243	243	255	286
16	DI Yogyakarta	108	109	109	110	113
17	Jawa Timur	417	432	432	435	458
18	Kalimantan Timur	9	12	12	16	18
19	Kalimantan Tengah	38	42	42	47	50
20	Kalimantan Selatan	10	15	15	19	22
21	Kalimantan Barat	-	12	12	18	19
22	Sulawesi Selatan	37	43	43	54	65
23	Sulawesi Utara	19	22	22	33	33
24	Sulawesi Tengah	33	37	37	42	45
25	Sulawesi Barat	8	13	13	16	19
26	Sulawesi Tenggara	4	10	10	11	18
27	Gorontalo	16	17	17	19	19
28	Bali	10	11	11	12	15
29	NTB	17	19	19	20	22
30	NTT	51	54	54	57	59
31	Maluku	10	11	11	11	12
32	Maluku Utara	37	3	3	4	4
33	Papua Barat	1	5	5	6	7
34	Papua	4	40	40	41	44
Total		2.044	2.229	2.229	2.391	2.566

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

c. Penjatuhan Sanksi Administratif

Adapun untuk Jumlah Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran pada tahun 2012 (1432 H) sebanyak 22 perusahaan otobus.

Tabel 4.11. Rekap Penjatuhan Sanksi Angkutan Lebaran Tahun 2012
Berdasarkan Domisili Perusahaan Angkutan AKAP

No.	Propinsi	Jumlah PO Penerima Sanksi
1	DKI Jakarta	1
2	Jawa Barat	9
3	Jawa Tengah	3
4	Jawa Timur	2
5	DI Yogyakarta	3
6	Sumatera Selatan	2
Total		20

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2012

5. Kegiatan-kegiatan Strategis

- a. Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident, terdiri dari kegiatan :
 - 1) Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ;
 - 2) Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi /Tipe;
 - 4) Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - 5) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 6) Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan.
- b. Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan, terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pembangunan Terminal Transportasi Jalan;
 - 2) Pembangunan Jembatan Timbang;
- c. Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan, terdiri dari kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi Simpul LLAJ;
 - 2) Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ;
 - 3) Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ;
 - 4) Kontingensi Bencana Alam;
 - 5) Alat Kinerja Angkutan Jalan.
- d. Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan, terdiri dari kegiatan :
 - 1) Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani;
 - 2) Pengadaan Bus Perintis;
 - 3) Paket Penunjang Operasional Keperintisan.

6. Permasalahan Yang Dihadapi

- a. Kendala Transportasi Wilayah Perbatasan hal ini antara lain disebabkan karena minim infrastruktur, tingginya ketidakpastian atau ketidak teraturan jadwal, Mahalnya biaya perjalanan terutama pada wilayah perbatasan, Rawan Kecelakaan, Tidak bersinerginya kebijakan dan Implementasi.
- b. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan.
- c. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
 - 1) Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal karena keterbatasan fisik/peralatan, SDM dan sistem manajemen;
 - 2) Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih;
 - 3) Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antarkota antarprovinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah;
 - 4) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
 - 5) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat :
 - a) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
 - b) Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
 - c) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
 - d) Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;

- e) Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.
- 6) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
- 7) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - a) Belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
 - b) Belum tuntasnya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan di bidang lalu lintas angkutan jalan (PP sebagai peraturan pelaksana UU No. 22 Th 2009);
 - c) Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antarlembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah;
 - d) Masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - e) Belum optimalnya peran swasta dan BUMN dalam investasi/penyelenggaraan LLAJ. Sebagian besar pelayanan angkutan umum memang sudah menjadi domain swasta, peran BUMN belum diperjelas apakah hanya untuk penugasan pelayanan di lintas yang kurang komersial (angkutan perintis dan perbatasan untuk Perum Damri); sedangkan peran Perum PPD dalam sistem transportasi umum di Jakarta semakin kecil, karena semenjak desentralisasi, transportasi perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - f) Kebijakan tarif dan subsidi melalui berbagai pungutan dan “road pricing” yang belum tepat sasaran.
 - g) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta

pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

- h) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

7. Upaya Pemecahan

- a. Mewujudkan *Road Map to Zero Overloading* dengan melakukan :
 - 1) Penanganan muatan lebih melalui modernisasi pengelolaan, rehabilitasi dan aplikasi teknologi informasi jembatan timbang;
 - 2) Menertibkan dimensi kendaraan bermuatan di jalan sesuai kebutuhan;
 - 3) Memberdayakan aparat penegak hukum yaitu PPNS baik di terminal, jembatan timbang maupun fasilitas pengawasan yang ada;
 - 4) Meningkatkan koordinasi dengan jasa penegak hukum lainnya.
- b. Penerapan sistem *Quality Licencing* (metode ini telah di ujicobakan dalam pemilihan operator angkutan yang memberikan pelayanan angkutan pepadu moda Bandara Soekarno-Hatta serta pemilihan operator *Busway*).
- c. Pembangunan transportasi jalan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
- d. Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya dan pertahanan, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

- e. Pembangunan transportasi jalan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah.
- f. Pembangunan transportasi jalan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- g. Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*).
- h. Pembangunan transportasi jalan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan rasional.
- i. Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

B. LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

1. Umum

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (archipelago) terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, yang dipisahkan oleh selat – selat serta juga memiliki banyak sungai dan danau yang berpotensi untuk dilayari, tentunya Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakatnya.

Angkutan SDP memungkinkan terjadinya kegiatan interaksi sosial budaya antar daerah dan wilayah, mendukung kegiatan ekonomi (industri, perdagangan, pemasaran, pertanian, dsb), serta secara politis dapat mendukung sistem keamanan dan ketahanan nasional serta mendukung terwujudnya kesatuan ekonomi dan politik wilayah nasional Indonesia.

ASDP sebagai penyelenggara jasa angkutan umum mempunyai fungsi dan peran menyediakan jasa angkutan kendaraan (barang) dan penumpang, baik

secara inter moda maupun intra moda transportasi. Khusus jasa angkutan penyeberangan, mempunyai fungsi menghubungkan jalur transportasi jalan raya ataupun kereta api yang terputus oleh adanya perairan danau, sungai, dan selat, sehingga sering disebut jembatan penyeberangan. Di era sekarang fungsi penyeberangan menjadi moda transportasi perairan dengan jarak tertentu, yang bersifat *point to point services*.

Angkutan Sungai dan Danau diperlukan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum disentuh oleh moda angkutan lainnya. Disamping itu angkutan sungai dan danau juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang relatif besar.

Peranan angkutan sungai dan danau telah nyata dirasakan oleh masyarakat di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Namun potensi angkutan sungai dan danau yang sesungguhnya jauh lebih besar, belum termanfaatkan pada saat ini. Oleh karena itu, kebijakan umum bidang angkutan sungai dan danau diarahkan untuk mengembangkan potensi angkutan sungai dan danau sebagai salah satu moda transportasi darat yang dapat menghubungkan pelosok daratan, dengan mewujudkan keselamatan, dan menciptakan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang tertib lalu lintas dan administrasi.

2. Perkembangan Prasarana LLASDP

a. Perkembangan Jumlah Lintas Penyeberangan

Sejak pertama kali ditetapkannya lintas penyeberangan pada tahun 1989, melalui Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 64 Tahun 1989, sebanyak 44 lintas penyeberangan, sampai saat ini telah menjadi sebanyak 193 lintas penyeberangan, ditambah dengan 50 lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) setelah era otonomi daerah. Sehingga jumlah total lintas penyeberangan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 243 lintas penyeberangan. Sedangkan lintasan yang beroperasi pada tahun 2012 sebanyak 179 lintasan dan yang belum/tidak beroperasi sebanyak 95 lintasan. Dari sisi pengoperasiannya, sebanyak 42 lintas adalah berupa lintas penyeberangan dengan angkutan komersil dan sisanya sebanyak 137 lintasan berupa lintas penyeberangan angkutan perintis.

Tabel 4.12. Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan

No.	Status Operasional Lintas	Jumlah
1.	Jumlah lintas yang ditetapkan	
	a. Melalui Keputusan Menteri Perhubungan	193
	b. Melalui Keputusan Pemerintah Daerah	43
2.	Status pengoperasian	
	a. Lintasan yang beroperasi	179
	b. Lintasan yang belum dan tidak beroperasi	95
3.	Jenis Pengoperasian angkutan	
	a. Lintas penyeberangan dengan angkutan komersil	42
	b. Lintas penyeberangan dengan angkutan perintis	137

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

Tabel 4.13. Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan

No.	No. KM	Tahun	Jumlah Lintas
1	KM No. 64	1989	44
2	KM No. 25	1991	21
3	KM No. 49	1994	23
4	KM No. 33	1995	10
5	KM No. 1	1997	8
6	KM No. 13	1997	26
7	KM No. 30	1998	18
8	KM No. 43	1998	1
9	KM No. 82	1998	12
10	KM No. 66	2000	5
11	KM No. 1	2001	4
12	KM No. 58	2002	1
13	KM No. 16	2003	1
14	KM No. 71	2004	3
15	KM No. 76	2004	1
16	KM No. 38	2005	4
17	KM No. 48	2005	1
18	KM No. 69	2005	1
19	KM No. 44	2009	1
20	KP. No. 325	2009	1
21	KP. No. 436	2009	1
22	KM No. 160	2010	1
23	KM No. 213	2010	2
24	KP. No. 265	2010	1
25	KM No. 370	2010	1
26	KP N0. 232	2011	1
Jumlah			193

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

Tabel 4.14. Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota

No.	Nama Lintas	Propinsi
1.	Singkil - P. Banyak	NAD
2.	Singkil – Sinabang	NAD
3.	Balohan – Ulheu Lheu	NAD
4.	Tebas Kuala - Tebas Seberang	Kalimantan Barat
5.	Parit Sarem – S. Nipah	Kalimantan Barat
6.	Pamatata – Patumbukan – Labuhan Bajo	Sulsel – NTT
7.	Bira – Sikeli	Sulawesi Selatan
8.	Sikeli – Tondasi	Sulawesi Selatan
9.	Wakai – Ampana	Sulawesi Tengah
10.	Bitung-Siau	Sulawesi Utara
11.	Dongkala – Bau Bau	Sulawesi Tenggara
12.	Bau Bau – Mawasangka	Sulawesi Tenggara
13.	Aimere – Waingapu	NTT
14.	Waingapu – Sabu	NTT
15.	Kalabahi – Lewoleba	NTT
16.	Saumlaki – Tepa	Maluku
17.	Dobo – Benjina	Maluku
18.	Tulehu – Pelauw	Maluku
19.	Umiputih – Waley	Maluku
20.	Tulehu – Saparua	Maluku
21.	Saparua - Nalahia	Maluku
22.	Nalahia - Amahai	Maluku
23.	Hunimua – Masohi	Maluku
24.	Namlea - Ambalau	Maluku
25.	Ambalau - Wamsisi	Maluku
26.	Wamsisi – Namrole	Maluku
27.	Namrole - Leksula	Maluku
28.	Ternate – Bacan	Maluku Utara
29.	Ternate - Batang Dua	Maluku Utara
30.	Sorong – Seget	Irian Jaya Barat
31.	Seget – Seremuk	Irian Jaya Barat
32.	Seremuk – Konda	Irian Jaya Barat
33.	Konda – Teminabuan	Irian Jaya Barat
34.	Mogim – Kais	Irian Jaya Barat
35.	Kais – Inawatan	Irian Jaya Barat
36.	Inawatan – Kokoda	Irian Jaya Barat
37.	Bade - Mur – Kepi	Irian Jaya Barat
38.	Waren – Nabire	Papua
39.	Merauke – Atsy	Papua
40.	Atsy – Asgon	Papua
41.	Atsy – Senggo	Papua
42.	Atsy – Agat	Papua
43.	Biak – Numfor	Papua
44.	Pananaru – Siau	Sulawesi Utara
45.	Bitung – Lirung	Sulawesi Utara

No.	Nama Lintas	Propinsi
46.	Bitung – Tahuna	Sulawesi Utara
47.	Bitung – Pananaru	Sulawesi Utara
48.	Bitung – Melonguane	Sulawesi Utara
49.	Bitung – Tagulandang	Sulawesi Utara
50.	Pananaru – Melonguane	Sulawesi Utara

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

Berdasarkan jenis pengoperasian, lintas penyeberangan yang sudah beroperasi dapat dibedakan dalam 2 lintas, yaitu : lintasan komersil dan perintis yang disubsidi pemerintah. Untuk jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi sebanyak 179 lintasan yang terdiri dari lintasan komersil sebanyak 42 lintas dan lintasan perintis sebanyak 137 lintas. Lintas penyeberangan perintis yang tidak disubsidi pemerintah pusat berada di Danau Toba Provinsi Sumut yaitu, Tigaras – Simanindo, Muara – Nainggolan, dan di Provinsi Riau, Dumai – Tanjung Kapal (P. Rupat)

Tabel 4.15. Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan

No.	Jenis Pengoperasian	Jumlah
a.	Lintasan komersil	42
b.	Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah	134
c.	Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah	3
Jumlah yang beroperasi		179

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

1) Lintasan Komersil

Pada tahun 2012, lintas komersil sebanyak 42 lintas penyeberangan dengan rincian status yaitu : Antar Propinsi (AP) sebanyak 10 lintas dan Dalam Propinsi (DP) sebanyak 32 lintas.

Tabel 4.16. Lintas Penyeberangan Komersil

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Jarak Lintas (mil)	Klas. Lintas	SK Penetapan Lintas
1	Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	17	DP	-
2	Labuhan Haji (NAD) - Sinabang (P. Semeulue,NAD)	80	DP	KM 82 Thn 1998
3	Ajibata (Parapat, Sumut) - Tomok (D. Toba, Sumut)	1	DP	KM 64 Thn 1989
4	Sibolga (Sumut) – Gng. Sitoli (P. Nias, Sumut)	86	DP	KM 64 Thn 1989
5	Sungai Selari (Riau) – Bengkalis (P. Bengkalis, Riau)	8	DP	KM 25 Thn 1991
6	T. Pungkur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	10	DP	KM 64 Thn 1989
7	Palembang (Sumsel) – Muntok (P. Bangka, Babel)	90	AP	KM 43 Thn 1998
8	Merak (Jabar) – Bakauheni (Lampung)	15	AP	KM 64 Thn 1989
9	Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim)	2.5	DP	KM 64 Thn 1989
10	Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (P. Bali, Bali)	6	DP	KM 64 Thn 1989
11	Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar)	80	DP	KM 64 Thn 1989
12	Pontianak Kota (Kalbar) - Siantan (Kalbar)	0.8	DP	KM 49 Thn 1994

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Jarak Lintas (mil)	Klas. Lintas	SK Penetapan Lintas
13	Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	6	DP	KM 49 Thn 1994
14	Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)	6	DP	KM 64 Thn 1989
15	Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Mamuju (Sulbar)	184	AP	KM 49 Thn 1994
16	Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku)	148	AP	KM 25 Thn 1991
17	Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	95	AP	KM 25 Thn 1991
18	Bira (Sulsel) – Pamatata (P. Selayar, Sulsel)	16	DP	KM 64 Thn 1989
19	Bajoe (Sulsel) – Kolaka (Sultra)	85	AP	KM 64 Thn 1989
20	Siwa (Sulsel) - Lasusua (Sultra)	52	AP	KM 13 Thn 1997
21	Bira (Sulsel) – Tondasi (Sultra)	-	AP	KM 71 Thn 2004
22	Torobulu (Sultra) – Tampo (P. Muna, Sultra)	16	DP	KM 64 Thn 1989
23	Wara (P. Muna, Sultra) – Bau –Bau (P. Buton, Sultra)	2	DP	KM 64 Thn 1989
24	Padang Bai (P. Bali, Bali) – Lembar (P. Lombok, NTB)	38	AP	KM 64 Thn 1989
25	Kayangan (P. Lombok, NTB) – Pototano (P. Sumbawa, NTB)	12	DP	KM 64 Thn 1989
26	Sape (P. Sumbawa, NTB) – Lab. Bajo (P. Flores, NTT)	75	AP	KM 64 Thn 1989
27	Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	40	DP	KM 64 Thn 1989
28	Kupang (P.Timor, NTT) – Seba (P. Sabu, NTT)	-	DP	KM 64 Thn 1989
29	Kupang (P.Timor, NTT) – Larantuka (P. Flores, NTT)	120	DP	KM 64 Thn 1989
30	Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	137	DP	KM 64 Thn 1989
31	Kupang (P. Timor, NTT) - Aimere (P. Flores, NTT)	150	DP	KM 82 Thn 1998
32	Bastiong (Malut) - Sidangole (Malut)	12	DP	KM 64 Thn 1989
33	Bastiong (P. Ternate, Maluku) - Rum (Tidore, Maluku)	16	DP	KM 82 Thn 1998
34	Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku)	0.5	DP	KM 64 Thn 1989
35	Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)	13	DP	KM 64 Thn 1989
36	Tual (P. Kei Kecil, Maluku) – Elat (P. Kei Besar, Maluku)	26	DP	KM 25 Thn 1991
37	Bastiong – Sofifi	14	DP	-
38	Galala – Namlea	85	DP	KM 49 Thn 194
39	Sibolga – Teluk Dalam	99	DP	-
40	Gresik – Bawean	80	DP	
41	Kalianget – Kangean	96	DP	
42	Gunaksa – Nusa Penida		DP	

Keterangan : AP : Antar Propinsi, DP : Dalam Propinsi

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

2) Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah

Lintas penyeberangan perintis pada tahun 2012 sejumlah 137 lintas penyeberangan. Lintas penyeberangan perintis ini merupakan lintas Antar Propinsi (AP) dan Dalam Propinsi (DP). Pada tahun 2012 terdapat 18 lintas penyeberangan perintis antar Propinsi dan 119 lintas perintis Dalam Propinsi.

Tabel 4.17. Lintas Penyeberangan Bersubsidi

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
1	SINGKIL - P. BANYAK	DP	Subsidi Pemerintah
2	SINGKIL - SINABANG	DP	Subsidi Pemerintah
3	SINGKIL - G. SITOLI	AP	Subsidi Pemerintah
4	ULEE LHEU - LAMTENG	DP	Subsidi Pemerintah
5	PADANG - SIKAKAP	DP	Subsidi Pemerintah
6	PADANG - SIBERUT	DP	Subsidi Pemerintah
7	BENGKULU - ENGGANO	DP	Subsidi Pemerintah
8	KARIMUN - MENGKAPAN	AP	Subsidi Pemerintah
9	KARIMUN - BATAM	DP	Subsidi Pemerintah
10	TANJUNG PINANG - KARIMUN	DP	Subsidi Pemerintah
11	DABO - KUALA TUNGKAL	AP	Subsidi Pemerintah
12	SADAI - TANJUNG RU	DP	Subsidi Pemerintah
13	MANGGAR - KETAPANG	AP	Subsidi Pemerintah
14	JEPARA - KARIMUN JAWA	DP	Subsidi Pemerintah
15	TANJUNG HARAPAN - TELUK KALONG	DP	Subsidi Pemerintah
16	PARIT SAREM - SUNGAI NIPAH	DP	Subsidi Pemerintah
17	RASAU JAYA - PINANG LUAR	DP	Subsidi Pemerintah
18	BALIKPAPAN - TAIPA	AP	Subsidi Pemerintah
19	TOLI TOLI - TARAKAN	AP	Subsidi Pemerintah
20	TOLI TOLI - AMURANG	AP	Subsidi Pemerintah
21	TARAKAN - NUNUKAN	DP	Subsidi Pemerintah
22	BATULICIN - GARONGKONG	AP	Subsidi Pemerintah
23	BITUNG - MELONGUANE	DP	Subsidi Pemerintah
24	BITUNG - PANANARU	DP	Subsidi Pemerintah
25	PANANARU - MARORE	DP	Subsidi Pemerintah
26	LUWUK - SALAKAN	DP	Subsidi Pemerintah
27	GORONTALO - WAKAI	AP	Subsidi Pemerintah
28	WAKAI – AMPANA	DP	Subsidi Pemerintah
29	MARISSA - DOLONG	AP	Subsidi Pemerintah
30	DOLONG - AMPANA	DP	Subsidi Pemerintah
31	MARISSA – PARIGI	AP	Subsidi Pemerintah
32	LUWUK - BANGGAI	DP	Subsidi Pemerintah
33	BANGGAI - BOBONG	AP	Subsidi Pemerintah
34	BANGGAI - BONITON	DP	Subsidi Pemerintah
35	BIRA - PATTUMBUKAN	DP	Subsidi Pemerintah
36	PATTUMBUKAN - JAMPEA	DP	Subsidi Pemerintah
37	JAMPEA - LABUHAN BAJO	AP	Subsidi Pemerintah
38	JAMPEA - MAROPOKOT	AP	Subsidi Pemerintah
39	KENDARI - LENGGARA	DP	Subsidi Pemerintah
40	BAU BAU - DONGKALA	DP	Subsidi Pemerintah
41	DONGKALA - MAWASANGKA	DP	Subsidi Pemerintah
42	KAMARU – WANCI	DP	Subsidi Pemerintah
43	WAINGAPU - SABU	DP	Subsidi Pemerintah
44	WAINGAPU - AIMERE	DP	Subsidi Pemerintah
45	LARANTUKA - WAIWERANG	DP	Subsidi Pemerintah
46	WAIWERANG - LEWOLEBA	DP	Subsidi Pemerintah
47	LEWOLEBA - BARANUSA	DP	Subsidi Pemerintah
48	BARANUSA - KALABAHI	DP	Subsidi Pemerintah

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
49	KALABAHI - TELUK GURITA	DP	Subsidi Pemerintah
50	KUPANG – ENDE	DP	Subsidi Pemerintah
51	ENDE – WAINGAPU	DP	Subsidi Pemerintah
52	TOLEHU - KAILOLO	DP	Subsidi Pemerintah
53	KAILOLO - UMIPUTIH	DP	Subsidi Pemerintah
54	UMIPUTIH - WAILEY	DP	Subsidi Pemerintah
55	TULEHU - UMIPUTIH	DP	Subsidi Pemerintah
56	UMIPUTIH - NALAHIA	DP	Subsidi Pemerintah
57	NALAHIA - AMAHAI	DP	Subsidi Pemerintah
58	GALALA - AMBALAU	DP	Subsidi Pemerintah
59	AMBALAUW - WAMSISI	DP	Subsidi Pemerintah
60	WAMSISI - NAMROLE	DP	Subsidi Pemerintah
61	NAMROLE - LEKSULA	DP	Subsidi Pemerintah
62	TUAL – LARAT	DP	Subsidi Pemerintah
63	TUAL – KUR	DP	Subsidi Pemerintah
64	TUAL – DOBO	DP	Subsidi Pemerintah
65	DOBO – BENJINA	DP	Subsidi Pemerintah
66	DOBO - TABARFANE	DP	Subsidi Pemerintah
67	TUAL – TAYANDO	DP	Subsidi Pemerintah
68	TAYANDO – TAM	DP	Subsidi Pemerintah
69	TAYANDO – KUR	DP	Subsidi Pemerintah
70	TOBELO - DARUBA	DP	Subsidi Pemerintah
71	TOBELO – SUBAIM	DP	Subsidi Pemerintah
72	BASTIONG - BATANG 2	DP	Subsidi Pemerintah
73	BASTIONG - BABANG	DP	Subsidi Pemerintah
74	GOTO – SOFIFI	DP	Subsidi Pemerintah
75	MANGOLE - BOBONG	DP	Subsidi Pemerintah
76	SANANA - MANGOLE	DP	Subsidi Pemerintah
77	BOBONG – OBI	DP	Subsidi Pemerintah
78	OBI – SANANA	DP	Subsidi Pemerintah
79	SORONG - KABARAI	DP	Subsidi Pemerintah
80	SORONG - LINMALAS	DP	Subsidi Pemerintah
81	LINMALAS - WAIGAMA	DP	Subsidi Pemerintah
82	SORONG – FOLLEY	DP	Subsidi Pemerintah
83	FOLLEY - HARAPAN JAYA	DP	Subsidi Pemerintah
84	SORONG - TEMINABUAN	DP	Subsidi Pemerintah
85	TEMINABUAN - INANWATAN	DP	Subsidi Pemerintah
86	SORONG - SAUSOPOR	DP	Subsidi Pemerintah
87	SORONG – WEJIM	DP	Subsidi Pemerintah
88	WEJIM – KOFIAU	DP	Subsidi Pemerintah
89	SORONG – PATANI	AP	Subsidi Pemerintah
90	PATANI – WEDA	DP	Subsidi Pemerintah
91	SORONG – WAISAI	DP	Subsidi Pemerintah
92	BIAK – SERUI	DP	Subsidi Pemerintah
93	SERUI – WAREN	DP	Subsidi Pemerintah
94	WAREN - NABIRE	DP	Subsidi Pemerintah
95	BIAK - MANOKWARI	AP	Subsidi Pemerintah
96	MANOKWARI - NUMFOR	AP	Subsidi Pemerintah
97	MANOKWARI - WASIOR	AP	Subsidi Pemerintah

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
98	WASIOR - NABIRE	DP	Subsidi Pemerintah
99	MERAUKE - KIMAM	DP	Subsidi Pemerintah
100	KIMAM - BADE	DP	Subsidi Pemerintah
101	BADE - GATENTIRI	DP	Subsidi Pemerintah
102	GATENTIRI - TANAH MERAH	DP	Subsidi Pemerintah
103	BADE - MOOR	DP	Subsidi Pemerintah
104	MOOR - KEPI	DP	Subsidi Pemerintah
105	MERAUKE - ATSY	DP	Subsidi Pemerintah
106	ATSY - AGATS	DP	Subsidi Pemerintah
107	AGATS - POMAKO	DP	Subsidi Pemerintah
108	AGATS - SAWAERMA	DP	Subsidi Pemerintah
109	MELONGUANE - MUSI	DP	Subsidi Pemerintah
110	MELONGUANE - MANGARAN	DP	Subsidi Pemerintah
111	BITUNG - TAGULANDANG	DP	Subsidi Pemerintah
112	TAGULANDANG - SIAU	DP	Subsidi Pemerintah
113	TAGULANDANG - BIARO	DP	Subsidi Pemerintah
114	BITUNG - LEMBEH	DP	Subsidi Pemerintah
115	KUPANG - LEWOLEBA	DP	Subsidi Pemerintah
116	TELUK GURITA - P. WETAR (ILWAKI)	AP	Subsidi Pemerintah
117	P. WETAR (ILWAKI) - P. KISAR	DP	Subsidi Pemerintah
118	NAMLEA - SANANA	DP	Subsidi Pemerintah
119	LANGGUR - ELAT	DP	Subsidi Pemerintah
120	LANGGUR - HOLAT	DP	Subsidi Pemerintah
121	LANGGUR - WEDUAR	DP	Subsidi Pemerintah
122	SAUMLAKI - ADAUT	DP	Subsidi Pemerintah
123	ADAUT - LATUWURUNG	DP	Subsidi Pemerintah
124	SAUMLAKI - SEIRA	DP	Subsidi Pemerintah
125	SEIRA - WUNLAH	DP	Subsidi Pemerintah
126	WUNLAH - LARAT	DP	Subsidi Pemerintah
127	LARAT - YARU	DP	Subsidi Pemerintah
128	YARU - MOMAR	DP	Subsidi Pemerintah
129	TEPA - LETI	DP	Subsidi Pemerintah
130	LETI - ILWAKI	DP	Subsidi Pemerintah
131	KISAR - MOA	DP	Subsidi Pemerintah
132	MOA - LAKOR	DP	Subsidi Pemerintah
133	JANGKAR - KALIANGET	DP	Subsidi Pemerintah
134	JANGKAR - P. SAPUDI	DP	Subsidi Pemerintah
135	MUARA – NAINGGOLAN	DP	Subsidi Pemerintah Daerah
136	TIGARAS – SIMANINDO	DP	Subsidi Pemerintah Daerah
137	DUMAI – TJ. KAPAL (P. RUPAT)	DP	Subsidi Pemerintah Daerah

Keterangan : AP : Antar Propinsi, DP : Dalam Propinsi,

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

b. Pelabuhan Penyeberangan

Sampai tahun 2012, jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi sebanyak 144 pelabuhan. Pelabuhan tersebut diselenggarakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebanyak 34 pelabuhan, Dinas

Perhubungan sebanyak 106 pelabuhan, UPT Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 4 pelabuhan (pada tahun 2012 dioperasikan pelabuhan Marisa yang dikelola UPT Gorontalo), sebanyak 19 pelabuhan belum beroperasi (11 pelabuhan dikelola pemda dan 8 pelabuhan baru selesai tahun 2012). Dan sisanya sebanyak 40 pelabuhan belum ditetapkan karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

Tabel 4.18. Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan

No.	Penyelenggara	Jumlah
1.	PT. ASDP Persero	34
2.	Dinas Perhubungan	106
3.	UPT Ditjen Perhubungan Darat	4
4.	Dalam Proses Pembangunan	40
Jumlah		183

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2011

Tabel 4.19. Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP

No.	Pelabuhan	Lintas yang dilayani	No.	Pelabuhan	Lintas yang dilayani
1.	Bakauheni	Merak-Bakauheni	18.	Batu Licin	Batulicin-Tj. Serdang
2.	Merak	Idem	19.	Tj. Serdang	Idem
3.	Ujung	Ujung-Kamal	20.	Penajam	Penajam-Kariangau
4.	Kamal	Idem	21.	Bitung	Bitung-Ternate
					Bitung – Melonguane
					Bitung – Siau
					Bitung – P. Lembeh
					Bitung – Pananaru
					Bitung – Batang Dua
5.	Ketapang	Ketapang-Gilimanuk	22.	Pagimana	Pagimana-Gorontalo
6.	Gilimanuk	Idem	23.	Mamuju	Mamuju-Balikpapan
7.	Padangbai	Padangbai-Lembar	24.	Bajoe	BajoE-Kolaka
8.	Lembar	Idem	25.	Kolaka	Idem
9.	Khayangan	Kahayangan-Pototano	26.	Bastiong	Bastiong-Sidangole
10.	Pototano	Idem	27.	Sidangole	Idem
11.	Sape	Sape – Labuhan Bajo	28.	Bastiong	Bastiong-Rum
12.	Labuhan Bajo	Idem	29.	Pokka	Pokka-Galala
13.	Larantuka	Larantuka-Kalabahi	30.	Galala	Idem
14.	Rote	Kupang-Rote	31.	Hunimua	Hunimua-Waipirit
15.	Bolok	Kupang-Rote Dsn	32.	Waipirit	Idem
16.	Telaga Pungkur	Telaga Pungkur-Tj. Uban	33.	Namlea	Namlea-Galala
17.	Tj. Uban	Idem	34.	Muntok	Palembang-Muntok

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

c. Jaringan Pelayanan

Jaringan pelayanan transportasi sungai dan danau meliputi jaringan pelayanan angkutan orang dan pelayanan angkutan barang. Kedua jaringan tersebut dapat dilakukan dalam trayek tetap, trayek tidak tetap dan tidak dalam trayek.

Tabel 4.20. Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau

No.	Propinsi	Sungai			Danau	
		Jml	Pjg (km)	Navigable	Jml	Luas (km2)
1	NAD	10	1.749	660	1	490
2	Sumatera Utara	20	1.796	1.269	1	1.250
3	Sumatera Barat	-	-	-	4	391
4	Riau	21	2.747	2.082	-	-
5	Jambi	19	3.858	2.578	1	50
6	Sumatera Selatan	35	4.856	3.771	1	122
7	Lampung	8	695	530	-	-
8	Jawa Barat	1	122	22	3	205
9	Jawa Tengah	-	-	-	-	600
10	Jawa Timur	1	500	39	-	-
11	Bali	-	-	-	2	190
12	Kalimantan Barat	11	1.227	760	-	-
13	Kalimantan Selatan	15	1.737	1.223	1	40
14	Kalimantan Timur	17	4.089	2.786	3	390
15	Kalimantan Tengah	21	3.108	2.285	-	-
16	Sulawesi Selatan	9	548	222	4	120
17	Sulawesi Tengah	-	-	-	1	34
18	Sulawesi Tenggara	2	175	87	-	-
19	Sulawesi Utara	-	-	-	2	33
20	Irian Jaya	24	734	4.940	3	372
	Jumlah	214	34.342	23.255	27	3.737

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

d. Dermaga Sungai dan Danau.

Jumlah dermaga sungai dan danau lebih kurang 99 buah, yang terdiri dari beberapa jenis; seperti dermaga kayu, dermaga beton, dermaga ponton dan kombinasi dari kayu dan ponton, kombinasi beton dan ponton. Disamping itu masih banyak terdapat dermaga kecil sebagai tempat singgah.

3. Perkembangan Sarana LLASDP

Sampai dengan tahun 2012 terdapat 267 unit kapal SDP yang beroperasi dengan jenis kapal yaitu Ro-Ro, LCT, dan kapal cepat penumpang.

Tabel 4.21. Jumlah Kapal SDP yang beroperasi

No.	Jenis Kapal	Jumlah
1.	Kapal Ro-Ro	254
2.	Kapal LCT	13
3.	Kapal cepat penumpang	-
4.	Kapal penumpang/bus air	-
Jumlah		267

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

Sedangkan untuk jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi berdasarkan kepemilikan sebanyak 267 unit, pemilik/operatornya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), swasta dan Pemda.

Tabel 4.22. Jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi berdasarkan
Kepemilikan

No.	Pemilik/operator	Jumlah
1.	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	106
2.	Kerja Sama Operasi (KSO)	-
3.	Swasta	151
4.	Pemda	10
Jumlah		267

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

Subsidi kapal perintis pada tahun 2012 sebesar Rp. 130.209.639.599,- dengan jumlah lintas penyeberangan sebanyak 109 (yang dikelola Satker Keperintisan Pusat) lintas dan total frekuensi penyeberangan 26.280 trip.

Tabel 4.23. Subsidi Kapal Perintis Tahun 2005-2012

Tahun	Jumlah Lintas Penyeberangan Perintis	Total Frekuensi Penyeberangan	Nilai Subsidi (Juta Rupiah)
2005	64	23.022	46.334
2006	62	14.160	73.208
2007	72	26.491	85.799
2008	72	24.869	85.303
2009	82	28.779	139.874
2010	112	25,737	138.900
2011	115	25,737	157.852
2012	135	26.280	175.995

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

Tabel 4.24. Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai

No.	Jenis	Isi Kotor (m ³)	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (km/j)
			Brg(ton)	Penump.			
1	Speed Boat	1-5	-	<14	0,35-0,60	<200	<40
2	Long Boat	5-10	-	<60	0,40-0,60	<85	20-30
3	Bis Air	<200	<10	<200	0,80-1,50	75-100	12-15
4	Klotok	<15	<5	-	0,50-0,65	5-15	7-12
5	Truk Air	15-200	20-70	-	1,00-1,60	22-33	7-8
6	Barge Steel Hull	50-190	50-150	-	1,00-1,60	-	-
7	Barge (tiung)	20-50	15-35	-	1,00-1,60	-	-
8	Tug Boat	20-50	-	-	0,80-1,40	<100	30-60

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

Tabel 4.25. Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan

No.	Kapal RO-RO	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (knot)
		Kndrn	Penump.			
1	75 GT	4	50	1,9	350	10
2	200 GT	5	50	1,9	700	10
3	300 GT	15	80	2,0	1200	7
4	500 GT	19	202	2,15	1600	11
5	600 GT	21	214	2,15	1650	10
6	1500 GT	32	390	2,8	3200	15

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

4. Perkembangan Kinerja Angkutan Penyeberangan

Tabel 4.26. Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2005 – 2012

Tahun	Penumpang (orang)	Kend R-4 (unit)	Kend R-2 (unit)	Barang (ton)
2005	26.501.889	6.272.819	4.719.152	25.187.160
2006	27.829.666	5.738.196	5.037.859	25.422.005
2007	40.557.832	5.720.396	6.154.104	31.936.937
2008	46.926.166	6.850.114	7.374.333	41.079.174
2009	54.585.603	6.224.249	6.799.229	41.802.355
2010	54.858.531	6.255.370	6.833.225	211.453
2011	53.853.016	7.261.611	5.677.922	96.997
2011	53.853.016	7.261.611	5.677.922	96.997

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2012

5. Kegiatan-kegiatan Strategis

Kegiatan - kegiatan Strategis yang dilaksanakan pada tahun 2012 di bidang LLASDP antara lain :

- Pengembangan Sistem Data Base Transportasi Sungai di Sungai Indragiri (Provinsi Riau)

- b. Prastudi Kelayakan Lintas Penyeberangan :
- c. Tual – Kaimana – Dobo
- d. Manokwari – Wasior – Nabire
- e. Kangean – Bali Utara
- f. Studi Potensi Transportasi Sungai dan Danau di Propinsi Jambi dan Sumatera Barat
- g. Prastudi Kelayakan Transportasi Sungai dan Danau di Danau Sentarum
- h. Kajian Pelayanan Transportasi Penyeberangan di Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Maluku
- i. Studi Desain Kapal :
 - 1) Review Desain Prototype Kapal Penyeberangan Penumpang Tipe 750 GT dan 1000GT
 - 2) Desain Prototype Kapal Penyeberangan Tipe Katamaran ukuran 300 GT, 600GT dan 750 GT
 - 3) Desain Prototype Kapal Sungai Tipe LCT 150 GT dan 200 GT
 - 4) Review Desain Bus Air Kapasitas 50 dan 20 Penumpang
 - 5) Desain Prototype Kapal Sungai Tipe Katamaran
- j. Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang RO-RO baik yang disatker pusat dan daerah :
 - 1) Satker Pusat
 - a) Pemb. Kapal 750 GT Lts Cadangan Kapal Perintis KTI di Maluku & Papua Thp II (Termasuk supervisi)
 - b) Pembangunan kapal 750 GT lintas Wahai - Waigama (p. Misol) - Sorong (Termasuk Supervisi) Tahap II
 - c) Pembangunan kapal 750 GT lintas Dobo - Timika (Termasuk Supervisi) Tahap II
 - d) Pembangunan kapal 300 GT lintas Ancam - Tarakan (Termasuk Supervisi) Tahap II
 - e) Pembangunan kapal 750 GT lintas Cadangan Kapal Perintis KTI di NTT (Termasuk Supervisi) Tahap II
 - f) Pembangunan kapal 5000 GT lintas Merak - Bakaheuni (Termasuk Supervisi) Tahap I

- g) Pembangunan kapal 5000 GT lintas Bakaheuni - Merak(Termasuk Supervisi) Tahap I
- h) Pembangunan kapal 5000 GT lintas Merak - Bakaheuni (Termasuk Supervisi) Lanjutan
- i) Pembangunan kapal 750 GT lintas Paciran/Lamongan - Bawean (Termasuk Supervisi) Tahap I
- j) Pembangunan kapal 500 GT lintas Wahai - Fak-fak (Termasuk Supervisi) Tahap I
- k) Pembangunan kapal 750 GT lintas Toli Toli - Amurang (Termasuk Supervisi) Tahap I
- l) Pengadaan Kapal Kerja Pembersih Alur Prop. Kalimantan Tengah (termasuk supervisi) Tahap II selesai
- m) Pemb. Kapal Tunda / Tug Boat Lintas Merak - Bakauheni (termasuk supervisi) Tahap II
- n) Pemb. Kapal Tunda / Tug Boat Lintas Bahauheni - Merak (termasuk supervisi) Tahap I
- o) Pemb. Kapal Penyeb. Sungai 75 GT Prop. Papua (kabupaten Asmat) Tahap II termasuk supervisi
- p) Pembangunan Bus Air Kapasitas 20 Penumpang di Propinsi Riau
- q) Pembangunan Bus Air Kapasitas 50 Penumpang di Propinsi Sulawesi Tengah
- 2) Satker Daerah
 - a) Pengadaan Kapal Penyeb. Perintis 500 GT Lintas. Padang - Mentawai Thp II
 - b) Pengadaan Bus Air Kapasitas 20 orang di Sumatera Barat
 - c) Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeb. Perintis 500 GT Lintas Mengkapan - Kampung Balak Thp II (Termasuk Supervisi)
 - d) Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeb. Perintis 300 GT Lintas Karimun - Selat Belia Thp II (Termasuk Supervisi)
 - e) Pengadaan Kapal Kerja Speed Boat 1 x 100 PK di Jawa Barat
 - f) Pemb. Kapal Penyeberangan Lintas Kupang - Ende 750 GT Thp II

- g) Pemb. Kapal Penyeberangan Lintas Aimere-Waingapu 750 GT Tahap I
- h) Pengadaan Kapal Patroli (Speed Boat) di Kalimantan Selatan
- i) Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lintas Melong - Marampit - Miangas 600 GT Thp II
- j) Pembangunan dan Pengadaan Bis Air untuk Lintas Danau Tondano di Kab. Minahasa 20 Pnp
- k) Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lintas Kolonedale - Baturube 300 GT THP II (selesai)
- l) Lanjutan Pembangunan Kapal Sultan Murhum
- m) Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeb. Perintis 500 GT Lintas Air Nanang-Geser-Gorom-Kasui Thp II (selesai)
- n) Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeb. Perintis 500 GT Lintas Ambon-Ambalau-Wamsisi-Namrole-Leksula Thp II (selesai)

Tabel 4. 27. Kapal yang selesai dibangun di Tahun 2012

No	KAPAL PENYEBERANGAN	GT	SATKER	LINTASAN
1	KMP MANTA II	300	Dit.LLASDP	Ancam - Tarakan
2	KMP. TATIHU	750	Dit.LLASDP	Wahai - Waigama (P. Misol)
3	KMP RANAKA	750	Dit.LLASDP	Dobo -Timika
4	KMP. SARDINELA	750	Dit.LLASDP	Cadangan Kapal Perintis KTI - NTT
5	KMP. WAYANGAN	750	Dit.LLASDP	Cadangan Kapal Perintis KTI - Maluku & Papua
6	KM. PARI	75	LLASDP Malut	Tobelo - Daruba
7	KMP TELUK TOLO	300	LLASDP Sulteng	Kolonedale - Baturube
8	KMP.KUNDUR	300	LLASDP Kepri	Karimun - Selat Belia (P. Kundur)
9	KMP BOBOT MASIWANG	500	LLASDP Maluku	Air Nanang - Geser - Gorom - Kasui
10	KMP TANJUNG KABAT	500	LLASDP Maluku	Ambon - Ambalau - Wamsisi - Namrole - Leksula
11	KMP BAREMBANG	500	LLASDP Riau	Mengkapan - Kampung Balak
12	KMP GAMBOLO	500	LLASDP Sumbar	Padang - Mentawai
13	KMP WATU NAPATO	600	LLASDP Sulut	Melong - Marampit - Miangas
14	KMP SIRUNG	750	LLASDP NTT	Kupang - Ende
15	KMP SIRET	75	Dit.LLASDP	Kapal Penyeberangan Sungai Prov. Papua
16	TB MERAK	-	Dit.LLASDP	Tugboat Merak - Bakauheni
17	KPA DANUM BARESI	-	Dit. LLASDP	Kapal Pembersih Alur Prov. Kalteng



KMP Bobot Masiwang



KMP Sardinela



KMP Tatihu

- k. Pembangunan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan :
 - 1) Pembangunan dermaga penyeberangan baru di 15 lokasi;
 - 2) Pembangunan dermaga penyeberangan lanjutan di 38 lokasi;
 - 3) Rehabilitasi dan peningkatan prasarana transportasi SDP di 30 lokasi.
 - 4) Pembangunan Dermaga Penyeberangan VI Merak Tahap I dan Dermaga VI Bakauheni Tahap I
 - 5) Amdal Dermaga Penyeberangan Merak VI dan Bakauheni VI
 - 6) Pembangunan Gangway dan Elevated Side Ramp Dermaga V Merak Tahap II
 - 7) Pembangunan Gangway dan Elevated Side Ramp Dermaga V Bakauheni Tahap II
 - 8) Pembangunan Breakwater di Pelabuhan Penyeberangan Merak Tahap IV
 - 9) DED dan Uji Model Breakwater Sisi Selatan Pelabuhan Penyeberangan Merak
 - 10) DED Breakwater dan Bangunan Pengatur Arus di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
- l. Studi Kebijakan di Bidang Lalu Lintas Sungai Danau Dan Penyeberangan :
 - 1) Penyusunan Pedoman Detail Desain Rambu Sungai Danau serta SBNP Penyeberangan
 - 2) SID Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Dobo
 - 3) SID Pengerukan Sungai Terusan Hantipan di Kalimantan Tengah
 - 4) SID Pengerukan Sungai di Kampung Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara
 - 5) Survey Penetapan Kelas Alur Pelayaran Sungai Martapura Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar
 - 6) AMDAL Pengerukan Alur Pelayaran di Kariangau
- m. Studi Kebijakan di Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan :
 - 1) Kajian Optimalisasi Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis di Propinsi NTT
 - 2) Penyusunan Standarisasi Fasilitas Bagi Pengguna Khusus Angkutan Penyeberangan
 - 3) Pembangunan Sistem Informasi Persetujuan Kapal Penyeberangan

- 4) Penyusunan Pedoman Teknis Standarisasi Pengusahaan Angkutan Penyeberangan
- 5) Kajian Optimalisasi Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis di Propinsi Sulut
- 6) Kajian Optimalisasi Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis di Propinsi Maluku dan Maluku Utara
- 7) Penyusunan Prosedur Pengangkutan dan Penanganan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Pelabuhan Penyeberangan
- 8) Kajian Penerapan Diferensiasi Tarif Pada Waktu Operasi Kapal Penyeberangan
- 9) Kajian Indeks Konversi Untuk Perhitungan Tarif Jasa Angkutan Penyeberangan

6. Permasalahan yang Dihadapi

- a. Belum adanya data yang lengkap mengenai peta alur transportasi sungai dan sarana dan prasarana transportasi sungai.
- b. Masih belum tersusunnya data mengenai sarana prasarana transportasi penyeberangan.
- c. Keterseidaan data transportasi SDP di beberapa daerah belum tersimpan dengan baik.
- d. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring Transportasi SDP di daerah kurang optimal.
- e. Belum adanya peraturan pelaksana tentang penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.
- f. Belum adanya pedoman dalam pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- g. Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
- h. Belum adanya Kriteria Kelas Alur kelas Alur-Pelayaran Sungai dan Danau;

- i. Pemerintah Daerah Perlu menyiapkan kualifikasi SDM yang memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengikuti diklat dan mendapat manfaat secara efektif.

7. Upaya Pemecahan

- a. Menyusun data base transportasi sungai di Indonesia.
- b. Menyusun sistem informasi monitoring dan pengawasan pelabuhan penyeberangan.
- c. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengembangan transportasi SDP.
- d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam perumusan peraturan pelaksana tentang penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.
- e. Merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- f. Merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
- g. Merumuskan Kriteria Klas Alur Pelayaran sungai dan danau dalam bentuk study.
- h. Pemerintah menyelenggarakan orientasi di bidang teknis operasional LLASDP, menginformasikan kegiatan tersebut kepada seluruh Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten dan Kota.

C. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

1. Umum

Transportasi merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan baik pada tataran nasional, wilayah Propinsi/regional maupun pada kawasan perkotaan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 Juta Jiwa dan tingkat mobilitas yang tinggi, maka sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting khususnya di daerah perkotaan. Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi

dibandingkan daerah pedesaan, sejalan dengan itu juga menimbulkan permasalahan transportasi. Pertumbuhan kebutuhan transportasi sering tidak sejalan dengan penyediaan prasarana yang akan memperbesar masalah seperti dapat kita lihat dari kecepatan perjalanan di daerah perkotaan semakin lama semakin turun.

Pertumbuhan penduduk rata-rata tahunan di wilayah perkotaan antara tahun 1990-2010 diperkirakan dapat mencapai 3%-6%, angka tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional per tahun yang dibawah 2%. Keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mempunyai dampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Ditinjau dari besarnya jumlah penduduk kota-kota di Indonesia, maka terdapat 11 (sebelas) kota yang masuk kriteria kota raya dan 9 (sembilan) kota besar yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang. Dari kesembilan kota raya tersebut yang memiliki penduduk lebih dari 1 (satu) juta orang penduduk yaitu : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Tangerang, dan Makassar, Depok, Bekasi dan Bogor.

Dari sekian banyak kota besar tersebut ternyata transportasi melalui jalan merupakan moda transportasi yang paling dominan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Oleh karena itu masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota besar di Indonesia adalah kemacetan, kesemrawutan dan kecelakaan lalu lintas, serta pencemaran udara. Penanganan masalah transportasi perkotaan yang kurang hati-hati dan kurang terpadu, tidak akan dapat memecahkan masalah tersebut secara tepat dan baik. Hal ini justru cenderung menimbulkan permasalahan baru yang dapat menambah kompleks serta rumitnya permasalahan transportasi yang telah ada.

Akumulasi dari kondisi yang ada terhadap sektor transportasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, mengakibatkan kemacetan pada hampir semua ruas jalan dalam kota. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Dit. BSTP pada tahun 2011, terhadap kinerja ruas jalan nasional di kawasan Jabodetabek dapat digambarkan bahwa rata-rata kecepatan kendaraan berkisar antara 22 km/jam - 29 km/jam dengan rasio antara jumlah kendaraan terhadap kapasitas

jalan berkisar antara 0,62- 0,69 dengan tingkat pelayanan rata-rata adalah C dan E pada jam puncak pagi dan sore. Kondisi ini berada jauh di bawah standar pelayanan jalan yang diinginkan untuk jalan nasional yang seharusnya Tingkat Pelayanan A atau B.

Tabel 4.28. Kinerja Ruas Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek

	V/C		KECEPATAN	
	PAGI	SORE	PAGI	SORE
MAX	0.97	0.95	46.7	52.7
MIN	0.35	0.46	6.4	4.7
RERATA	0.69	0.62	28.5	22.7

Sumber : Dit. BSTP - Ditjen Hubdat

Tabel 4.29. Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek

Tingkat Pelayanan	PAGI	SORE
A	0%	0%
B	16%	5%
C	32%	18%
D	18%	15%
E	24%	33%
F	11%	28%

Sumber : Dit. BSTP - Ditjen Hubdat

Dari aspek penyediaan angkutan umum, kondisi angkutan umum yang ada secara kualitas cenderung menurun. Hal ini diperparah oleh semakin maraknya ojek sepeda motor sebagai pilihan yang mudah dan cepat bagi pengguna jalan yang berdampak pada turunnya jumlah penumpang angkutan umum dan pada akhirnya mempengaruhi produktifitas angkutan umum yang ada.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan umum, Dit. BSTP secara bertahap melakukan bimbingan dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan angkutan umum, khususnya di daerah-daerah perkotaan.

Dalam upaya pembinaan angkutan umum tidak dalam trayek di kawasan perkotaan (taksi), secara bertahap Dit. BSTP melakukan inventarisasi dan penyusunan standar pelayanan minimal untuk angkutan taksi. Hal yang sama juga dilakukan terhadap keberadaan angkutan pemadu moda yang berada pada bandara-bandara internasional yang ada saat ini.

Tabel 4.30. Data Pelayanan Taksi Di Kawasan Perkotaan

No	Propinsi	Jumlah Perusahaan	Jumlah Armada Beroperasi
1	Aceh	3	54
2	Sumatera Utara	11	860
3	Sumatera Barat	16	530
4	Sumatera Selatan	3	114
5	Riau	7	472
6	Kepulauan Riau	26	2.938
7	Jambi	2	30
8	Bengkulu	0	0
9	Lampung	2	15
10	Bangka Belitung	1	14
11	DKI Jakarta	47	26.667
12	Jawa Barat	63	9.743
13	Banten	35	7.197
14	Jawa Tengah	15	1.664
15	Di. Yogyakarta	17	768
16	Jawa Timur	44	4.972
17	Bali	9	2.705
18	Nusa Tenggara Barat	4	401
19	Nusa Tenggara Timur	1	50
20	Kalimantan Barat	7	121
21	Kalimantan Tengah	3	43
22	Kalimantan Selatan	3	199
23	Kalimantan Timur	7	443
24	Sulawesi Utara	5	210
25	Sulawesi Tengah	2	55
26	Sulawesi Selatan	13	1.434
27	Sulawesi Tenggara	3	219
28	Sulawesi Barat	0	0
29	Gorontalo	0	0
30	Maluku	1	49
31	Maluku Utara	N/A	50
32	Papua Barat	N/A	0
33	Papua Timur	0	0
JUMLAH		342	62.017

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat, 2012

Tabel 4.31. Rekapitulasi Data Angkutan Pemandu Moda, Angkutan Jalan Dengan Angkutan Udara Posisi 31 Desember 2012

No	Lokasi / Propinsi	Trayek		Waktu Operasi		Jarak	Waktu	Jumlah	Tarif	Operator
		No	Asal - Tujuan (PP)	Awal	Akhir		Tempuh	Bus	(Rupiah)	
1	Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, NAD	1	Bandara Sultan Iskandar Muda - Jl.Merdeka - SP.Surabaya-Jl.T.Hasan Dek-Jl.Daud Bereuh-SP.Lima-Jl.Safiatudin	08.00	13.00	17 Km	30-45 Menit	3	10.000	Damri
						Jumlah		3		
2	Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, DKI Jakarta	1	Bandara Soekarno Hatta - Blok M	04.00	23.00	38 Km	60 Menit	15	20.000	Damri
		2	Bandara Soekarno Hatta - Gambir	04.00	23.00	37 Km	45 Menit	20	20.000	Damri
		3	Bandara Soekarno Hatta –Rawamangun	03.00	23.00	46 Km	60 Menit	15	20.000	Damri
		4	Bandara Soekarno Hatta -Pasar Minggu	04.00	23.00	40 Km	75 Menit	14	20.000	Damri
		5	Bandara Soekarno Hatta –Cikarang	04.00	20.00	80 Km	120 Menit	6	20.000	Damri
		6	Bandara Soekarno Hatta –Bogor	02.00	22.00	87 Km	120 Menit	17	30.000	Damri
		7	Bandara Soekarno Hatta –Bekasi	02.00	23.00	57 Km	90 Menit	22	20.000	Damri
		8	Bandara Soekarno Hatta – Priok	04.00	23.00	43 Km	45 Menit	4	20.000	Damri
		9	Bandara Soekarno Hatta – Lebak Bulus	04.00	23.00	40 Km	85 Menit	8	20.000	Damri
		10	Bandara Soekarno Hatta - Kp. Rambutan	04.00	23.00	60 Km	90 Menit	16	20.000	Damri
		11	Bandara Soekarno Hatta - Serang	05.00	18.00	43 Km	90 Menit	3	28.000	Damri
		12	Bandara Soekarno Hatta –Kemayoran	05.00	23.00	37 Km	45 Menit	4	20.000	Damri
		13	Bandara Soekarno Hatta –Mangga Dua	05.00	23.00	37 Km	45 Menit	4	25.000	Damri
		14	Bandara Soekarno Hatta -Komplek Batununggal	02.00	24.00	197 Km	180 Menit	40	75.000	Prima Jasa
						Jumlah		188		
3	Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur	1	Bandara Juanda - Terminal Purabaya – Tanjung Perak	05.00	21.00	30 Km	90 Menit	17	15.000	Damri
						Jumlah		17		

4	Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat	1	Bandara Int. Minangkabau- Lap. Imam Bonjol	06.00	21.00	28 Km	40 Menit	3	18.000	Damri
		2	Bandara Int. Minangkabau- Simpang lubuk begalung	07.00	22.00	33 Km	60 Menit	4	18.000	Tranex
						Jumlah		7		
5	Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau	1	Bandara Hang Nadim - Jodoh	07.00	21.00	29 Km	30-45 Menit	2	15.000	Damri
		2	Bandara Hang Nadim – Batu Aji (Pasar Fanindo)	07.00	21.00	32 Km	30-45 Menit	2	15.000	Damri
						Jumlah		4		
6	Bandara Sultan Hasanudin, Makasar, Sulawesi Selatan	1	Bandara Sultan Hasanudin- Lap.Karebosi	08.00	21.30	23 Km	90 Menit	3	20.000	Damri
						Jumlah		3		
7	Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, DIY	1	Bandara Adi Sucipto - Kebumen	03.00	21.00	110 Km	180 Menit	4	55.000	Damri
		2	Bandara Adi Sucipto - Magelang	04.00	21.00	55 Km	90 Menit	6	35.000	Damri
						Jumlah		10		
8	Bandara Sultan Thaha Jambi, Provinsi Jambi	1	Bandara Sultan Thaha - Sudirman					2	20.000	Damri
		2	Bandara Sultan Thaha – Simpang Tempino					2	20.000	Damri
		3	Bandara Sultan Thaha – Simpang Mendalo					2	25.000	Damri
		4	Bandara Sultan Thaha – Perumahan Auduri					2	30.000	Damri
						Jumlah		8		
9	Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Riau	1	Bandara Depati Amir - Muntok					3	60.000	Damri
		2	Bandara Depati Amir – Jebus					2	55.000	Damri
		3	Bandara Depati Amir – Toboali					1	50.000	Damri
		4	Bandara Depati Amir - Belinyu					1	55.000	Damri
						Jumlah		7		

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat, 2012

Selain permasalahan lalu lintas dan angkutan, permasalahan lingkungan juga menjadi fokus kegiatan Dit. BSTP. Direktorat BSTP mendukung Program gasifikasi angkutan umum secara terencana dan berkelanjutan terus dilakukan dalam rangka mendukung program langit biru dan transportasi ramah lingkungan.

Memperhatikan kondisi yang ada di lapangan, pembinaan transportasi perkotaan terus dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis dibidang penyusunan rencana induk pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan di perkotaan (*master plan* transportasi/*grand design* transportasi), penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan program gasifikasi, pengembangan *bus rapid transit*, bantuan bus sekolah/pelajar/mahasiswa, penataan fasilitas pemadu moda dan program-program lain yang bersifat insidental.

2. Perkembangan Prasarana Angkutan Perkotaan

Prasarana angkutan umum yang dikembangkan saat ini belum menunjukkan hal yang signifikan. Dari DKI Jakarta, Batam, Bogor, Bandung, Pekanbaru, Manado, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Gorontalo, Sarbagita dan Palembang; hanya DKI Jakarta saja yang telah mempunyai jalur khusus untuk bus (*busway*) sedangkan yang lainnya masih menggunakan jalur bersama (*mixuser*) .

Untuk mengantisipasi hal ini, mengacu pada Undang-Undang No: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus dilengkapi dengan rencana pengembangan jaringan angkutan umum. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan kota-kota besar dan metropolitan untuk menyediakan angkutan umum massal.

Untuk data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 4.32 dan 4.33

Tabel 4.32 Data Prasarana Tahun 2012

No	Kota	Jumlah	Luas Kota	Luas Jalan	Road Ratio	Panjang Jalan	Panjang Jalan	Panjang Jalan	Jumlah Rambu	Jumlah LPJ	Jml
		Penduduk	(km2)	(km2)	(%)	(km2)	Yang dilengkapi Trotoar (km)	Yang dilengkapi Marka (km)	Yang Terpasang	yang Terpasang	SRP
KOTA METROPOLITAN											
1	SURABAYA	2,987,456	32,637	15,187	0.23	3,546	2,124	2,837	17,730	37,233	35
2	BANDUNG	2,296,848	21,035	11,660	0.21	2,453	1,471	1,962	12,265	25,756	38
3	MEDAN	2,067,288	27,054	16,185	0.18	2,981	1,352	2,385	14,905	31,300	30
4	PALEMBANG	1,607,673	40,564	17,987	0,13	747.9	83.63	15.85	1332	10504	24
5	MAKASAR	1,253,656	29,275	16,655	0.11	1,765	865	1,412	8,825	18,532	37
6	SEMARANG	1,419,478	35,286	18,309	0.21	3,769	1,341	3,015	18,845	39,574	38
7	BOGOR	1,945,000	18,605	10,725	0,13	1,356	632	1,085	6.780	14,238	14
KOTA BESAR											
8	PADANG	764,800	28,935	11,557	0,09	1,086	533	869	5,430	11,403	11
9	PEKANBARU	666,902	23,262	12,466	0,19	2,342	1,621	1,874	11,710	24,591	23
10	SAMARINDA	650,000	15,635	7,654	0,7	535,5	35.086	70.00	1043	1815	21
11	TASIKMALAYA	589,597	17,158	8,656	0,11	985	234	788	4,925	10,342	10
12	SURAKARTA	565,415	44.014	11,567	0.4	675.8	124.41	41	849	16,169	13
13	BALIKPAPAN	601,392	15,030	7,132	0,6	257	27,78	153,775	650	4.854	15
14	YOGYAKARTA	419,164	13,250	6,874	0,16	1,098	412	878	5,490	11,529	11
15	SIDOARJO	211.881	14,506	13,567	0,11	1,453	422	1,162	7,265	15,256	15
16	BUKIT TINGGI	485,324	12,524	6,134	0,16	980	522	784	4,900	10,290	10
KOTA SEDANG											
17	CIMAHI	463,448	7,210	3,178	0,25	780	210	624	3,900	8,190	8
18	JAMBI	300,000	6,089	2,978	0,22	653	125	522	3,265	6,856	7
19	SENGKANG	143,223	1,039	1,601	0,08	124	61	99	620	1,302	1
20	SUKABUMI	206,288	18,278	9,408	0,01	603	369	482	3,015	6,331	8
21	BANYUWANGI	274.542	7,250	3,981	0,09	378	121	302	1,890	3,969	6
22	PANGKAJENE	271.709	7,125	2,684	0,09	237	117	190	1,185	2,488	7

23	DUMAI	263.199	685	5,375	0,03	136	51	109	680	1,428	10
24	BANGLI	254.053	1,654	1,587	0,06	98	44	78	490	1,029	11
25	MADIUN	249.643	6,170	1,753	0,12	212	102	170	1,060	2,226	6
26	T. AGUNG	239.201	7,160	1,175	0,14	159	62	127	759	1,669	7
27	TANJUNG BALAI	236.943	6,460	1,241	0,07	89	69	71	445	934	8
28	BADUNG	221.055	8,109	1,559	0,15	230	124	184	1,150	2,415	9
29	LUMAJANG	206.288	10,021	2,574	0,14	359	153	287	1,759	3,769	18
30	PAREPARE	121.161	9.910	2488.8	0,22	311.1	199.6	212.465	237	1612	9
31	CIAMIS	186.623	8,765	2,312	0,20	459	223	367	2,295	4,819	11
32	WATAMPONE	183,251	11,235	1,534	0,21	320	164	256	1,600	3,360	6
33	MOJOKERTO	181.999	6,693	1,356	0,20	270	121	216	1,350	2,835	7
KOTA KECIL											
34	SNG.MINASA	79,643	9,316	1,125	0,12	130	64	104	650	1,365	13
35	SRAGEN	98,461	7,475	1,213	0,21	260	127	208	1,300	2,730	15
36	SINGARAJA	84,613	9,885	1,435	0,12	178	134	142	890	1,869	8
37	STABAT	76,315	10,096	1,512	0,08	117	52	93	585	1,228	9
38	PARIAMAN	64,587	6,336	1,344	0,06	81	35	64	405	850	7
39	AMLAPURA	76,312	7,448	1,234	0,13	158	78	126	790	1,659	6
40	KY.AGUNG	46,579	12,145	946	0,06	54	26	43	270	567	5
41	MAGETAN	54,612	7,434	1,157	0,11	129	63	103	645	1,354	12
42	TABANAN	76,431	6,124	1,778	0,13	233	154	186	1,165	2,446	22
43	SEMARAPURA	84,615	7,546	1,434	0,23	328	211	262	715	3,444	11
44	GNG KIDUL	64,315	6,968	1,453	0,10	143	134	114	475	1,501	9
45	POLEWALI	46,312	8,916	1,586	0,06	95	59	76	660	997	10
46	M. BUNGO	84,516	9,189	2,453	0,05	132	63	105	425	1,386	19
47	AMUNTAI	64,312	13,673	1,232	0,07	85	41	68	1,055	892	12
48	LUBUK PAKAM	64,315	12,901	1,397	0,15	211	106	168	956	2,215	13
49	PD.PANJANG	52,018	8,398	1,536	0,1776	60.4	34	14	491	1,953	14
50	PINRANG	51,324	5,942	2,132	0,04	76	39	60	380	798	8
51	MUARA ENIM	63,142	14,613	4,768	0,02	85	41	68	425	892	10
52	PELAIHARI	54,312	10,072	3,434	0,02	66	37	52	330	693	9

53	KEPANJEN	91,324	12,625	4,987	0,05	241	125	192	1,205	2,530	19
54	TANJUNG	61,542	9,323	1,546	0,06	89	42	71	445	934	8
55	GIANYAR	85,134	8,987	3354	0,09	287	143	229	653	3,013	8
56	BATU SANGKAR	76,132	7,473	1467	0,07	109	62	87	341	1,144	10

Sumber : Dit. BSTP (WTN 2012)

Keterangan : LPJ : Lampu Penerangan Jalan
SRP : Satuan Ruang Parkir

Tabel 4.33. Fasilitas Pendukung LLAJ dan Persimpangan dengan APILL

No	Kota	Jumlah Halte	Jumlah Fasilitas Penyebrangan	Jumlah Simpang	Jumlah APILL
KOTA METROPOLITAN					
1	SURABAYA	53	192	133	124
2	BANDUNG	35	165	352	182
3	MEDAN	36	312	239	43
4	PALEMBANG	34	46	57	42
5	MAKASSAR	70	324	80	46
6	SEMARANG	57	77	94	105
KOTA BESAR					
7	BOGOR	35	126	271	37
8	PADANG	65	127	269	38
9	PEKANBARU	45	138	212	27
10	SAMARINDA	24	154	316	33
11	TASIKMALAYA	13	85	304	25
12	SURAKARTA	42	71	134	68
13	BALIKPAPAN	39	121	344	24
KOTA SEDANG					
14	CIMAHI	15	49	411	17
15	JAMBI	28	148	63	26
16	YOGYAKARTA	3	195	280	76
17	SENGKANG	3	9	50	22
18	SUKABUMI	8	185	167	84
19	BANYUWANGI	8	80	113	9
20	PANGKAJENE	3	6	203	14
21	BINJAI	11	56	55	35
22	DUMAI	37	32	13	6
23	BANGLI	3	31	22	2
24	MADIUN	10	183	74	42
25	TULUNG AGUNG	11	74	70	23
26	TANJUNG BALAI	7	13	26	4
27	BADUNG	13	112	53	16
28	LUMAJANG	9	29	20	11
29	SIDOARJO	7	39	25	15
30	PAREPARE	7	47	93	14
31	CIAMIS	6	20	59	10
32	WATAMPONE	5	7	49	7
33	MOJOKERTO	2	20	21	18
34	BUKIT TINGGI	21	85	99	15
35	SUNGGUMINASA	3	15	97	7
36	SRAGEN	12	20	32	23
37	SINGARAJA	10	49	21	21
38	STABAT	10	16	63	3
39	PARIAMAN	1	75	58	8
40	AMLAPURA	12	80	98	4

41	KAYU AGUNG	4	9	78	4
42	MAGETAN	2	43	64	5
43	TABANAN	16	66	70	9
44	SAMARAPURA	5	54	108	7
45	GUNUNG KIDUL	20	54	71	11
46	POLEWALI	16	25	113	113
47	MUARA BUNGO	3	14	175	113
48	AMUNTAI	0	14	68	1
49	LUBUK PAKAM	7	44	41	15
50	PADANGPANJANG	11	41	19	62
51	PINRANG	1	4	55	2
52	MUARA ENIM	0	13	71	3
53	PELAIHARI	1	33	15	1
54	KEPANJEN	6	22	35	10
55	TANJUNG	7	20	37	8
56	GIANYAR	2	26	62	8

Sumber : Dit. BSTP (WTN 2012)

Tabel 4.34. Data Lalu Lintas Tahun 2012

No	Kota	V/C Ratio Rata - Rata	Kecepatan Rata-rata (km/jam)
KOTA METROPOLITAN (10 RUAS JALAN)			
1	SURABAYA	0.83	21
2	BANDUNG	0.85	14.3
3	MEDAN	0.76	23.4
4	PALEMBANG	0.61	28.54
5	MAKASSAR	0.73	24.06
6	SEMARANG	0.72	27
7	BOGOR	0.86	15.32
KOTA BESAR (8 RUAS JALAN)			
1	PADANG	0.63	30.9
2	PEKANBARU	0.64	31.13
3	SAMARINDA	0.64	20,8
4	TASIKMALAYA	0.61	30
5	SURAKARTA	0.68	18.25
6	BALIKPAPAN	0.67	47,43
7	CIMAHI	0.75	25.5
8	JAMBI	0.68	31
9	YOGYAKARTA	0.86	31.34
KOTA SEDANG (6 RUAS JALAN)			
1	SENGKANG	0.53	63.2
2	SUKABUMI	0.66	23
3	BANYUWANGI	0.54	60
4	PANGKAJENE	0.6	73
5	BINJAI	0.69	40
6	DUMAI	0.6	50

7	BANGLI	0.76	45
8	MADIUN	0.53	27.48
9	TANJUNG BALAI	0.24	41.09
10	BADUNG	0.85	30.18
11	LUMAJANG	0.49	37.8
12	SIDOARJO	0.67	50
13	PAREPARE	0.62	20
14	MOJOKERTO	0.53	60
15	BUKIT TINGGI	0.63	37.07
KOTA KECIL (4 RUAS JALAN)			
1	SUNGGUMINASA	0.61	35
2	TULUNG AGUNG	0.55	54.54
3	CIAMIS	0.45	40
4	WATAMPONE	0.67	55
5	SRAGEN	0.53	45
6	SINGARAJA	0.63	25
7	STABAT	0.76	40
8	PARIAMAN	0.19	33.33
9	AMLAPURA	0.63	62
10	KAYU AGUNG	0.68	30
11	MAGETAN	0.59	35
12	TABANAN	0.62	40
13	SAMARAPURA	0.62	41
14	GUNUNG KIDUL	0.65	45
15	POLEWALI	0.85	36.67
16	MUARA BUNGO	0.42	30
17	AMUNTAI	0.27	49
18	LUBUK PAKAM	0.34	30.2
19	PADANGPANJANG	0.43	25.62
20	PINRANG	0.41	63.2
21	MUARA ENIM	0.52	28.7
22	PELAIHARI	0.38	45
23	KEPANJEN	0.49	40
24	TANJUNG	0.49	41.5
25	GIANYAR	0.67	37.22

Sumber Dit. BSTP (WTN 2012)

3. Perkembangan Sarana Angkutan Perkotaan

Pada tahun 2012 jumlah angkutan umum perkotaan dan taksi masih sama seperti pada tahun 2011. Untuk angkutan kota, jumlah yang paling tinggi yaitu pada mobil penumpang umum (MPU) sebesar 203.828 unit untuk mobil penumpang umum tersebut mengalami penurunan di bandingkan tahun 2009 karena kelayakan kendaraan tersebut sedangkan untuk taksi hanya sebesar 58.512 unit mengalami peningkatan dari tahun 2009.

Tabel 4.35. Jumlah Angkutan Umum

No.	Pelayanan	Jenis Kendaraan				Total
		BB	BS	BK	MPU	
1	Angkutan Kota	26.402	37.868	89.224	203.828	357.322
2	Taksi	-	-	-	62.017	62.017
Total		26.402	37.868	89.224	262.340	415.834

Sumber : Dit. BSTP. Ditjen Hubdat 2011

Kondisi saat ini menunjukkan jumlah angkutan umum di Indonesia semakin menurun akibat penurunan tersebut dikarenakan kendaraan yang sudah semakin tua atau umur kendaraan yang sudah tidak layak, dan pelayanannya dirasakan masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena penataan dan perencanaan angkutan umum diperkotaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan prasarana yang ada.

Dalam peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan dan untuk mengatasi permasalahan diatas telah diterapkan kebijakan dengan orientasi pada pengembangan angkutan umum dengan strategi :

- Mengembangkan angkutan umum yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat yang cepat, tepat, aman, nyaman, murah (CTANM) dan berkelanjutan.
- Menjamin kepastian dan keberlangsungan untuk pelayanan angkutan umum perkotaan dimasa yang akan datang.

Program yang dilakukan oleh Dit. BSTP yang berkaitan dengan pengembangan sarana angkutan perkotaan antara lain :

- Pengadaan Bus Sedang AC (Bus Bantuan Pelajar/Mahasiswa/Perkotaan) 45 unit;
- Pengadaan Bus Sedang AC (Bantuan untuk Pengembangan Angkutan Umum Masal/BRT) 10 unit;

Untuk penetapan Bus 2012 tersebut belum dapat di bagikan ke daerah dikarenakan masih dalam proses pengkajian oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

4. Kinerja Angkutan Perkotaan

Unjuk kerja pelayanan angkutan perkotaan dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya:

- Ketepatan waktu pelayanan
- Kepastian akan pelayanan

- c. Tarif yang ditetapkan terjangkau oleh pengguna jasa angkutan umum;
- d. Tingkat keamanan dan kenyamanan dalam angkutan terjaga;

Saat ini sedang disusun draft Peretauran Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan.

5. Kegiatan-kegiatan Strategis

- a. Pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT)
Kegiatan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan angkutan umum wilayah perkotaan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama/MOU yang masing-masing instansi telah menyepakati kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- b. Program bantuan Angkutan sekolah/pelajar dan mahasiswa
- c. Penerapan *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Medan dan Kota Yogyakarta
- d. Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki (dalam penyusunan desain) di Kota Bogor

6. Permasalahan yang dihadapi

- a. Masih kurangnya pedoman/panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
- b. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
- c. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
- d. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi.
- e. Kemacetan lalu lintas;
- f. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
- g. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

7. Upaya yang dilakukan

Dari hambatan-hambatan di atas maka untuk menanggulangnya dilakukan berbagai upaya yaitu :

- a. Penyelenggaraan kegiatan konsolidasi kepada Pemerintah Daerah tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna mengetahui perkembangan serta permasalahan transportasi yang terjadi pada masing-

masing Kota/Kabupaten lebih mendalam dan mensosialisasikan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam pengembangan transportasi yang lebih baik,

- b. Bimbingan teknis dan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah baik pada bidang penyusunan master plan, lalu lintas, angkutan maupun lingkungan;
- c. Pembinaan transportasi perkotaan melalui Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota;
- d. Penyusunan Grand Desain Perkotaan, dengan beberapa kota sebagai Kota Percontohan.
- e. Penyempurnaan peraturan penrundangan-undangan dibidang transportasi perkotaan.

D. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

1. Umum

Di dunia setiap tahun sekitar 1 juta orang meninggal dan lebih 50 juta orang luka karena kecelakaan lalu lintas jalan, 75% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang. Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi berkisar US \$ 500 milyar untuk negara-negara berkembang dan transisi atau diperkirakan sekitar 2% - 4% dari GDP.

Pada tahun 2020 WHO memperkirakan jumlah kematian di seluruh dunia akibat kecelakaan lalu lintas naik menjadi 2,3 juta setiap tahun memempati urutan ketiga setelah *Ischemic heart disease* dan *Unipolar major depression* (Krug, 2000).

Dengan adanya fenomena seperti itu maka PBB mengeluarkan suatu resolusi No. A/58/289 tanggal 14 April 2004 yang berisi agar setiap Negara anggota meningkatkan perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan jalan, sehingga mampu mengurangi tingkat kecelakaan.

Kemudian juga Resolusi Sekjen PBB A/Res/60/5 tanggal 1 Desember 2005 lebih menekankan kembali agar setiap negara mengambil langkah-langkah spesifik seperti: Peningkatan penggunaan helm dan sabuk keselamatan, *Drink and Drive* dan setiap negara wajib membentuk "*a National Lead Agency on Road Safety*". Untuk menindak lanjutinya maka diadakan 4th *United Nations Road*

Safety Collaboration Meeting pada hari ketiga membahas *The First United Nation Global Road Safety Week* yang dilaksanakan bulan April 2007.

Pada tanggal 2 Maret tahun 2010, PBB mengeluarkan resolusi A/64/255 tentang *Decade of Road Safety 2011-2020*, dimana dalam resolusi itu diharapkan tiap Negara anggota PBB memberikan atau membuat Rencana aksi keselamatan transportasi Darat. Pendekatan yang digunakan dalam penanganan itu adalah lima pilar yang terdiri atas:

1. Manajemen Keselamatan (*Road safety Management*);
2. Jalan yang Berkeselamatan (*Safer Road*);
3. Kendaraan yang Berkeselamatan (*Safer Vehicle*);
4. Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (*Safer People*);
5. Penanganan Korban Paska Kecelakaan (*Post Crash*).

Kondisi keselamatan jalan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, diantara negara-negara di ASEAN, Indonesia dianggap masih kurang serius menangani keselamatan jalan, hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah dan tingkat fatalitas kecelakaan di Indonesia. Beberapa hal yang mendasar yang belum tertangani dengan baik adalah sistem pendataan kecelakaan, *road safety audit*, sistem pengendalian dan pengawasan juga masih adanya persepsi yang keliru dari masyarakat dan pengambil keputusan yaitu :

1. Persepsi selama ini beranggapan bahwa penanganan peningkatan keselamatan transportasi jalan merupakan *cost* (biaya), persepsi ini keliru hendaknya program-program peningkatan keselamatan transportasi ini sudah dapat dianggap sebagai suatu investasi yang menguntungkan.
2. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan nasib seseorang artinya bahwa kecelakaan seolah-olah tidak dapat diubah.

Kedua persepsi ini perlu mendapat perhatian dan dapat dipublikasikan secara luas dikalangan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap peningkatan keselamatan di semua kalangan.

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang langka, acak dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh suatu situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Sedangkan salah satu penyebab kecelakaan adalah manusia (90%) dari penyebab yang lain.

Ada beberapa perubahan cara pandang tentang keselamatan yang bersifat lebih baik, diantaranya adalah :

1. Kecelakaan Lalu lintas adalah buah dari kelalaian dan ketidaksiapan.
2. Penurunan peluang kecelakaan adalah peluang bisnis.
3. Upaya perwujudan keselamatan transportasi darat adalah investasi

Dengan semakin banyaknya penawaran dan mudahnya dalam memiliki kendaraan bermotor serta tingkat mobilitas yang mengharuskan mempunyai kendaraan bermotor. Dengan adanya faktor-faktor tersebut maka kepemilikan kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2. Perkembangan Kecelakaan Transportasi Jalan

1) Kelakaan Lalu Lintas di Jalan

Tabel 4.36. Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotor Berdasar Tingkat Kecelakaan Tahun 2007-2012

No	Jenis	Satuan	T A H U N						PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Kecelakaan	Kecelakaan	48,508	59,164	62,960	109,319	109,776	109,038	20.35
2	Kendaraan yang terlibat	Unit	84,090	130,062	212,308	212,011	239,257*	239,257*	26.12
3	Korban								
	Meninggal Dunia	orang	16,548	20,188	19,979	31,234	31,185	25,131	11.55
	Luka Berat	orang	20,180	23,440	23,469	46,851	36,767	36,710	18.85
	Luka Ringan	orang	45,860	55,772	62,936	97,702	108,811	118,158	21.93
4	Total Korban	orang	82,588	99,400	106,384	175,787	176,763	179,999	19.00
5	Kerugian	Milyar Rp.	10,329	13,121	13,628	14,316	8,609	22,218	30.83

Sumber : POLRI, Tahun 2006-2008

* Data Internal Ditjen Perhubungan Darat, Tahun 2011 – 2012



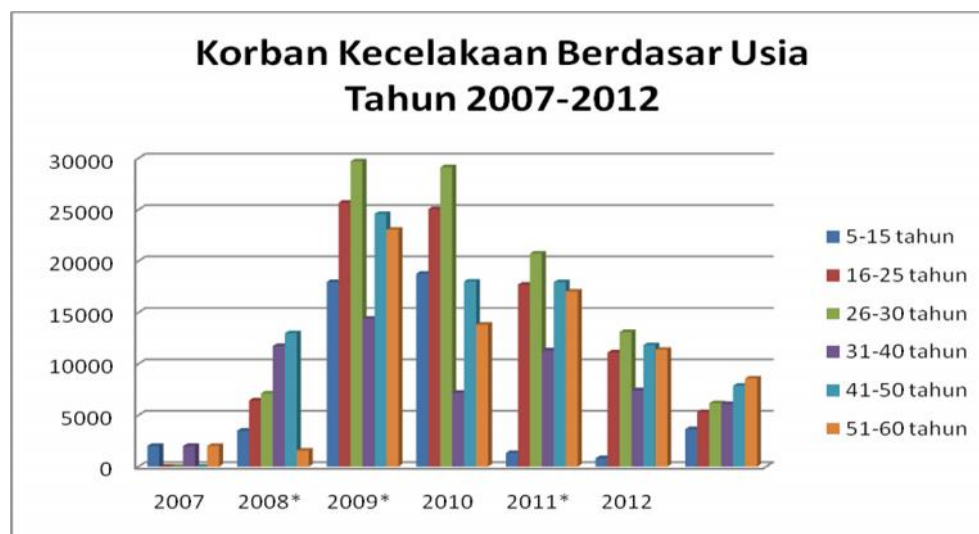
Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas

Tabel 4.37. Jumlah Korban Kecelakaan Berdasarkan Usia

No	Jenis	Satuan	TAHUN						PERTUMBUHAN RATA-RATA %
			2007	2008*	2009*	2010	2011*	2012	
1	5-15 tahun	orang	3,492	6,437	7,114	11,747	12,968	1,563	8.57
2	16-25 tahun	orang	17,963	25,681	29,703	14,396	24,583	23,052	11.32
3	26-30 tahun	orang	18,776	25,064	29,123	7,198	18,012	13,816	18.14
4	31-40 tahun	orang	1,338	17,712	20,728	11,315	17,942	17,034	23.02
5	41-50 tahun	orang	826	11,115	13,095	7,434	11,826	11,376	23.95
6	51-60 tahun	orang	3,645	5,318	6,163	6,091	7,871	8,585	16.46
	Jumlah	orang	65,516	91,327	105,926	58,181	93,202	89,493	10.64

Sumber : POLRI, Tahun 2007

Data Internal Ditjen Perhubungan Darat, Tahun 2008-2012



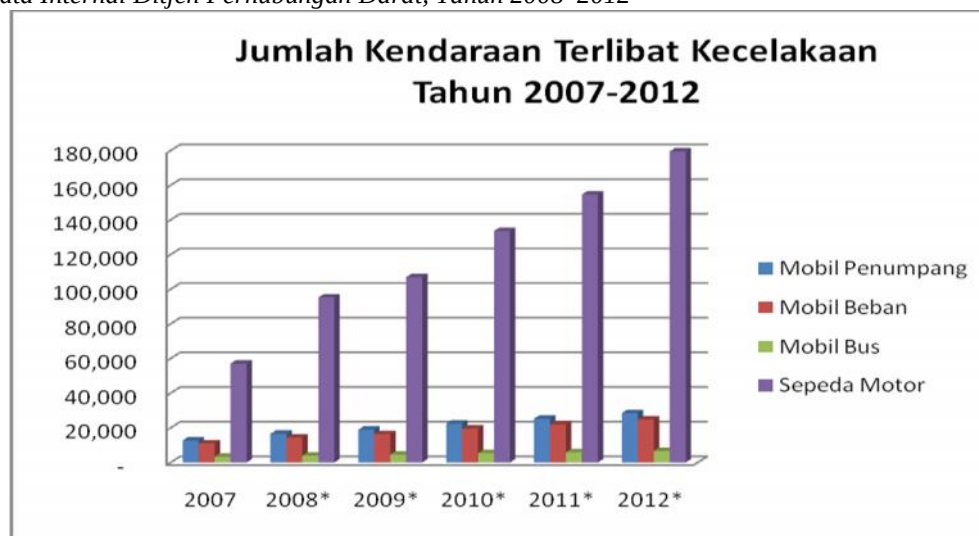
Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Usia

Tabel 4.38. Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenis Kendaraan
Tahun 2007-2012

No	Uraian	Satuan	TAHUN						PERTUMBUHAN RATA-RATA %
			2007	2008*	2009*	2010*	2011*	2012*	
1	Mobil PNP	Unit	12,726	16,552	18,939	22,474	25,245	28,475	15.90
2	Mobil Beban	Unit	11,006	14,328	16,363	19,590	21,951	24,793	16.07
3	Mobil Bus	Unit	3,278	3,973	4,586	5,374	5,881	6,601	13.94
4	Spd. Motor	Unit	57,080	95,209	106,969	133,568	154,636	179,534	21.56
	Jumlah	Unit	84,090	130,062	146,857	181,006	207,714	239,403	20.01

Sumber : POLRI, Tahun 2007

Data Internal Ditjen Perhubungan Darat, Tahun 2008-2012



Gambar 4.3. Grafik Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kendaraan yang Terlibat

Tabel 4.39. Korban Kecelakaan berdasar Tingkat Pendidikan Korban Tahun 2007-2012

No	Jenis	Satuan	TAHUN						PERTUMBUHAN RATA-RATA %
			2007	2008*	2009*	2010*	2011*	2012*	
1	Sekolah Dasar	Orang	7,689	9,911	11,736	14,416	16,429	18,632	17.64
2	Sekolah Menengah Pertama	Orang	15,362	2,033	2,365	28,779	3,255	36,582	282.09
3	Sekolah Menengah Atas	Orang	31,488	55,754	62,835	77,302	87,702	103,209	21.79
4	Perguruan Tinggi	Orang	4,765	5,603	6,788	8,502	9,781	10,967	16.97
	Jumlah		59,304	91,598	105,009	128,999	146,462	16,939	-0.80

Sumber : POLRI, Tahun 2007

Data Internal Ditjen Perhubungan Darat, Tahun 2008-2012



Gambar 4.4. Grafik Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pendidikan

3. Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat

a. Workshop Manajemen Keselamatan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Workshop Manajemen Keselamatan Transportasi Darat adalah agar instansi – instansi stake holder yang bertanggung jawab masalah Keselamatan transportasi darat di Indonesia memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap Undang-undang No.22 tahun 2009 yang baru tersebut. Selain itu, melalui kegiatan ini, wawasan dan pengetahuan Dinas Perhubungan di daerah dapat lebih diperkaya lagi terutama wawasan yang berhubungan dengan kebijakan keselamatan transportasi jalan dalam rangka penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dan meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi lain seperti Kepolisian, Bina Marga, dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan keselamatan jalan.

Workshop Manajemen Keselamatan dilaksanakan di 3 Provinsi yaitu Jambi, Kalimantan Tengah dan Gorontalo. Workshop Manajemen Keselamatan di Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2012 bertempat di Hotel Abadi dan Convention Centre Jambi, dengan jumlah peserta sebanyak 85 orang. Materi workshop disampaikan oleh Kabag Kepegawaian dan Umum, Setditjen Hubdat, Dirlantas Polda Jambi, Dinas Bina Marga Provinsi Jambi dan Universitas Jambi.

Workshop Manajemen Keselamatan di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2012 bertempat di Hotel Luwansa, Palangkaraya, dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang. Materi workshop disampaikan oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Balai LLAJSDP, dan Akademisi dari Universitas Palangkaraya.

b. Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan adalah agar Dinas Perhubungan di Indonesia khususnya pada propinsi yang telah membentuk Unit Pengkaji Keselamatan memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap Undang-undang No.22 tahun 2009 yang baru tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur.

Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 25-26 April 2012 bertempat di Hotel Equator dengan jumlah peserta 33 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, M.Sc dari Universitas Maranatha Bandung, DR Zudhy Irawan dari UGM, dan Dewa Made Priyantha Wedagama, ST, MT, MSc, Ph.D dari Universitas Udayana Bali.

Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Juni 2012 bertempat di Hotel The Daira Jayakarta dengan jumlah peserta 30 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, M.Sc dari Universitas Maranatha Bandung, Prof.Ir.Sigit Priyanto,M.Sc.,Ph.D dari UGM, dan Prof. Dr. Ir. Hj. Erika Buchari, MSc dari Universitas Sriwijaya Palembang.

Peningkatan Kapasitas Bidang Pengkajian Keselamatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juli 2012 bertempat di Hotel Sasando dengan jumlah peserta 22 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Dr. Aine Kusumawati dari Institut Teknologi Bandung, Prof.Ir.Sigit Priyanto,M.Sc.,Ph.D dari UGM, dan Dewa Made Priyantha Wedagama, ST, MT, MSc, Ph.D dari Universitas Udayana Bali.

c. Pembinaan Teknis Pembentukan Forum LLAJ

Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ dimana didalam pasal 13 menjelaskan tentang :

- 2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi;
- 3) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (3) terdiri atas unsure Pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat;
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atur dengan Peraturan Pemerintah;

Maksud dan tujuan dilakukannya Kegiatan Pembinaan Teknis Pembentukan Forum LLAJ adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pengetahuan kepada Dinas Perhubungan di seluruh provinsi di Indonesia terkait pembentukan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar instansi di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Kegiatan Pembinaan Teknis Pembentukan Forum LLAJ ini dilakukan di 3 Kota antara lain Solo, Medan, dan Banjarmasin.

Pembinaan Teknis Pembentukan Forum LLAJ di Solo (Jawa Tengah) dilaksanakan pada tanggal 5 April 2012 bertempat di Hotel Lor In dengan jumlah peserta 80 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Drs. Suripno MsTR dan DR. Ir. Heru Sutomo, MSc, Direktur Keselamatan Transportasi Darat dan Bappenas.

Pembinaan Teknis Pembentukan Forum LLAJ di Medan (Sumatera Utara) dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 bertempat di Asean

International dengan jumlah peserta 80 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Drs. Soeripno Ms.Tr, Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Kabag Kepegawaian dan Umum dan Perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Pembinaan Teknis Pembentukan Forum LLAJ di Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 bertempat di Hotel Banjarmasin Internasional dengan jumlah peserta 80 orang. Materi kegiatan disampaikan oleh Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Darat, Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Monitoring Evaluasi Manajemen Keselamatan

Tujuan kegiatan monitoring evaluasi manajemen keselamatan ini adalah untuk mengetahui potret kinerja keselamatan transportasi jalan di tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia.

Sasaran dari kegiatan ini adalah seberapa jauh upaya yang telah dilakukan oleh daerah (Pemda) provinsi, kabupaten dan kota dalam masalah keselamatan transportasi jalan yang dijabarkan dalam lima pilar kinerja.

Monitoring Evaluasi Manajemen Keselamatan diharapkan menghasilkan:

- 1) Skor Kinerja keselamatan transportasi jalan tiap provinsi, kabupaten dan kota;
- 2) Mengkatagorian kinerja keselamatan transportasi jalan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota;
- 3) Meranking kinerja keselamatan transportasi jalan.

Monitoring Kinerja keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2012 dilakukan di 13 Provinsi, antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Gorontalo, Maluku dan Papua dan 185 Kota/Kabupaten.

e. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2012

Maksud dilakukannya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat adalah untuk memilih dan menyeleksi juara pelajar pelopor keselamatan transportasi jalan dari kalangan generasi muda yang dapat membantu sosialisasi keselamatan di masyarakat sehingga tercapai peningkatan keselamatan transportasi jalan di Indonesia.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran pelajar dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan mengurangi resiko akibat kesalahan teknis/kendaraan dengan cara memberdayakan seluruh komponen yang terkait dengan keselamatan lalu lintas;
- 2) Memberikan reward atas prestasi tertib berlalu lintas dan kepedulian yang tinggi terhadap upaya menjaga keselamatan di jalan;
- 3) Membangun kesadaran generasi muda untuk berperilaku tertib berlalu lintas;
- 4) Membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini atas dasar kesadaran pribadi dan tanggung jawab moral untuk meningkatkan keselamatan;
- 5) Menyebarkan informasi ke kalangan generasi muda melalui peer groupnya;
- 6) Menyelamatkan generasi muda sebagai asset bangsa.

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 16 peserta dari 14 provinsi. Kegiatan ini dilakukan selama 4 hari dari tanggal 11-14 November 2012 bertempat di Hotel Sofyan Betawi Menteng, Jakarta Pusat.

Dari hasil penilaian diperoleh pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat sebagai berikut :

a) Juara I

Nama : Mohammad Harith
Sekolah : SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh
Propinsi : Aceh
Total Nilai : 84,33

- b) Juara II
 - Nama : Plorren Setianegara
 - Sekolah : SMA Negeri 77 Jakarta
 - Propinsi : DKI Jakarta
 - Total Nilai : 81,46
- c) Juara III
 - Nama : Tika Nilamsari
 - Sekolah : SMA Negeri 8 Yogyakarta
 - Propinsi : DI. Yogyakarta
 - Total Nilai : 76,73
- d) Pemenang Favorit Putra
 - Nama : M. Aldi Novri Kurnia Abidin
 - Sekolah : SMAN 1 Pariaman
 - Provinsi : Sumatera Barat
 - Total Nilai : 72
- e) Pemenang Favorit Putri
 - Nama : Assyifa Shafira Prahasti
 - Sekolah : SMAN 1 Metro
 - Provinsi : Lampung
 - Total Nilai : 70

f. Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi nomor 58/289 Tanggal 23 April 2004, A/ 60/5 tanggal 26 October 2005 on “*improving global road safety*” dan telah diperbaharui dengan resolusi nomor 62/244 tanggal 25 april tahun 2008. Kemudian Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa – Bangsa, pada laporannya tahun 2009 dalam sidang umum mendorong Negara – Negara anggota untuk mendukung upaya – upaya untuk mendirikan aksi satu dekade. Satu dekade akan memberikan kesempatan untuk jangka panjang dan kegiatan terkoordinasi untuk mendukung keselamatan jalan raya nasional dan lokal.

Selain itu dengan telah disahkannya Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang LLAJ, maka perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-

undang No.22 tahun 2009 di maksud. Pembahasan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 telah melibatkan banyak instansi terkait dan telah dihasilkan beberapa masukan dalam penyusunan undang-undang LLAJ ini. Paradigma dari Undang-undang No. 22 tahun 2009 ini adalah pembinaan bidang LLAJ dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait dengan kata lain bahwa instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan LLAJ tidak lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Menteri Perhubungan namun bersifat kolektif pada beberapa instansi seperti :

- 1) Urusan Pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan
- 2) Urusan Pemerintahan dibidang sarana dan prasarana LLAJ oleh kementerian yang bertanggung jawab bidang sarana dan prasarana LLAJ
- 3) Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan industri LLAJ oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri
- 4) Urusan Pemerintahan di bidang Pengembangan teknologi LLAJ oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi
- 5) Urusan Pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat ini dilakukan di 2 Kota antara lain Jakarta dan Bali.

Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2012 bertempat di Hotel Ibis Kemayoran dengan jumlah peserta 20 orang. Kegiatan diskusi ini di pimpin oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat dan dihadiri oleh Drs. Suripno MsTR dan DR. Ir. Heru Sutomo, MSc, Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, M.Sc, Kasubdit di lingkungan Ditjen Hubdat dan Dinas Perhubungan setempat.

Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat di Denpasar (Bali) dilaksanakan pada tanggal 3-4 Oktober 2012 bertempat di Hotel Quest Central Park dengan jumlah peserta 20 orang. Kegiatan

diskusi ini di pimpin oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat dan dihadiri oleh Drs. Suripno MsTR dan DR. Ir. Heru Sutomo, MSc, Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, M.Sc, Dewa Made Priyantha Wedagama, ST, MT, MSc, Ph.D dari Universitas Udayana Bali, Kasubdit di lingkungan Ditjen Hubdat dan Dinas Perhubungan setempat.

Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2012 bertempat di Hotel Aston Pluit dengan jumlah peserta 20 orang. Kegiatan diskusi ini di pimpin oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat dan dihadiri oleh Drs. Suripno MsTR, Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, IGW. Samsi Gunarta (Pusjatan Bandung), Kasubdit di lingkungan Ditjen Hubdat dan Dinas Perhubungan setempat.

g. Workshop Sosialisasi Modul Keselamatan Usia 3-11 Tahun

Maksud dan tujuan dari Workshop Modul Keselamatan adalah Workshop ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang dibutuhkan semua pihak terutama orang tua agar dapat memberikan keselamatan di jalan kepada anak usia 3-12 tahun.

Workshop ini juga ditujukan untuk para pengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap peningkatan keselamatan anak usia 3-12 tahun, antara lain :

- 1) Memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai keselamatan anak usia 3-12 tahun kepada Masyarakat, Guru dan Wali murid.
- 2) Meningkatkan kepedulian Pemerintah Khususnya mengenai peningkatan keselamatan yang dapat diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan keselamatan yang bersifat nyata.
- 3) Sebagai tindak lanjut dari Pembentukan Masyarakat sadar Keselamatan (KMSK), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c.q. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat akan menyelenggarakan Workshop Sosialisasi Materi Keselamatan usia 3-11 tahun yang akan diselenggarakan di Hotel Santika, Serpong – Banten pada bulan Mei 2012. Yang akan dibagi dalam 2 (dua) angkatan.

Workshop yang pesertanya merupakan Dewan Guru, Wali Murid serta Masyarakat, diharapkan mempunyai pemahaman, visi dan misi

yang sama mengenai keselamatan khususnya anak usia 3-12 tahun dan cara-cara meningkatkan keselamatan tersebut dengan cara sosialisasi kepada masyarakat.

h. Monitoring Pekan Keselamatan Transportasi Jalan

Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang Pertama pada tahun 2007 telah dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, serta Menteri – Menteri dan Pejabat terkait, dan Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan ke-2 tahun 2008 telah dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan ini melibatkan instansi terkait serta dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Setelah dilaksanakan di Jakarta selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tahun 2010 disepakati bersama untuk melaksanakannya di daerah-daerah di Indonesia, dimana telah dilaksanakan di 7 (tujuh) Provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2011 disepakati untuk melanjutkan pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan di 7 (tujuh) Provinsi yang telah melaksanakan di tahun 2010 ditambah 3 (tiga) Provinsi, yaitu Riau, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi Pekan Nasional Keselamatan Jalan ini adalah untuk memberikan bimbingan asistensi kepada daerah yang mendapatkan APBN untuk melaksanakan kegiatan ini agar tepat kepada target audience serta mencapai tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan kepedulian keselamatan jalan para pemangku kepentingan di daerah setempat dan peningkatan awareness di masyarakat pada umumnya di wilayah-masing-masing.

Dalam upaya peningkatan keselamatan di Indonesia, Pada tahun 2012 selain di Jakarta, terpilih 10 Provinsi yang menerima APBN untuk pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan. Sepuluh daerah tersebut adalah Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan Gorontalo.

a) Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan telah dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 30 Juni 2012 dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, dan dihadiri oleh Bupati, Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupetn kota, Dirlantas Polda Jawa Tengah, Para kepala SKPD se provinsi Jawa Tengah, Ketua MTI, Ketua Organda dan ketua IMI Jawa Tengah.

b) Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan telah dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Sumatera Utara, dan dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Darat, Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Kadishub Sumatera Utara, Ditlantas Polda Sumatera Utara, UPPKB Dishub Sumatera Utara, Dishub Kota, Dishub Kabupaten, Dharma Wanta, PKK dan Media.

c) Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan dicanangkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada puncak acara ini dihadiri oleh Kasi Promosi Keselamatan, Subdit Promosi dan Kemitraan Keselamatan beserta staff Subdit Promosi dan Kemitraan Keselamatan serta instansi dari daerah yang meliputi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten se-provinsi Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Jasa Raharja Palangka Raya, Balai LLAJSDP Wilayah 3 Kalimantan serta instansi lain yang peduli keselamatan dengan transportasi jalan.

d) Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo sudah melaksanakan kegiatan promosi pre event, event dan pasca event. Kegiatan Pre event yang telah dilakukan adalah :

(1) Penayangan di media cetak melalui koran,

(2) Promosi melalui media luar ruang berupa baleho dan big banner yang sudah.

- (a) Baleho semi permanen
- (b) Big Banner
- (c) Backdrop
- (d) Umbul-umbul

Kegiatan telah dilaksanakan di terminal pada tanggal 29 april 2012 dihadiri oleh Sekretaris Daerah, dan dihadiri oleh Bupati, Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten kota, Dirlantas, Para masyarakat.

e) Provinsi Bengkulu

Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2012 di Medan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu / 30 September 2012
Waktu : 06.30 WIB – selesai
Tempat : Lapangan Sport Center, Bengkulu

f) Provinsi Jambi

Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2012 di Provinsi Jambi diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 02 Desember 2012
Waktu : 06.30 WIB – selesai (dimulai dari jalan santai)
Tempat : Halaman Kantor Gubernur Provinsi Jambi

g) Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan Pekan yang bertajuk Sosialisasi Keselamatan Jalan tidak dilaksanakan di Prov Kepulauan Riau dikarenakan kesulitan menyesuaikan jadwal Gubernur. melainkan lebih difokuskan melakukan sosialisasi di sekolah, adapun sekolah yang di tunjuk sebagai pelaksanaan sosialisasi (SMUN 1 Bintan, SMP 2 Kijang, kab Bintan) kegiatan dilaksanakan pada tanggal 03 s/d 07 Desember 2012 dihadiri langsung Seketaris Dishub Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kab.Bintan, para staf Dishub Provinsi Kepulauan Riau, serta Para Kepala Sekolah SKPD dan guru serta siswa-siswi sekolah.

i. Pemantauan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat di Sekolah

Pemantauan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat dalam pelaksanaannya dilakukan dengan maksud untuk memberikan masukan serta umpan balik kepada daerah sehingga dapat dilakukan langkah – langkah perbaikan dan optimalisasi pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Maksud dan tujuan pemantauan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi di bidang keselamatan transportasi darat di Daerah sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin.

Tempat dan Waktu

- 1) Acara Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di SDN. Purwanto 1, Malang, Kota Malang pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012;
- 2) Acara Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di SDN. Kubangkutu 1 dan 2, Kab. Cilegon, Prov. Banten pada hari Senin – Selasa, tanggal 27 – 28 Februari 2012;
- 3) Acara Car Free Day yang dilaksanakan di jalan Slamet Riyadi pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012;
- 4) Acara Below The Line yang dilaksanakan di Kota Padang pada Sabtu, tanggal 2 Juni 2012;
- 5) Acara Pariaman Expo di kota Pariaman yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012;
- 6) Acara Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di Hotel Maharani, Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012;
- 7) Acara Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di Aula PT. Coca Cola Amatil Indonesia, Kab. Semarang pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012;
- 8) Pelatihan tenaga penyuluhan Keselamatan di Aula Dishub dan Kominfo Kab. Semarang pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012;

- 9) Acara Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di Aula Pendopo Kantor Bupati Tabalong, Kab. Tabalong pada hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2012.

j. Pembentukan Komunitas Keselamatan Jalan

Maksud dan tujuan diadakan workshop ini adalah:

- 1) Masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra selamat di jalan (*road safety agent*).
- 2) Memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan agar dapat mengelola secara efektif kampanye keselamatan jalan.
- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai peningkatan keselamatan yang dapat diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan keselamatan yang bersifat nyata.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Jambi, Kota Palangkaraya dan Kota Mataram.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

No	Waktu	Tempat
1.	5 – 7 Juni 2012	Abadi Hotel & Convention Center, Jambi
2.	27 – 29 September 2012	Hotel Luwansa, Palangkaraya
3.	16 – 18 Oktober 2012	Lombok Plaza Hotel, Mataram

Peserta Workshop

Peserta Workshop Pembentukan Komunitas Keselamatan di Sekolah tahun 2011 ini total diikuti oleh 118 (seratus delapan belas) peserta, yang terdiri dari:

No.	Kota Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Jambi	22 (dua puluh dua) orang, yang terdiri dari: • 2 (dua) orang dari Dishub Provinsi; • 2 (dua) orang dari Dishub Kota; • 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan Provinsi; • 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan Kota; • 2 (dua) orang dari Kepolisian; • 6 (enam) orang dari Sekolah; • 6 (enam) orang dari Masyarakat; dan • 2 (dua) orang dari Muspida.
2.	Palangkaraya	18 (delapan belas) orang, yang terdiri dari: • 2 (dua) orang dari BLLAJSDP Palangkaraya; • 4 (empat) orang dari Dishub Provinsi; • 2 (dua) orang dari Dishub Kota;

No.	Kota Pelaksanaan	Jumlah Peserta
		• 1 (satu) orang dari Kepolisian; • 7 (tujuh) orang dari Sekolah; • 1 (satu) orang dari Universitas; dan • 1 (satu) orang dari Masyarakat.
3.	Mataram	21 (dua puluh satu) orang, yang terdiri dari: • 2 (dua) orang dari Dishub Provinsi; • 1 (satu) orang dari Dishub Kabupaten; • 1 (satu) orang dari Dishub Kota; • 2 (dua) orang dari Kepolisian; • 6 (enam) orang dari Sekolah; • 8 (delapan) orang dari Masyarakat; dan • 1 (satu) orang dari Muspida.

k. Workshop Manajemen Kampanye

Maksud dan tujuan diadakan workshop ini adalah:

- 1) Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan agar dapat mengelola secara efektif kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Meningkatkan kepedulian instansi terkait (Dinas Perhubungan) mengenai peningkatan keselamatan yang dapat diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan keselamatan yang bersifat nyata.

Melalui Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan peserta diharapkan akan memahami konsep penyelenggaraan kampanye yang baik dan profesional serta:

- 1) Memiliki pemahaman, visi dan misi yang sama mengenai manajemen keselamatan, dan cara-cara meningkatkan keselamatan.
- 2) Dapat membuat usulan kegiatan kampanye dengan baik.
- 3) Usulan yang baik membuka peluang adanya dana untuk melakukan kegiatan.
- 4) Evaluasi kegiatan sehingga menghasilkan data dan informasi yang lebih lengkap serta menambah pengalaman dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

No	Waktu	Tempat
1.	19 - 21 Juni 2012	New Rahmat Hotel, Gorontalo
2.	2 – 4 Oktober 2012	Merapi Merbabu Hotel, Yogyakarta
3.	27 – 29 November 2012	The Luxio Hotel & Resort, Sorong

Peserta Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan untuk tahun 2012

ini diikuti oleh 63 (enam puluh tiga) peserta, yang terdiri dari:

No	Kota Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Gorontalo	25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri dari: • 8 (delapan) orang dari Dishub Provinsi; • 14 (empat belas) orang dari Dishub Kabupaten; dan • 3 (tiga) orang dari Dishub Kota.
2.	Yogyakarta	20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari: • 6 (enam) orang dari Dishub Provinsi; • 9 (sembilan) orang dari Dishub Kabupaten; dan • 5 (lima) orang dari Dishub Kota.
3.	Sorong	18 (delapan belas) peserta, yang terdiri dari : • 1 (satu) orang dari Dishub Provinsi; • 14 (empat belas) orang dari Dishub Kabupaten; dan • 3 (tiga) orang dari Dishub Kota.

1. Pemantauan Sosialisasi DKI JAKARTA Konferensi Anak Indonesia

Latar Belakang

Konferensi Anak Indonesia (KONFA) telah dijalankan selama 10 tahun, setiap tahun KONFA mengambil tema yang berbeda, dan tahun ini mengambil tema “Keselamatanku di Jalan”. Keselamatan anak belum menjadi perhatian. Menurut WHO pada usia anak-anak, kecelakaan merupakan penyebab kedua kematian. Berdasarkan literatur, *Hilman et al 1990, Tranter & Whitelegg 1994*, disampaikan bahwa Anak- anak di Indoensia sulit sekali melakukan mobilitas secara independen dan gejala ini sudah terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Mobilitas anak artinya bagaimana anak dapat bepergian secara mandiri tanpa didampingi orang dewasa. Orang tua tidak memberi ijin anaknya bermobilitas karena tidak ada jaminan keselamatan bagi mereka.

Tujuan

Kegiatan Konferensi Anak Indonesia bertujuan untuk mengajak orang tua, komunitas dan stakeholder untuk menciptakan komunitas dan kota

yang ramah anak dan mendukung keselamatan mobilitas anak secara independen. Selain itu tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi norma-norma budaya dalam komunitas yang bisa dipakai untuk memberdayakan mobilitas anak secara independen dan selamat.

Kegiatan

Kegiatan terbagi menjadi 2 hal :

- 1) Rangkaian kegiatan anak-anak
- 2) Rangkaian kegiatan orang tua

Rangkaian Kegiatan anak-anak

Kegiatan bagi anak berlangsung selama 5 hari

Hari / tanggal : Minggu – Jum’at / 4 – 8 November 2012

Tempat : Wisma PKK, Kompas Ballroom, Taman

Lalu Lintas Cibubur dan Le Meridien Hotel

Peserta sebanyak 36 orang Wali dari masing-masing delegasi, mereka ada yang orang tua anak, ada yang seorang guru, ada pula para pengajar muda dari Indonesia Mengajar.

m. *The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims*

Sesuai momentum resolusi PBB No. A/RES/64/255 tentang Improving global road safety dan amanah Wakil Presiden RI pada Pencanangan Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 tanggal 20 Juni 2011, serta pelaksanaan *The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims* di berbagai negara di seluruh dunia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah melaksanakan pula kegiatan Peringatan Sedunia untuk Korban Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2012.

Hal-hal terkait kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- 1) Peringatan Sedunia untuk Korban Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2012 yang telah dilaksanakan pada :
Hari /tanggal : Minggu / 25 November 2012
Tempat : Lapangan Banteng Jakarta
Waktu : 08.00 – 21.00 WIB
- 2) Kegiatan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :
 - a) CSR Private Sector Stakeholder (08.00 – 11.00 WIB)

Adira Insurance dan Michellin Indonesia pada sesi ini menyampaikan pesan-pesan keselamatan.

- b) Sosialisasi Keselamatan oleh kementerian Kesehatan dan Komunitas Pesepeda Motor (13.00 – 17.00 WIB)

Kementerian Kesehatan menyampaikan Prosedur Pertolongan Pertama pada Kecelakaan, sedangkan Komunitas sepeda motor yaitu komunitas motor Pulsar menyampaikan materi safety riding.

- c) Seremonial Malam Renungan (19.00 – 21.00 WIB)

Renungan bersama dan pemberian donasi disampaikan oleh Wakil Menteri Perhubungan RI.

- 3) Seremonial Malam Renungan merupakan acara inti pada kegiatan ini. Seluruh kegiatan berlangsung dengan lancar. Mengawali acara Kepala Korps Lalu Lintas POLRI menyampaikan pesan keselamatan dan himbauan untuk selalu tertib berlalu lintas sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan Ibu negara terdahulu yaitu Ibu Sinta Nuriyah Wahid (Istri Alm. Abdurrahman Wahid) berkenan hadir serta berbagi kisah testimonial kejadian kecelakaan yang pernah menimpa beliau.
- 4) Pada kegiatan dimaksud Wakil Menteri Perhubungan RI menyerahkan donasi kepada 10 korban kecelakaan yang telah menjadi narasumber program reality show “*Hidup hanya Sekali*” berisi kisah testimonial kejadian kecelakaan yang menimpa masing-masing dari mereka. Donasi disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun rincian bentuk donasi terlampir pada surat ini.
- 5) Kegiatan ditutup dengan renungan bersama dengan lantunan syair serta iringan orchestra. Banyak dari hadirin ikut menitikkan air mata.
- 6) Secara keseluruhan peserta yang hadir pada acara dimaksud kurang lebih berjumlah 300 orang, terdiri dari Perwakilan Pejabat dan staf dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Korps Lalu Lintas POLRI, BUMN, Perusahaan Swasta pemangku kepentingan bidang keselamatan jalan, Dinas Perhubungan Provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten, Media

Massa Cetak dan Elektronik, Asosiasi Otomotif, berbagai Komunitas Sepeda Motor, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

n. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum AKAP/AKDP Angkatan XXVIII

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan tambahan pengetahuan kepada para pengemudi angkutan umum AKAP/AKDP yang meliputi aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan sehingga diharapkan dapat semakin mendukung kompetensi profesinya sebagai pengemudi angkutan umum dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya berperilaku selamat di jalan dengan berperilaku tertib dan disiplin sehingga dapat turut berperan dalam upaya meningkatkan keselamatan dan menekan angka kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada para pengemudi angkutan umum AKAP/AKDP ini adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap perilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.
- 2) Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan umum AKAP/AKDP dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib.
- 3) Menyiapkan pengemudi angkutan umum AKAP/AKDP yang handal sehingga bermanfaat bagi Pengusaha Perusahaan Otobus yang memerlukan pengemudi yang berkualitas dan berdisiplin tinggi, juga menghargai para penumpang dan pengguna jalan lainnya.
- 4) Meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik.
- 5) Meningkatkan rasa percaya diri para peserta sehingga akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tulus, ikhlas dan penuh rasa syukur.

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum AKAP/AKDP, Angkatan XXVIII Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 11 Mei Tahun 2012 di Hotel Gondangdia, Jl. Raya Puncak Km. 79,3 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Peserta kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP/AKDP, Angkatan ke XXVIII ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari 17 Perusahaan.

Materi yang diberikan antara lain :

- 1) *Outbound*
- 2) *Sosialisasi Program HIV/AIDS*
- 3) *Defensive Driving*
- 4) *Laik Jalan Kendaraan Bermotor*
- 5) *Pelayanan Angkutan Umum*
- 6) *Implementasi Perundang-undangan LLAJ*
- 7) *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- 8) *Pengetahuan Asuransi*
- 9) *Keselamatan Lalu Lintas Jalan*
- 10) *Pengembangan Sikap dan Perilaku Pengemudi*
- 11) *Penanganan Darurat Kecelakaan*
- 12) *Pengetahuan Teknik Kendaraan Bermotor*
- 13) *Keselamatan Kerja Pengemudi*
- 14) *Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba*

o. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi Bandara Soekarno-Hatta Angkatan VII Tahun 2011

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi taksi Bandara Soekarno-Hatta meliputi aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan, selain itu juga meningkatkan pelayanan kepada para penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap perilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya;
- 2) Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan taksi dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib;
- 3) Menyiapkan pengemudi taksi Bandara Soekarno-Hatta yang handal sehingga bermanfaat bagi pengusaha perusahaan otobus yang memerlukan pengemudi yang berkualitas dan berdisiplin tinggi juga menghargai para penumpang dan pengguna jalan lainnya;
- 4) Meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik;
- 5) Meningkatkan rasa percaya diri para peserta sehingga akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh

Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyuluhan Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum dalam rangka Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi taksi, Angkatan VIII Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 25 Juni s/d 29 Juni Tahun 2012 di Hotel Jatimas Hijau Puncak, Jl. Hankam, Cisarua, Bogor, 16750, Jawa Barat.

Peserta pendidikan dan penyuluhan peningkatan pelayanan dan keselamatan pengemudi taksi, Angkatan ke VIII ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari 11 Perusahaan.

Materi yang diberikan antara lain :

- 1) *Outbound*
- 2) *Keselamatan Kerja Pengemudi*
- 3) *Defensive dan Efficiency Driving*
- 4) *Pengetahuan Teknik Kendaraan Bermotor*
- 5) *Pelayanan Angkutan Umum*
- 6) *Implementasi Perndang – Undangn LLAJ*

- 7) *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- 8) *Ketentuan Bandara*
- 9) *Sosialisasi Program HIV/AIDS*
- 10) *Keselamatan Lalu Lintas Jalan*
- 11) *Pengembangan Sikap dan Prilaku Pengemudi*
- 12) *Bahasa Inggris Praktis*
- 13) *Penanganan Darurat Kecelakaan*
- 14) *Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba*

p. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional Tahun 2012

Maksud Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan bertujuan untuk mendudukkan insan Awak Kendaraan umum sejajar dengan insan pembangunan lainnya dengan cara memberikan motivasi serta penghargaan terhadap profesinya. Pemilihan AKUT Tingkat Nasional juga dimaksudkan sebagai sosialisasi peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan yang berskala nasional melalui pembinaan kepada para pengemudi angkutan umum AKAP, AKDP, Taksi/Sewa, Perkotaan, dan Pariwisata.

Tujuan

- 1) Untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan umum yang baik guna mempersiapkan Awak Kendaraan Umum yang berkualitas, berdisiplin dan bertanggung jawab.
- 2) Untuk mendorong terwujudnya penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas, kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas akibat kecelakaan terutama yang disebabkan oleh faktor pengemudi.
- 3) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap perilaku/unjuk kerja Awak Kendaraan Umum.
- 4) Untuk mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pengemudi angkutan umum dalam profesi yang digelutinya.

Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dilaksanakan dengan prinsip senyaman mungkin bagi semua pihak, baik panitia, peserta, maupun pengelola tempat kegiatan. Jadwal kegiatan pemilihan AKUT sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, maka pada tahun 2012 ini

bulan September jatuh pada hari Senin, tanggal 17 September 2012, sehingga penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara simultan. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan rangkaian kegiatan penilaian sampai dengan penentuan peserta terbaik dan penambahan wawasan berupa penyampaian materi, diskusi, kunjungan ke instansi-instansi terkait dan wisata yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 17 September 2012. Pemberian penghargaan berupa Sertifikat dan Tropi (piala) kepada peserta Terbaik 1 oleh Menteri Perhubungan yang bertepatan dengan Upacara Hari Perhubungan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012. Selain itu peserta juga mendapatkan penghargaan uang sebagai berikut : Peserta Terbaik 1 sebesar Rp. 6 Juta, Terbaik 2 sebesar Rp. 5 Juta, Terbaik 3 sebesar Rp. 3 Juta, Harapan 1 sebesar Rp. 2.5 juta, Terbaik 2 sebesar Rp. 2 juta dan untuk terbaik 6 s/d 53 masing-masing sebesar Rp. 1.25 Juta.

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Nasional Tahun 2012 dilaksanakan di Hotel Bintang Jadayat, Jl. Raya Puncak KM.70 No. 1, Cisarua Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan nilai akhir dan berdasarkan keputusan dari juri pemilihan AKUT 2011 melalui berita acara penilaian pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011 diputuskan Peringkat I, II, III dan Terbaik Harapan I, II pada pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Nasional 2011 adalah sebagai berikut :

1) Peringkat I

Nama : Muhammad Asas Hujairo
PO : PT. Lombok Seaside Cottage
Propinsi : Nusa Tenggara Barat
Total Nilai : 85,91

2) Peringkat II

Nama : Syafni Zulfikar
PO : Taksi Angkasa
Propinsi : Sumatera Barat
Total Nilai : 77,69

- 3) Peringkat III
Nama : Muhammad Nasich
PO : Koperasi Primkopangda
Propinsi : Jawa Timur
Total Nilai : 77,31
- 4) Harapan I
Nama : Albani Fakhri
PO : PO. Gunung Harta
Propinsi : Jawa Timur
Total Nilai : 77,29

q. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Angkatan VIII Tahun 2012

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan, selain itu juga meningkatkan pelayanan kepada para penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran kepada para pengemudi angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap prilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.
- 2) Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib.
- 3) Menyiapkan pengemudi angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun

- (B3) yang handal sehingga bermanfaat bagi Pengusaha Perusahaan B3 yang memerlukan pengemudi yang berkualitas dan berdisiplin tinggi, juga menghargai para penumpang dan pengguna jalan lainnya.
- 4) Meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik.
 - 5) Meningkatkan rasa percaya diri para peserta sehingga akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tulus, ikhlas dan penuh rasa syukur.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyuluhan Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum dalam rangka Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Angkatan VIII Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 12 Oktober Tahun 2012 di Hotel Bintang Jadayat, Jl. Raya Puncak KM 70, No. 1, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. (jadwal lengkap terlampir).

Peserta pendidikan dan penyuluhan peningkatan pelayanan dan keselamatan pengemudi angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Angkatan ke VIII ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari 14 Perusahaan.

Materi yang diberikan antara lain :

- 1) *Outbound*
- 2) *Keselamatan Kerja Pengemudi*
- 3) *Defensive dan Efficiency Driving*
- 4) *Pengetahuan Teknik Kendaraan Bermotor*
- 5) *Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengangkutan B3*
- 6) *Implementasi Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ*
- 7) *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- 8) *Pengangkutan, pemuatan, pembongkaran B3*
- 9) *Pengendalian, penanggulangan Keadaan Berbahaya*
- 10) *Sosialisasi Program HIV/AIDS*
- 11) *Keselamatan Lalu Lintas Jalan*
- 12) *Pengembangan Sikap dan Prilaku Pengemudi*
- 13) *Penanganan Darurat Kecelakaan*
- 14) *Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba*

r. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Perkotaan/Angkutan Pedesaan Angkatan V Tahun 2012

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pembinaan kepada pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan guna memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan serta peningkatan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengubah pola pikir dan cara pandang para pengemudi angkutan umum terhadap profesinya sehingga dapat mengubah perilakunya dan secara tidak langsung akan turut berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa atau penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan program aksi kepada para pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan adalah :

- 1) Memberikan kesadaran terhadap harkat dan martabat profesi pengemudi angkutan umum dan peran penting pengemudi angkutan umum dalam sistem transportasi jalan.
- 2) Meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat mengurangi resiko kematian/fatalitas dalam kecelakaan.
- 3) Meningkatkan wawasan pengetahuan, keterampilan dan terutama sikap perilaku (attitude) pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan dalam berkendara dan berlalu lintas.
- 4) Meningkatkan jumlah pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan yang telah mengikuti program aksi.

Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum dalam rangka Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Angkatan V Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 15 Juni Tahun 2012 bertempat di Hotel Indah Palace, Jl. Veteran 284, Solo, Jawa Tengah. Peserta Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi angkutan Perkotaan dan Pedesaan Angkatan V Tahun 2012 ini diikuti oleh 40 peserta.

Materi yang diberikan antara lain :

- 1) *Outbound*
- 2) *Keselamatan Kerja Pengemudi*
- 3) *Implementasi Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ*
- 4) *Keselamatan Lalu Lintas Jalan*
- 5) *Tata Cara dan Penegakan Hukum LLAJ*
- 6) *Kebijakan Angkutan Umum di Perkotaan*
- 7) *Pengetahuan Teknik Kendaraan Bermotor*
- 8) *Pengetahuan Asuransi*
- 9) *Pengembangan Sikap dan Prilaku Pengemudi*
- 10) *Defensive Driving*
- 11) *Penanganan Darurat Kecelakaan*
- 12) *Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba*
- 13) *Pengetahuan Penyakit HIV/AIDS*
- 14) *Pelayanan Angkutan Perdesaan*

s. Workshop Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Workshop Sistem Manajemen Keselamatan bagi Perusahaan Angkutan Umum adalah :

- 1) Memberikan informasi/sosialisasi kepada stakeholder terkait tentang SMK Pengusahaan Angkutan Umum khususnya AKAP/AKDP;
- 2) Memperoleh bahan masukan positif khususnya kekurangan – kekurangan konsep SMK Pengusahaan Angkutan Umum AKAP/AKDP yang sudah ada kepada pemerintah

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Workshop Sistem Manajemen Keselamatan bagi Perusahaan Angkutan Umum adalah :

- 1) Memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan angkutan umum AKAP/AKDP kepada stake holder terkait khususnya para pengusaha agar dapat mempersiapkan dalam penerapan sistem tersebut;
- 2) Penyempurnaan konsep SMK Perusahaan Angkutan Umum AKAP/AKDP agar sistem itu sendiri dapat berlaku secara nasional

dan dapat diterapkan di semua segmen kelas perusahaan angkutan umum AKAP/AKDP.

Workshop ini dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan DI. Yogyakarta.

Penyelenggaraan Workshop Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum I Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Juli 2012 bertempat di Aston Primera Pasteur Hotel and Conference Center, Jl. Dr. Djunjunan 96, Pasteur, Bandung, Jawa Barat.

Peserta Workshop Sistem Manajemen Keselamatan bagi Perusahaan Angkutan Umum I ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri atas :

- 1) Instansi Pemerintahan : 10 orang dari 2 instansi;
- 2) Akademisi : 4 orang dari 3 universitas;
- 3) Organisasi : 4 orang dari 3 organisasi;
- 4) Perusahaan Otobus : 67 orang dari 29 perusahaan.

Penyelenggaraan Workshop Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum II Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 2-3 Oktober 2012 bertempat di Hotel Inna Garuda, Jl. Malioboro No. 60 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta Workshop Sistem Manajemen Keselamatan bagi Perusahaan Angkutan Umum II ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri atas :

- 1) Instansi Pemerintahan : 17 orang dari 10 instansi;
- 2) Akademisi : 5 orang dari 3 universitas;
- 3) Organisasi : 6 orang dari 4 organisasi;
- 4) Perusahaan Otobus : 52 orang dari 29 perusahaan.

Penyelenggaraan Workshop Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum III Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2012 bertempat di Hotel Novotel, Jl. Ngagel 173 -175 Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Peserta Workshop Sistem Manajemen Keselamatan bagi Perusahaan Angkutan Umum III ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri atas :

- 1) Instansi Pemerintahan : 40 orang dari 25 instansi;
- 2) Akademisi : 5 orang dari 2 universitas;

- 3) Organisasi : 6 orang dari 4 organisasi;
- 4) Perusahaan Otobus : 29 orang dari 25 perusahaan.

t. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (AKUT)

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan monitoring pemilihan AKUT ini adalah memberikan masukan-masukan kepada Dinas Perhubungan Propinsi tentang penyelenggaraan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) yang sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sehingga akan dapat menghasilkan pemenang tingkat provinsi yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional atau dalam hal ini dapat berarti bahwa diharapkan dalam kegiatan Pemilihan AKUT tingkat nasional semua peserta yang mewakili propinsi mempunyai standar kompetensi pemenang AKUT tingkat provinsi yang setara, sehingga dalam ajang kompetisi tingkat nasional tidak terjadi perbedaan atau *gap* yang lebar.

Selain itu juga untuk mendapatkan masukan-masukan dan temuan-temuan dari Dinas Perhubungan Provinsi terhadap pengembangan penyelenggaraan Pemilihan AKUT yang semakin lebih baik dan bermanfaat serta memberikan kesadaran yang lebih dalam lagi terhadap para pengemudi angkutan umum bahwa profesi pengemudi angkutan umum adalah profesi terhormat yang diakui dan mempunyai peran penting yang setara dengan profesi-profesi lainnya. Pengemudi angkutan umum yang lebih percaya diri akan turut berperan dalam upaya menekan kejadian kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa atau penumpang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan di daerah sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana penerapan terhadap pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah yang ada.
- 3) Untuk melakukan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan di daerah.
- 4) Untuk mendorong perhatian pemerintah daerah untuk bersama – sama

dengan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan terhadap pengemudi/awak angkutan umum sebagai wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 5) Agar adanya kesamaan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Lokasi moniring ini dilakukan kebeberapa Provinsi yaitu:

- 1) Sumatera Barat;
- 2) Sulawesi Selatan;
- 3) Kalimantan Selatan;
- 4) Yogyakarta;
- 5) Aceh;
- 6) Sulawesi Utara;
- 7) Maluku;
- 8) Sumatera Selatan;
- 9) Sumatera Utara;
- 10) Kalimantan Tengah.

u. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Program Aksi)

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mengawasi, mengevaluasi dan menilai hal – hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti kesiapan pelaksanaan, kurikulum, materi, tata cara, durasi diklat, pengajar, mekanisme penyelenggaraan, baik yang terkait dengan administrasi, anggaran, kepanitiaan, dan lain – lain agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat mencapai sasaran dan manfaat secara optimal.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan di daerah sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana penerapan terhadap pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah yang ada.
- 3) Untuk melakukan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan di daerah.
- 4) Untuk mendorong perhatian pemerintah daerah untuk bersama – sama dengan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan terhadap

pengemudi/awak angkutan umum sebagai wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 5) Agar adanya kesamaan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Adapun daerah yang menjadi lokasi kegiatan monitoring tersebut adalah:

- 1) Jawa Tengah
- 2) Kalimantan Timur
- 3) Jawa Timur
- 4) Jambi
- 5) Sulawesi Tengah
- 6) Kepulauan Riau

v. Bimbingan Teknis Audit Dan Inspeksi Keselamatan Jalan

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik tentang audit dan inspeksi keselamatan jalan.

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan Tahun 2012 dilaksanakan di 2 (Dua) Kota yaitu :

- 1) **Angkatan I di Kota Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,** diselenggarakan di Hotel Sulthan pada tanggal **29 s/d 31 Mei 2012;**
- 2) **Angkatan II di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,** diselenggarakan di Hotel Mercure pada tanggal **19 s/d 21 Juni 2012;**

Peserta Bimbingan Teknis Audit Dan Inspeksi Keselamatan Jalan pada masing-masing Provinsi diikuti oleh 25 peserta.

Ruang lingkup materi Bimbingan Teknis Audit Dan Inspeksi Keselamatan Jalan Tahun 2012 antara lain meliputi :

- 1) Pengenalan ruang lingkup audit dan inspeksi keselamatan jalan;
- 2) Penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan jalan;
- 3) Melakukan simulasi kegiatan audit dan inspeksi keselamatan jalan;
- 4) Analisis data yang diperoleh dari hasil audit dan inspeksi keselamatan jalan;
- 5) Memberikan usulan perbaikan;

- 6) Memberikan pemahaman tata cara dan teknis pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan jalan.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah sebagai berikut:

- 1) Perundang-undangan LLAJ
- 2) Geometri Jalan
- 3) Perilaku Penggunaan Jalan
- 4) Pengantar Form Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Jalan
- 5) Audit Dan inspeksi Keselamatan Jalan
- 6) Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
- 7) Roas Safety Harzardous
- 8) Studi Kasus/ Simulasi Audit Dan Inspeksi Keselamatan Jalan
- 9) Penanganan Dan Rekomendasi

w. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Prasarana Jalan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memperoleh data tentang kondisi prasarana jalan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan nasional di provinsi Banten, Jawa Barat dan Sumatera Utara, terkait keselamatan pengguna jalan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan inventarisasi terhadap potensi kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalan, yang kemudian diberikan rekomendasi penanganan terhadap hasil inspeksi.

Lingkup kegiatan Inspeksi Prasarana Jalan Nasional di Provinsi Banten, Jawa Barat dan DI Yogyakarta di batasi dengan rincian kegiatan meliputi :

- 1) Pelaksanaan inspeksi keselamatan prasarana jalan di ruas jalan nasional terpilih, yaitu ruas jalan Banten – Merak – Pandeglang, ruas jalan Bandung – Tasikmalaya – Banjar - Cirebon (Kadipaten), ruas jalan Yogyakarta – Jl. Raya Wates - Magelang
- 2) Identifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan dan pengaruh lainnya dari pengoperasian jalan;
- 3) Memberikan rekomendasi tentang solusi penanganannya (countermeasure) atas potensi bahaya dan ancaman terhadap

keselamatan jalan nasional.

x. Inspeksi Keselamatan Transportasi Darat

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memperoleh data tentang kondisi prasarana jalan dan prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), terkait dengan keselamatan pengguna jalan dan pengguna Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan analisis terhadap potensi kemungkinan terjadinya kecelakaan, baik pada angkutan jalan maupun angkutan sungai danau dan penyeberangan, yang kemudian diberikan rekomendasi penanganan/perbaikan terhadap hasil inspeksi.

Inspeksi Prasarana Jalan dilaksanakan pada ruas jalan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Transportasi Darat di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 18 Oktober s/d 20 Oktober 2012, ruas Jalan Kota Banjarmasin – Jl. Ahmad Yani;
- 2) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Transportasi Darat di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Oktober s/d 2 November 2012, ruas Jalan Kota Surabaya – Pelabuhan Kamal (Madura);
- 3) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Transportasi Darat di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 19 s/d 21 November 2012, ruas jalan Kota Manado – Amurang;
- 4) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Transportasi Darat di Provinsi Bali pada tanggal 26 s/d 28 November 2012, ruas jalan Kota Denpasar – Padang Bay.

y. Inspeksi Keselamatan Prasarana Angkutan Sungai

Kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Sungai Siak di Riau dan Sungai Martapura di Kalimantan Selatan.

Maksud dilakukannya Inspeksi Keselamatan Prasarana Angkutan Sungai antara lain untuk :

- 1) Untuk mendapatkan data dan informasi alur pelayaran perairan daratan di rawan kecelakaan;
- 2) Mendapatkan data - data yang dapat digunakan sebagai bahan dan pertimbangan apakah alur tersebut aman untuk dilayari oleh kapal

sungai;

- 3) Menganalisa dan mengantisipasi terhadap kemungkinan adanya penambahan / pengadaan prasarana sungai lainnya (rambu - rambu sungai, pengaman tebing sungai dll) yang dianggap perlu guna meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan para pengguna alur;

Sedangkan tujuan yang dirancang dalam pekerjaan antara lain agar terlaksananya kegiatan Survey Inspeksi Keselamatan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau pada alur Pelayaran Sungai Siak dalam rangka meningkatkan kehandalan kualitas pelayanan jasa transportasi angkutan sungai dan terciptanya keselamatan lalu lintas angkutan sungai secara efektif dan efisien.

Ruang Lingkup Kegiatan yaitu :

- 1) Melaksanakan survey inspeksi keselamatan angkutan sungai pada ruas alur pelayaran sungai terpilih yaitu alur pelayaran Sungai Siak dan Sungai Martapura;
- 2) Melakukan survey inventaris alur pelayaran sungai melalui peninjauan lapangan terhadap ruas alur pelayaran sungai terpilih;
- 3) Menganalisa dan mengevaluasi potensi kecelakaan yang mungkin timbul pada ruas alur pelayaran sungai terpilih

z. Audit Keselamatan Prasarana Alur Pelayaran Sungai dan Danau

Kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Sungai Musi di Sumatera Selatan dan Sungai Kahayan di Kalimantan Tengah.

Maksud pelaksanaan Audit Keselamatan Prasarana Alur Pelayaran Sungai dan Danau adalah :

- 1) Mendapatkan gambaran/kondisi sarana dan prasarana di sepanjang Sungai Musi Kota Palembang dan Sungai Kahayan Kota Palangkaraya.
- 2) Mendapatkan gambaran tentang fasilitas penunjang keselamatan alur pelayaran di Sungai Musi Kota Palembang dan Sungai Kahayan Kota Palangkaraya.

- 3) Mendapatkan gambaran karakteristik umum alur pelayaran di sepanjang Sungai Musi Kota Palembang dan Sungai Kahayan Kota Palangkaraya.
- 4) Menganalisa faktor-faktor penghambat alur pelayaran serta mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kecelakaan angkutan sungai di Kota Palembang dan Sungai Kahayan Kota Palangkaraya.
- 5) Menganalisa kelayakan kondisi alur pelayaran sungai Musi di Kota Palembang dan Sungai Kahayan Kota Palangkaraya.

Ruas sungai terpilih di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Alur Pelayaran Sungai Musi dan di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Alur Pelayaran Sungai Kahayan, karena pada ruas alur sungai tersebut banyak terdapat aktivitas angkutan sungai masyarakat setempat di kota Palembang, sehingga keselamatan pelayaran pada alur sungai Musi dan Kahayan perlu diperhatikan.

Ruang lingkup kegiatan Audit Keselamatan Alur Pelayaran dilakukan di sepanjang wilayah perairan Sungai Musi Kota Palembang dan dan Sungai Kahayan Kota Palangkaraya antara lain :

- 1) Survey alur pelayaran yang meliputi ; karakteristik alur pelayaran sungai Musi yang meliputi ; kedalaman, lebar, kondisi arus termasuk hambatan serta alinyemen alur pelayaran.
- 2) Pengumpulan data mengenai kecelakaan kapal sungai, fasilitas penunjang keselamatan pelayaran serta fasilitas Sungai.
- 3) Survey inventarisasi dan kondisi sarana dan prasarana angkutan sungai.
- 4) Melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat dan permasalahan alur pelayaran yang mempengaruhi keselamatan pelayaran
- 5) Memberikan saran solusi pemecahan permasalahan pada alur pelayaran Sungai Musi.

â. Monitoring Audit Keselamatan ASDP

Kegiatan Monitoring Audit Keselamatan ASDP Tingkat Provinsi ini dimaksudkan antara lain adalah :

- 1) Untuk dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada Instansi Perhubungan daerah agar melakukan kegiatan audit keselamatan

ASDP diwilayah/daerah masing-masing, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan bisa didapatkan data dan informasi yang akurat, serta dapat memberikan rekomendasi dan program aksi yang diperlukan agar kejadian kecelakaan yang sama tidak terulang kembali dimasa yang akan datang;

- 2) Untuk dapat mengetahui sejauh mana koordinasi pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap daerah kab/kota yang ada di wilayahnya masing-masing;
- 3) sebagai bahan pendukung dalam upaya penciptaan dan pengembangan pola pembinaan dan program keselamatan transportasi darat yang terarah, terukur, terpadu serta berkesinambungan, mulai dari pusat, propinsi sampai dengan kabupaten/kota;

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan monitoring ini antara lain adalah:

- 1) Terwujudnya kesamaan persepsi antara instansi yang terkait baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota dalam menyikapi perlunya dilaksanakan kegiatan audit keselamatan ASDP ;
- 2) Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam hal pelaporan dan penyajian data

Penyelenggaraan Monitoring Audit Keselamatan ASDP Tingkat Provinsi tahun 2012 dilaksanakan di 5 (lima) kota yaitu :

- 1) Pontianak, diselenggarakan pada tanggal 26-28 April 2012;
- 2) Banjarmasin, diselenggarakan pada tanggal 29 April – 1 Mei 2012;
- 3) Samarinda, diselenggarakan pada tanggal 2-4 Mei 2012;
- 4) Palangkaraya, diselenggarakan pada tanggal 6-8 Mei 2012;
- 5) Jambi, diselenggarakan pada tanggal 9-11 Mei 2012.

Peserta Pelatihan

Peserta Monitoring Penelitian Audit Keselamatan ASDP Tingkat Provinsi pada masing-masing Provinsi diikuti oleh :

- 1) Provinsi Kalbar diikuti oleh 22 peserta;
- 2) Provinsi Kalsel diikuti oleh 10 peserta;
- 3) Provinsi Kaltim diikuti oleh 22 peserta;

- 4) Provinsi Kalteng diikuti oleh 15 peserta;
- 5) Provinsi Jambi diikuti oleh 20 peserta.

bb. Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan ASDP

Maksud dari kegiatan Pemberdayaan Audit Keselamatan jalan ini adalah penilaian terhadap hasil paparan survey audit keselamatan jalan yang dilakukan oleh aparaturnya daerah untuk menentukan predikat peserta/tim terbaik.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan ini yaitu untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam bimbingan teknis di bidang audit keselamatan jalan yang telah diberikan kepada aparaturnya daerah sebelumnya guna pencegahan kejadian kecelakaan.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Monitoring

Sebelum masing-masing provinsi peserta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melakukan presentasi hasil audit ruas jalan terpilih di Jakarta, tim Direktorat Keselamatan Transportasi Darat telah melakukan monitoring kepada masing-masing provinsi yang dilaksanakan pada :

- 1) Daerah Istimewa Yogyakarta

Monitoring dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 September 2012, sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Keselamatan Transportasi Darat nomor : KP. 004/53/3/ DJPD/2012 tanggal 15 Agustus 2012;

- 2) Provinsi Sulawesi Tengah

Monitoring dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 September 2012, sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Keselamatan Transportasi Darat nomor : KP. 004/53/5/DJPD/2012 tanggal 15 Agustus 2012;

- 3) Provinsi Bengkulu

Monitoring dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 September 2012, sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Keselamatan Transportasi Darat nomor : KP. 004/53/4/ DJPD/2012 tanggal 15 Agustus 2012;

Pelaksanaan Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di ruang Melati Hotel Millenium, Jalan Fachrudin No. 3, Jakarta Pusat.

Peserta Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan

Peserta Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan Tahun 2012 diikuti oleh 3 (tiga) provinsi peserta dengan masing-masing provinsi terdiri dari 6 (enam) orang. Ketiga provinsi peserta tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Bengkulu.

Keempat personil yang mewakili provinsi peserta tersebut merupakan aparatur yang telah menerima kompetensi dasar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui bimbingan teknis di bidang audit keselamatan jalan pada tahun yang lalu.

cc. Bimbingan Teknis di Bidang Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pengenalan tentang ruang lingkup Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan, tata cara pelaksanaan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan serta teori pendukung yang relevan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Memberikan pemahaman tentang pelaksanaan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan sehingga peserta diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk menetapkan Daerah Rawan Kecelakaan .
- 2) Mendorong petugas/aparatur perhubungan dapat melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan serupa dikemudian hari.
- 3) Meminimalkan dan upaya pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.
- 4) Sebagai salah satu usaha dalam mendukung program keselamatan lalu lintas di jalan.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bidang Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Angkatan I dan II dilaksanakan pada :

- 1) Angkatan I di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, diselenggarakan di Hotel Athaya pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2012;
- 2) Angkatan II di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, diselenggarakan di Hotel Red Dot pada tanggal 10 s/d 12 Juli 2012.

4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

a. Permasalahan

- 1) Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia. Dari data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2011-2012 menunjukkan bahwa jumlah meninggal akibat kecelakaan pada tahun 2011 sebanyak 31.185 orang dan pada tahun 2012 mencapai 25.131 orang.
- 2) Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan.
- 3) Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan.

b. Upaya Pemecahan

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat antara lain sebagai berikut :

- 1) Program-program revitalisasi batas kecepatan (*speed limits*) berikut pemantauan dan penindakan pelanggarannya, upaya penjinakan arus lalu lintas (*traffic calming*), penggunaan helm pengaman dan sabuk keselamatan, alat-alat penegas keberadaan sepeda motor dan pengendaranya (*conspicuity*), serta pembuatan/penempatan lajur-lajur khusus sepeda motor disarankan untuk diimplementasikan secara lebih intensif dalam 5 tahun ke depan.
- 2) Telah ditetapkan Rencana Umum Keselamatan Nasional Keselamatan Angkutan Jalan.
- 3) Direktorat KTD melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian, Kem. Pekerjaan Umum, Kem. Kesehatan, Kem. Pendidikan Nasional).

BAB V

KINERJA BALAI, K-OPP DAN UPT PENYEBERANGAN

A. KINERJA BALAI

1. BPLJSKB BEKASI

a. Kondisi BPLJSKB Saat Ini

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi merupakan salah satu UPT dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang bertugas untuk melakukan pengujian beberapa jenis/tipe kendaraan untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut laik jalan atau tidak memiliki sarana pengujian yang terdiri dari :

- 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi:
 - a) Pemeliharaan Alat Pengujian Passenger Car :
 - (1) Side Slip (Banzai)
 - (2) Brake Tester (Banzai)
 - (3) Speed Tester (Anzen)
 - (4) Axle Load Meter (Banzai)
 - (5) Smoke Tester (VIS)
 - (6) Gasoline Gas Analyzer
 - (7) Head Light Tester Type HL3033SM-1
 - (8) Sideslip Tester (Saxon)
 - (9) Speed Tester (Saxon)
 - (10) Sound level meter (Saxon)
 - (11) Infralyt Smart & Opacylit 1030 (Saxon)
 - (12) Chassis Tester (Saxon)
 - (13) Roller Brake Tester (Saxon)
 - (14) Q-Lift 700 (Saxon)
 - (15) LVC 1050 FM Fully Automatic Head Light Tester (Saxon)
 - (16) Weighing System (Saxon)

- b) Pemeliharaan Alat Pengujian Sepeda Motor :
 - (1) Brake Tester (Saxon) tipe 1 & 2
 - (2) Speed Tester (Saxon)
 - (3) Head Light Tester (L.E.T Automotive)
 - (4) Sound Level Meter (Saxon)
 - (5) Measuring Arm (Faro Dimension)
 - (6) Weighing system
 - (7) Laptop Faro
 - (8) Exhaust Blower
 - c) Pemeliharaan Alat Pengujian Bus dan Truck :
 - (1) Side Slip (Banzai)
 - (2) Brake Tester (Banzai)
 - (3) Speed Tester (Anzen)
 - (4) Axle Load Meter (Banzai)
 - d) Pemeliharaan Elektrik Generating Set (EGS) :
 - (1) Genset Merk Deutz
 - (2) Pengadaan Solar
 - e) Pemeliharaan Trafo :
 - (1) Trafo 1 Merk Union
 - (2) Trafo 2 Merk Centrado
- 2) Perawatan alat uji Emisi Euro 2 :
- a) Jenis M1
 - b) Jenis L

Peralatan uji type yang dimiliki oleh BPLJSKB masih ada yang berumur lebih dari 25 tahun, sehingga sering mengalami masalah dalam pelaksanaan pengujian. Peralatan tersebut terdiri dari :

- 1) *Head Light Tester* yang dimiliki saat ini masih sama dengan tahun lalu hanya baik untuk mengukur kekuatan pancar cahaya lampu yang fokus dan masih sulit untuk mengukur dari cahaya bias, dengan standard satuan ukur candela. Pembacaan hasil uji secara visual dialat uji dan hasil print-out selalu menunjukkan selisih untuk itu perlu disesuaikan. Stabilizer untuk meluruskan kendaraan uji terhadap alat uji juga tidak berfungsi. Untuk saat ini kemampuan ukur kekuatan

- pancar cahaya lampu sudah berkurang, sehingga yang seharusnya jarak ukur dari 3 meter standar alat uji, dirubah menjadi 1 meter;
- 2) Side Slip yang ada menggunakan alat ukur digital dan analog. Penunjuk alat ukur digital dan alat ukur analog selalu berbeda, sehingga dalam pengukuran selalu digunakan hasil uji yang dibaca oleh alat ukur analog untuk itu disarankan masih diperlukan perbaikan alat uji side slip.
 - 3) Pemeriksaan kontruksi/bagian bawah (kolong) untuk menjaga jaminan keselamatan penguji saat melakukan pengujian pemeriksaan bagian bawah atau kolong kendaraan dengan alat carlift yang memiliki satu kaki hidrolik (one post), saat ini telah dibangun pit lift (jembatan uji) sebagai penggantinya, namun masih ada kendala untuk mobil penumpang dengan ground clearance rendah tidak dapat naik keatas jembatan uji, karena dapat membentur besi pengaman roda, oleh karena itu besi pengaman roda yang terletak pada sisi dalam jembatan uji agar bisa dihilangkan dan sudut naik jembatan agar dibuat lebih landai supaya pemeriksaan bagian kendaraan bermotor bisa dilakukan secara maksimal.
 - 4) Brake tester untuk mobil barang, keseharian dipergunakan untuk uji semua jenis kendaraan uji, saat dipakai dial indikator tidak menunjukkan hasil yang tepat dikarenakan ada komponen yang sudah aus sehingga kinerja alat uji tidak maksimal. Alat uji rem untuk mobil penumpang yang telah dimodifikasi menjadi digital selalu ada selisih angka antara yang tercatat digital dengan analog untuk itu pengujian sering dilakukan berulang kali. Pembacaan dengan mata sangat sulit mengingat angka bergerak dengan cepat. Untuk itu alat uji ini masih perlu terus disempurnakan. Sedang alat uji rem untuk mobil barang (truck) dengan tenaga penggerak serentak (khususnya untuk jenis tandum) tidak dapat diuji dikarenakan alat uji yang ada tidak memiliki fasilitas boogie roller.
 - 5) Axle load tester, alat yang dimiliki ada dua unit dimana satu unit memiliki kapasitas maximum tiap sumbu 10.000 kg dengan indikator digital dengan hasil timbangan kelipatan 5 kg, dan satunya lagi

memiliki kapasitas maximum tiap sumbu 3.000 kg dengan indikator digital dengan hasil timbangan kelipatan 0.5 kg. Untuk hasil penimbangan terhadap kendaraan yang sama selalu didapat selisih antara 5 kg s/d 10 kg, walaupun perbedaan ini kecil bila dibandingkan dengan berat kendaraan tapi tetap masih dibutuhkan perbaikan secara keseluruhan baik sistim elektronik dan mekanik.

- 6) Speedometer tester, yang saat ini beroperasi hanya untuk mobil penumpang dengan sistim penggerak roda 4x2. Untuk kendaraan besar penggerak serentak (Tandum) kendaraan tiga sumbu pengujian speedometer tidak dapat dilakukan, karena alat uji speedometer yang ada hanya untuk kendaraan light truck, sehingga perlu pengadaan Alat uji speedometer untuk kendaraan besar berikut Boogie roller. Untuk itu pengujian speedometer kendaraan bermotor tandum dan kendaraan uji yang memiliki sistim sensor penggerak pada seluruh roda diuji secara visual.
- 7) Pengujian emisi gas buang, saat ini hanya menggunakan alat uji merek AVL yang sebenarnya diperuntukan khusus untuk operasional di gedung uji emisi euro-2 dan 1 (satu) unit alat uji emisi untuk mengukur gas buang (ketebalan asap).
- 8) Pengujian dimensi, masih menggunakan alat manual dengan menggunakan alat ukur meteran metal (meteran gulung), water pass, bandul (lot) dan batang alumunium.
- 9) Pengukuran radius putar dilakukan di luar gedung sehingga mempunyai kendala saat cuaca hujan dengan demikian diperlukan sarana pengujian radius putar yang statis (didalam gedung).

b. Bidang Keuangan

1) PNBP

Realisasi PNBP pada tahun 2012 sebesar **Rp.6.065.115.514,-** (Enam Puluh Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) atau naik sebesar 12,81 % dibandingkan tahun 2011 sebesar **Rp.5.376.552.004,-** (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1. Pencapaian PNBP BPLJSKB Bekasi

Tahun Anggaran	Target PNBP	Realisasi	%	Keterangan
2011	Rp 4.500.000.000,-	Rp 5.376.552.004,-	119,48	Target Tercapai Realisasi Melebihi Target.
2012	Rp 4.500.000.000,-	Rp 6.065.115.514,-	134,78	Target Tercapai Realisasi Melebihi Target

Sumber : BPLJSKB Bekasi, Tahun 2012

2) Anggaran Rutin

Jumlah anggaran pada Balai PLJSKB pada tahun 2012 adalah **Rp.23.543.261.000,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi anggaran yang terserap adalah 85.31 % atau **Rp.20.085.229.131,-** (Dua Puluh Milyar Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

c. **Permasalahan yang dihadapi**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPLJSKB antara lain :

- 1) Peralatan uji tipe yang ada di Balai PLJSKB rata-rata usianya sudah mencapai 27 tahun sehingga kurang dapat mengikuti perkembangan teknologi otomotif. Untuk itu diperlukan *backup* peralatan dan pengadaan alat pengujian baru yang sesuai dengan teknologi otomotif yang mutakhir.
- 2) Sebagian besar pegawai di Balai Pengujian sudah mulai memasuki masa pensiun sehingga diperlukan tenaga-tenaga muda sebagai pengganti yang pensiun, khususnya untuk tenaga penguji.
- 3) Terbatasnya staf yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Teknik atau yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang diperlukan dalam pengembangan Balai PLJSKB mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk pengembangan Balai kedepan.
- 4) Diperlukan dana yang sangat besar untuk pengembangan pengujian tipe di Balai PLJSKB, khususnya dalam mengikuti perkembangan teknologi otomotif yang berkembang sangat pesat.

- 5) Diklat-diklat teknis yang menunjang pekerjaan bagi para pegawai yang ada di Balai PLJSKB masih cukup terbatas.

d. Upaya yang dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan, upaya yang dilakukan antara lain :

- 1) Perlu ditingkatkan pertemuan – pertemuan rutin untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dilingkungan BPLJSKB dengan instansi pembina (seperti LLAJ dan Sesditjen), sehingga dari segi SDM tumbuh keakraban, suasana kerja yang baik serta motivasi kerja yang baik pula. Dari segi program akan lebih terorganisir, terkordinasi dan terarah untuk menjadikan Balai PLJSKB yang mendapat pengakuan Global.
- 2) Penjadwalan dan prioritas terhadap program perbaikan / penggantian / pengadaan peralatan pengujian, utilitas, computer, jaringan khusus untuk akses internet, lemari file dan lain-lain memerlukan manajemen yang lebih baik dengan program yang lengkap, khusus untuk program pekerjaan dengan biaya yang relative besar pembuatan data dukungnya sebaiknya dilaksanakan melalui jasa konsultasi. Mengingat pekerjaan ini cukup rumit dan keterbatasan kemampuan staf Balai PLJSKB
- 3) Perlu disediakan dana yang cukup untuk pengembangan Balai PLJSKB dan perawatan seluruh alat yang akan dilakukan dengan sistem contract.
- 4) Perlu penambahan sarjana teknis baru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pengujian, teknologi kendaraan bermotor dan teknologi peralatan pengujian saat ini.
- 5) Mengingat peralatan uji emisi gas buang EURO-2 memerlukan perawatan ketelitian yang tinggi serta gas kalibrasi yang masih diimport, serta belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang mampu melakukan kalibrasi disarankan untuk menyediakan dana yang cukup dalam pelaksanaan *Maintenance Contract*.

2. BLLAJSDP JAMBI

a Kondisi Saat Ini

Pada tanggal 23 Juli tahun 2012, dan pembentukan dan keberadaan **BLLAJSDP JAMBI**, di Provinsi Jambi, baru efektif berjalan. Organisasi BLLAJSDP Jambi dilaksanakan, formasi organisasi, awalnya hanya diisi pejabat struktural 3 (tiga) orang, terdiri dari 1(satu) Kepala BLLAJSDP Jambi,(eselon III a), 1(satu) Kasubag TU BLLAJSDP JAMBI (eselon IVa), dan 1(satu) Kepala Seksi Angkutan dan Teknik Sarana BLLAJSDP (eselon IVa), dan baru pertengahan minggu II Desember 2012 diisi pejabat struktural tingkat eselon IV a, yakni Kepala Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana. Hingga akhir Tahun Anggaran 2012, Organisasi BLLAJSDP Jambi, masih diisi dengan 4 (empat) orang Pejabat Struktural Tingkat Eselon II a dan 3 Pejabat Struktural tingkat Eselon IVa, belum tersedia tenaga staf pendukung yang tetap, dalam pengertian yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Adapun pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan rutin dan pengadaan barang inventaris kantor, maupun pelaksanaan koordinasi kelembagaan antar instansi terkait, sebagian besar dirangkap oleh pejabat struktural dan dibantu tenaga personil yang Job Training (Magang) dari lulusan STTD dan Lulusan LLASDP Palembang.

Untuk menghindari keterlambatan dan upaya peningkatan dan kelancaran proses pekerjaan pada Satuan Kerja BLLAJSDP Jambi, terutama dalam penyusunan laporan administrasi perkantoran, penyusunan sistim akuntansi, laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan rutin dan proses pelaksanaan pengadaan barang berupa inventaris kantor yang menjadi Milik Negara, seperti Pengadaan Meublair, (Meja, Kursi Kerja), Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, BLLAJSDP Jambi mengajukan permohonan dan meminta bantuan personil dari Dinas Perhubungan Provinsi.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan rutin dan pengadaan barang kantor BLLAJSDP Jambi, dapat dilakukan dan dikerjakan dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal satuan organisasi di BLLAJSDP Jambi, dan lingkungan eksternal, dalam hal ini melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan

Provinsi, khususnya dukungan personil (sifat bantuan sementara) mengisi kekosongan staf pendukung dilingkungan Satuan Kerja BLLAJSDP Jambi, ditambah dukungan Petugas Tenaga Sekuriti dan Tenaga Kebersihan. Adapun pemberian honorarium tenaga personil tersebut diatas berasal dari DIPA Satker BLLAJSDP Jambi No. 1284/022-03.01/05/2012 tanggal 4 Juli 2012.

1) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang Administrasi dilingkungan BLLAJSDP Jambi, adalah kegiatan ketata usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

a) Urusan Umum

Ditinjau dari kegiatan administrasi perkantoran berupa surat yang dikeluarkan dan surat yang masuk selama periode Tahun Anggaran Anggaran 2012, terhitung mulai bulan Juli s/d akhir bulan Desember 2012, sebanyak 144 lalu lintas surat menyurat di lingkungan Kantor BLLAJSDP Jambi dengan rincian data sebagai berikut :

- Surat Masuk sebanyak : 62 kali
- Surat Keluar sebanyak : 82 kali

b) Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga Kantor Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) di Jambi telah dilaksanakan dengan baik, sesuai kemampuan yang ada dioptimalkan, termasuk Pengawasan barang-barang Inventaris Kantor. Namun dalam pengelolaannya, secara jujur diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan signifikan, sebagian besar dipengaruhi oleh kekurangan pegawai dilingkungan kantor BLLAJSDP Jambi. Dapat kami sampaikan para pegawai yang ditugaskan di BLLAJSDP Jambi, para petugas keamanan dan petugas kebersihan, dapat bekerjasama dengan baik, melakukan inventarisasi barang milik pemerintah dan aktif melakukan

pengawasan barang-barang inventaris yang tersedia saat ini di kantor BLLAJSDP Jambi.

2) Bidang Kepegawaian

Untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan rutin dan penyelenggaraan pembangunan (pengadaan barang perkantoran) di lingkungan internal BLLAJSDP Jambi, dan melaksanakan TUPOKSI, maka aspek ketersediaan dan peranan keberadaan personil (pegawai) cukup penting, termasuk kesiapan dan kemampuan baik kualitas dan kuantitas.

Pada tahun anggaran 2012, terhitung mulai Mei Tahun 2012 s/d Desember 2012, jumlah Pegawai PNS dilingkungan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi (BLLAJSDP Jambi) sebanyak 4 (empat) orang, dan pegawai honorer sebanyak 4 (empat) yang terdiri dari Petugas Keamanan Kantor (security) sebanyak 2 orang dan Petugas Kebersihan sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 5.2. Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan
UPT. BLLAJSDP Jambi

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					Jumlah
			S II	SI	DIII	SMA	SMP	
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1	-	-	-	-	1
2.	Penata Tk. I	III/d	-	1	-	-	-	1
3.	Penata	III/c	1	-	-	-	-	1
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	-	1	-	-	-	1
5.	Honorer	-	-	-	-	4	-	4
6.	On job training	-	-	-	4	-	-	4
J u m l a h			2	2	4	4		12

Sumber : BLLAJSDP Jambi, Tahun 2012.

3) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012

DIPA Satker BLLAJSDP Jambi diterima terhitung tanggal 4 Juli 2012, dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2012 diterima pada tanggal 13 Agustus 2012 (sebagaimana Terlampir) dengan pelaksanaan pekerjaan selama 5 bulan kerja tahun 2012. Adapun daftar kegiatan yang termuat di dalam DIPA dan POK tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3. Program dan Kegiatan UPT. BLLAJSDP Jambi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	JUMLAH BIAYA
1	Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat	Rp.1.454.553
2	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp.1.454.553
3	Layanan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat (10.00)Jambi	Rp.627.505
4	Penyelenggaraan operasional Dan pemeliharaan perkantoran	Rp.602.505
5	Operasional Kantor dan Pemeliharaan	Rp.569.505
6.	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp.22.000
7.	Belanja barang operasional lainnya	Rp.3.000
8.	Belanja barang non operasional lainnya	Rp.70.000
9.	Belanja langganan listrik	Rp.30.000
10.	Belanja Langanan Telepon	Rp.12.000
11.	Belanja langganan air	Rp.6.000
12.	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp.6.000
13.	Belanja Sewa	Rp.60.000
14.	Belanja Jasa Profesi	Rp.27.600
15.	Belanja Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp.20.000
16.	Belanja perjalanan lainnya	Rp.312.905
17.	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan SAI	Rp.33.000
18.	Honor Pejabat dan Panitia Pengadaan	Rp.25.000
19.	Honor Output Kegiatan	Rp.25.000
20	Pengadaan Meubelair Kantor (10.00) Jambi	Rp.105.348
21	Pengadaan Meubelair Kantor (10.00) Jambi	Rp.105.348
22	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp. 105.348
23	Pengadaan AC Split	Rp.56.800
24	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp.56.800
25	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Rp.40.000
26	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp.40.000
27	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Rp.415.000
28	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp.245.000
29	Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp.209.900
30	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp.209.900

Sumber : BLLAJSDP Jambi,Tahun 2012.

4) Realisasi Pelaksanaan DIPA Tahun 2012

Pada Tahun Anggaran 2012, terhitung mulai bulan Juli 2012, Kantor BLLAJSDP Jambi, memperoleh dana anggaran yang dituangkan dalam DIPA No. 1284/022-03.01/05/2012 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 1.454.553.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Modal	Rp. 827.048.000,-
Belanja Barang	<u>Rp. 627.505.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.454.553.000,-

- a) Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2012. sebesar Rp. 1.260.320.169,-
 - b) Daya Serap Tahun 2012 yang terealisasi sebesar 86.65%
 - c) Pertanggung Jawaban keuangan atas realisasi penggunaan anggaran tersebut secara berkala dilaporkan dalam bentuk Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan pengiriman serta tembusan – tembusannya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) Pemeriksaan Kas, dilakukan oleh Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan Jambi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni setiap Triwulan disamping itu pula pada waktu – waktu tertentu dilaksanakan pemeriksaan bila diperlukan.
- 5) Program Kerja BLLAJSDP Tahun 2012
- Kegiatan dan Rencana Kerja BLLAJSDP Jambi, sampai akhir Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
- a) Melaksanakan Rapat Konsolidasi Internal dilikungan BLLAJSDP Jambi;
 - b) Melaksanakan Rapat Konsolidasi Internal dilingkungan Satuan Kerja BLLAJSDP Jambi;
 - c) Menyusun Program Kerja BLLAJSDP Jambi, baik Jangka Pendek, Jangka Menengah Maupun Jangka Panjang;
 - d) Melakukan Konsolidasi dan Koordinasi Program Kerja dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan, Ditjendat);
 - e) Melakukan Kunjungan Kerja, Konsolidasi, Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pemantapan Program Kerja Kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Pengenalan Wilayah Kerja, Penyampaian Keberadaan dan TUPOKSI BLAJSDP Jambi;

- f) Menghadiri Rapat Koordinasi Kelembagaan dengan Jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera (tidak termasuk Provinsi Lampung);
 - g) Melaksanakan Konsolidasi, Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantapan Program Kerja dibidang Pembangunan, Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan, yang Sumber Dana berasal dari APBN, secara intensif dan berkesinambungan dengan KPA Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP, yang saat ini berada di Pemerintah Provinsi.
 - h) Melakukan **Rapat Kerja Rutin**, Konsolidasi, Sinkronisasi, Konsultasi, Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pemantapan Program Kerja Pembangunan di bidang LLAJSDP, dengan KPA Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan Pengembangan LLASDP dimasing-masing Provinsi dalam wilayah kerja BLLAJSDP Jambi.
 - i) Melakukan Inventarisasi dan Pengumpulan *Data Base* secara bertahap di wilayah kerja.
- 6) Realisasi Program Kerja Tahun 2012

Sebagaimana kami kemukakan diatas, bahwa pembentukan organisasi BLLAJSDP Jambi, efektif mulai melaksanakan tugas di Pulau Sumatera dengan wilayah kerja mencakup 9 (sembilan) Provinsi, terhitung mulai minggu ke III Juli 2012.

Berbagai Upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan pembentukan keberadaan Organisasi BLLAJSDP Jambi, dimulai dari Pengenalan Organisasi, Penyusunan Program Kerja 2012 dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerja dengan melakukan koordinasi kelembagaan, kunjungan kerja ke masing-masing Dinas Perhubungan Provinsi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan BLLAJSDP Jambi antara lain memperkenalkan dan memaparkan TUPOKSI BLLAJSDP serta melakukan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi berbagai tugas di

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan, serta melakukan rapat teknis dengan Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan satuan Kerja Pengembangan LLASDP di wilayah kerja BLLAJSDP Jambi.

Disamping itu BLLAJSDP Jambi, turut aktif mengikuti berbagai kegiatan Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, antara lain Rakornis Angkutan Perintis, Rakornis Perhubungan Darat, Rakornis Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Sosialisasi dan Penyusunan SOP Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor, termasuk menghadiri undangan rapat pembahasan berbagai pekerjaan studi, Workshop yang dilaksanakan Direktorat LLAJ, Direktorat BSTP, Direktorat LLASDP, dan Direktorat KTD dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

b Permasalahan Yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BLLAJSDP Jambi, antara lain :

1) Belum memiliki KANTOR tetap

Dalam melaksanakan kegiatan kerja Organisasi Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Jambi, belum di dukung dengan ketersediaan atau belum memiliki Kantor menetap. Status Kepemilikan Kantor BLLAJSDP Jambi saat ini masih status Kontrak Sewa setiap tahun anggaran.

2) Fasilitas Pendukung Kantor Belum Memadai.

Untuk kelancaran pelaksanaan TUPOKSI BLLAJSDP Jambi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.86 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan, dalam hal pelaksanaan tugas rutin dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja dibutuhkan Fasilitas Kantor yang memadai. Untuk masa yang akan datang, guna dapat menciptakan suasana nyaman, tenang dan

kondusif, melaksanakan berbagai tugas rutin maupun pembangunan, sangat membutuhkan kesiapan perangkat Fasilitas Pendukung Kantor yang memadai. Fasilitas Kantor BLLAJSDP saat ini hanya terdiri dari 11 Meja Kerja, 11 Kursi Kerja, 4(empat) Unit Fasilitas AC, dinilai belum memadai, untuk mendukung suasana nyaman, tenang, kondusif, (Safe Work). Sampai dengan saat ini, kelengkapan media informasi berupa Televisi, juga belum tersedia sebagai fasilitas informasi akan kebutuhan berbagai informasi dari wilayah Nusantara.

3) Kendaraan Operasional Belum Memadai

Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional, saat ini di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khusus pada Kantor BLLAJSDP Jambi, baru memiliki 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4 (R4) sebanyak 2(dua) unit dan Kendaraan Roda 2 (R-2) sebanyak 2 unit, yang dipergunakan sebagai kendaraan dinas untuk keperluan dinas operasional. Keberadaan kendaraan dinas operasional ini, efektif dipergunakan mulai bulan Oktober 2012. Selama 2 (dua) bulan pertama pembentukan dan keberadaan BLLAJSDP Jambi, yakni pada Minggu ke II bulan Juli 2012 s/d September 2012, dalam hal melaksanakan dan mendukung kelancaran kegiatan rutin dan proses pelaksanaan pengadaan barang pada kantor BLLAJSDP Jambi, yang bersifat operasional, antara lain menghadiri rapat eksternal, mengirim surat Kondisi saat ini,

Dalam rangka memobilisasi pencapaian kinerja BLLAJSDP Jambi, dimasa yang akan datang, peran Kendaraan **Operasional**, berupa penambahan kendaraan roda 4 (R-4), sangatlah dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan kegiatan inventarisasi, survai, monitoring /pemantuan pelayanan kinerja prasarana dan sarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan yang berada di 9 (sembilan) Provinsi di Pulau Sumatera sesuai wilayah kerja, yang memerlukan percepatan penyampaian informasi dan kordinasi. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan performansi dan pelaksanaan tugas dinas, penambahan kendaraan

dinas untuk Pejabat Struktural dilingkungan BLLAJSDP Jambi, masih diperlukan.

4) Sumber Daya Manusia

Salah satu motor penggerak roda keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di wilayah Kerja BLLAJSDP Jambi, Mutlak didukung adanya Ketersediaan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dedikasi, pengabdian, pekerja keras, perilaku yang baik, memiliki kemampuan handal, kompetensi profesional di bidang tugas melaksanakan pekerjaan di daerah.

Kondisi saat ini di Kantor BLLAJSDP Jambi, hanya tersedia 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Struktural dilingkungan BLLAJSDP Jambi, yang berasal dari PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam melaksanakan berbagai tugas rutin, koordinasi kelembagaan internal maupun eksternal UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BLLAJSDP Jambi, Penyusunan Laporan Administrasi, penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Kegiatan Satker BLLAJSDP Jambi, mulai dari penyusunan konsep, pengetikan, pengiriman, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, terpaksa harus ekstra menyediakan waktu yang cukup menyita tenaga, merangkap tugas berbagai kegiatan untuk mencapai target pencapaian realisasi program kerja. Guna mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan BLLAJSDP Jambi, untuk sementara waktu dibantu oleh tenaga personil yang sedang on Job Training (Magang) dan bantuan staf dari lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Secara nyata, kondisi saat ini yang terkait dengan proses penerbitan surat-menyurat, pengiriman surat, pembuatan dan pengetikan surat, pengelolaan kepegawaian, penyusunan laporan keuangan, Daftar Hadir Pegawai, Urusan Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat, masih dirangkap Kepala Bagian Tata Usaha BLLAJSDP Jambi. Fact Finding Real Condition, mengemukakan, **belum tersedia** staf

pendukung baik di bagian Tata Usaha, Bagian Seksi Jaringan Pelayanan, Bagian Seksi Angkutan dan Teknis Sarana BLLAJSDP Jambi.

5) Administrasi Kepegawaian

Kondisi saat ini mengenai Urusan Kepegawaian Personil PNS yang ditugaskan di BLLAJSDP Jambi, sampai saat ini masih ditangani Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, seperti Pengambilan Gaji, Usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Usulan Mengikuti Diklat, usulan pengajuan penerima penghargaan.

Melihat kondisi saat ini, memang belum memungkinkan untuk dilakukan segera pengalihan urusan kepegawaian personil PNS yang semula bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di pusat, mengingat keterbatasan personil dan keperluan kelancaran penanganan administrasi kepegawaian,

6) Anggaran Pembangunan

Keberadaan BLLAJSDP sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam melaksanakan TUPOKSI nya, mutlak didukung dengan ketersediaan Anggaran Pembangunan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 86 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Mempunyai Tugas antara lain Melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan di masing-masing wilayah kerja, tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran pembangunan dan pemeliharaan. Kondisi saat ini, tugas pokok tersebut belum dapat dilaksanakan, pendekatan yang dilakukan hanya terbatas ke bidang Koordinasi, Konsolidasi, Penyamaan Persepsi, Sinkronisasi Penyusunan dan Pemantapan Program Kerja di bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana, Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan di masing-masing wilayah kerja BLLAJSDP Jambi, terutama dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan para Satker Sementara bidang

Pengembangan LLAJ dan Satker Sementara Pengembangan LLASDP di masing-masing wilayah kerja.

7) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi BLLAJSDP Jambi, membutuhkan Pegawai yang memiliki Kompetensi Kemampuan dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Seiring dengan waktu berjalan dan kondisi saat ini, PNS dilingkungan BLLAJSDP masih terbatas dan pemenuhan personil belum lengkap sebagai staf pendukung maupun pejabat yang akan mengisi jabatan fungsional. Pendidikan dan Pelatihan untuk sementara waktu masih di usulkan dari bidang Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

c Upaya Yang Dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan dilingkungan BLLAJSDP Jambi, upaya yang dilakukan antara lain :

1) Peningkatan Performansi BLLAJSDP Jambi

Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk hal berikut :

- a) Pengadaan Pembangunan Kantor BLLAJSDP (jangka Panjang)
- b) Sewa Gedung Kantor BLLAJSDP (jangka Pendek)
- c) Pemeliharaan Kondisi Gedung /Kantor
- d) Peningkatan Fasilitas Kantor

2) Bidang Sumber Daya Manusia

- a) Mengusulkan Pengisian Kebutuhan Personil PNS dari Pusat

Pencapaian kinerja yang optimal BLLAJSDP Jambi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sangat tergantung kepada pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Jumlah dan Kompetensi yang dibutuhkan, pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor, pemenuhan peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan disamping Anggaran Pembeangunan yang tersedia.

Melihat kenyataan (fact finding condition), BLLAJSDP Jambi mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat, untuk dapat kiranya mengisi kekosongan jumlah personil yang dibutuhkan untuk mengisi formasi PNS.

Formasi Jumlah Personil PNS dilingkungan BLLAJSDP Jambi, yang dibutuhkan dalam jangka panjang sebanyak 28 Personil PNS, yang terdiri dari :

(1) Bidang Subbag Tata Usaha

- (a) Tenaga Personil sebagai Pramur Surat.
- (b) Tenaga Personil sebagai Pengelola Keuangan (Bendahara)
- (c) Tenaga Personil sebagai Pengelola Kepegawaian
- (d) Tenaga Personil sebagai SPM
- (e) Tenaga Personil sebagai Petugas SAI
- (f) Tenaga Personil sebagai Petugas SIMAK BMN
- (g) Tenaga Personil sebagai Operator Komputer
- (h) Tenaga Personil sebagai Petugas Humas
- (i) Tenaga Personil sebagai Teknisi
- (j) Tenaga Personil sebagai Operator Radio Telekomunikasi
- (k) Tenaga Personil sebagai Bendahara Pengeluaran

(2) Bidang Jaringan Pelayanan Dan Prasarana

- (a) Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJSDP
- (b) Petugas Monitoring Terminal Penumpang
- (c) Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalin
- (d) Pengevaluasi Analisis Dampak Lalin
- (e) Petugas Monitoring Penimbangan Kendaraan Bermotor
- (f) Petugas Monitoring Pelayanan Kinerja Penyelenggaraan Pelabuhan SDP
- (g) Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP

(3) Bidang Angkutan Dan Teknis Sarana

- (a) Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP

- (b) Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- (c) Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata)
- (d) Pengawas Teknis Angkutan Alat Berat dan B3
- (e) Pengawas Teknis Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- (f) Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan
- (g) Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- (h) Penyidik Pelanggaran Bidang LLAJ
- (i) Petugas Bimbingan Keselamatan LLAJ
- (j) Petugas Bimbingan Keselamatan LLASDP
- (4) Kebutuhan Personil dalam jangka pendek, yang memungkinkan disediakan adalah :
 - (a) Personil yang ditugaskan sebagai Bendahara ,
 - (b) Personil yang ditugaskan sebagai SAI,
 - (c) Personil yang ditugaskan sebagai Petugas SIMAK BMN,
 - (d) Personil yang ditugaskan sebagai Pramur Surat,
 - (e) Personil yang ditugaskan sebagai Operator Komputer
 - (f) Personil Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP
 - (g) Personil Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata), Angkutan Alat Berat dan B3
 - (h) Personil Penyiapan bahan Pengawas Teknis Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan

Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan

- (i) Personil Penyiapan bahan Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
 - (j) Personil Penyiapan bahan Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJSDP
 - (k) Personil Penyiapan dan Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalin, Pengevaluasi Analisis Dampak Lalin, Kebutuhan Lalu Lintas, Penyiapan Bahan Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan dan Kemacetan Lalu Lintas (di Jalan Nasional),
 - (l) Personil penyiapan bahan Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP
- b) Mengusulkan Bantuan Personil dari Dishub Provinsi Jambi
- Sambil menunggu realisasi pengisian formasi PNS dilingkungan BLLAJSDP Jambi dan guna menunjang kelancaran pekerjaan pada Satuan Kerja BLLAJSDP Jambi khususnya pada tahun anggaran 2013, mengusulkan bantuan personil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sebagai berikut:
- (1) Personil yang ditugaskan sebagai Panitia Lelang
 - (2) Personil yang ditugaskan sebagai Penerima Pemeriksa Barang
 - (3) Personil yang ditugaskan sebagai pramu surat (Staf Satker)
 - (4) Personil yang ditugaskan sebagai SAI sebanyak 4 (empat) orang,
 - (5) Personil yang ditugaskan sebagai Petugas SPM,
 - (6) Personil yang ditugaskan sebagai Petugas SIMAK BMN,
 - (7) Personil yang ditugaskan sebagai Pramu Surat,
 - (8) Personil yang ditugaskan sebagai Operator Komputer

3) Bidang Operasional

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas rutin maupun tugas pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan peningkatan parasarana dan sarana dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan (LLASDP), Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Angkutan Penumpang, ASDP, Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor, mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk hal-hal berikut :

- 1) Pengadaan Alat-alat Survai LLAJSDP
- 2) Pengadaan Kendaraan Operasional Survai dan Monitoring
- 3) Pengadaan Kendaraan Sosialisasi Keselamatan LLASDP
- 4) Penambahan Kendaran Dinas untuk Pejabat Struktural

4) Bidang Pembangunan

Guna merealisasikan pembentukan organisasi BLLAJSDP Jambi, sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BLLAJSDP Jambi, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 86 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan, akan menyusun Program BLLAJSDP Jambi Tahun 2014-2018.

5) Bidang Kepegawaian

Pada masa yang akan datang, dengan terpenuhinya personil PNS di lingkungan BLLAJSDP Jambi, BLLAJSDP Jambi akan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, agar urusan Kepegawaian PNS, dapat dialihkan menjadi bagian organisasi BLLAJSDP Jambi.

3. BLLAJSDP PALANGKARAYA

a Kondisi Saat Ini

1) Jumlah Personil.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BLLAJSDP Palangkaraya didukung oleh PNS dan non-PNS dengan data sebagai berikut :

Tabel 5.4. Pegawai Negeri Sipil di BLLAJSDP Palangkaraya

NO	NAMA	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1.	Dadan M. Ramdan, ATD, M.Si	Kepala BLLAJSDP Palangkaraya	Pasca Sarjana
2.	B. Wahyu Hapsoro, MMTr	Kepala Subbaguan Tata Usaha	Pasca Sarjana
3.	Arivianto Utomo, S.SiT, M.Si	Kepala Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana	Pasca Sarjana
4.	Utomo Harmawan, ATD, MT	Kepala Seksi Angkutan dan Teknik Sarana	Pasca Sarjana
5.	Rional F. Girot, SE.	Bendahara Pengeluaran	Sarjana
6.	Rezki Satriya Suherman, SE.	Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP	Sarjana

Sumber : BLLAJSDP Palangkaraya, Tahun 2012.

2) Efektifitas Organisasi BLLAJSDP Palangkaraya.

Personil BLLAJSDP Palangkaraya secara efektif mulai bertugas di Palangkaraya terhitung mulai tanggal 23 Juli 2012, karena meskipun pengangkatan dalam jabatan struktural telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.122 Tahun 2012 tanggal 19 April 2012, tetapi untuk penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran pada Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan baru terbit pada tanggal 19 Juli 2012 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.731 Tahun 2012.

Untuk melihat efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi BLLAJSDP Palangkaraya sepanjang tahun anggaran 2012 dapat dilihat sebagai berikut :

a) Peraturan / SK yang telah diterbitkan :

- (1) SK Kepala BLLAJSDP Palangkaraya Nomor KP.004/1/2/BLLAJSDP-PLK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggung Jawab,

serta Honorarium Personil Pengelola Anggaran BLLAJSDP Palangkaraya T.A.2012;

- (2) SK Kepala BLLAJSDP Palangkaraya Nomor KP.004/1/2a/BLLAJSDP-PLK/2012 tentang Struktur Organisasi Sistem Akuntansi Instansi Pengguna Anggaran (SAKPA) dan SIMAK pada BLLAJSDP Palangkaraya T.A.2012;
- (3) SK Kepala BLLAJSDP Palangkaraya Nomor KP.004/1/2b/BLLAJSDP-PLK/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang BLLAJSDP Palangkaraya T.A.2012;
- (4) SK Kepala BLLAJSDP Palangkaraya Nomor KP.004/1/2c/BLLAJSDP-PLK/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada BLLAJSDP Palangkaraya T.A.2012.

b) Jumlah Surat Masuk tercatat :

Jumlah surat yang masuk ke BLLAJSDP Palangkaraya dapat dikelompokkan menurut asal surat masuk dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.5. Jumlah Surat Masuk

ASAL SURAT MASUK, KLASIFIKASI DAN JUMLAHNYA		
LINGKUNGAN KEMENHUB	LINGKUNGAN KEMENTERIAN DILUAR KEMENHUB	UMUM / NON-LEMBAGA
1) Undangan 2) Angkutan jalan 3) Kepegawaian 4) Surat Keputusan 5) Peraturan Menteri 6) Keuangan	1) Undangan 2) Angkutan jalan 3) Keuangan 4) Permohonan 5) Serah Terima 6) Surat Pengantar	1) Permohonan bantuan
40	29	1
70		

Sumber : BLLAJSDP Palangkaraya, Tahun 2012.

c) Jumlah Surat Keluar tercatat :

Jumlah surat yang keluar dari BLLAJSDP Palangkaraya dapat dikelompokkan menurut asal surat masuk dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.6. Jumlah Surat Keluar

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1.	Angkutan Jalan	1
2.	Kepegawaian	38
3.	Keuangan	67
4.	Perencanaan	3
5.	Perlengkapan	14
6.	Umum	29
7.	Pengembangan SDM	1
Jumlah Surat Keluar		153

Sumber : BLLAJSDP Palangkaraya, Tahun 2012.

3) Penyerapan Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dari anggaran yang diberikan sebesar Rp. 1.378.233.000,- realisasi data anggaran yang diserap di BLLAJSDP Palangkaraya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.7. Penyerapan Dana BLLAJSDP Palangkaraya

NO	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
1	022.03.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Rp 1.378.233.000	Rp 1.222.408.201	Rp 155.824.799
2	06.1953	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 1.378.233.000	Rp 1.222.408.201	Rp 155.824.799
3	1953,001	Layanan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Rp 556.185.000	Rp 425.706.701	Rp 130.478.299
4	52	BELANJA BARANG	Rp 556.185.000	Rp 425.706.701	Rp 130.478.299
5	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 22.000.000	Rp 9.396.800	Rp 12.603.200
6	521115	Belanja Honor Operasional satuan Kerja	Rp 33.000.000	Rp 31.200.000	Rp 1.800.000
7	521119	Belanja Barang Operasional lainnya	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 3.000.000
8	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	Rp 2.500.000	Rp 15.948.600	Rp (13.448.600)
9	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp 70.000.000	Rp 61.370.000	Rp 8.630.000
10	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
11	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000
12	522113	Belanja Langganan Air	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 6.000.000
13	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 6.000.000
14	522141	Belanja sewa	Rp 60.000.000	Rp 55.000.000	Rp 5.000.000
15	522151	Belanja jasa Profesi	Rp 27.600.000	Rp -	Rp 27.600.000
16	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 20.000.000	Rp 11.629.100	Rp 8.370.900
17	524119	Belanja Perjalanan Lainnya	Rp 241.585.000	Rp 241.162.200	Rp 422.800

NO	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
18	1953,015	Pengadaan Meubelair Kantor	Rp 105.348.000	Rp 103.750.000	Rp 1.598.000
19	53	BELANJA MODAL	Rp 105.348.000	Rp 103.750.000	Rp 1.598.000
20	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 105.348.000	Rp 103.750.000	Rp 1.598.000
21	1953,016	Pengadaan AC Split	Rp 56.800.000	Rp 56.600.000	Rp 200.000
22	53	BELANJA MODAL	Rp 56.800.000	Rp 56.600.000	Rp 200.000
23	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 56.800.000	Rp 56.600.000	Rp 200.000
24	1953,019	Pengadaan Kendaraan operasional roda-2	Rp 40.000.000	Rp 37.901.500	Rp 2.098.500
25	53	BELANJA MODAL	Rp 40.000.000	Rp 37.901.500	Rp 2.098.500
26	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 40.000.000	Rp 37.901.500	Rp 2.098.500
27	1953,020	Pengadaan Kendaraan operasional roda-4	Rp 410.000.000	Rp 391.800.000	Rp 18.200.000
28	53	BELANJA MODAL	Rp 410.000.000	Rp 391.800.000	Rp 18.200.000
29	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 410.000.000	Rp 391.800.000	Rp 18.200.000
30	1953,996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 209.900.000	Rp 206.650.000	Rp 3.250.000
31	53	BELANJA MODAL	Rp 209.900.000	Rp 206.650.000	Rp 3.250.000
32	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 209.900.000	Rp 206.650.000	Rp 3.250.000

Sumber : BLLAJSDP Palangkaraya, Tahun 2012.

4) Hasil kemajuan program kerja.

a) Output :

- (1) Sosialisasi dan koordinasi kepada Pejabat / Instansi terkait mengenai keberadaan, tugas dan fungsi BLLAJSDP;
- (2) Rapat koordinasi dengan Instansi / unit kerja yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLLAJSDP, yaitu Dinas Perhubungan Propinsi / Kabupaten / Kota, Satker Pengembangan LLAJ, Satker Pengembangan LLASDP, Kepala Stasiun DAMRI se-Kalimantan;
- (3) Pengenalan wilayah kerja secara bertahap se-Kalimantan, dengan fokus Dishub Kota / Kabupaten.

b) Outcome :

- (1) Data Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) Propinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Dokumentasi pengenalan wilayah kerja di Propinsi Kalimantan Tengah, meliputi kondisi perlengkapan jalan (rambu, marka, guardraill, APILL, lampu penerangan jalan umum), kantor Dishubkominformo Propinsi / Kabupaten

/ Kota, terminal jalan, dermaga sungai dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, dan jembatan timbang;

(3) Data identifikasi awal asset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kalimantan.

c) Benefit :

- (1) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan BLLAJSDP sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2011 dapat disusun dan dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan di wilayah kerja BLLAJSDP Palangkaraya;
- (2) Tahapan untuk mewujudkan pelayanan transportasi darat di Pulau Kalimantan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, dapat lebih mudah dipetakan.

b Permasalahan Yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BLLAJSDP Palangkaraya, antara lain :

1) Belum memiliki KANTOR tetap

Dalam melaksanakan kegiatan kerja Organisasi Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Jambi, belum di dukung dengan ketersediaan atau belum memiliki Kantor menetap. Status Kepemilikan Kantor BLLAJSDP Palangkaraya saat ini masih status Kontrak Sewa setiap tahun anggaran.

2) Fasilitas Pendukung Kantor Belum Memadai.

Untuk kelancaran pelaksanaan TUPOKSI BLLAJSDP Palangkaraya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.86 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai,Danau Dan Penyeberangan, dalam hal pelaksanaan tugas rutin dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja dibutuhkan Fasilitas Kantor yang memadai.

3) Kendaraan Operasional Belum Memadai

4) Sumber Daya Manusia

Salah satu motor penggerak roda keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di wilayah Kerja BLLAJSDP Palangkaraya, Mutlak didukung adanya Ketersediaan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dedikasi, pengabdian, pekerja keras, perilaku yang baik, memiliki kemampuan handal, kompetensi profesional di bidang tugas melaksanakan pekerjaan di daerah.

5) Anggaran Pembangunan

6) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi BLLAJSDP Palangkaraya, membutuhkan Pegawai yang memiliki Kompetensi Kemampuan dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Seiring dengan waktu berjalan dan kondisi saat ini, PNS dilingkungan BLLAJSDP masih terbatas dan pemenuhan personil belum lengkap sebagai staf pendukung maupun pejabat yang akan mengisi jabatan fungsional. Pendidikan dan Pelatihan untuk sementara waktu masih di usulkan dari bidang Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

c Upaya Yang Dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan dilingkungan BLLAJSDP Palangkaraya, upaya yang dilakukan antara lain :

1) Peningkatan Performansi BLLAJSDP Palangkarya

Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk hal berikut :

- a) Pengadaan Pembangunan Kantor BLLAJSDP (jangka Panjang)
- b) Sewa Gedung Kantor BLLAJSDP (jangka Pendek)
- c) Pemeliharaan Kondisi Gedung /Kantor
- d) Peningkatan Fasilitas Kantor

2) Bidang Sumber Daya Manusia

- a) Mengusulkan Pengisian Kebutuhan Personil PNS dari Pusat
- b) Mengusulkan Bantuan Personil dari Dishub Provinsi Jambi

- 3) Bidang Operasional
- 4) Bidang Pembangunan
- 5) Bidang Kepegawaian

Pada masa yang akan datang, dengan terpenuhinya personil PNS di lingkungan BLLAJSDP Palangkaraya, BLLAJSDP Palangkaraya akan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Cq Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, agar urusan Kepegawaian PNS, dapat dialihkan menjadi bagian organisasi BLLAJSDP Palangkaraya.

4. BLLAJSDP PALU

a Kondisi Saat Ini

Balai LLAJSDP Palu dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2011 yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana, fasilitas bimbingan dan pengawasan teknis serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan. Balai LLAJSDP Palu meliputi wilayah kerja 10 Provinsi di Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Kantor BLLAJSDP Palu mulai aktif pada bulan Juli 2012 dengan alamat Jl. Nuri No. 3 Kota Palu menempati kantor dengan status sewa. Formasi organisasi, awalnya hanya diisi pejabat struktural 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) Kepala Balai (eselon III a), 1 (satu) Kasubag TU (eselon IVa), dan 1 (satu) Kepala Seksi Angkutan dan Teknik Sarana (eselon IVa), dan baru pertengahan minggu II Desember 2012 diisi pejabat struktural tingkat eselon IVa, yakni Kepala Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana. Hingga akhir Tahun 2012, Organisasi BLLAJSDP Palu, masih diisi dengan 4 (empat) orang Pejabat Struktural Tingkat Eselon III a dan 3 Pejabat Struktural tingkat Eselon IVa, belum tersedia tenaga staf Pegawai Negeri Sipil. Adapun pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan rutin dan pengadaan barang inventaris kantor, maupun pelaksanaan koordinasi kelembagaan antar instansi terkait, sebagian besar

dirangkap oleh pejabat struktural dan dibantu tenaga dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk menghindari keterlambatan dan upaya peningkatan dan kelancaran proses pekerjaan pada Satuan Kerja Balai LLAJSDP Palu, terutama dalam penyusunan laporan administrasi perkantoran, penyusunan sistim akuntansi, laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan rutin dan proses pelaksanaan pengadaan seperti Pengadaan Meubelair, (Meja, Kursi Kerja), Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, Balai LLAJSDP Palu meminta bantuan personil dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan rutin dan pengadaan, dapat dilakukan dan dikerjakan dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal satuan organisasi di BLLAJSDP Palu, dan lingkungan eksternal, dalam hal ini melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi, khususnya dukungan personil (sifat bantuan sementara) mengisi kekosongan staf pendukung dilingkungan Satuan Kerja BLLAJSDP Palu, ditambah dukungan Petugas Tenaga Sekuriti dan Tenaga Kebersihan.

1) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang Administrasi dilingkungan BLLAJSDP Palu, adalah kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

a) Urusan Umum

Ditinjau dari kegiatan administrasi perkantoran berupa surat yang dikeluarkan dan surat yang masuk selama periode Tahun Anggaran Anggaran 2012, terhitung mulai bulan Juli s/d akhir bulan Desember 2012, sebanyak 144 lalu lintas surat menyurat di lingkungan Kantor Balai LLAJSDP Palu dengan rincian data sebagai berikut :

- Peraturan SK Yang Telah Diterbitkan Sebanyak 5 SK
- Jumlah Surat Masuk Tercatat Sebanyak 25 Surat
- Jumlah Surat Keluar Tercatat Sebanyak 73 Surat
- Rapat Koordinasi Yang Telah Dilakukan Sebanyak 2 Kali Pertemuan

- Koordinasi langsung dengan beberapa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dilaksanakan pada saat melakukan kunjungan dinas sosialisasi.

b) **Urusan Rumah Tangga**

Urusan Rumah Tangga Kantor Balai telah dilaksanakan dengan baik, sesuai kemampuan yang ada dioptimalkan, termasuk pengawasan barang-barang Inventaris Kantor. Namun dalam pengelolaannya, masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sebagian besar dipengaruhi oleh kekurangan pegawai.

2) **Bidang Kepegawaian**

Pada tahun 2012, jumlah Pegawai dilingkungan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu (BLLAJSDP Jambi) sebanyak 8 orang terdiri dari 4 (empat) orang PNS, dan pegawai honorer sebanyak 4 (empat) orang yang meliputi Petugas Keamanan Kantor (security) sebanyak 2 orang dan Petugas Kebersihan sebanyak 2 (dua) orang.

Untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012, Balai LLAJSDP Palu dibantu pegawai dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan pegawai tersebut untuk kegiatan dalam Satuan Kerja Balai, Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang, dan Tim Teknis yang melibatkan Pejabat dan staf serta masuk dalam Tim monitoring/sosialisasi wilayah kerja Balai.

Tabel 5.8. Jumlah dan Kualifikasi PNS

Nama	Pangkat / Golongan	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Pengalaman Jabatan	Diklat Yang Pernah Diikuti
MARWANTO HERU SANTOSO, ST, MT 19700328 199803 1 002	Penata Tk. I – III/d	S2	13 Tahun	Kepala Balai Kasi Bintek PPNS Ditjen Hubdat (2006-2012)	PPNS, MRLI Perkotaan, Pengaturan Traffic Controller, PPNS LLAJ, Asean Safety Networking (Asnet), Pengoperasian JT Portable, PIM IV, PIM III, Diklat wajib Kemenhub Angk. II, Diklat Bela Negara Rindam Jaya
MULIA UTAMA PUTERA ALAM SIREGAR, S.Kom 19631229 198703 1 001	Penata – III/c	S1	25 Tahun	Kasubbag TU	Sispuhlahta. Bendaharawan BPPAKP Pengadaan Barjas

Drs. BENNY NURDIN YUSUF, MH 19700828 199403 1 001	Penata Tk. I – III /d	S2	18 Tahun	- Kasie Kes dan Teksar Dishub Prop Sulsel (Th. 2007 – 2012) - Kasie Jaringan Pelayanan dan prasarana	PIM IV PKB PPNS Audit Kes Jalan Pengadaan Barjas PIM IV
JABONOR , MM.Tr 19710325 199803 1 001	Penata Tk. I – III/d	S2	13 Tahun	Kasie Angkutan dan Teknik Sarana	Road Safety Audit Road Safety Training Investigasi Kecelakaan PIM IV

Sumber : BLLAJSDP Palu,Tahun 2012.

3) Bidang Keuangan

Pada tahun anggaran 2012, Balai LLAJSDP Palu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.738.090.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian belanja barang sebesar Rp 825.258.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp 912.832.000,- (Sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 1.595.454.149,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Rincian pagu dan realisasi masing-masing jenis belanja sebagaimana table berikut :

Tabel 5.9. Rincian realisasi keuangan per jenis belanja

MAK	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI
521111	Belanja Keperluan Kantor	22,000,000	22,000,000
521119	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	2,150,000
521219	Belanja Barang Non Operasioal Lainnya	70,000,000	69,980,000
522111	Belanja Langganan Listrik	30,000,000	5,694,892
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	7,510,137
521213	Belanja Langganan Air	6,000,000	-
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,000,000	-
522141	Belanja Sewa	60,000,000	50,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	27,600,000	27,600,000

MAK	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Alat dan Mesin	20,000,000	20,000,000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	510,658,000	510,102,720
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	33,000,000	30,600,000
521213	Honorarium Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan	25,000,000	4,780,000
531111	PENGADAAN MEUBELAIR KANTOR Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105,348,000	101,638,000
532111	PENGADAAN AC SPLIT Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56,800,000	21,200,000
532111	PENGADAAN RODA 2 DAN 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,784,000	51,078,400
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489,000,000	474,500,000
532111	PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN PERALATAN KOMUNIKASI Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209,900,000	196,620,000
JUMLAH		1,738,090,000	1,595,454,149

Sumber : BLLAJSDP Palu, Tahun 2012.

4) Bidang Operasional

Kegiatan operasional pada tahun 2012 yang menunjang tupoksi belum secara optimal dilakukan karena belum terdapat kegiatan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012. Kegiatan operasional untuk menunjang tupoksi dilakukan bersamaan dengan kegiatan koordinasi kelembagaan dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa kegiatan operasional tersebut antara lain :

- Peninjauan pembangunan terminal Tipe A Kota Ambon, Maluku;
- Peninjauan pembangunan Dermaga Sungai di Sorong, Papua Barat;
- Peninjauan angkutan sungai di wilayah Pankep Sulsel;

- d) Peninjauan di Danau Matano Provinsi Sulsel;
- e) Fasilitas perlengkapan jalan di jalan nasional di wilayah kerja.

Kegiatan operasional untuk menunjang tupoksi lainnya dilakukan pada wilayah terdekat yaitu kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut antara lain :

- a) Peninjauan dermaga penyeberangan Taipa Sulawesi Tengah;
- b) Peninjauan terminal Tipe A Kota Palu;
- c) Peninjauan pengujian kendaraan bermotor Kota Palu;
- d) Peninjauan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Sigi;
- e) Peninjauan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Donggala;
- f) Peninjauan jembatan timbang Toboli Sulteng;
- g) Peninjauan perlengkapan jalan di ruas Toboli-Tawaili (Kebon Kopi) Sulteng.

Kegiatan operasional lainnya bersifat pendampingan pimpinan dalam acara resmi pada beberapa Provinsi wilayah kerja, yang terdiri dari :

- a) Kegiatan Sail Morotai di Maluku Utara;
- b) Peresmian Dermaga Marissa di Provinsi Gorontalo;
- c) Kunjungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Provinsi Maluku;
- d) Acara Pekan Keselamatan Jalan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;
- e) Acara sosialisasi keselamatan di Kota Palu Sulteng;

5) Bidang Pembangunan

Pada tahun 2012 kegiatan pembangunan di Balai LLAJSDP Palu belum bersifat pembangunan infrastruktur hanya bersifat pembangunan minor untuk perlengkapan Kantor Balai LLAJSDP yang meliputi :

- a) Pengadaan kendaraan bermotor roda 4;
- b) Pengadaan kendaraan bermotor roda 2;
- c) Pengadaan meubelair kantor.

Kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayah kerja Balai LLAJSDP Palu masih dilaksanakan melalui Dinas Perhubungan Provinsi.

b Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Balai LLAJSDP Palu, antara lain :

a) Permasalahan Kantor

Kondisi kantor saat ini yang masih berstatus sewa dengan bentuk rumah tinggal dengan kondisi tegangan listrik yang tidak stabil (naik turun) memperlambat pelaksanaan pekerjaan karena computer sering mati.

b) Peralatan Kerja yang masih minim

Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional, saat ini di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khusus pada Kantor Balai LLAJSDP Palu, baru memiliki 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4 (R4) sebanyak 2(dua) unit dan Kendaraan Roda 2 (R-2) sebanyak 2 unit, yang dipergunakan sebagai kendaraan dinas untuk keperluan dinas operasional. Kendaraan dinas operasional ini, kurang layak untuk dipergunakan untuk dipergunakan pada lokasi yang berada di pelosok dengan kondisi jalan yang menanjak dan berlumpur. Dibutuhkan kendaraan roda 4 dengan penggerak roda 4x4. Selain itu belum adanya peralatan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor dan peralatan survai.

c) Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2012 belum terdapat staf pegawai negeri sipil definitive, yang mempengaruhi lambatnya proses pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Balai dan pejabat structural lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan jumlah personil yang cukup besar dan harus memiliki kualifikasi tertentu belum dapat dilaksanakan oleh pegawai Balai LLAJSDP Palu. Beberapa kualifikasi pegawai yang dibutuhkan antara lain tenaga penguji kendaraan bermotor dan PPNS.

Upaya Yang Dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan dilingkungan Balai LLAJSDP Palu, upaya yang dilakukan antara lain :

- 1) **Permasalahan Kantor**
Melakukan koordinasi dengan PT. PLN untuk perbaikan tegangan listrik agar tegangan stabil.
- 2) **Peralatan kerja yang masih minim**
Mengusulkan pada kegiatan Tahun Anggaran 2013 untuk pengadaan Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dengan penggerak roda 4x4, peralatan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor dan peralatan survai.
- 3) **Sumber Daya Manusia**
Melakukan pendekatan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat memberikan tenaga sementara yang bekerja paralel dalam kegiatan operasional dan panitia pengadaan. Melakukan sosialisasi keberadaan Balai LLAJSDP Palu pada wilayah kerja dan memberikan informasi bahwa Balai membutuhkan staf dengan kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.
- 4) **Memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan di wilayah kerja mengenai butuhnya tenaga, apabila ada yang berkeinginan mutas ke Balai LLAJSDP Palu.**

5. BLLAJSDP DENPASAR

a Kondisi Saat Ini

Pada tanggal 23 Juli tahun 2012, pembentukan dan keberadaan **BLLAJSDP DENPASAR** di Provinsi Bali baru efektif berjalan. Formasi organisasi awalnya hanya diisi pejabat struktural 4 (empat) orang, terdiri dari 1(satu) Kepala Balai LLAJSDP Denpasar (eselon III a), 1(satu) Kasubag TU (eselon IVa), 1 (satu) Kepala Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana dan 1(satu) Kepala Seksi Angkutan dan Teknik Sarana (eselon IVa). Hingga akhir Tahun Anggaran 2012, Organisasi BLLAJSDP Denpasar sudah ditambah 7 (tujuh) orang tenaga staf pendukung. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan rutin dan pengadaan barang inventaris kantor, maupun pelaksanaan koordinasi kelembagaan antar instansi terkait dibantu juga tenaga personil yang Job Training (Magang) dari lulusan STTD Bekasi dan Lulusan BPPTD Bali.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan rutin dan pengadaan barang kantor BLLAJSDP Denpasar, dapat dilakukan dan dikerjakan dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal satuan organisasi di BLLAJSDP Denpasar, dan lingkungan eksternal, dalam hal ini melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi, ditambah dukungan Petugas Tenaga Sekuriti dan Tenaga Kebersihan. Adapun pemberian honorarium tenaga personil tersebut diatas berasal dari DIPA Satker BLLAJSDP Denpasar Nomor 2185/022-03.1.01/20/2012 tanggal 4 Juli 2012.

1) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang Administrasi dilingkungan BLLAJSDP Denpasar, adalah kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

a) Urusan Umum

Ditinjau dari kegiatan administrasi perkantoran berupa surat yang dikeluarkan dan surat yang masuk selama periode Tahun Anggaran Anggaran 2012, terhitung mulai bulan Juli s/d akhir bulan Desember 2012, sebanyak 120 lalu lintas surat menyurat di lingkungan Kantor Balai LLAJSDP Denpasar dengan rincian data sebagai berikut :

- Surat Masuk sebanyak : 56 kali
- Surat Keluar sebanyak : 64 kali

b) Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga Kantor Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) di Denpasar telah dilaksanakan dengan baik, sesuai kemampuan yang ada dioptimalkan, termasuk Pengawasan barang-barang Inventaris Kantor. Dapat kami sampaikan para pegawai yang ditugaskan di Balai LLAJSDP Denpasar, para petugas keamanan dan petugas kebersihan, dapat bekerjasama dengan baik, melakukan inventarisasi barang milik pemerintah dan aktif melakukan pengawasan barang-barang inventaris yang tersedia saat ini di kantor BLLAJSDP Denpasar.

2) Bidang Kepegawaian

Untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan rutin dan penyelenggaraan pembangunan (pengadaan barang perkantoran) di lingkungan internal Balai LLAJSDP Denpasar, dan melaksanakan TUPOKSI, maka aspek ketersediaan dan peranan keberadaan personil (pegawai) cukup penting, termasuk kesiapan dan kemampuan baik kualitas dan kuantitas.

Pada tahun anggaran 2012, terhitung mulai Mei Tahun 2012 s/d Desember 2012, jumlah Pegawai PNS dilingkungan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Denpasar (BLLAJSDP Denpasar) sebanyak 11 (sebelas) orang dan tenaga personil yang Job Training (Magang) sebanyak 5 (lima) orang.

Tabel 5.10. Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

UPT. BALAI LLAJSDP Denpasar

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					Jumlah
			S II	SI	DIV	DIII	DII	
1.	Pembina	IV/a	1	-	-	-	-	1
2.	Penata Tk. I	III/d	-	-	-	-	-	-
3.	Penata	III/c	1	1	-	-	-	2
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	-	4	-	-	-	4
5.	Penata Muda	III/a	-	2	1	-	-	3
6.	Pengatur	II/c	-	-	-	1	-	1
7.	On job training	-	-	-	2	1	2	5
J u m l a h			2	7	3	2	2	16

Sumber : Balai LLAJSDP Denpasar, Tahun 2012.

3) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012

DIPA Satker BLLAJSDP Denpasar diterima terhitung tanggal 4 Juli 2012, dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2012 diterima pada tanggal 13 Agustus 2012 (sebagaimana Terlampir) dengan pelaksanaan pekerjaan selama 5 bulan kerja tahun 2012. Adapun daftar kegiatan yang termuat di dalam DIPA dan POK tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11. Program dan Kegiatan UPT. BALAI LLAJSDP Denpasar

No	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Jumlah Biaya
1	Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat	Rp.1.465.988
2	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp.1.465.988
3	Layanan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat (10.00) Denpasar	Rp.647.500
4	Penyelenggaraan operasional Dan pemeliharaan perkantoran	Rp.622.500
5	Operasional Kantor dan Pemeliharaan	Rp.589.500
6.	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp.22.000
7.	Belanja barang operasional lainnya	Rp.3.000
8.	Belanja barang non operasional lainnya	Rp.70.000
9.	Belanja langganan listrik	Rp.30.000
10.	Belanja Langanan Telepon	Rp.12.000
11.	Belanja langganan air	Rp.6.000
12.	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp.6.000
13.	Belanja Sewa	Rp.60.000
14.	Belanja Jasa Profesi	Rp.27.600
15.	Belanja Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp.20.000
16.	Belanja perjalanan lainnya	Rp.332.900
17.	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan SAI	Rp.33.000
18.	Honor Pejabat dan Panitia Pengadaan	Rp.25.000
19.	Honor Output Kegiatan	Rp.25.000
20.	Pengadaan Meubelair Kantor (10.00) Denpasar	Rp.105.348
21.	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp. 105.348
22.	Pengadaan AC Split	Rp.56.800
23.	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp.56.800
24.	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Rp.40.000
25.	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp.40.000
26.	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Rp.406.440
27.	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp.406.440
28.	Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp.209.900
39.	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp.209.900

Sumber : Balai LLAJSDP Denpasar,Tahun 2012.

4) Realisasi Pelaksanaan DIPA Tahun 2012

Pada Tahun Anggaran 2012, terhitung mulai bulan Juli 2012, Kantor BLLAJSDP Denpasar, memperoleh dana anggaran yang dituangkan dalam DIPA No. 2185/022-03.1.01/20/2012 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 1.465.988.000,-

- a) Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2012. sebesar Rp. 1.354.548.559,-
- b) Daya Serap Tahun 2012 sebesar 92,4%

b Program Kerja BLLAJSDP Tahun 2012

Kegiatan dan Rencana Kerja BLLAJSDP Denpasar, sampai akhir Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Rapat Konsolidasi Internal dilingkungan BLLAJSDP Denpasar;
- 2) Melaksanakan Rapat Konsolidasi Internal dilingkungan Satuan Kerja di wilayah kerja BLLAJSDP Denpasar;
- 3) Menyusun Program Kerja BLLAJSDP Denpasar, baik Jangka Pendek, Jangka Menengah Maupun Jangka Panjang;
- 4) Melakukan Konsolidasi dan Koordinasi Program Kerja dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat);
- 5) Melakukan Kunjungan Kerja, Konsolidasi, Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pemantapan Program Kerja Kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Pengenalan Wilayah Kerja, Penyampaian Keberadaan dan TUPOKSI BLAJSDP Denpasar;
- 6) Menghadiri Rapat Koordinasi Kelembagaan dengan Jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Kabupaten/Kota se wilayah kerja;
- 7) Melaksanakan Konsolidasi, Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantapan Program Kerja dibidang Pembangunan, Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan, yang Sumber Dana berasal dari APBN, secara intensif dan berkesinambungan dengan KPA Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP, yang saat ini berada di Pemerintah Provinsi, meliputi :

- a) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Konsolidasi, Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantapan Program Kerja Pembangunan, khususnya di Jalan Nasional, terkait oleh Satker Sementara di wilayah kerja :

- (1) Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
 - (2) Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail
 - (3) Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (Petunjuk /RPPJ, Perintah, Peringatan dan Larangan)
 - (4) Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan APILL, Warning Light
 - (5) Pembangunan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Pemasangan Deliniator, Paku Jalan, Cermin Tikungan
 - (6) Pembangunan Pengadaan Zona Selamat Sekolah
 - (7) Sosialisasi Keselamatan Jalan
 - (8) Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Jalan
 - (9) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan
 - (10) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan
 - (11) Program Penanganan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di ruas Jalan Nasional
 - (12) Program Subsidi Bus Perintis
 - (13) Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang
 - (14) Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
- b) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- Konsolidasi, Koordinasi, Fasilitas dan Pemantapan Program Kerja Pembangunan di Bidang LLAJSDP oleh Satker Sementara di wilayah kerja, antara lain terkait dengan :
- (1) Pembangunan Dermaga Sungai, Danau, Penyeberangan
 - (2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Danau, Penyeberangan
 - (3) Pembangunan Rambu Penuntun di Alur Penyeberangan
 - (4) Peningkatan Rambu Sungai dan Danau

- (5) Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
- (6) Melakukan Rapat Kerja Rutin, Konsolidasi, Sinkronisasi, Konsultasi, Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pemantapan Program Kerja Pembangunan di bidang LLAJSDP, dengan KPA Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan Pengembangan LLASDP dimasing-masing Provinsi dalam wilayah kerja Balai LLAJSDP Denpasar.
- (7) Melakukan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Base secara bertahap di wilayah kerja.

c Realisasi Program Kerja Tahun 2012

Sebagaimana kami kemukakan diatas, bahwa pembentukan organisasi BLLAJSDP Denpasar, efektif mulai melaksanakan tugas di Bali dengan wilayah kerja mencakup 9 (sembilan) Provinsi, terhitung mulai minggu ke III Juli 2012.

Berbagai Upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan pembentukan keberadaan Organisasi BLLAJSDP Denpasar, dimulai dari Pengenalan Organisasi, Penyusunan Program Kerja 2012 dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerja dengan melakukan koordinasi kelembagaan, kunjungan kerja ke masing-masing Dinas Perhubungan Provinsi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan BLLAJSDP Denpasar antara lain memperkenalkan dan memaparkan TUPOKSI BLLAJSDP serta melakukan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi berbagai tugas di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan, serta melakukan rapat teknis dengan Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan satuan Kerja Pengembangan LLASDP di wilayah kerja BLLAJSDP Denpasar.

Disamping itu Balai LLAJSDP Denpasar, turut aktif mengikuti berbagai kegiatan Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, antara lain Rakornis Angkutan Perintis, Rakornis Perhubungan Darat, Rakornis Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Sosialisasi dan Penyusunan SOP Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor, termasuk menghadiri undangan rapat

pembahasan berbagai pekerjaan studi, Workshop yang dilaksanakan Direktorat LLAJ, Direktorat BSTP, Direktorat LLASDP, dan Direktorat KTD dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

d Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BLLAJSDP Denpasar, antara lain :

1) Belum memiliki KANTOR tetap

Dalam melaksanakan kegiatan kerja Organisasi Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Denpasar, belum di dukung dengan ketersediaan atau belum memiliki Kantor menetap. Status Kepemilikan Kantor BLLAJSDP Denpasar saat ini masih status Kontrak Sewa setiap tahun anggaran.

2) Fasilitas Pendukung Kantor Belum Memadai.

Untuk kelancaran pelaksanaan TUPOKSI BLLAJSDP Denpasar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.86 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan, dalam hal pelaksanaan tugas rutin dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja dibutuhkan Fasilitas Kantor yang memadai. Untuk masa yang akan datang, guna dapat menciptakan suasana nyaman, tenang dan kondusif, melaksanakan berbagai tugas rutin maupun pembangunan, sangat membutuhkan kesiapan perangkat Fasilitas Pendukung Kantor yang memadai. Fasilitas Kantor BLLAJSDP saat ini dinilai belum memadai, untuk mendukung suasana nyaman, tenang, kondusif, (Safe Work). Sampai dengan saat ini, kelengkapan media informasi berupa Televisi, juga belum tersedia sebagai fasilitas informasi akan kebutuhan berbagai informasi dari wilayah Nusantara.

3) Kendaraan Operasional Belum Memadai

Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional, saat ini di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khusus pada Kantor Balai LLAJSDP Denpasar, baru memiliki 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4 (R4) dan Kendaraan Roda 2 (R-2) sebanyak 2 unit, yang

dipergunakan sebagai kendaraan dinas untuk keperluan dinas operasional. Keberadaan kendaraan dinas operasional ini, efektif dipergunakan mulai bulan Oktober 2012. Selama 2 (dua) bulan pertama pembentukan dan keberadaan Balai LLAJSDP Denpasar, yakni pada Minggu ke II bulan Juli 2012 s/d September 2012, dalam hal melaksanakan dan mendukung kelancaran kegiatan rutin dan proses pelaksanaan pengadaan barang pada kantor BLLAJSDP Denpasar, yang bersifat operasional, antara lain menghadiri rapat eksternal, mengirim surat Kondisi saat ini,

Dalam rangka memobilisasi pencapaian kinerja BLLAJSDP Denpasar, dimasa yang akan datang, peran Kendaraan **Operasional**, berupa penambahan kendaraan roda 4 (R-4), sangatlah dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan kegiatan inventarisasi, survai, monitoring /pemantuan pelayanan kinerja prasarana dan sarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan yang berada di 9 (sembilan) Provinsi di Wilayah Kerja, yang memerlukan percepatan penyampaian informasi dan kordinasi. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan performansi dan pelaksanaan tugas dinas, penambahan kendaraan dinas untuk Pejabat Struktural dilingkungan BLLAJSDP Jambi, masih diperlukan.

4) Sumber Daya Manusia

Salah satu motor penggerak roda keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di wilayah Kerja BLLAJSDP Denpasar, Mutlak didukung adanya Ketersediaan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dedikasi, pengabdian, pekerja keras, perilaku yang baik, memiliki kemampuan handal, kompetensi profesional di bidang tugas melaksanakan pekerjaan di daerah.

Kondisi saat ini di Kantor BLLAJSDP Denpasar, sudah memiliki 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Struktural dilingkungan BLLAJSDP Denpasar dan 7 (tujuh) orang staf

pendukung serta ditambah tenaga personil yang sedang on Job Training (Magang) sebanyak 5 (lima) orang.

Secara nyata, kondisi saat ini yang terkait dengan proses penerbitan surat-menyurat, pengiriman surat, pembuatan dan pengetikan surat, pengelolaan kepegawaian, penyusunan laporan keuangan, Daftar Hadir Pegawai, Urusan Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat, masih memerlukan tambahan tenaga.

Kebutuhan tenaga Personil yang sangat mendesak tersedia dilingkungan Kantor BLLAJSDP Denpasar adalah sebagai berikut :

- a) Tenaga Personil sebagai Pengelola Kepegawaian
- b) Tenaga Personil sebagai Petugas SIMAK BMN
- (b) Tenaga Personil sebagai Petugas Humas
- (c) Tenaga Personil sebagai Teknisi
- (d) Tenaga Personil sebagai Operator Radio Telekomunikasi
- (e) Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJ dan LLASDP
- (f) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A
- (g) Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas (di jalan Nasional)
- (h) Tenaga Personil sebagai Pengevaluasi Analisis Dampak Lalu lintas
- (i) Tenaga Personil sebagai Pelaksanaan Kebutuhan Lalu Lintas, Penyiapan Bahan Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan dan Kemacetan Lalu Lintas (di Jalan Nasional),
- (j) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
- (k) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)
- (l) Tenaga Personil sebagai Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP

- (m) Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP
 - (n) Tenaga Personil sebagai Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - (o) Tenaga Personil sebagai Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata)
 - (p) Tenaga Personil sebagai Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan B3
 - (q) Tenaga Personil sebagai Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
 - (r) Tenaga Personil sebagai Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)
 - (s) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
 - (t) Tenaga Personil sebagai Penyidik Pelanggaran Bidang LLAJ
 - (u) Tenaga Personil sebagai Petugas Bimbingan Keselamatan LLAJ
 - (v) Tenaga Personil sebagai Petugas Bimbingan Keselamatan LLASDP
- 5) Administrasi Kepegawaian
- Kondisi saat ini mengenai Urusan Kepegawaian Personil PNS yang ditugaskan di BLLAJSDP Denpasar, sampai saat ini masih ditangani Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, seperti Pengambilan Gaji, Usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Usulan Mengikuti Diklat, usulan pengajuan penerima penghargaan. Melihat kondisi saat ini, memang belum memungkinkan untuk dilakukan segera pengalihan urusan kepegawaian personil PNS yang semula bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di pusat, mengingat keterbatasan personil dan keperluan kelancaran penanganan administrasi kepegawaian,
- 6) Anggaran Pembangunan
- Keberadaan Balai LLAJSDP sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam melaksanakan TUPOKSI nya, mutlak didukung dengan ketersediaan Anggaran

Pembangunan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 86 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Mempunyai Tugas antara lain Melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan di masing-masing wilayah kerja, tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran pembangunan dan pemeliharaan. Kondisi saat ini, tugas pokok tersebut belum dapat dilaksanakan, pendekatan yang dilakukan hanya terbatas ke bidang Koordinasi, Konsolidasi, Penyamaan Persepsi, Sinkronisasi Penyusunan dan Pemantapan Program Kerja di bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana, Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan di masing-masing wilayah kerja BLLAJSDP Denpasar, terutama dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan para Satker Sementara bidang Pengembangan LLAJ dan Satker Sementara Pengembangan LLASDP di masing-masing wilayah kerja .

7) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi BLLAJSDP Denpasar, membutuhkan Pegawai yang memiliki Kompetensi Kemampuan dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Seiring dengan waktu berjalan dan kondisi saat ini, PNS dilingkungan BLLAJSDP masih terbatas dan pemenuhan personil belum lengkap sebagai staf pendukung maupun pejabat yang akan mengisi jabatan fungsional. Pendidikan dan Pelatihan untuk sementara waktu masih di usulkan dari bidang Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

e Upaya Yang Dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan dilingkungan BLLAJSDP Denpasar, upaya yang dilakukan antara lain :

1) Peningkatan Performansi BLLAJSDP Denpasar

Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk hal berikut :

a) Pengadaan Pembangunan Kantor BLLAJSDP (jangka Panjang)

- b) Sewa Gedung Kantor BLLAJSDP (jangka Pendek)
- c) Pemeliharaan Kondisi Gedung /Kantor
- d) Peningkatan Fasilitas Kantor :
 - (1) Penambahan Meubleair (Meja, Kursi)
 - (2) Penambahan AC Split
 - (3) Penambahan Komputer
 - (4) Pembelian Pesawat Televisi
 - (5) Pengadaan Alat Absensi Elektronik
 - (6) Pengadaan Genset
- 2) Bidang Sumber Daya Manusia

Pencapaian kinerja yang optimal Balai LLAJSDP Denpasar, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sangat tergantung kepada pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Jumlah dan Kompetensi yang dibutuhkan, pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor, pemenuhan peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan disamping Anggaran Pembeangunan yang tersedia.

Melihat kenyataan (fact finding condition), Balai LLAJSDP Denpasar mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk dapat kiranya mengisi kekosongan jumlah personil yang dibutuhkan untuk mengisi formasi PNS.
- 3) Bidang Operasional

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas rutin maupun tugas pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan peningkatan parasarana dan sarana dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan (LLASDP), Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Angkutan Penumpang, ASDP, Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor, mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk hal-hal berikut :

 - (a) Pengadaan Alat-alat Survai LLAJSDP
 - (b) Pengadaan Kendaraan Operasional Survai dan Monitoring
 - (c) Pengadaan Kendaraan Sosialisasi Keselamatan LLASDP

4) Bidang Pembangunan

Guna merealisasikan pembentukan organisasi BLLAJSDP Denpasar, sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BLLAJSDP Denpasar, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 86 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan, akan menyusun Program BLLAJSDP Denpasar Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

- (a) Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten-Kota diwilayah Provinsi Lampung, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DIY, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Bali, Propinsi NTB, Propinsi NTT
(Marka Jalan, Rambu, (Petunjuk /RPPJ, Perintah, Peringatan dan Larangan) Guard Rail, Deliniator, Cermin Tikungan, Paku Jalan, Lampu Penerangan Solar Sel, APILL, Warning Light)
- (b) Pengadaan dan Pembangunan Zona Selamat Sekolah di Jalan Nasional
- (c) Melaksanakan Sosialisasi Keselamatan Jalan di Jalan Nasional
- (d) Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Nasional
- (e) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan di Jalan Nasional
- (f) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan di Jalan Nasional
- (g) Program Penanganan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di ruas Jalan Nasional
- (h) Studi Identifikasi dan Desain Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional
- (i) Studi, Identifikasi dan Desain Lokasi Potensi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten-Kota diwilayah Provinsi Lampung, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat,

- Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DIY, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Bali, Propinsi NTB, Propinsi NTT
- (j) Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di wilayah Provinsi Lampung, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DIY, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Bali, Propinsi NTB, Propinsi NTT
 - (k) Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
 - (l) Pembangunan Dermaga Sungai, Danau, Penyeberangan
 - (m) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Danau, Penyeberangan
 - (n) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Penuntun di Alur Penyeberangan
 - (o) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peningkatan Rambu Sungai dan Danau
 - (p) Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - (q) Study Kelayakan dan DED Pembangunan Dermaga Pelabuhan SDP
 - (r) Survei, Identifikasi dan Desain Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Wilayah Propinsi Lampung, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DIY, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Bali, Propinsi NTB, Propinsi NTT

Sukses pelaksanaan program tersebut diatas, perlu dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal penyediaan Anggaran yang dibutuhkan, dan BLLAJSDP Denpasar akan pro aktif melaksanakan Rapat Kerja Rutin, Konsolidasi, Sinkronisasi, Konsultasi, Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pemantapan Program Kerja Pembangunan di bidang LLAJSDP, dengan KPA Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan Pengembangan LLASDP dimasing-masing Provinsi dalam wilayah kerja Balai LLAJSDP Denpasar atau semua pihak stake holder terkait.

5) Bidang Kepegawaian

Pada masa yang akan datang, dengan terpenuhinya personil PNS dilingkungan BLLAJSDP Denpasar, BLLAJSDP Denpasar akan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, agar urusan Kepegawaian PNS, dapat dialihkan menjadi bagian organisasi BLLAJSDP Denpasar

B. KINERJA OPP

1. KANTOR OPP MERAK

a. Dasar Hukum

Keberadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan komersial berdasarkan PM 85 Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik tentunya didukung juga oleh ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan Angkutan Penyeberangan, ada beberapa ketentuan yang menjadi landasan tugas dan fungsi OPP antara lain :

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
- 3) PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
- 4) PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
- 5) PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan;
- 6) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
- 7) PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- 8) Permenhub Nomor PM.60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

b. Tupoksi Kantor OPP

Berdasarkan Permen 85 Tahun 2011 Kantor OPP Merak mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor OPP Merak menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja, program, dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- 2) pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah lingkungan Kerja (DLKr), sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan serta penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;
- 3) penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- 4) pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
- 5) pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan;
- 6) pelaksanaan koordinasi dalam penjaminan ketertiban, keamanan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan;
- 7) pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- 8) pelaksanaan, penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian hidup di lingkungan pelabuhan penyeberangan;
- 9) pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan;
- 10) pelaksanaan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang serta jadwal *docking* kapal penyeberangan; dan
- 11) pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

c. Kondisi Saat Ini

1) Bidang Administrasi

a) Ruang Perkantoran

Status kantor yang dipergunakan oleh Kantor OPP Merak untuk kegiatan operasional saat ini bertempat dikedung bundar (STC) milik PT. ASDP dilingkungan pelabuhan dan untuk kegiatan administrasi perkantoran sementara adalah sewa yang berlokasi di Jalan Raya Merak, menempati 3 bangunan dengan luas kurang lebih (@ 8 x 6 m²). Terdiri dari 1 Ruang Tamu, 1 Ruang Kepala Kantor, 3 Ruang Kasi dan Kasubag, 1 ruang rapat, 4 Kamar mandi, 2 Ruang Kerja Staf, dan pekarangan depan kantor.

b) Perabotan dan Perlengkapan Kantor

Sejak beroperasi dari bulan Juli 2012, semua kegiatan perkantoran mulai berjalan dengan baik, yaitu penyiapan peralatan dan fasilitas kantor antara lain pengadaan Meja dan Kursi Pegawai, Pendingin Ruangan dan kelengkapan lainnya.

c) Peralatan dan Mesin

Peralatan yang sudah dimiliki sampai dengan saat ini adalah perangkat komputer, printer, notebook, scanner, brankas, HT dan Kendaraan Operasional R2.

d) Perbekalan dan Alat Tulis

Penyediaan Kebutuhan kantor dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kantor. Kelengkapan surat menyurat seperti Kop Surat, Amplop Surat, Map dan Lain-lain sudah mengacukan kepada ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.

2) Urusan Kepegawaian

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak dipimpin oleh Kepala Kantor dan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi, 1 (satu) Kasubag Tata Usaha dan 7 (tujuh) staff. Saat ini kantor OPP lembar masih membutuhkan pegawai kurang lebih 120 orang untuk menempati posisi dipelabuhan dan kantor OPP Merak.

3) **Urusan Keuangan**

Kegiatan Tahun 2012, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak dibiayai oleh Dana DIPA sebesar Rp.876.799.000,-. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 relisasi penyerapan anggaran adalah 96,69%.

4) **Bidang Operasional**

Kegiatan Operasional yang sudah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) semester di tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a) Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan
- b) Monitoring Pelabuhan diwilayah kerja OPP Merak
- c) Koordinasi dengan Para mitra kerja dan Operator
- d) Angkutan Lebaran Tahun 2012;
- e) Angkutan Natal dan Tahun Baru 2013;

5) **Bidang Pembangunan**

Kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2012 di Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak Belum ada.

d. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Belum tersedianya kantor yang permanen, sehingga perlu dipersiapkan segera pengalokasian anggaran untuk penyediaan lahan dan bangunan kantor OPP Merak.
- 2) Belum tersedianya pegawai yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi OPP sedangkan penyediaan tenaga alih daya tidak disetujui, sehingga kebutuhan pegawai didapat dari tenaga magang.
- 3) Operasional dilapangan masih terkendala dengan jumlah personil dan sarana operasional yang terbatas yang dimiliki oleh OPP Merak.
- 4) Sering terjadinya gangguan operasional yang terjadi pada kapal sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jasa diatas kapal sehingga diperlukan kapal tugboat untuk mengatasi hal tersebut, namun alokasi anggaran guna melaksanakan kegiatan operasional tersebut tidak disetujui oleh DJA dikarenakan aspek legal yang masih kurang jelas.
- 5) Keberadaan aturan setingkat Keputusan Menteri Perhubungan dan SK Direktur Jenderal yang tidak selaras dengan PM 85 Tahun 2011 perlu

direview seperti : KM 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan, Sehingga selaras dengan PM 85 Tahun 2011.

e. Upaya Pemecahan

- 1) Mengusulkan kebutuhan pegawai ke Kantor Pusat dan Untuk saat ini sekiranya Kantor Pusat dapat dicarikan solusi pembiayaan buat tenaga bantu yang bukan PNS alokasi insentifnya.
- 2) Memberikan informasi pada pihak terkait guna mencari solusi terkait aspek legal yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Kapal Tugboat.
- 3) Perencanaan kegiatan TA 2013, lebih rinci dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga diharapkan daya serap TA.2013 dapat menjadi 100%.
- 4) Memberikan informasi kepada bagian hukum, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku.

2. KANTOR OPP GILIMANUK

a. Kondisi Saat Ini

- 1) Bidang Administrasi

Nama dan Alamat Kantor :

- a) Nama Kantor : Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk
- b) Alamat : Jalan Sedap Malam No. 5X, Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 80227.
- c) E-mail : koppgilimanuk@yahoo.com
- d) Telepon/Fax : (0361) 8460115

- 2) Ruang Kantor

Ruang Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk terbagi menjadi 5 ruang dengan ukuran masing-masing 5x4 meter dan diperuntukkan sebagai berikut :

- a) Ruang Kepala Kantor

- b) Ruang Kasubag Tata Usaha;
 - c) Ruang Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - d) Ruang Kepala Seksi Operasi
 - e) Ruang Rapat
- 3) Urusan Kepegawaian

Jumlah karyawan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk sebanyak 12 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12. Rincian Jumlah Pegawai KOPP Gilimanuk

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Kantor	1 orang
2.	Kasubag Tata Usaha	1 Orang
3.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan	1 orang
4.	Kepala Seksi Operasi	1 orang
5.	Bendahara	1 orang
6.	Staf Operasional	1 orang
7.	Satpam	2 orang
8.	Pengemudi/Sopir	1 orang
9.	Petugas kebersihan/ <i>Cleaning service</i>	1 orang
10.	Karyawan magang (<i>Job Training</i>)	2 orang
	JUMLAH	12 orang

Sumber : KOPP Gilimanuk, Tahun 2012.

Jenjang kepangkatan dan tingkat pendidikan Pejabat dan Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13. Rincian Jumlah Pegawai KOPP Gilimanuk berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					Jumlah
			S-2	S-1	DIII	SMA	SMP	
1.	Pembina	IVa	-	1	-	-	-	1
2.	Penata Muda Tk. I	III/b	2	-	-	-	-	2
3.	Penata Muda Tk.I	III/c	-	1	-	-	-	1
4.	Pengatur	II/c	-	-	2	-	-	2
5.	Outsourcing	-	-	-	2	-	-	2
6.	On Job Training	-	-	-	4	-	-	4
J u m l a h		-	2	2	8	-	-	12

Sumber : KOPP Gilimanuk, Tahun 2012.

- 4) Urusan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1281/022-03.1.01/20/2012 tanggal 1 Agustus 2012, Pagu anggaran yang

ditetapkan untuk Kantor OPP Gilimanuk sebesar 884.409.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 797.080.411,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu empat ratus sebelas rupiah) atau sebesar 90,3% dari total anggaran. Untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan keuangan dana uang persediaan yang dicairkan sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan gaji dan tunjangan lainnya pada tahun anggaran 2012 ini masih dikelola oleh Kantor pusat.

5) Bidang Operasional

Sesuai dengan PM.85 Tahun 2011, jumlah pelabuhan yang menjadi wilayah kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk sebanyak 7 pelabuhan penyeberangan sebagai berikut :

Tabel 5.14. Lintas Penyeberangan yang Merupakan Lingkup KOPP Gilimanuk

NO	PELABUHAN PENYEBERANGAN	JUMLAH DERMAGA	LINTAS PENYEBERANGAN YANG DILAYANI	JUMLAH KAPAL
1.	Ketapang	6 dermaga	Ketapang – Gilimanuk (6 mil)	37 kapal
2.	Gilimanuk	6 dermaga	Ketapang – Gilimanuk (6 mil)	37 kapal
3.	Ujung	3 dermaga	Ujung – Kamal (2,5 mil)	6 kapal
4.	Kamal	3 dermaga	Ujung – Kamal (2,5 mil)	6 kapal
5.	Batulicin	1 dermaga	Batulicin – Tanjung Serdang (5 mil)	4 kapal
6.	Tanjung Serdang	1 dermaga	Batulicin – Tanjung Serdang (5 mil)	4 kapal
7.	Penajam (Somber)	1 dermaga	Penajam – Balikpapan (6 mil)	8 kapal

Sumber : KOPP Gilimanuk, Tahun 2012.

6) Bidang Pembangunan

Pada tahun 2012 ini belum ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Kegiatan masih difokuskan pada koordinasi dan kelembagaan serta penyiapan gedung kantor sementara beserta kelengkapan fasilitas pendukungnya.

b. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk selama tahun 2012 ini, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Masih terdapat dualisme kewenangan dalam pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan antara Kantor OPP Gilimanuk sesuai dengan PM.85 Tahun 2011 dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sesuai KM.11 Tahun 2002.
- 2) Belum ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas dalam pengelolaan pelabuhan antara Kantor OPP Gilimanuk dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- 3) Adanya nomenklatur “Gilimanuk” dalam nama Kantor menjadikan pelaksanaan di lapangan menjadi kurang fleksibel mengingat wilayah kerja tidak hanya Pelabuhan Gilimanuk tetapi mencakup 7 pelabuhan yang tersebar di 4 Provinsi Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- 4) Dalam PM.85 Tahun 2011 belum mengatur masa peralihan pada saat masa transisi penyerahan kewenangan pemerintah yang sejauh ini dilaksanakan oleh PT. ASDP kepada Kantor OPP sampai dengan Kantor OPP benar-benar telah siap.
- 5) Jumlah Sumber Daya Manusia terbatas sementara wilayah kerja luas;
- 6) Kepemilikan aset pelabuhan sudah diserahkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadikan kendala dalam pelaksanaan penataan dan pengaturan lahan daratan di lapangan;
- 7) Hubungan komunikasi dan informasi antara Kantor Pusat dengan Kantor OPP di daerah secara hirarki belum dilaksanakan sepenuhnya secara baik, sebagai contoh dalam setiap permintaan data, penerbitan izin dan informasi lain dari lapangan tidak melibatkan Kantor OPP padahal keberadaan Kantor OPP adalah sebagai kepanjangan tangan Kantor Pusat di Daerah.
- 8) Kebutuhan fasilitas penunjang kinerja masih terbatas seperti rumah dinas, kendaraan operasional, uang lembur pegawai, dll.
- 9) Gedung kantor kurang representatif baik dari sisi lokasi, jarak dan kebutuhan ruang karena keterbatasan rumah yang disewakan.
- 10) Kelengkapan fasilitas perlengkapan dan peralatan perkantoran masih terbatas;
- 11) Jumlah anggaran masih terbatas;

12) Jangkauan wilayah kerja cukup luas;

c. Upaya Yang Dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan dilingkungan OPP Gilimanuk, upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Mengusulkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dapat mereview PM.85 Tahun 2011 tentang Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan baik dari aspek tugas, fungsi dan kewenangan, nomenklatur serta masa peralihan;
- 2) Memaksimalkan gedung kantor yang ada beserta fasilitas perlengkapan dan peralatan perkantoran.
- 3) Memfokuskan kegiatan pada penyiapan kantor serta koordinasi kelembagaan dan sosialisasi keberadaan Kantor OPP Gilimanuk baik kepada instansi terkait maupun kepada perusahaan angkutan penyeberangan.
- 4) Mengajukan usulan penambahan SDM kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5) Menjalin komunikasi yang baik dan menyampaikan harapan kepada Kantor Pusat agar dalam setiap kegiatan terkait dengan Pelabuhan yang masuk dalam wilayah kerja Kantor OPP dapat melibatkan Kantor OPP.
- 6) Mengusulkan penambahan fasilitas penunjang kinerja pegawai pada tahun anggaran 2013 seperti rumah dinas, kendaraan operasional, uang lembur pegawai, dll
- 7) Meminta bantuan tenaga lulusan DIII LLASDP dari BP2TD Palembang yang baru lulus/belum bekerja untuk dapat membantu pelaksanaan tugas di Kantor OPP Gilimanuk.
- 8) Mengusulkan penambahan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
- 9) Melakukan koordinasi dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

3. KANTOR OPP LEMBAR

a. Kondisi Saat Ini

1) Bidang Administrasi

a) Dasar Hukum

Keberadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan komersial berdasarkan PM 85 Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik tentunya didukung juga oleh ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan Angkutan Penyeberangan, ada beberapa ketentuan yang menjadi landasan tugas dan fungsi OPP antara lain :

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
 - 3) PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
 - 4) PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
 - 5) PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan;
 - 6) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
 - 7) PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- b) Permenhub Nomor PM.60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- c) Ruang Perkantoran

Status kantor yang dipergunakan oleh Kantor OPP saat ini adalah sewa. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar berlokasi di Jalan Bung Karno no.6 Mataram, menempati luas 700 m² dengan luas kantor kurang lebih 300 m². Terdiri dari 1 Ruang Tamu, 1 Ruang Kepala Kantor, 3 Ruang Kasi dan Kasubag, 1 ruang rapat, 3 Kamar mandi, 1 Ruang Kerja Staf, 1 Garasi kendaraan dan 2 pekarangan depan dan belakang kantor.

d) Komunikasi / Hubungan Masyarakat

Keberadaan Kantor OPP Lembar di Propinsi NTB sudah disosialisasikan kepada instansi terkait di Provinsi NTB seperti Dinas Perhubungan baik Provinsi dan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi NTB terutama yang menjadi lokasi pelabuhan wilayah Kerja OPP Lembar. Dan dalam kegiatan yang terkait dengan bidang perhubungan khususnya Angkutan Penyeberangan, Kantor OPP Lembar sudah dilibatkan dan berperan aktif. Sosialisasi dan komunikasi didalam kantor OPP sendiri dilaksanakan dengan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan berkala dalam rangka penyampaian tugas-tugas dan fungsi OPP.

e) Perabotan dan Perlengkapan Kantor

Sejak beroperasi dari bulan juli 2012, semua kegiatan perkantoran mulai berjalan dengan baik, yaitu penyiapan peralatan dan fasilitas kantor antara lain pengadaan Meja dan Kursi Pegawai, Pendingin Ruangan dan kelengkapan lainnya.

f) Peralatan dan Mesin

Peralatan yang sudah dimiliki sampai dengan saat ini adalah perangkat komputer, printer, notebook, scanner, brankas, HT dan Kendaraan Operasional R2.

g) Perbekalan dan Alat Tulis

Penyediaan Kebutuhan kantor dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kantor. Kelengkapan surat menyurat seperti Kop Surat, Amplop Surat, Map dan Lain-lain sudah menacukan kepada ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.

2) Urusan Kepegawaian

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar dipimpin oleh Kepala Kantor dan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi, 1 (satu) Kasubag Tata Usaha dan 3 (tiga) staff. Saat ini kantor OPP lembar masih membutuhkan pegawai kurang lebih 80 orang untuk menempati posisi dipelabuhan dan kantor OPP Lembar.

3) **Urusan Keuangan**

Kegiatan Tahun 2012, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar dibiayai oleh Dana DIPA sebesar Rp. 928.000.000,-. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 relisasi penyerapan anggaran adalah 86%.

4) **Bidang Operasional**

Kegiatan Operasional yang sudah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) semester di tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a) Monitoring Pelabuhan diwilayah kerja OPP Lembar
- b) Koordinasi dengan Para mitra kerja dan Operator
- c) Angkutan Lebaran Tahun 2012;
- d) Angkutan Natal dan Tahun Baru 2013;

5) **Bidang Pembangunan**

Kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2012 di Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar Belum ada.

b. Permasalahan Yang Dihadapi

- 1) Belum tersedianya kantor yang permanen, sehingga perlu dipersiapkan segera pengalokasian anggaran untuk penyediaan lahan dan bangunan kantor OPP Lembar
- 2) Belum tersedianya pegawai yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi OPP sedangkan penyediaan tenaga alih daya tidak disetujui, sehingga kebutuhan pegawai didapat dari tenaga magang dan bantuan sementara dari Dishub Propinsi NTB
- 3) Daya Serap OPP Lembar Tahun 2012 yang belum optimal
- 4) Operasional dilapangan masih terkendala dengan jumlah personil dan sarana operasional yang terbatas yang dimiliki oleh OPP Lembar
- 5) Keberadaan aturan setingkat Keputusan Menteri Perhubungan dan SK Direktur Jenderal yang tidak selaras dengan PM 85 Tahun 2011 perlu direview seperti : KM 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan, Sehingga selaras dengan PM 85 Tahun 2011.

c. Upaya Pemecahan

- 1) Telah diusulkan kebutuhan anggaran untuk penyediaan lahan kantor pada TA. 2014.
- 2) Mengusulkan kebutuhan pegawai ke Kantor Pusat dan Untuk saat ini sekiranya Kantor Pusat dapat dicarikan solusi pembiayaan buat tenaga bantu yang bukan PNS alokasi insentifnya.
- 3) Perencanaan kegiatan TA 2013, lebih rinci dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga diharapkan daya serap TA.2013 dapat menjadi 100%.
- 4) Meminta bantuan Pegawai sementara ke Instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Dishub Kab. Lombok Barat, Dishub Kab. Lombok Timur, Dishub Kab. Karang Asem melalui surat. Terkait dengan sarana operasional sudah diusulkan kebutuhan nya pada Rencana Anggaran Tahun 2014.
- 5) Memberikan informasi kepada bagian hukum, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku.

4. KANTOR OPP PAGIMANA

a Kondisi Saat Ini

Pada tanggal 23 Juli tahun 2012, dan pembentukan dan keberadaan **KANTOR OPP PAGIMANA**, di Provinsi Sulawesi Tengah, baru efektif berjalan. Organisasi Kantor OPP Pagimana dilaksanakan, formasi organisasi, awalnya hanya diisi pejabat struktural 3 (tiga) orang, terdiri dari 1(satu) Kepala Kantor OPP Pagimana (eselon III a), 1(satu) Kasubag (eselon IVa), dan 1(satu) Kepala Seksi Operasi (eselon IVa), dan 1 (satu) orang Bendahara pengeluaran sedangkan untuk Kepala Seksi Renbang (eselon IVa) belum menjalankan tugas dikarenakan masih menyelesaikan Kuliah S2, belum tersedia tenaga staf pendukung yang tetap, dalam pengertian yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Adapun pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan rutin dan pengadaan barang inventaris kantor, maupun pelaksanaan koordinasi kelembagaan antar

instansi terkait, sebagian besar dirangkap oleh pejabat struktural dan dibantu tenaga personil jasa profesi.

Untuk menghindari keterlambatan dan upaya peningkatan dan kelancaran proses pekerjaan pada Satuan Kerja Kantor OPP Pagimana , terutama dalam penyusunan laporan administrasi perkantoran, penyusunan sistim akuntansi, laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan rutin dan proses pelaksanaan pengadaan barang berupa inventaris kantor yang menjadi Milik Negara, seperti Pengadaan Meublair, (Meja, Kursi Kerja), Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2, Kantor OPP Pagimana mengajukan permohonan dan meminta bantuan personil dari Kantor Otoritas Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan rutin dan pengadaan barang Kantor OPP Pagimana, dapat dilakukan dan dikerjakan dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal satuan organisasi di Kantor OPP Pagimana, dan lingkungan eksternal, dalam hal ini melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi, khususnya dukungan personil (sifat bantuan sementara) mengisi kekosongan staf pendukung dilingkungan Satuan Kerja Kantor OPP Pagimana, ditambah dukungan Petugas Tenaga Sekuriti dan Tenaga Kebersihan. Adapun pemberian honorarium tenaga personil tersebut diatas berasal dari DIPA Satker Kantor OPP Pagimana No. 1283/022-03.1.01/24/2012 tanggal 09 Desember 2011.

1) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang Administrasi dilingkungan Kantor OPP Pagimana, adalah kegiatan ketata-usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

a) Urusan Umum

Ditinjau dari kegiatan administrasi perkantoran berupa surat yang dikeluarkan dan surat yang masuk selama periode Tahun Anggaran Anggaran 2012, terhitung mulai bulan Juli s/d akhir bulan Desember 2012, sebanyak 30 lalu lintas surat menyurat di lingkungan Kantor OPP Pagimana dengan rincian data sebagai berikut :

- Surat Masuk sebanyak : 16 kali
- Surat Keluar sebanyak : 14 kali

b) Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana di Luwuk telah dilaksanakan dengan baik, sesuai kemampuan yang ada dioptimalkan, termasuk Pengawasan barang-barang Inventaris Kantor. Namun dalam pengelolaannya, secara jujur diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan signifikan, sebagian besar dipengaruhi oleh kekurangan pegawai dilingkungan Kantor OPP Pagimana . Dapat kami sampaikan para pegawai yang ditugaskan di Kantor OPP Pagimana, para petugas keamanan dan petugas kebersihan, dapat bekerjasama dengan baik, melakukan inventarisasi barang milik pemerintah dan aktif melakukan pengawasan barang-barang inventaris yang tersedia saat ini di Kantor OPP Pagimana

2) Bidang Kepegawaian

Untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan rutin dan penyelenggaraan pembangunan (pengadaan barang perkantoran) di lingkungan internal Kantor OPP Pagimana, dan melaksanakan TUPOKSI, maka aspek ketersediaan dan peranan keberadaan personil (pegawai) cukup penting, termasuk kesiapan dan kemampuan baik kualitas dan kuantitas.

Pada tahun anggaran 2012, terhitung mulai Mei Tahun 2012 s/d Desember 2012, jumlah Pegawai PNS dilingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana di Luwuk sebanyak 4 (empat) orang, dan pegawai honorer sebanyak 4 (empat) yang terdiri dari Petugas Keamanan Kantor (security) sebanyak 2 orang dan Petugas Kebersihan sebanyak 1 (satu) orang dan Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 5.15. Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan Satker Kantor OPP
Pagimana

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					Jumlah
			S II	SI	DIII	SMA	SMP	
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1	-	-	-	-	1
2.	Pembina	IV/a	1	-	-	-	-	1
3.	Penata Tk.I	III/d	1	-	-	-	-	1
4.	Penata	III/c	1	-	-	-	-	1
5.	Honorar	-	-	-	-	4	-	4
J u m l a h			4	-	-	4	-	8

Sumber : Kantor OPP Pagimana, Tahun 2012.

3) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012

DIPA Satker Kantor OPP Pagimana diterima terhitung tanggal 4 Juli 2012, dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2012 diterima pada tanggal 13 Agustus 2012 (sebagaimana Terlampir) dengan pelaksanaan pekerjaan selama 5 bulan kerja tahun 2012. Adapun daftar kegiatan yang termuat di dalam DIPA dan POK tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.16. Program dan Kegiatan Satker OPP Pagimana

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	JUMLAH BIAYA (Ribuan)
1	Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat	Rp.1.010.414
2	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp.1.010.414
3	Layanan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 744.228
4	Penyelenggaraan operasional Dan pemeliharaan perkantoran	Rp. 727.228
5.	Belanja barang operasional lainnya	Rp. 5.000
6.	Belanja barang non operasional lainnya	Rp. 60.000
7.	Belanja langganan listrik	Rp. 18.000
8.	Belanja Langganan Telepon	Rp. 15.000
9.	Belanja langganan air	Rp. 5.400
10.	Perawatan dan operasional kendaraan	Rp. 10.200
11.	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp. 38.400
12.	Belanja Sewa	Rp. 144.000
13.	Belanja Jasa Profesi	Rp. 28.800
14.	Belanja Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 10.200
15.	Belanja perjalanan lainnya	Rp. 338.928
16.	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan SAI	Rp. 32.100
17.	Honor Output Kegiatan	Rp. 17.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	JUMLAH BIAYA (Ribuan)
18.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 228.286
19.	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Rp. 40.000
20.	Paeralatan dan fasilitas Perkantoran	Rp. 7.900

Sumber : Kantor OPP Pagimana, Tahun 2012.

4) Realisasi Pelaksanaan DIPA Tahun 2012

Pada Tahun Anggaran 2012, terhitung mulai bulan Juli 2012, Kantor OPP Pagimana, memperoleh dana anggaran yang dituangkan dalam DIPA No. 1283/022-03.1.01/24/2012 tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp. 1.010.414.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Modal	Rp. 265.335.000,-
Belanja Barang	<u>Rp. 745.079.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.010.414.000,-

- Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2012. sebesar Rp. 988.764.400,-
- Daya Serap Tahun 2012 yang terealisasi sebesar 97,86 %
- Pertanggung Jawaban keuangan atas realisasi penggunaan anggaran tersebut secara berkala dilaporkan dalam bentuk Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan pengiriman serta tembusan – tembusannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemeriksaan Kas, dilakukan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni setiap Triwulan disamping itu pula pada waktu – waktu tertentu dilaksanakan pemeriksaan bila diperlukan.

b Permasalahan yang dihadapi

- Belum tersedianya kantor yang permanen, sehingga perlu dipersiapkan segera pengalokasian anggaran untuk penyediaan lahan dan bangunan Kantor OPP Pagimana
- Belum tersedianya pegawai yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi Kantor OPP Pagimana sedangkan penyediaan tenaga alih daya

tidak disetujui, sehingga kebutuhan pegawai didapat dari tenaga magang dan bantuan sementara dari Dishubkominfo Propinsi Sulteng.

- 3) Daya Serap Kantor OPP Pagimana Tahun 2012 belum optimal
- 4) Operasional dilapangan masih terkendala dengan jumlah personil dan sarana operasional yang terbatas yang dimiliki oleh Kantor OPP Pagimana.
- 5) Keberadaan anturan setingkat Keputusan Menteri Perhubungan dan SK Direktur Jenderal yang tidak selaras dengan PM 85 Tahun 2011 perlu direview seperti : KM 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan, Sehingga selaras dengan PERMENHUB NOMOR : 85 Tahun 2011.

c Upaya Pemecahan

- 1) Telah diusulkan kebutuhan anggaran untuk penyediaan lahan kantor pada TA. 2014.
- 2) Mengusulkan kebutuhan pegawai ke Kantor Pusat dan Untuk saat ini sekiranya Kantor Pusat dapat dicarikan solusi pembiayaan buat tenaga bantu yang bukan PNS alokasi insentifnya.
- 3) Perencanaan kegiatan TA 2013, lebih rinci dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga diharapkan daya serap TA.2013 dapat menjadi 100%.
- 4) Meminta bantuan Pegawai sementara ke Instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, Dishubkominfo Kab. Banggai, Kantor UPP Luwuk , Kantor Otoritas Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk melalui surat.

C. KINERJAN UPT PENYEBERANGAN

1. UPT. Penyeberangan Kalabahi

a. Kondisi Saat Ini

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat, mengawali pengoperasiannya sejak pertengahan tahun 1994 membawa dampak sosial dan ekonomi positif terutama ketersediaan fasilitas bongkar muat yang memadai dan dapat memperlancar mobilisasi, distribusi kebutuhan pokok kendaraan maupun penumpang serta memperlancar pelaksanaan program pemerintah di kawasan penyeberangan.

UPT. Penyeberangan Kalabahi selama Tahun 2012 telah melayani 3 (tiga) lintasan yaitu :

- 1) Kalabahi – Kupang (2 kali seminggu)
- 2) Kalabahi – Teluk Gurita (2 kali seminggu)
- 3) Kalabahi – Baranusa Hingga Larantuka (2 kali seminggu)

Lintasan tersebut dilayani oleh beberapa kapal secara bergantian sedangkan untuk lintasan masing-masing dari Kalabahi tujuan Teluk Gurita dan Baranusa hingga Larantuka dilayani oleh kapal tipe 175 gt yang *home base* nya di pelabuhan Penyeberangan Kalabahi sedangkan untuk kapal lainnya setelah bongkar muat barang dan penumpang langsung diberangkatkan.

Selain dengan kesediaan layanan angkutan yang menimbulkan animo masyarakat akan jasa dimaksud maka seringkali terjadi kekosongan pelayanan lintasan khusus untuk lintasan dari Kalabahi tujuan Teluk Gurita dan Baranusa hingga Agustus dikarenakan adanya *docking* tahunan dan tidak tersedianya kapal pengganti dan hal tersebut sudah disampaikan kepada operator tapi sampai sekarang belum ada realisasi.

Hal ini menyangkut pengawasan 2 asset pelabuhan masing-masing berlokasi di Maritaing dan Bakalang telah dilakukan pengawasan berikut pelaporan dan sesuai arahan dari Pemerintah Daerah setempat saat pengawasan mengharapkan kiranya asset tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

a) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang ini adalah kegiatan ketata usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

- (1) Urusan Kepegawaian

Untuk mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi maka aspek ketersediaan personil (pegawai) cukup penting menyangkut kualitas dan kuantitas.

Tabel 5.17 Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					Jumlah
			S I	D.III	SLTA	SLT P	SD	
1.	Penata	III/c	-	-	1	-	-	1
2.	Penata Muda Tk.I	III/b	1	-	-	-	-	1
3.	Penata Muda	III/a	1	-	-	-	-	1
4.	Pengatur	II/c	-	4	1	-	-	5
5.	Honorar	-	1	1	7	2	2	13
J u m l a h			3	5	9	2	2	21

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, 2012.

b) Bidang Operasional

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi selama tahun 2012 telah melayani 3 (tiga) lintasan dimana lintasan tersebut dilayani oleh beberapa kapal secara bergantian. Data produksi Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut ini :

Tabel 5.18. Data Produksi Angkutan Penyeberangan Ferry Tahun 2012

No	Keterangan	Turun/Bongkar	Naik/Muat
1.	Penumpang Dewasa	30.782	24.838
2.	Penumpang Anak	1.219	1.251
3.	Golongan I	-	-
4.	Golongan II	3.259	1.670
5.	Golongan III	144	287
6.	Golongan IV	136	197
7.	Barang (Ton)	1.083	623

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, 2012.

b. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Dengan selesai dibangunnya dermaga II (plongsengan) tidak bisa langsung digunakan karena belum tersedia fasilitas tambat yang memadai
- 2) Mengingat lebih dari 50% status pegawai adalah tenaga kontrak maka sangat mempengaruhi kinerja secara optimal

- 3) Alokasi anggaran perjalanan dinas yang relatif kecil sehingga mengganggu kegiatan lintas komunikasi yang ,esti dilakukan secara regular maupun insidentil
- 4) Dengan ditolaknya usulan pencairan dana tanda bintang berupa pembangunan gedung operasional maka membutuhkan waktu yang cukup agar dapat diusulkan kembali mengingat legalitas lahan.

c. Upaya yang dilakukan

- 1) Mengusulkan untuk digunakannya dermaga II (plengsengan) dengan kegiatan tambat yang dilengkapi dengan fasuilitas tambat
- 2) Akan diusulkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat dipertimbangkan sesuai formasi pegawai untuk diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan.
- 3) Mengingat Perolehan pencairan pembangunan gedung operasional adalah berupa persyaratan dan legalitas lahan maka dapat dilakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah Alor karena yang menjadi persyaratan bukan hanya ijin kelola lahan dari Bupati Alor tapi sertifikat hak pakai.
- 4) Mengusulkan dengan data dukung agar alokasi DIPA dapat mencakup keseluruhan Perjalanan dinas Pada tahun Anggaran berjalan.
- 5) Kiranya setiap usulan fisik kendalanya lebih melihat kepada aspek legalitas sebagai bagian dari persyaratan.

2. UPT. Penyeberangan Kariangau

a. Kondisi Saat Ini

Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Pelabuhan Penyeberangan Kariangau melayani 3 (tiga) lintasan penyeberangan, yaitu :

- 1) Lintasan Balikpapan – Penajam (lintas antar Kabupaten – Kota)
- 2) Lintasan Balikpapan (Kalimantan Timur) – Mamuju (Sulawesi Barat)
- 3) Lintasan Balikpapan (Kalimantan Timur) – Taipa (Sulawesi Tengah)

Dengan keseluruhan armada berjumlah 12 (dua belas) unit kapal motor penyeberangan beroperasi pada masing-masing lintasan adalah:

- 1) Balikpapan – Penajam :
 - a) KMP. Bili - PT. ASDP Indonesia Ferry
 - b) KMP. Kambaniru - PT. ASDP Indonesia Ferry
 - c) KMP. Trunojoyo - PT. Dharma Lautan Utama
 - d) KMP. Ulin Ferry - PT. Dharma Lautan Utama
 - e) KMP. Tawes - PT. Pasca Dana Sundari
 - f) KMP. Kineret - PT. Sadena Mitra Bahari
 - g) KMP. Goropa - PT. ASDP Indonesia Ferry
 - h) KMP. Dharma Badjra - PT. Dharma Lautan Utama
 - i) KMP. Pelangi Nusantara - PT. Prima Eksekutif
- 2) Balikpapan – Mamuju :
 - a) KMP. Mandala Nusantara, KMP. Satria Pratama
 - PT. Jembatan Madura
 - b) KMP. Permata Nusantara (kapal cadangan)
 - PT. Jembatan Madura
- 3) Balikpapan – Taipa :
 - a) KMP. Madani
 - PT. ASDP Indonesia Ferry

Meskipun pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah diresmikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan bagi para pemakai jasa, sehingga transportasi darat pada ketiga lintasan tersebut diatas cukup lancar tanpa adanya hambatan.

1) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang ini adalah kegiatan ketata usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

- a) Urusan rumah tangga Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah dilaksanakan dengan baik termasuk Pengawasan barang –barang Inventaris Kantor yang ditangani oleh Petugas Penanggungjawab Perlengkapan. Namun kami m bahwa dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan dan

kelemahan yang dipengaruhi oleh kekurangan pegawai, adakalanya 1 (satu) pegawai merangkap sampai dengan 2 (dua) jabatan belum termasuk tugas – tugas operasional.

- b) Laporan barang-barang inventaris tersebut diatas yang berada dalam lingkungan Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah dilaksanakan dengan baik.

2) **Urusan Kepegawaian**

Hingga akhir Tahun 2012 jumlah pegawai Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau tercatat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil sudah termasuk Pimpinan. Jika melihat tugas – tugas yang mengelola administrasi dan keuangan / jabatan – jabatan fungsional serta tugas-tugas operasional di lapangan, idealnya jumlah pegawai yang tersedia berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang pegawai. Namun demikian tetap diusahakan untuk melaksanakan tugas tersebut diatas sebaik-baiknya dengan keterbatasan personil yang ada.

Sedangkan untuk pegawai Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau sebanyak 34 orang dengan perincian : PNS (14) dan tenaga Honorer (7) orang.

Tabel 5.19. Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau

NO.	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					JML
			SI	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Penata Tk. I	III/d	1	-	-	-	-	1
2.	Penata Muda Tk. I	III/b	-	-	2	-	-	2
3.	Penata Muda	III/a	3	-	-	-	-	3
4.	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-	-	-	0
5.	Pengatur	II/c	-	18	-	-	-	18
6.	Pengatur muda Tk. I	II/b	-	-	2	-	-	2
7.	Pengatur Muda	II/a	-	-	1	-	-	1
Jumlah			4	18	5	0	0	27

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, 2012.

3) **Urusan Keuangan**

- a) Pertanggung Jawaban keuangan atas realisasi penggunaan anggaran tersebut secara berkala dilaporkan dalam bentuk Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan

pengiriman serta tembusan – tembusannya sesuai ketentuan yang berlaku.

- b) Pemeriksaan Kas oleh Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni setiap Triwulan disamping itu pula pada waktu – waktu tertentu dilaksanakan pemeriksaan bila diperlukan.
- c) Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan.

4) Bidang Operasional

Kegiatan operasional Pelabuhan pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas-tugas yang sarannya sebagai berikut :

- a) Terciptanya kelancaran arus lalu lintas dan angkutan Penyeberangan barang dan kendaraan, yang didukung oleh jumlah kapal motor penyeberangan yang memadai.
- b) Pemanfaatan seluruh prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang tersedia guna mendukung kelancaran angkutan antara lain:
 - Dermaga
 - Jalan dan Lapangan Parkir
 - Ruang Tunggu
 - Pos – Pos Pengawasan
- c) Pelaksanaan pemungutan penerimaan jasa pelabuhan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan dasar hukum pungutannya Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2009.
 - Jasa Sandar
 - Jasa Tanda Masuk Pelabuhan
 - Jasa Pemeliharaan dermaga
 - Sewa Ruangan
 - Sewa Listrik dan Air (Lain-lain)

- Khusus untuk lintasan Balikpapan (Kalimantan Timur) – Mamuju (Sulawesi Barat), pada Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau tidak dilakukan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena lintasan tersebut melakukan operasi bongkar muat angkutan pada pelabuhan swasta Kampung Baru dan bukan pada pelabuhan penyeberangan Kariangau.
- d) Penertiban dan pengawasan dalam Wilayah Pelabuhan yang dilaksanakan dengan pihak terkait.

5) Bidang Pengaturan

Secara umum pengaturan berdasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM.60 Tahun 2002, adapun hal-hal lain yang diatur secara khusus antara lain :

- a) Pelaksanaan pemungutan penerimaan jasa Pelabuhan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009.
- b) Penertiban dan Pengamanan Pelabuhan berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/B/256/1969 dan 010/20/MPHB/1969 tanggal 29 Mei 1969.

Pengaturan penumpang, barang dan kendaraan melalui Pelabuhan baik tiba maupun berangkat adalah sebagai berikut :

- a) Berangkat
 - Pada umumnya penumpang langsung ke loket penjualan tiket mendapatkan tiket dan langsung menuju kapal melalui Pos Pengawasan guna pemeriksaan ticket.
 - Kendaraan
 - Kendaraan muatan barang / Truck diparkir di lapangan parkir yang telah disediakan dan dilakukan pemeriksaan seperlunya terhadap muatannya, selanjutnya didaftar dan diurutkan naik ke kapal apabila telah membeli ticket dan melunasi kewajiban jasa pelabuhan.

- Wajib daftar tersebut dan pemenuhan kewajiban jasa pelabuhan diperlakukan pula terhadap kendaraan jenis lainnya (Bus, dan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2)
- Barang
Barang dimuat ke dalam kapal dengan 2 (dua) cara pemuatan :
 - Muatan barang diatas kendaraan seperti cara pemuatan di Pelabuhan Penyeberangan lainnya yang sudah tidak menerima barang curah.
 - Muatan barang curah / diatur langsung diatas deck kapal yang jumlahnya hanya sedikit, sebab hanya mengisi ruang yang kosong, apabila muatan kendaraan diatas kapal tidak penuh. Dengan cara pemuatan ini oleh pedagang masih dianggap lebih menguntungkan dari pada langsung diatas kendaraan, dan cara pemuatan ini masih dapat memberikan peluang bagi tenaga kerja barang di pelabuhan untuk membiayai hidup keluarganya.
- b) Tiba
 - Penumpang
Penumpang yang menggunakan kendaraan diarahkan keluar melalui pintu gerbang pelabuhan untuk selanjutnya ke tempat tujuan masing-masing sedangkan penumpang non kendaraan diarahkan ke ruang tunggu, selanjutnya memilih kendaraan umum yang telah disediakan di lapangan parkir untuk menuju tempat tujuan akhir masing-masing.
 - Kendaraan
Semua jenis kendaraan sebelum keluar pelabuhan diwajibkan untuk melunasi kewajiban jasa pelabuhan dan dilakukan pemeriksaan seperlunya terhadap muatannya, kemudian melanjutkan perjalanan sesuai tujuan.

- Barang

- Bagi muatan barang diatas kendaraan proses pelaksanaan pelayanannya seperti kendaraan, diarahkan langsung melalui pintu gerbang keluar.
- Bagi muatan barang curah, dimuat kembali ke kendaraan yang menjemput dengan menggunakan jasa tenaga kerja di pelabuhan dan kendaraan yang memuat barang curah diperbolehkan keluar setelah menyelesaikan kewajibannya dengan pihak pelabuhan.

6) Bidang Pembangunan

Kegiatan ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya baik yang bersifat proyek maupun pemeliharaan rutin yang anggarannya tertuang dalam DIPA Pelabuhan Penyeberangan Kariangau T.A. 2011.

Untuk posisi pelaksanaan belanja modal sementara dalam pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan.

b. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Masih adanya pendangkalan pada alur muara sungai Wain Kariangau, sehingga tidak dapat di gunakan secara maksimal oleh kegiatan operasi penyeberangan lintasan Balikpapan – Mamuju yang selama ini melakukan operasi bongkar muat angkutan pada pelabuhan swasta Kampung Baru.
- 2) Dan juga masih adanya kapal penyeberangan untuk lintasan Kariangau – Penajam yang sering kandas pada alur muara sungai Wain Kariangau karena pendangkalan alur muara sungai wain Kariangau tersebut.
- 3) Kami sampaikan pula bahwa sampai pada saat ini untuk antrian kendaraan pada lintasan Kariangau – Penajam masih sering terjadi.
- 4) Masih kurangnya sumber daya manusia untuk dapat memperlancar kegiatan operasional dan administrasi.

c. Upaya yang dilakukan

- 1) Guna lebih meningkatkan pelayanan dan pengaturan di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau perlu adanya penambahan pegawai menjadi 30 (tiga puluh) orang pegawai negeri sipil, sangat diharapkan agar dapat teralisasi sebelum penghapusan sistem Kerja sama Operasional (KSO) yang ada pada Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan, mengingat jumlah pegawai yang ada saat ini hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai negeri sipil, dan 7 (tujuh) orang pegawai kontrak. Yang mana jumlah tersebut belum optimal untuk mengelola kegiatan yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan, mengingat pelabuhan ini melayani 3 (tiga) lintasan penyeberangan dan beroperasi selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 penjualan tiket pada Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan untuk lintasan Kariangau -penajam sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan yang membutuhkan 3 (tiga) orang pegawai, dan pada pelabuhan penyeberangan Kariangau khusus lintasan Kariangau Penajam akan bertambah 1 (satu) dermaga lagi yang pastinya akan membutuhkan tenaga petugas operasional lagi.
- 2) Melakukan pelaksanaan kegiatan pengerukan pada alur muara sungai Wain Kariangau agar secepatnya dapat di laksanakan dalam kegiatan pada Tahun Anggaran 2012.
- 3) Agar dapat digunakan dengan maksimal oleh kegiatan operasi penyeberangan lintasan Balikpapan – Mamuju yang selama ini melakukan operasi bongkar muat angkutan pada pelabuhan swasta Kampung Baru, dan agar dengan adanya pengerukan tersebut kapal – kapal untuk lintasan kariangau penajam tidak mengalami kandas pada saat beroperasi.
- 4) Penyelesaian pembangunan dermaga II (dua), agar segera dapat diselesaikan secara maksimal, untuk penunjang peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa dan sudah dapat digunakan pada

tahun anggaran 2012, sehingga dapat mengurangi terjadinya antrian untuk lintasan Kariangau - Penajam.

3. UPT. Penyeberangan Gorontalo

a. Lintasan penyeberangan

Secara umum penyeberangan Gorontalo melayani 3 (tiga) lintasan yaitu :

- 1) Gorontalo – Pagimana (Sulteng 2 hari sekali).

Dilayani oleh KMP. Baronang 526 GT dengan kapasitas muat 400 orang penumpang dan 21 unit kendaraan campuran

- 2) Gorontalo – Wakai – Ampana (2 x seminggu).

Dilayani oleh KMP. Tuna Tomini 546 GT dengan kapasitas muat 240 orang penumpang dan 14 unit kendaraan campuran.

- 3) Marisa – Dolong – Ampana (2 x seminggu).

Dilayani oleh KMP. Tanjung Api 617 GT dengan kapasitas muat 200 orang penumpang dan 19 unit kendaraan campuran.

b. Jadwal kapal penyeberangan

- 1) KMP. Baronang (Komersil) PT. ASDP, Lintas Gorontalo – Pagimana (2 hari sekali).
- 2) KMP. Tuna Tomini (Perintis) PT. ASDP, Lintas Gorontalo – Wakai – Ampana (2 x seminggu).
- 3) KMP. Tanjung Api 617 GT, Lintas Marisa – Dolong – Ampana (2 x seminggu).

c. Produksi Angkutan 2012

- 1) *Lintas Gorontalo – Pagimana (KMP. Baronang)*

- a) *Penumpang* : 65.582 *Penumpang*
- b) *Kendaraan (R4 dan R2)* : 6.947 *Unit*
- c) *Barang* : 14.704 *Ton*

- 2) *Gorontalo – Wakai – Ampana (KMP. Tuna Tomini)*

- a) *Penumpang* : 25.209 *Penumpang*
- b) *Kendaraan (R4 dan R2)* : 912 *Unit*
- c) *Barang* : 4.452 *Ton*

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Jumlah Karyawan dengan Jabatan Struktur
 - a) Kepala Kantor / UPT : 1 orang (Eselon V)
 - b) Petugas TU dan Kepegawaian : 1 orang (Non Eselon)
 - c) Fungsional Lalu Lintas Angkutan : 1 orang (Non Eselon)
 - d) Fungsional Jasa-jasa Pelabuhan : 1 orang (Non Eselon)
 - e) Fungsional Sarana dan Prasarana : 1 orang (Non Eselon)
 - f) Fungsional Keamanan dan Ketertiban: 1 orang (Non Eselon)
 - g) Staff : 17 orang

e. Sarana dan Prasarana

- 1) Luas Tanah Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo : 42.486 m²
- 2) Luas Dermaga Plengsengan : 96 m²
- 3) Luas Gedung Kantor : 198 m²
- 4) Luas Crag Terminal Penumpang : 360 m²
- 5) Luas Rumah Operasional dan Rumah Dinas : 135 m² (3 unit)
- 6) Luas Lapangan Parkit dan Jalan : 6.474 m²
- 7) Luas Gang Way : 385 m²
- 8) Kapasitas Bak penampung air tawar : 20 m²
- 9) Cat Walk : 69 m²
- 10) Breasting Dolpin dan Fender : 3 buah
- 11) Morning Dolpin : 4 buah
- 12) Jembatan Timbang Crag : 1 set
- 13) Daya Listrik PLN : 13.200 watt
- 14) Genset 15 KVA : 12.200 watt
- 15) Luas Kolom Pelabuhan : 27.375 m²
- 16) Kedalaman Kolam Pelabuhan : 4,5 m²
- 17) Break Water : 2.700 m²
- 18) Rambu Suar (Beacon tetap) : 5 unit
- 19) Speed Boat (rusak) : 1 unit
- 20) Pagar Tembok Pelabuhan : 1.200 m²
- 21) Pagar BRC : 600 m²
- 22) Mushola : 36 m²

f. Data Sarana Kapal Penyeberangan

- 1) KMP. Baronang (Komersil)
 - a) Lintas Penyeberangan : Gorontalo – Pagimana
 - b) Waktu Tempuh Pelayanan : 10 s/d 12 jam
 - c) Jadwal Trip : 2 hari sekali
 - d) Kapasitas Angkut Penumpang : 320 s/d 400 orang
 - e) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 4 : 21 unit
 - f) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 2 : 20 s/d 30 unit
 - g) Kapasitas Angkut Barang : 50 ton
 - h) Spesifikasi Teknis KMP. Baronang
 - Kapasitas Muat : 526 GT (tahun 1993)
 - Panjang : 45,30 m
 - Lebar : 12 m
 - Draft air : 2 m
 - Main Engine : Nigata 2 x 650 HP
 - Mesin Pembantu : 2 x 115 HP (Generator)
- 2) KMP. Tuna Tomini (Perintis)
 - a) Lintas Penyeberangan : Gorontalo–Wakai-Ampana
 - b) Waktu Tempuh Pelayanan : 17 s/d 18 jam
 - c) Jadwal Trip : seminggu dua kali
 - d) Kapasitas Angkut Penumpang : 250 s/d 300 orang
 - e) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 4 : 16 unit
 - f) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 2 : 20 s/d 30 unit
 - g) Kapasitas Angkut Barang : 50 ton
 - h) Spesifikasi Teknis KMP. Tuna Tomini
 - Kapasitas Muat : 546 GT (tahun 2006)
 - Panjang : 40,3 m
 - Lebar : 10,5 m
 - Draft air : 2 m
 - Main Engine : Yanmar 2 x 620 HP
 - Mesin Pembantu : 2 x 115 HP (Generator Listrik)

g. Kendala

- a) Sering terjadi komplain dari pihak pengguna jasa ketika salah satu kapal yang melayani lintasan tersebut melakukan docking tahunan dan tidak adanya kapal pengganti. Hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak operator tetapi hingga saat ini belum ada realisasi dari pihak operator terkait;
- b) Terdapat sekitar 40% status pegawai adalah tenaga kontrak maka sangat mempengaruhi kinerja kepegawaian di lingkungan kerja;
- c) Telah dilaksanakan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pada Kantor Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap para pengguna jasa serta untuk memperlancar kegiatan administrasi perkantoran;

h. Solusi Permasalahan

- a) Kami telah meminta klarifikasi dan berdiskusi dengan pihak operator ketika terjadi docking tahunan agar pelayanan jasa angkutan dapat diberikan secara maksimal serta memuaskan para pengguna jasa.
- b) Kami akan mengusulkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat dipertimbangkan sesuai formasi untuk dapat diangkat sebagai CPNS sesuai ketentuan;
- c) Memberdayakan personil di lapangan untuk menjaga dan ikut memelihara asset serta selalu melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kendala dalam hal Prasarana dan Sarana terhadap Petugas Fungsional Prasarana Dan Sarana untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2012 merupakan wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012.

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini tercermin pelaksanaan kegiatan dibidang transportasi darat yaitu pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa angkutan darat khususnya dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Secara umum laporan tahunan ini menggambarkan kegiatan-kegiatan transportasi darat yang meliputi bidang angkutan jalan, bidang angkutan penyeberangan dan bidang angkutan perkotaan serta keselamatan transportasi darat yang membutuhkan faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan, operasional dan pembangunan yaitu dengan adanya kebijakan dan program yang jelas, tersedianya sumber daya manusia yang memadai, sistem kerjasama dan koordinasi yang baik, serta didukung dengan peralatan kerja yang cukup.

Sedangkan Balai, KOPP dan UPT dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat perlu peningkatan pelayanan jasa angkutan, serta terus mempertahankan dan mengembangkan pelayanan jasa angkutan dengan terus melakukan peningkatan kinerja pelayanan secara berkesinambungan yaitu dengan peningkatan kinerja SDM yang ada.

LAMPIRAN I

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU

I. LAPORAN ANALISA DAN EVALUASIREALISASI DATAPENUMPANG ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2012 (1433H)

A. UMUM

Realisasi jumlah pemudik hasil pantauan pada 44 Terminal Angkutan Jalan, 9 Daops, dan 2 Divre KA, 7 Lintasan Utama Penyeberangan, 52 Pelabuhan Laut dan 24 Bandara di seluruh indonesia berdasarkan pemantauan pada masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2012 Di Wilayah Indonesia, Dengan Titik Berat Pengendalian Terpadu meningkat menjadi **16.262.371** pemudik atau **7.54 % (1.140.517 pemudik)** yang menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan tahun 2011.

Tabel 1. Prosentase Realisasi Penumpang Umum Angkutan Lebaran Tahun 2011&2012 Di Wilayah Indonesia, Dengan Titik Berat Pengendalian Terpadu

NO	MODA	JUMLAH PEMUDIK		SELISIH PEMUDIK 2012/2011	%
		2011	2012		
A. Angkutan Umum					
1	Moda Darat :	8,772,679	9,275,013	502,334	5.73%
	a. Angkutan Jalan	5,524,875	5,998,162	473,287	8.57%
	b. Angkutan Penyeberangan	3,247,804	3,276,851	29,047	0.89%
2	Moda Kereta Api	1,904,517	2,409,486	504,969	26.51%
3	Moda Laut*	1,457,577	1,284,631	-172,946	-11.87%
4	Moda Udara	2,987,081	3,293,241	306,160	10.25%
Sub Total		15,121,854	16,262,371	1,140,517	7.54%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

Keterangan : Data Pemudik Moda Laut Tahun 2011 = Data H-15 s.d H+15

Data Realisasi Pemudik Moda Laut Tahun 2012 = Data H-15 s.d H+7

B. MUDIK BERSAMA

Tabel 2. Rekapitulasi Data Angkutan Mudik Gratis/Bersama Dan Data Angkutan Balik Bersama Pada Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2011 Dan Tahun 2012

NO	MODA	2011			2012			PROSENTASE		
		BUS	SEPEDA MOTOR	PENUMPANG	BUS	SEPEDA MOTOR	PENUMPANG	BUS	SEPEDA MOTOR*	PENUMPANG
ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)										
1	DARAT (BUS)	1612	1662	80024	2559	1303	121191	58,75%	-21,60%	51,44%
2	LAUT (KAPAL TNI AL)	-	1000	1500	-	1296	2428	-	29,60%	61,87%
3	KERETA API	-	-	-	-	-	2153	-	-	-
4	UDARA (PESAWAT UDARA)	-	-	-	-	-	1433	-	-	-
TOTAL		1.612	2.662	81.524	2.559	2.599	133.442	58,75%	-2,37%	63,68%
ARUS BALIK (H+ s.d. H+7)										
1	DARAT (BUS)	6	150	300	4	102	204	-33,33%	-32,00%	-32,00%
2	LAUT (KAPAL TNI AL)	-	-	-	-	636	1486	-	-	-
3	KERETA API	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	UDARA (PESAWAT UDARA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		6	150	300	4	738	1690	-33,33%	392,00%	463,33%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

Selama Angkutan Lebaran Periode H-7 hingga H+3 telah dilaksanakan program mudik gratis bersama menggunakan bus dan mudik bersama menggunakan bus dengan sepeda motor diangkut truk dengan total kendaraan **2.559 bus** dengan total jumlah penumpang sebesar **133.442 orang** dan **2.599 sepeda motor** dari **28 instansi** Pemerintah, Parpol dan Swasta antara lain : Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, BNI 46, BRI, Sidomuncul, Indofood, Indomaret, Jasa Raharja, Yamaha, Astra Honda Motor, Holcim, Giant, Yuasa, Wahana Makmur Sejati, Pemda Jateng, Pemda Jatim Telkom Group, Carefour, Petro Jaya Board, Pos Indonesia, Sophie Martin, Indosat, Pertamina, PLN, Alfamart, Partai GOLKAR, DEMOKRAT, GERINDRA, PAN dan PB. NU.

Pelaksanaan Program Mudik Gratis yang diselenggarakan menggunakan Kapal TNI Angkatan Laut (KRI Banda Aceh) selama angkutan lebaran periode H-7 hingga H+2 telah dilaksanakan pada 2 (dua) periode dengan rute Jakarta-Semarang, antara lain pada tanggal **16 Agustus 2012** dengan jumlah penumpang **1.718 orang** dan mengangkut **927 motor**, serta pada tanggal **18 Agustus 2012** dengan jumlah penumpang **710 orang** dengan mengangkut **369 motor**. Sedangkan untuk pelaksanaan Program Balik Gratis pada arus balik, telah dilaksanakan dengan rute Semarang – Jakarta pada tanggal **23 Agustus 2012** dengan jumlah penumpang **1486 orang** dan mengangkut **636 motor**, selain itu program balik gratis yang diselenggarakan oleh PT Astra Honda Motor memberangkatkan **204 Orang** dan **102 motor** dengan rute Semarang - Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan menggunakan 2 Truck dan 4 Bus. Pada tahun 2012 terjadi penurunan prosentase jumlah sepeda motor dikarenakan PT. Yamaha tidak menyelenggarakan mudik gratis dengan sepeda motor.

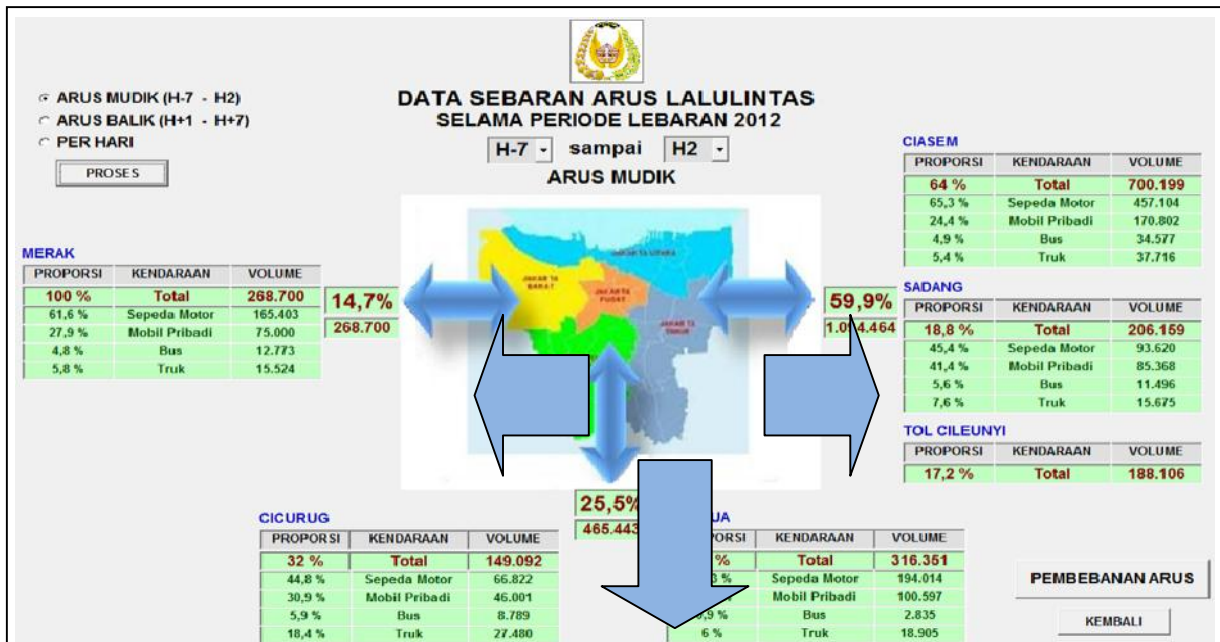
C. KENDARAAN PRIBADI

1. Realisasi jumlah kendaraan pribadi (sepeda motor dan mobil pribadi) berdasarkan pemantauan di 6 (enam) titik (Ciasem, Sadang, Merak, Ciamis, Cicurug, dan Cisarua) pada periode H-7 (12 Agustus 2012) hingga H+7 (27 Agustus 2012) sebagai berikut :
 - a. Sepeda motor mengalami **kenaikan sebesar 18.17%** (dari jumlah 2.368.720 sepeda motor pada tahun 2011 menjadi 2.799.129 sepeda motor pada tahun 2012);
 - b. Mobil pribadi mengalami **kenaikan sebesar 9.03%** (dari jumlah 1.520.150 kendaraan pada tahun 2011 menjadi 1.675.457 kendaraan pada tahun 2012).

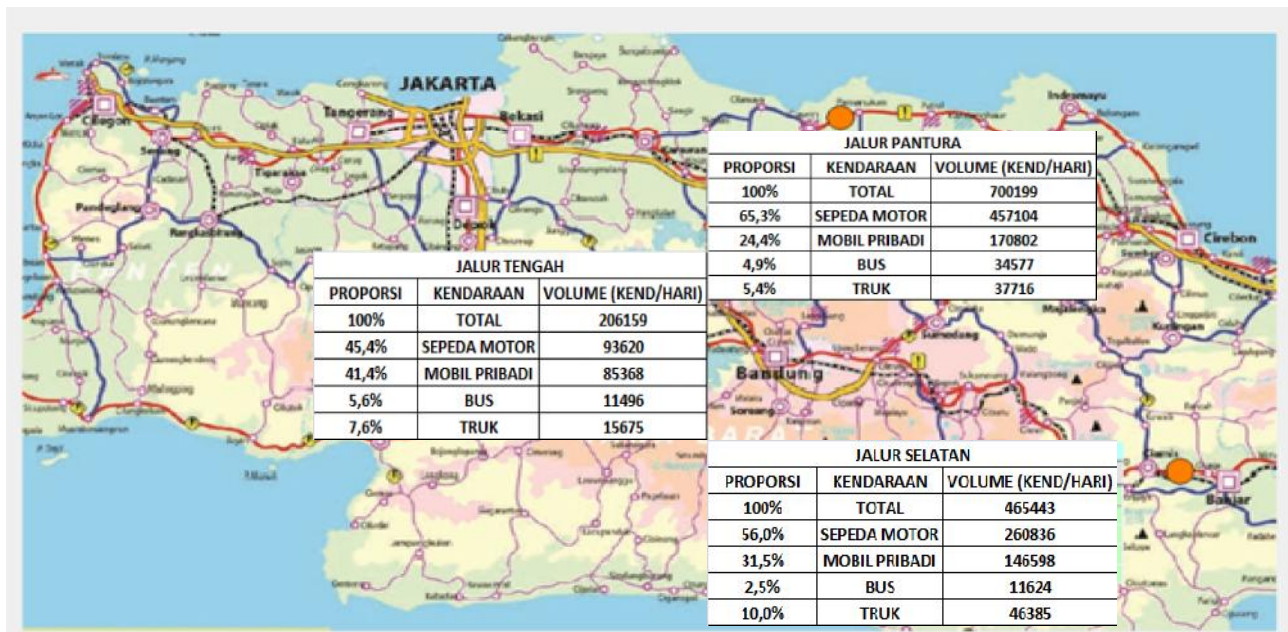
Tabel 3. Prosentase Realisasi Kendaraan Pribadi Angkutan Lebaran Tahun 2011&2012(Periode H-7 S.D. H+7)

NO	MODA	JUMLAH KEND. (UNIT)		%
		2011	2012	
H-7 s.d. H+7				
B. Angkutan Pribadi :				
1	Sepeda Motor	2,368,720	2,799,129	18.17%
2	Mobil Pribadi	1,520,150	1,657,457	9.03%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012



Gambar 1. Peta Sebaran Arus Mudik (H-7 s.d H2) Keluar JABODETABEK



Gambar 2. Peta Perbandingan Arus Mudik (H-7 s.d H2) Melalui Jalur Pantura, Pansela dan Tengah

Tabel 4. Jumlah Kendaraan Melalui Jalur Pantura, Tengah dan Pansela Pada Arus Mudik Periode H-7 s.d H2

KENDARAAN	PANTURA		TENGAH		PANSELA		TOTAL	%
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
SEPEDA MOTOR	457.104 65,3%	56,3%	93.620 45,4%	11,5%	260.836 56,0%	32,1%	811.560 59,2%	100%
MOBIL PRIBADI	170.802 24,4%	42,4%	85.368 41,4%	21,2%	146.598 31,5%	36,4%	402.768 29,4%	100%
BUS	34.577 4,9%	59,9%	11.496 5,6%	19,9%	11.624 2,5%	20,1%	57.697 4,2%	100%
TRUK	37.716 5,4%	37,8%	15.675 7,6%	15,7%	46.385 10,0%	46,5%	99.776 7,3%	100%
TOTAL KENDARAAN	700.199 100%	51,0%	206.159 100%	15,0%	465.443 100%	33,9%	1.371.801 100%	100%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah kendaraan pada periode **arus mudik H-7 s.d H2** adalah **1.371.801 kendaraan** yang terbagi melalui **Jalur Pantura, Tengah dan Pansela** sebagai berikut :

1) Jalur Pantura

Prosentase kendaraan untuk **tahun 2012** sebesar **51 % (700.199 kendaraan)** dengan proporsi kendaraan **sepeda motor 65.3 % (457.104 Kendaraan)**, **mobil pribadi 24.4 % (170.802 kendaraan)**, **Bus 4.9 % (34.577 kendaraan)** dan **Truk sebesar 5.4 % (37.716 kendaraan)**.

2) Jalur Tengah

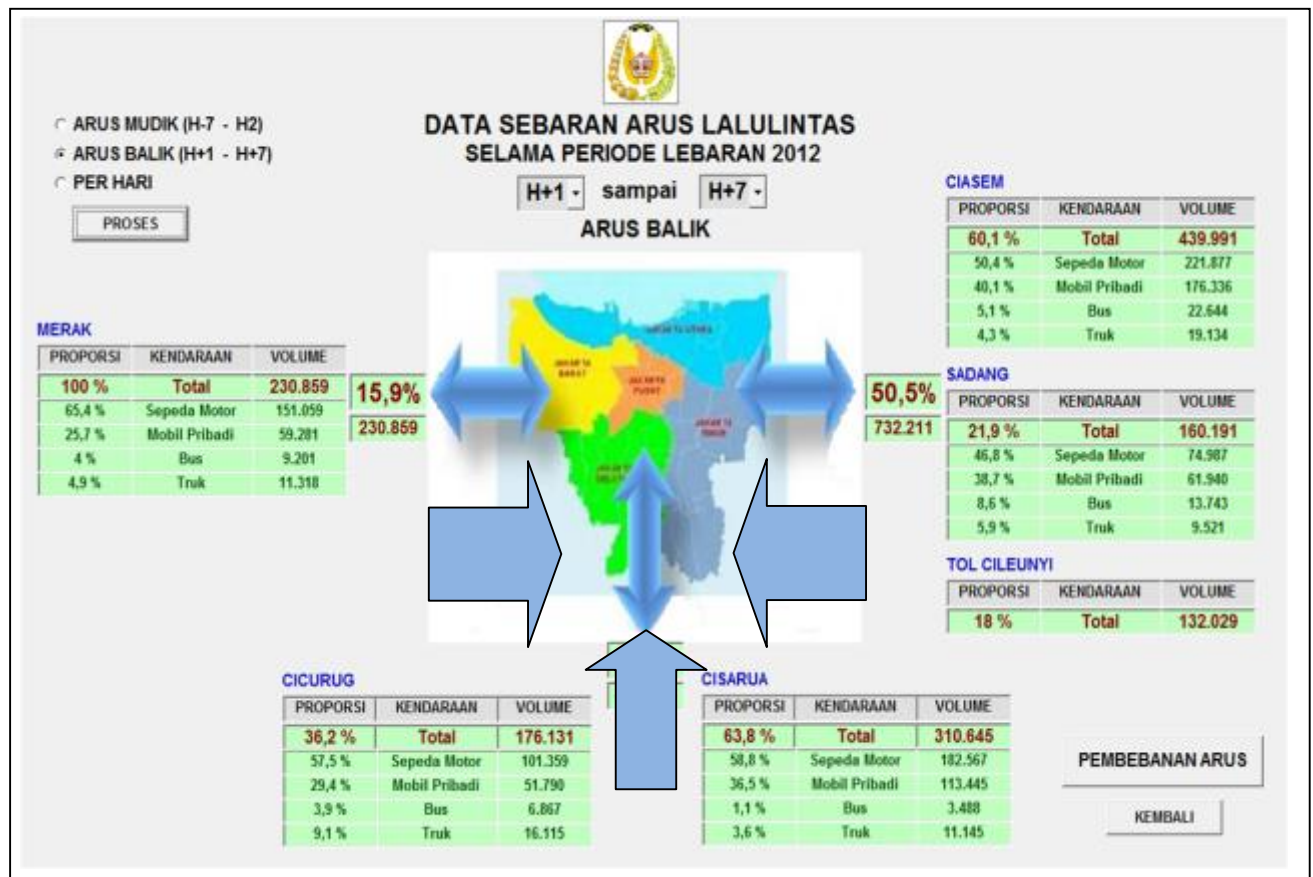
Prosentase kendaraan untuk **tahun 2012** sebesar **15 % (206.159 kendaraan)** dengan proporsi kendaraan **sepeda motor 45.4 % (93.620 Kendaraan)**, **mobil pribadi 45.4 % (85.368 kendaraan)**, **Bus 5.6 % (11.496 kendaraan)** dan **Truk sebesar 7.6 % (15.675 kendaraan)**.

3) Jalur Pansela

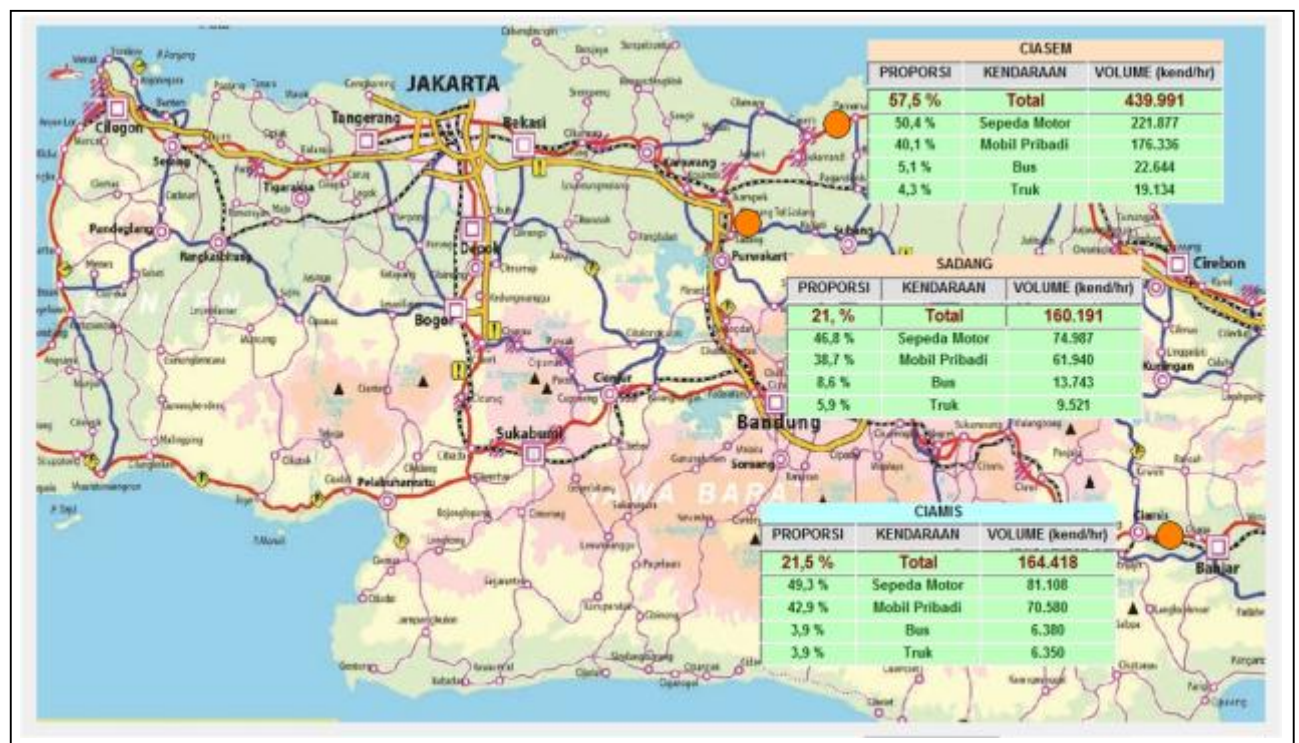
Prosentase kendaraan untuk **tahun 2012** sebesar **33.9 % (465.443 kendaraan)** dengan proporsi kendaraan **sepeda motor 56 % (260.836 Kendaraan)**, **mobil pribadi 31.5 % (146.598 kendaraan)**, **Bus 2.5 % (11.624 kendaraan)** dan **Truk sebesar 10 % (46.385 kendaraan)**.



Gambar 3. Pie Chart Prosentase Jalur Pansela, Jalur Pantura dan Jalur Tengah pada Arus Mudik H-7 s.d H2 Angkutan Lebaran 2012/1433



Gambar 4. Peta Sebaran Arus Balik (H-7 s.d H+7) Masuk JABODETABEK



Gambar 5. Peta Perbandingan Arus Balik (H-7 s.d H+7)Melalui Jalur Pantura, Pansela dan Tengah

Tabel 5. Jumlah Kendaraan Melalui Jalur Pantura, Tengah dan Pansela
Pada Arus Balik Periode H+1 s.d H+7

KENDARAAN	PANTURA		TENGAH		PANSELA		TOTAL	%
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
SEPEDA MOTOR	221.877 50,4%	58,7%	74.987 46,8%	19,8%	81.108 49,3%	21,5%	377.972 49,4%	100%
MOBIL PRIBADI	176.336 40,1%	57,1%	61.940 38,7%	20,1%	70.580 42,9%	22,9%	308.856 40,4%	100%
BUS	22.644 5,1%	52,9%	13.743 8,6%	32,1%	6.380 3,9%	14,9%	42.767 5,6%	100%
TRUK	19.134 4,3%	54,7%	9.521 5,9%	27,2%	6.350 3,9%	18,1%	35.005 4,6%	100%
TOTAL KENDARAAN	439.991 100%	57,5%	160.191 100%	21,0%	164.418 100%	21,5%	764.600 100%	100%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah kendaraan pada periode **arus balik H+1 s.d H+7** adalah **764.600 kendaraan** yang terbagi melalui **Jalur Pantura, Tengah dan Pansela** sebagai berikut :

1) Jalur Pantura

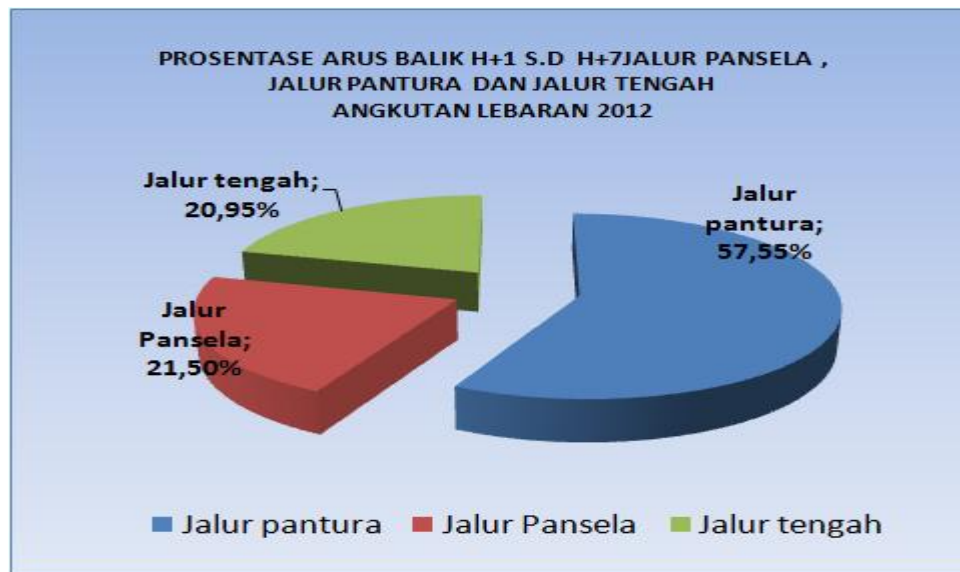
Prosentase kendaraan untuk **tahun 2012** sebesar **57.5% (439.991 kendaraan)** dengan proporsi kendaraan **sepeda motor 50.4 % (221.877 Kendaraan)**, **mobil pribadi 40.1 % (176.336 kendaraan)**, **Bus 5.1 % (22.644 kendaraan)** dan **Truk sebesar 4.3 % (19.134 kendaraan)**.

2) Jalur Tengah

Prosentase kendaraan untuk **tahun 2012** sebesar **21 % (160.191 kendaraan)** dengan proporsi kendaraan **sepeda motor 46.8 % (74.987 Kendaraan)**, **mobil pribadi 38.7 % (61.490 kendaraan)**, **Bus 8.6% (13.743 kendaraan)** dan **Truk sebesar 5.9 % (9.521 kendaraan)**.

3) Jalur Pansela

Prosentase kendaraan untuk **tahun 2012** sebesar **21.5 % (164.418 kendaraan)** dengan proporsi kendaraan **sepeda motor 49.3 % (81.108 kendaraan)**, **mobil pribadi 42.9 % (70.580 kendaraan)**, **Bus 3.9 % (6.380 kendaraan)** dan **Truk sebesar 3.9% (6.350 kendaraan)**.



Gambar 6. Pie Chart Prosentase Jalur pansela, Jalur Pantura dan Jalur Tengah pada Arus Balik H+1 s.d. H+7 Angkutan Lebaran 2012/1433

D. TOTAL SEMUA PEMUDIK

Tabel 6. Rekapitulasi Data Pemudik Pada Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2011 Dan Tahun 2012 Di Wilayah Indonesia, Dengan Titik Berat Pengendalian Terpadu

NO	MODA	JUMLAH PEMUDIK		SELISIH PEMUDIK 2012/2011	%
		2011	2012		
H-7 S.D H+7					
A. Angkutan Umum					
1	Moda Darat :				
	a. Angkutan Jalan	5.524.875	5.998.162	473.287	8,57%
	b. Angkutan Penyeberangan	3.247.804	3.276.851	29.047	0,89%
2	Moda Kereta Api	1.904.517	2.409.486	504.969	26,51%
3	Moda Laut	1.457.577	1.284.631	-172.946	-11,87%
4	Moda Udara	2.987.081	3.293.241	306.160	10,25%
Sub Total		15.121.854	16.262.371	1.140.517	7,54%
B.MUDIK GRATIS		81.024	133.442	52.418	64,69%
TOTAL A + B		15.202.878	16.395.813	1.192.935	7,85%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

Berdasarkan data Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pemudik hasil dari pemantauan pada Masa Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2012 Di Wilayah Indonesia, Dengan Titik Berat Pengendalian Terpadu dengan **Angkutan Jalan** pada 12 Provinsi 44 Terminal meliputi 33 terminal utama dan 11 terminal bantuan, Angkutan Kereta Api pada 9 Daop dan 3 Divre, Angkutan SDP pada 7 lintasan utama, Angkutan Laut pada 52 Pelabuhan dan Angkutan Udara pada 24 Bandar dan Jumlah Mudik Gratis mengalami kenaikan menjadi

15.203.378 pemudik atau **7.84 % (1.203.378 pemudik)** dibandingkan dengan tahun 2011 (pemudik gratis adalah pemudik yang berangkat dari Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sumber Dana CSR Swasta/BUMN, APBN, APBD Jawa Timur).

Tabel 7. Prosentase Realisasi Pemudik Menggunakan Kendaraan Pribadi Angkutan Lebaran Tahun 2011&2012(Periode H-7 S.D. H+7)

NO	MODA	JUMLAH PEMUDIK		SELISIH PEMUDIK 2012/2011	%
		2011	2012		
H-7 S.D H+7					
C. KENDARAAN PRIBADI					
1	Sepeda Motor	4,737,440	5,598,258	860,818	18.17%
2	Mobil Pribadi	7,600,750	8,287,285	686,535	9.03%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

Keterangan Asumsi 1 Mobil Pribadi = 5 Penumpang, 1 Sepeda Motor = 2 Penumpang

Berdasarkan data Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pemudik dari hasil pemantauan di 6 (enam) titik (Ciasem, Sadang, Merak, Ciamis, Cicurug, dan Cisarua) pada periode H-7 (12 Agustus 2012) hingga H+7 (27 Agustus 2012) pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi untuk **sepeda motor** pada tahun 2012 sebesar **5.598.258 Pemudik** dan Mobil pribadi untuk tahun 2012 sebesar **8.287.285 Pemudik**.

E. Penumpang Moda Angkutan Jalan

Penumpang moda angkutan jalan pada Angkutan Lebaran Tahun 2012 (1433 H) pada pantauan H-7 hingga H+7 mengalami **peningkatan** sebesar **473.287 penumpang (8.57%)** jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 dari 5.524.875 penumpang menjadi **5.998.162 penumpang** (tabel 2).

Tabel 8.Realisasi Penumpang Moda Angkutan JalanDi 12 Provinsi pada 44 Terminal Utama/Bantuan

KLASIFIKASI	PERIODE	JUMLAH BUS		SELISIH BUS 2012:2011	%	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG 2012:2011	%
	HARI	2011	2012			2011	2012		
ARUS MUDIK	H-7	14.696	15.050	354	2,41	214.904	261.995	47.091	21,91
	H-6	15.899	17.192	1.293	8,13	252.288	309.000	56.712	22,48
	H-5	16.962	17.004	42	0,25	307.233	320.358	13.125	4,27
	H-4	18.465	19.004	539	2,92	371.839	394.019	22.180	5,96
	H-3	19.241	23.018	3.777	19,63	464.718	525.350	60.632	13,05
	H-2	20.091	20.393	302	1,50	435.774	510.814	75.040	17,22
	H-1	16.493	18.008	1.515	9,19	306.250	409.465	103.215	33,70
	H1	12.319	14.041	1.722	13,98	208.973	332.965	123.992	59,33
	H2	14.020	15.998	1.978	14,11	302.244	412.856	110.612	36,60
TOTAL ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)		148.186	159.708	11.522	7,78	2.864.223	3.476.822	612.599	21,39
ARUS BALIK	H+1	15.866	16.145	279	1,76	389.366	378.580	-10.786	-2,77
	H+2	17.533	17.080	-453	-2,58	416.791	390.227	-26.564	-6,37
	H+3	17.865	16.791	-1.074	-6,01	429.392	349.980	-79.412	-18,49
	H+4	17.856	17.929	73	0,41	437.125	444.092	6.967	1,59
	H+5	17.552	17.452	-100	-0,57	372.251	409.491	37.240	10,00
	H+6	16.339	16.513	174	1,06	297.478	314.802	17.324	5,82
	H+7	15.434	14.652	-782	-5,07	318.249	234.168	-84.081	-26,42
TOTAL ARUS BALIK (H+1 s.d. H+7)		118.445	116.562	-1.883	-1,59	2.660.652	2.521.340	-139.312	-5,24
TOTAL H-7 s.d H+7		266.631	276.270	9.639	3,62	5.524.875	5.998.162	473.287	8,57

Sumber : Posko Angkutan Lebaran2012

F. Penumpang Moda Angkutan Penyeberangan

Penumpang moda angkutan penyeberanganberdasarkan data dari H-7 s.d. H+7pada 7 lintas utama penyeberangan,diketahui jumlah penumpang yang diberangkatkan mengalami**peningkatan** sebesar**29.047 penumpang(0.89%)**jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011 dari**3.247.804**penumpangmenjadi**3.276.851**penumpang pada tahun 2012.

Tabel 9.Realisasi Penumpang Moda Angkutan Penyeberangan di 7 Lintas Utama
Penyeberangan

KLASIFIKASI	Periode Hari	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG 2012:2011	%
		2011	2012		
ARUS MUDIK	H-7	130,567	154,151	23,584	18.06
	H-6	161,556	153,847	(7,709)	-4.77
	H-5	217,769	181,545	(36,224)	-16.63
	H-4	268,256	253,301	(14,955)	-5.57
	H-3	291,839	288,947	(2,892)	-0.99
	H-2	252,452	231,115	(21,337)	-8.45
	H-1	129,065	158,754	29,689	23.00
	H1	95,395	155,425	60,030	62.93
	H2	144,228	151,650	7,422	5.15
TOTAL ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)		1,691,127	1,728,735	37,608	2.22
ARUS BALIK	H+1	175,807	168,990	(6,817)	-3.88
	H+2	224,665	213,597	(11,068)	-4.93
	H+3	265,258	223,354	(41,904)	-15.80
	H+4	271,694	236,679	(35,015)	-12.89
	H+5	222,742	253,329	30,587	13.73
	H+6	190,844	248,739	57,895	30.34
	H+7	205,667	203,428	(2,239)	-1.09
TOTAL ARUS BALIK (H+1 s.d. H+7)		1,556,677	1,548,116	(8,561)	-0.55
Total H-7 s.d. H+7		3,247,804	3,276,851	29,047	0.89

Sumber : Posko Angkutan Lebaran2012

Realisasi jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 moda angkutan penyeberangan pada periode angkutan lebaran 2012 dari H-7 hingga H+7 dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.

Jumlah Kendaraan Roda 2 Moda Angkutan Penyeberangandan mengalami **peningkatan** sebesar **9.400kendaraan R2 (2.32%)** jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011 dari **404.324Kendaraan Roda 2** menjadi **413.724Kendaraan Roda 2** dan jumlah Kendaraan Roda 4/ Lebih ModaAngkutan Penyeberanganmengalami **peningkatan** sebesar **19.838kendaraan R4/lebih (5.79%)** jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011 dari **345.317 Kendaraan Roda 4/lebih** menjadi **365.306Kendaraan Roda 4/lebih**.

Tabel 10.Realisasi Kendaraan Roda 2 Moda Angkutan Penyeberangan
di 7 Lintas Utama Penyeberangan

KLASIFIKASI	Periode Hari	JUMLAH R-2		SELISIH R2 2012:2011	%
		2011	2012		
ARUS MUDIK	H-7	13,366	14,881	1,515	11.33
	H-6	19,361	16,437	(2,924)	-15.10
	H-5	25,732	21,587	(4,145)	-16.11
	H-4	37,713	35,571	(2,142)	-5.68
	H-3	41,338	50,677	9,339	22.59
	H-2	33,824	35,017	1,193	3.53
	H-1	16,395	19,803	3,408	20.79
	H1	12,308	19,373	7,065	57.40
	H2	20,145	19,580	(565)	-2.80
TOTAL ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)		220,182	232,926	12,744	5.79
ARUS BALIK	H+1	21,792	20,216	(1,576)	-7.23
	H+2	23,084	26,001	2,917	12.64
	H+3	31,892	25,141	(6,751)	-21.17
	H+4	37,686	24,023	(13,663)	-36.25
	H+5	25,516	30,519	5,003	19.61
	H+6	19,600	31,861	12,261	62.56
	H+7	24,572	23,037	(1,535)	-6.25
TOTAL ARUS BALIK (H+1 s.d. H+7)		184,142	180,798	(3,344)	-1.82
Total H-7 s.d. H+7		404,324	413,724	9,400	2.32

Sumber : Posko Angkutan Lebaran2012

Tabel 11.Realisasi Kendaraan Roda 4 / Lebih Moda Angkutan Penyeberangan
di 7 Lintas Utama Penyeberangan

KLASIFIKASI	Periode Hari	JUMLAH R-4/LEBIH		SELISIH R4/LEBIH 2012:2011	%
		2011	2012		
ARUS MUDIK	H-7	19,335	21,312	1,977	10.22
	H-6	21,090	20,521	(569)	-2.70
	H-5	24,590	22,615	(1,975)	-8.03
	H-4	26,882	26,792	(90)	-0.33
	H-3	27,488	24,991	(2,497)	-9.08
	H-2	24,938	29,370	4,432	17.77
	H-1	12,901	16,594	3,693	28.63
	H1	11,432	17,443	6,011	52.58
	H2	15,166	15,268	102	0.67
TOTAL ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)		183,822	194,906	11,084	6.03
ARUS BALIK	H+1	17,114	18,000	886	5.18
	H+2	22,003	22,738	735	3.34
	H+3	27,277	25,115	(2,162)	-7.93
	H+4	25,071	27,544	2,473	9.86
	H+5	23,661	27,822	4,161	17.59
	H+6	23,159	25,982	2,823	12.19
	H+7	23,210	23,199	(11)	-0.05
TOTAL ARUS BALIK (H+1 s.d. H+7)		161,495	170,400	8,905	5.51
Total H-7 s.d. H+7		345,317	365,306	19,989	5.79

Sumber : Posko Angkutan Lebaran2012

G. Penumpang Moda Angkutan Kereta Api

Penumpang moda angkutan kereta api yang dihimpun pada 9 Daop di Pulau Jawa dan 2 Divre (Sumatera Utara dan Sumatera Selatan) pada periode H-7 s.d H+7 terdata dengan jumlah total **2.409.486** penumpang atau mengalami **peningkatan** sebesar **504.969 penumpang (26.51%)** jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya pada tahun 2011 yaitu **1.904.517** penumpang, namun bila yang dibandingkan adalah kereta utama 2012 dan kereta utama 2011 maka mengalami **penurunan** sebesar **320.583 penumpang (16.83 %)** yaitu Tahun 2011 sebesar **1.904.517** menjadi **1.583.934** di Tahun 2012.

Tabel 12. Realisasi Penumpang Moda Angkutan Kereta Api di 9 Daop (Pulau Jawa) dan 2 Divre

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG				SELISIH PENUMPANG UTAMA 2012/UTAMA 2011	% UTAMA 2012 / UTAMA 2011	SELISIH PENUMPANG TOTAL 2012/TOTAL 2011	% TOTAL 2012 / TOTAL 2011
		2011	2012						
		UTAMA	UTAMA	LOKAL	TOTAL				
ARUS MUDIK	H-7	73.756	66.932	73.462	140.394	(6.824)	-9,25%	66.638	90,35%
	H-6	93.397	63.808	49.034	112.842	(29.589)	-31,68%	19.445	20,82%
	H-5	106.349	73.410	45.612	119.022	(32.939)	-30,97%	12.673	11,92%
	H-4	108.523	84.587	45.663	130.250	(23.936)	-22,06%	21.727	20,02%
	H-3	112.953	95.171	49.189	144.360	(17.782)	-15,74%	31.407	27,81%
	H-2	114.945	98.050	45.850	143.900	(16.895)	-14,70%	28.955	25,19%
	H-1	99.526	91.620	37.261	128.881	(7.906)	-7,94%	29.355	29,49%
	H1	89.499	93.508	33.956	127.464	4.009	4,48%	37.965	42,42%
	H2	113.014	109.043	54.973	164.016	(3.971)	-3,51%	51.002	45,13%
TOTAL ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)		911.962	776.129	435.000	1.211.129	(135.833)	-14,89%	299.167	32,80%
ARUS BALIK	H+1	144.174	121.803	59.574	181.377	(22.371)	-15,52%	37.203	25,80%
	H+2	143.686	126.544	60.651	187.195	(17.142)	-11,93%	43.509	30,28%
	H+3	142.660	121.636	57.856	179.492	(21.024)	-14,74%	36.832	25,82%
	H+4	146.314	116.490	46.458	162.948	(29.824)	-20,38%	16.634	11,37%
	H+5	138.559	117.376	57.139	174.515	(21.183)	-15,29%	35.956	25,95%
	H+6	141.330	109.478	52.154	161.632	(31.852)	-22,54%	20.302	14,36%
	H+7	134.909	94.478	56.720	151.198	(40.431)	-29,97%	16.289	12,07%
TOTAL ARUS BALIK (H+1 s.d. H+7)		991.632	807.805	390.552	1.198.357	(183.827)	-18,54%	206.725	20,85%
TOTAL H-7 s.d H+7		1.904.517	1.583.934	825.552	2.409.486	(320.583)	-16,83%	504.969	26,51%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

Keterangan = - Data penumpang 2011 adalah Data Penumpang KA Utama

- Data Penumpang 2012 adalah Data Penumpang KA Utama dan Lokal

H. Penumpang Moda Angkutan Laut

Penumpang moda angkutan laut pada masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2012 mempunyai periode H-15 s.d H+15, tetapi dalam laporan sementara ini data untuk tahun 2012 merupakan data jumlah penumpang periode H-15 s.d H+7 dengan jumlah total **1.284.631** penumpang atau mengalami **peningkatan sebesar 73.777 penumpang (5.43%)** dari total penumpang pada tahun 2011 yang mencapai **1.121.854** yang terpantau pada 52 pelabuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 13. Realisasi Penumpang Moda Angkutan Laut di 52 Pelabuhan

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG 2012:2011	%
		2011	2012		
ARUS MUDIK	H-15	33,350	40,074	6,724	20.16
	H-14	33,928	38,307	4,379	12.91
	H-13	40,232	32,364	(7,868)	-19.56
	H-12	38,008	40,515	2,507	6.60
	H-11	34,372	38,252	3,880	11.29
	H-10	37,036	44,722	7,686	20.75
	H-9	49,223	43,584	(5,639)	-11.46
	H-8	41,418	54,441	13,023	31.44
	H-7	52,360	55,598	3,238	6.18
	H-6	59,849	61,591	1,742	2.91
	H-5	45,536	61,863	16,327	35.86
	H-4	64,683	80,434	15,751	24.35
	H-3	66,814	70,564	3,750	5.61
	H-2	75,705	94,177	18,472	24.40
	H-1	48,414	52,370	3,956	8.17
	H1	22,989	29,275	6,286	27.34
	H2	33,235	53,908	20,673	62.20
TOTAL ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)		777,152	892,039	114,887	14.78
ARUS BALIK	H+1	68,289	60,563	(7,726)	-11.31
	H+2	71,748	63,733	(8,015)	-11.17
	H+3	67,483	61,588	(5,895)	-8.74
	H+4	59,140	58,489	(651)	-1.10
	H+5	53,197	64,459	11,262	21.17
	H+6	55,509	58,541	3,032	5.46
	H+7	58,336	25,219	(33,117)	-56.77
TOTAL ARUS BALIK (H+1 s.d. H+7)		433,702	392,592	(41,110)	-9.48
TOTAL H-15 s.d. H+7		1,210,854	1,284,631	73,777	6.09

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

Keterangan : Data Realisasi Pemudik Moda Laut Tahun 2011 = Data H-15 s.d H+7

I. Penumpang Moda Angkutan Udara

Penumpang moda angkutan udara selama periode H-7 hingga H+7 total jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar **306.160 penumpang (10.25%)** jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011 dari **2.987.081** penumpang menjadi **3.293.241** penumpang pada tahun 2012.

Tabel 14. Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 24 Bandara penerbangan Domestik 4 Bandara Penerbangan Internasional

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG 2012:2011	%
		2011	2012		
ARUS MUDIK	H-7	173.071	182.490	9.419	5,44
	H-6	182.264	186.372	4.108	2,25
	H-5	191.366	194.532	3.166	1,65
	H-4	201.878	220.258	18.380	9,10
	H-3	209.621	223.390	13.769	6,57
	H-2	203.832	234.214	30.382	14,91
	H-1	181.093	216.926	35.833	19,79
	H1	159.766	187.858	28.092	17,58
TOTAL ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)		1.664.513	1.833.935	169.422	10,18
ARUS BALIK	H+1	166.435	194.762	28.327	17,02
	H+2	174.914	203.975	29.061	16,61
	H+3	194.676	215.914	21.238	10,91
	H+4	207.152	218.290	11.138	5,38
	H+5	196.298	231.062	34.764	17,71
	H+6	180.194	237.504	57.310	31,80
	H+7	178.322	157.799	-20.523	-11,51
TOTAL ARUS BALIK (H+1 s.d. H+7)		1.297.991	1.459.306	161.315	12,43
Total H-7 s.d H+7		2.987.081	3.293.241	306.160	10,25

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

J. Data Volume Arus Lalu Lintas

Berdasarkan data volume lalu lintas untuk sepeda motor dan mobil pribadi yang diperoleh dari 6 titik lokasi pemantauan (Ciasem, Sadang, Merak, Cisarua, Cicurug dan Ciamis) diketahui bahwa volume lalu lintas untuk **sepeda motor** mengalami peningkatan sebesar **430.409 kendaraan (18.15 %)** (dari **2.368.720** kendaraan menjadi **2.799.129** kendaraan) arus puncak pengguna sepeda motor pada arus mudik terjadi pada **H-2** yaitu sebesar **294.132** kendaraan dan puncak arus balik terjadi pada **H+6** dengan total sepeda motor sebanyak **219.846** kendaraan sedangkan mobil pribadi **naik** sebesar **137.307 kendaraan (9.03%)** dari **1.520.150** kendaraan menjadi **1.657.457** kendaraan) dan mencapai puncaknya pada **H-3** sebanyak **117.563** kendaraan dan untuk

arus balik di H+6 sebanyak **131.869** kendaraan selama pemantauan Angkutan Lebaran 2012 dari H-7 s.d. H+7.

Tabel 15. Total Sepeda Motor dan Mobil Pribadi Pada Titik Pemantauan Dari H-7 s.d. H+7 Periode Angkutan Lebaran 2012/1433 H

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	MOBIL PRIBADI		SELISIH MOBIL PRIBADI 2012:2011	%	SEPEDA MOTOR		SELISIH SEPEDA MOTOR 2012:2011	%
		2011	2012			2011	2012		
ARUS MUDIK	H-7	40.567	62.062	21.495	52,99	61.617	99.764	38.147	61,91
	H-6	51.550	64.329	12.779	24,79	79.701	102.921	23.220	29,13
	H-5	74.269	72.212	-2.057	-2,77	120.612	113.028	-7.584	-6,29
	H-4	108.376	95.182	-13.194	-12,17	179.473	164.654	-14.819	-8,26
	H-3	111.028	117.563	6.535	5,89	228.667	249.972	21.305	9,32
	H-2	103.028	115.843	12.815	12,44	220.765	294.132	73.367	33,23
	H-1	70.797	100.745	29.948	42,30	120.615	203.139	82.524	68,42
	H1	59.536	99.132	39.596	66,51	71.342	133.370	62.028	86,94
	H2	81.993	104.905	22.912	27,94	112.496	151.278	38.782	34,47
TOTAL ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)		701.144	831.973	130.829	18,66	1.195.288	1.512.258	316.970	26,52
ARUS BALIK	H+1	131.092	106.836	-24.256	-18,50	162.186	167.481	5.295	3,26
	H+2	115.376	124.585	9.209	7,98	157.126	189.428	32.302	20,56
	H+3	123.361	121.817	-1.544	-1,25	166.592	185.253	18.661	11,20
	H+4	152.066	118.361	-33.705	-22,16	288.166	166.152	-122.014	-42,34
	H+5	114.830	128.161	13.331	11,61	173.886	204.212	30.326	17,44
	H+6	102.518	131.869	29.351	28,63	123.197	219.846	96.649	78,45
	H+7	79.763	93.855	14.092	17,67	102.595	154.499	51.904	50,59
TOTAL ARUS BALIK H+1 S.D H+7		819.006	825.484	6.478	0,79	1.173.748	1.286.871	113.123	9,64
TOTAL ARUS H-7 S.D H+7		1.520.150	1.657.457	137.307	9,03	2.368.720	2.799.129	430.409	18,17

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2012

Keterangan : Titik Lokasi TC Tahun 2011 : Ciamis , Ciasem, Sadang , Merak, dan Cianjur

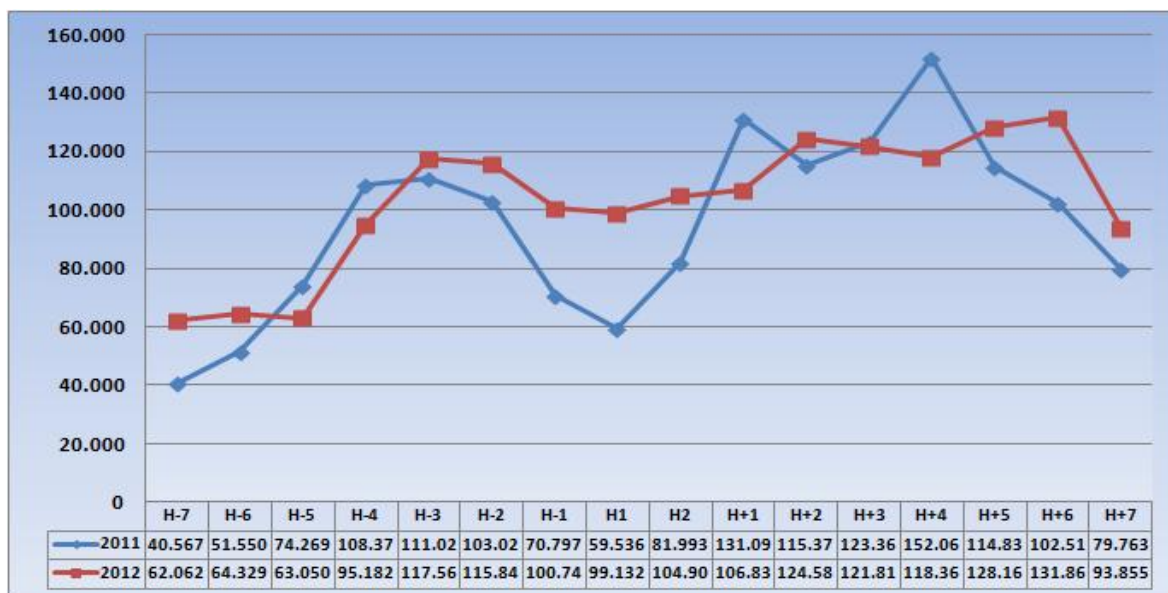
Titik Lokasi TC Tahun 2012 : Ciamis , Ciasem , Sadang, Merak , Cicurug, Cisarua



Gambar 7. Perbandingan Volume Lalu Lintas Sepeda Motor dan Mobil Pribadi pada H-7 s.d. H+7 Angkutan Lebaran 2012/1433 H



Gambar 16. Grafik Fluktuasi Volume Lalu Lintas Sepeda Motor pada H-7 s.d. H+7 Angkutan Lebaran 2012/1433 H



Gambar 17. Grafik Fluktuasi Volume Lalu Lintas Mobil Pribadi pada H-7 s.d. H+7 Angkutan Lebaran 2012/1433 H

K. Pemantauan GPS

Tabel 18.Data Kecepatan Rata-Rata Pada Jalur Pantura Dan Pansela Berdasarkan Pantuan GPS Bus AKAP Dan Pemasu Moda Pada Angkutan Lebaran 2012/1433 H Periode H-7 s.d H+7

PERIODE HARI		LINTASAN (Km/Jam)			
		LINTASAN 1	LINTASAN 2	LINTASAN 3	LINTASAN 4
H-7	H-7 SHIFT 1	74,42	73,25	49,51	42,96
	H-7 SHIFT 2	72,25	80,10	54,94	49,87
H-6	H-6 SHIFT 1	63,26	74,62	57,48	-
	H-6 SHIFT 2	62,48	77,09	38,77	34,51
H-5	H-5 SHIFT 1	67,49	73,05	58,20	35,58
	H-5 SHIFT 2	40,36	72,13	48,82	39,51
H-4	H-4 SHIFT 1	59,91	72,43	36,53	30,36
	H-4 SHIFT 2	47,02	60,98	43,65	31,87
H-3	H-3 SHIFT 1	59,12	68,06	13,93	20,35
	H-3 SHIFT 2	25,69	47,81	17,67	23,35
H-2	H-2 SHIFT 1	31,54	42,23	1,28	12,26
	H-2 SHIFT 2	55,97	47,75	9,58	15,91
H-1	H-1 SHIFT 1	66,72	68,35	11,68	27,27
	H-1 SHIFT 2	78,57	77,43	40,58	30,88
H1	H1 SHIFT 1	58,15	47,66	31,65	47,36
	H1 SHIFT 2	72,04	72,88	42,01	-
H2	H1 SHIFT 1	61,5	56,56	56,6	26,47
	H1 SHIFT 2	74,63	77,27,	47,39	32,43
H+1	H+1 SHIFT 1	81,16	79,87	57,59	26,43
	H+1 SHIFT 2	71,72	74,59	62,77	32,75
H+2	H+2 SHIFT 1	64,79	76,8	48,14	26,34
	H+2 SHIFT 2	52,98	52,59	48,17	53,05
H+3	H+3 SHIFT 1	69,92	77,07	38,26	19,24
	H+3 SHIFT 2	67,87	78,72	45,84	40,45
H+4	H+4 SHIFT 1	71,06	77	41,59	20,52
	H+4 SHIFT 2	66,81	72,3	41,07	34,98
H+5	H+5 SHIFT 1	65,43	63,99	29,18	27,64
	H+5 SHIFT 2	67,58	81,25	37,15	26,87
H+6	H+6 SHIFT 1	61,24	69,09	27,19	28,04
	H+6 SHIFT 2	59,65	75,3	31,46	4,76
H+7	H+7 SHIFT 1	61,34	83,67	21,28	26,84
	H+7 SHIFT 2	57,75	73,67	48,88	25,53

Sumber : Posko Angkutan Lebaran. 2012

Keterangan :

Lintasan 1 : Jalan Tol Jakarta - Cikampek

Lintasan 2 : Jalan Tol Cipularang

Lintasan 3 : Jalur Cikampek - Cirebon (Pantura)

Lintasan 4 : Jalur Cileunyi - Banjar (Pansela)

Berdasarkan Pantauan GPS selama masa angkutan lebaran (H-7 S/D H+7) di dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum kondisi ruas jalan di jalur Cikampek – Jakarta kecepatan tertinggi di H+1 Shift 1 dan terendah di H-3 Shift 2.
2. Kondisi ruas jalan di jalur Tol Cipularang kecepatan tertinggi di H+7 Shift 1 dan terendah di H-2 Shift 1
3. Kondisi ruas jalan di jalur Tol Cikampek -Cirebon kecepatan tertinggi di H+1 Shift 2 dan terendah di H-2 Shift 1
4. Kondisi ruas jalan di jalur Cileunyi- Banjar kecepatan tertinggi di H-7 Shift 2 dan terendah di H+6 Shift 2

L. Pemantauan Tarif

1. Angkutan Jalan

Dari hasil pemantauan tarif angkutan jalan pada 19 (sembilan belas) terminal, selama angkutan lebaran **tahun 2012**, dari total **209 kendaraan yang diperiksa**, terdapat **37 kendaraan (17.70%)** yang terindikasi melanggar tarif angkutan jalan pada pelayanan bus ekonomi. Kondisi ini terjadi kenaikan dibanding **tahun 2011** dari **167 kendaraan yang diperiksa**, **23 kendaraan (14%)** terindikasi melakukan pelanggaran tarif angkutan jalan jenis sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar tarif sesuai batas ketentuan antara lain :

- Pembekuan / pencabutan izin trayek terhadap bus yang bersangkutan;
- Pelarangan pengembangan usaha;
- Sanksi bersifat kumulatif.

Laporan hasil pemantauan tarif angkutan jalan akan disampaikan secara terpisah oleh tim pemantau tarif Ditjen Hubdat.

2. Moda Angkutan Udara

Dari hasil pemantauan tarif angkutan udara pada tiga (3) Bandar Udara diperoleh Hasil sebagai Berikut :

a. PT Lion Mentari Airlines

Tarif yang diberlakukan oleh PT. Lion 0.43%-1% dari tarif batas atas

b. PT. Aviastar Mandiri

Memberikan surat peringatan karena melanggar tarif melebihi 3% dari tarif batas atas pada rute jakarta ketapang.

c. Citilink Indonesia

Memberikan surat peringatan pada PT. Citilink Indonesia pada rute Jakarta-Banjarmasin dengantarif melebihi 3%

Kepada ketiga maskapai tersebut telah diberikan surat peringatan terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap tarif batas atas yang telah diatur oleh pemerintah.

M. Data Kecelakaan

1. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Berdasarkan hasil pemantauan di Polda se - Indonesia dari H-7 sampai dengan H+7 terdapat **jumlah kasus sebesar 5.233** jumlah kejadian, meninggal **908** korban, Luka Berat **1.505** Korban Luka ringan **5.139** Korban dan Kerugian Material sebesar Rp.**11.125.695.012**

Tabel 19.Perbandingan Data Kecelakaan Tahun 2011 dan 2012H-7 s.d H+7

PERIODE	Jumlah Kasus	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materi (Rp)
	2012	2012	2012	2012	
H-7	339	45	62	306	636.025.000
H-6	304	54	69	266	670.681.000
H-5	346	74	81	311	1.012.545.900
H-4	286	47	69	258	799.950.000
H-3	337	66	116	305	1.024.831.500
H-2	383	54	90	329	58.800.250
H-1	314	58	96	293	759.350.000
H1	373	62	112	388	711.288.500
H2	303	52	123	325	510.450.308
H+1	306	62	81	354	692.530.000
H+2	309	64	95	309	586.972.250
H+3	327	48	99	306	593.225.004
H+4	407	74	129	436	988.180.300
H+5	367	60	114	388	624.145.000
H+6	305	49	102	339	1.073.250.000
H+7	227	39	67	226	383.470.000
Total	5.233	908	1.505	5.139	11.125.695.012

Sumber : Korlantas POLRI 2012

Tabel 20.Data Kecelakaan Berdasarkan Polda Prioritas

NO	POLDA PRIORITAS	2011	2012	TREND	
				ANGKA	%
1	PRIORITAS I	3.231	3.847	616	19,07%
2	PRIORITAS II	1.513	1.386	-127	-8,39%
	JUMLAH	4.744	5.233	489	10,31%

Sumber : Korlantas POLRI 2012

Keterangan :

Polda Prioritas I : Polda Sumsel, Polda Lampung, Polda Banten, Polda Metro,Polda Jabar, Polda Jateng, Polda DIY, Polda Jatim, Polda Bali dan Polda Sulsel.

Polda Prioritas II: Polda Sumut, polda Sumbar, Polda Sultra, Polda Kalsel, Polda NAD, Polda Sulteng, Polda Bengkulu, Polda Kalteng, Polda Kep.Riau, Polda Kaltim, Polda Kalbar, Polda Papua, Polda Riau, Polda NTB, Polda Gorontalo, Polda Maluku, Polda Babel,Polda Maluku Utara, Polda Sulut, Polda Jambi dan Polda NTT.

Tabel 21.Data Kecelakaan Lalu Lintas

URAIAN	H-7 S/D H+7		
	2011	2012	%
a. Jumlah Kejadian	4.744	5.233	10,3%
b. Korban Meninggal dunia	779	908	16,6%
c. Korban Luka Berat	1.334	1.505	12,8%
d. Korban Luka Ringan	3.443	5.139	49,3%
e. Kerugian Materiil	14.480.307.464	11.125.695.012	-23,2%

Sumber : Korlantas POLRI 2012

- Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan jumlah kejadian sebesar 10, 3% dibandingkan tahun 2011 atau naik sebesar 489 kasus.
- Jumlah kejadian selama masa angkutan lebaran tahun 2011 sebesar 4.744 kejadian sedangkan tahun 2012 sebesar 5233 kejadian.
- Rata-rata kejadian tahun 2011 adalah 297 kejadian perhari sedangkan untuk tahun 2012 nadalah 327 kejadian perhari
- Terjadi peningkatan jumlah korban meninggal dunia sebesar 16,5 % jika dibandingkan tahun 2011;
- Jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2011 sebanyak 779 orang sedangkan tahun 2012 sebanyak 908 orang;
- Rata-rata korban meninggal tahun 2011 selama periode angkutan lebaran sebesar 49 orang/hari, sedangkan tahun 2012 sebesar 57 orang/hari.

Tabel 22. Data Kendaraan Yang Terlibat Kecelakaan

URAIAN	H-7 S/D H+7		
	2011	2012	%
a. Sepeda Motor	4.325	5.710	32,02%
b. Mobil Penumpang	826	1.202	45,52%
c. Mobil Bus	241	278	15,35%
d. Mobil Barang	542	675	24,54%
e. Kendaraan Khusus	14	14	0,00%
f. Kendaraan Tidak Bermotor	115	101	-12,17%
Jumlah	6.063	8.032	32,48%

Sumber : Korlantas POLRI 2012

Tabel 23. Data Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian

URAIAN	H-7 S/D H+7		% dari total	KETERANGAN
	2011	2012		
a. 00.00 - 03.00	0	336	6,42%	Perkara
b. 03.00 - 06.00	0	327	6,25%	Perkara
c. 06.00 - 09.00	0	676	12,92%	Perkara
d. 09.00 - 12.00	0	843	16,11%	Perkara
e. 12.00 - 15.00	0	792	15,13%	Perkara
f. 15.00 - 18.00	0	845	16,15%	Perkara
g. 18.00 - 21.00	0	880	16,82%	Perkara
h. 21.00 - 24.00	0	534	10,20%	Perkara
Jumlah	0	5.233	100,00%	Perkara

Sumber : Korlantas POLRI 2012

Tabel 24. Perbandingan Rata-Rata Tingkat Kecelakaan Harian Selama Periode Lebaran 2012 Dengan Periode Normal

URAIAN	KECELAKAAN PERIODE LEBARAN TAHUN 2012 (16 HARI)	TOTAL KECELAKAAN TAHUN 2011 (349 HARI DI LUAR LEBARAN)	RATA-RATA PERHARI PERIODE LEBARAN 2012	RATA-RATA PERHARI DI LUAR PERIODE LEBARAN TH. 2011	PERBANDINGAN
KEJADIAN LAKA	5.233	106.291	327	305	7.21 %
MENINGGAL DUNIA	908	30.406	57	87	-34,48 %

Sumber : Korlantas POLRI 2012

Analisis:

- Selama masa angkutan lebaran 2012 rata-rata harian jumlah kecelakaan 7,21 % lebih tinggi dibanding hari normal;
- Selama masa angkutan lebaran 2012 rata-rata harian jumlah korban meninggal dunia 34,48% lebih rendah dibanding hari normal;
- Pada periode lebaran pengawasan lebih menyeluruh sehingga seluruh kejadian kecelakaan dapat dicatat, disisi lain juga terjadi penurunan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas.

N. Kondisi Lapangan Perilaku Pemudik Sepeda Motor Masa Angkutan Lebaran Tahun 2012

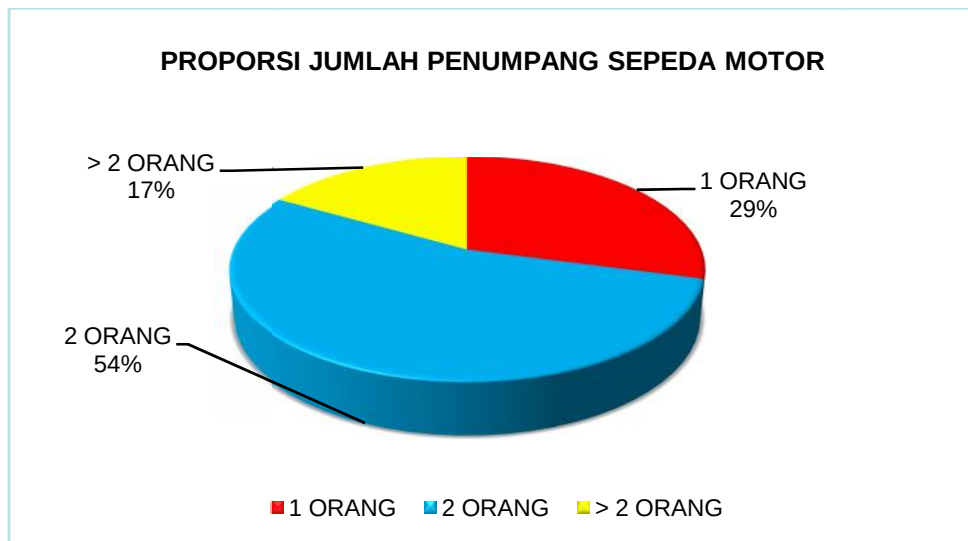
1. Asal tujuan pemudik sepeda motor

PERTANYAAN	JAWABAN	%
Asal Perjalanan	Jakarta	31,1%
	Bogor/Depok	6,6%
	Tangerang/Banten	19,0%
	Bekasi/Cikarang	35,5%
	Lain - Lain	5,8%
Tujuan Mudik	Jabar	9,9%
	Jateng	73,6%
	Jogyakarta	5,0%
	Jatim	10,7%
	Lain - Lain	0,8%

Sumber :Hasil Survey Pemudik Sepeda Motor, Kemenhub

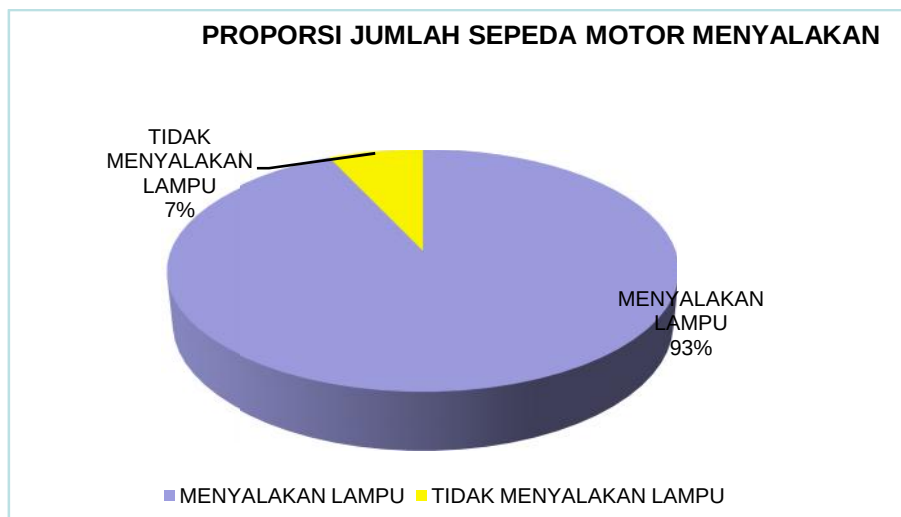
Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah pemudik dengan menggunakan sepeda motor banyak yang berasal dari bekasi/ cikarang bila dibandingkan dengan jakarta hal ini dikarenakan didaerah tersebut merupakan daerah kawasan industri yang banyak mempekerjakan buruh atau pekerja, dilihat dari tujuan mudik yang terbesar adalah dengan tujuan jawa tengah hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemudik jarak menengah yang rata2 bekerja di kawasan industri cikarang/bekasi menggunakan sepeda motor untuk mudik ke kampung halamannya.

2. Proporsi jumlah penumpang sepeda motor



Sumber :Hasil Survey Pemudik Sepeda Motor, Kemenhub

3. Proporsi jumlah pemudik sepeda motor menyalakan lampu



Sumber :Hasil Survey Pemudik Sepeda Motor, Kemenhub

O. Pelanggaran dan Percaloan

1. Moda Kereta Api

Di stasiun Kertosono hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2012 Jam 09.00 WIB telah ditangkap seorang calo bernama suharto, alamat kedung derang RT01/02 Kecamatan Diwek Jombang dengan barang bukti 261 tiket KA. Gaya Baru Malam lebaran tiket berlaku tanggal 22 agustus 2012 s/d 10 September 2012, Pelaku ditahan di Polres Nganjuk, Jawa Timur

2. Moda Angkutan Jalan

URAIAN	Perbandingan		%
	Diperiksa	Melanggar	
Tahun 2011	209 kend.	37 kend.	17,7%
Tahun 2012	167 kend.	23 kend.	13,8%

Laporan Sementara Sambil menunggu Pengaduan dari Masyarakat dan Pemda

Dari data diatas pada tahun 2011 dilakukan pemeriksaan/pemantauan sebanyak 209 Kendaraan dan ditemukan 37 tujuh kendaraan melanggar ketentuan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan pada tahun 2012 dilakukan pemeriksaan atau pemantauan terhadap 167 kendaraan dan ditemukan 23 kendaraan yang melanggar ketentuan mengenai tarif.

3. Moda Angkutan Udara

- PT. Lion Mentari Airlines memberlakukan tariff melebihi batas atas sebesar 0,43%- 1%
- PT. Aviastar Mandiri rute Jakarta –Ketapang memberlakukan tarif melebihi tarif batas atas sebesar 3 %
- Citilink Indonesia rute Jakarta Banjarmasin memberlakukan tarif melebihi tarif batas atas sebesar 3 %

P. Lokasi Kemacetan dan Penyebab Kemacetan

- Kemacetan Lalu Lintas dapat terjadi pada jalur mudik dan jalur “wisata”
- Tingkat kemacetan relatif lebih berkurang dibanding periode lebaran tahun lalu kecuali pada periode puncak arus mudik (H-2)
- Kemacetan yang terjadi pada H-2 di ruas jalan Pantura, Pansela dan Jalur Alternatif antara lain disebabkan oleh :
 - Terkonsentrasinya kendaraan pada hari yang sama, dimana puncak H-2 Tahun 2012 sebesar 358.377 Kendaraan atau naik 25,65 % dibanding puncak Tahun 2011 (H-3) sebesar 266.441 Kendaraan;
 - Kurang Disiplinnya sebagian pemudik, khususnya pengguna sepeda motor sebagai contoh:

- 1) Jalur Pantura (Cikopo – Ciasem) terjadi kemacetan total karena sepeda motor yang keluar dari jalur alternatif tidak dapat dikendalikan;
- 2) Antrian pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau Restoran di jalan;
- c. Masih belum optimalnya skema pembebanan lalu lintas pada masing-masing ruas baik pantura, pansela maupun jalur alternatif.

Q. Kejadian Menonjol

1. Keterlambatan jadwal Kereta Api pada H-2
 - KA 33 Bima selama 143 menit
 - KA 7023 Gajayana selama 133 menit
 - KA 95 Mutiara selama 101 menit
 - KA 89 Malabar Express selama 90 menit
 - KA 40 Taksak selama 53 menit
2. Keterlambatan Kereta pada H-4 KA 7147 KRDE (Tegal – Tj. Priok)
3. Kecelakaan pelayaran
Pada hari ke 7:
Kansar Semarang musibah KM Anjani terbalik di perairan Nusakambangan 2 korban
4. Keterlambatan pesawat

R. Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi Bus

1. Pemeriksaan di Terminal

Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada 1460 pengemudi di 10 Propinsi pada 22 terminal dari Sumatera, Jawa dan Bali. Didapati hasil sebagai berikut:

784 dinyatakan sehat, 175 Hipertensi Berat, 277 pengemudi Hipertensi sedang, 219 pengemudi hipertensi ringan, 3 orang terbukti positif mengkonsumsi alkohol dan 1 orang terbukti mengkonsumsi amphetamine.

2. Pemeriksaan di lokasi Mudik Bersama/Gratis

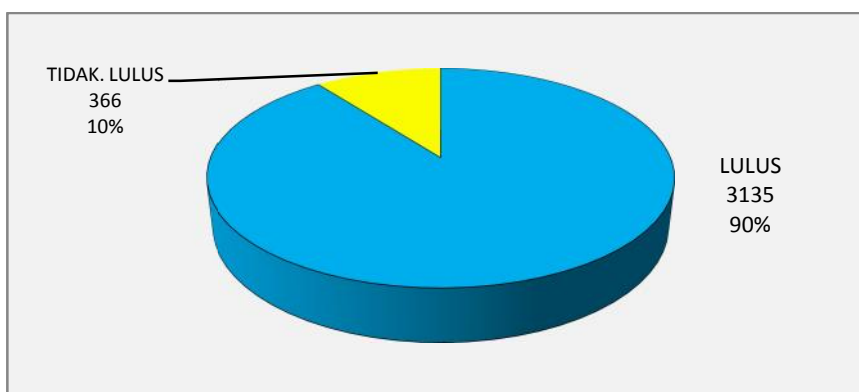
Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada 605 pengemudi di tempat pembernagkatan mudik gratis/bersama pada 12 lokasi di Propinsi DKI Jakarta dengan hasil sebagai berikut :266 pengemudi dinyatakan sehat, 79 hipertensi Berat, 145 Hipertensi Sedang, 115 Hipertensi ringan

3. Pengemudi yang dinyatakan tidak layak digantikan oleh pengemudi cadangan dan di rujuk ke pos kesehatan serta dilakukan pembinaan bersama perusahaan Otobis oleh Dinas Kesehatan setempat, untuk pengemudi yang ditemukan memiliki faktor risiko KKL agar melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan untuk menghindari kecelakaan saat mengemudi.

S. Uji Laik Jalan Sarana Angkutan Bus

Selama masa angkutan lebaran khususnya arus mudik Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor umum (Bus AKAP) yang akan digunakan oleh pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Pemeriksaan dikhususkan pada (Terminal Rawamangun, Terminal Pulogadung, Terminal Rambutan, Terminal Merdeka, Terminal Lebak Bulus, Terminal Tj Priok dan Terminal Kalideres) dengan hasil sebagai berikut :

No	KELAIK JALANAN	JUMLAH KENDARAAN	PROSENTASE
1	LULUS	3,135	89.5%
2	TIDAK LULUS	366	10.5%
TOTAL		3,501	100.0%



Dari data yang disajikan kendaraan yang diperiksa selama masa arus mudik di terminal yang ada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3.501 Kendaraan 10,5 % tidak lulus (366 Kendaraan) dan 3135 Kendaraan lulus uji yang dilaksanakan oleh Tim dari kementerian perhubungan dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jika kendaraan tersebut

dinyatakan tidak lulus maka kendaraan dikembalikan ke polol masing-masing untuk dilakukan perbaikan sampai dinyatakan laik jalan.

Adapun jenis pemeriksaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Karoseri;
2. Kondisi Ban;
3. Sistem Motor Penggerak;
4. Sistem kemudi, suspensi, AS dan Roda;
5. Sistem Penerus Daya;
6. Sistem Rem Utama;'
7. Sistem Penerangan;
8. Emisi Gas Buang;
9. Komponen Pendukung.

T. Rekomendasi

1. Jangka Pendek

- a. Menekan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi mudik dengan:
 - Sosialisasi baik media cetak maupun elektronik dan jejaring sosial
 - Penambahan penyediaan sarana Angkutan Umum bus maupun KA yang nyaman dan aman untuk dapat menarik pengguna R-2
 - Penambahan sarana mudik gratis yang dapat mengangkut sepeda motor menggunakan truk, KA, Kapal Laut dengan mendorong pengangkutan "Corporate Social Responsibility" pihak swasta termasuk penambahan dukungan APBN dan APBD
 - Ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pengendara R-2 yang tidak memenuhi ketentuan (jumlah penumpang maupun barang yang diangkut)
- b. Program pemenuhan perlengkapan jalan untuk keselamatan dengan menitikberatkan pada daerah-daerah rawan/potensi kecelakaan (rambu, marka, PJU, dll), petunjuk jurusan, serta informasi jalur-jalur alternatif dan informasi awal (melalui Variable Message Sign)
- c. Mengkaji ulang skema-skema manajemen lalu lintas operasional saat puncak

2. Jangka Menengah

- Membangun Budaya Mudik Setiap Tahun Menjadi 2 Tahun
- Peningkatan Kapasitas Angkut Di Semua Moda
- Peningkatan Sinergi Semua Pemangku Kepentingan Baik Pemerintah, Swasta (Dunia Usaha, Akademisi, Dll) Maupun Masyarakat Termasuk Peningkatan Peran Tni Dan Potensi Masyarakat Lainnya Dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran.
- Manajemen Demand Angkutan Dan Manajemen Gangguan Samping Lalu Lintas

3. Jangka Panjang

- Pembangunan Fly Over Pada Perlintasan Sebidang
- Relokasi Pasar Tumpah Atau Pembangunan Jalan Lingkar
- Pemerataan Pembangunan Pada Daerah

U. Perbandingan Realisasi Dengan Prediksi

Tabel 24.Perbandingan Realisasi Penumpang menggunakan Angkutan Umum

Moda	JUMLAH PENUMPANG			% Growth	Perbandingan Realisasi dengan Prediksi (%)
				Prediksi	
	2011 (1432 H)	Realisasi 2012 (1433H)	Prediksi 2012 (1433 H)	(dev $\pm$ 2-5%)	
ANGKUTAN DARAT	8.772.679	9.275.013	8.981.066	2,38	3,3%
a. Angkutan Jalan	5.524.875	5.998.162	5.596.892	1,30	7,2%
b. Angkutan SDP	3.247.804	3.276.851	3.384.174	4,20	-3,2%
ANGKUTAN KERETA API	1.904.517	2.409.486	2.215.284	16,32	8,8%
ANGKUTAN LAUT*	1.457.577	1.284.631	1.530.456	5,00	-16,1%
ANGKUTAN UDARA	2.987.081	3.293.241	3.285.788	10,00	0,2%
Jumlah	15.121.854	16.262.371	16.012.594	5,89	2%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2012

Data Realisasi Pemudik Moda Laut Tahun 2011 = Data H-15 s.d H+15

Data Realisasi Pemudik Moda Laut Tahun 2011 = Data H-15 s.d H+7

Berdasarkan data Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum sampai dengan H+7 adalah naik menjadi 16.262.371(2%) dibanding keseluruhan prediksi dari masa Angkutan Lebaran Tahun 2012 yang mencapai 16.012.594 penumpang.

Tabel 25.Perbandingan Realisasi Penumpang menggunakan Angkutan Pribadi

Moda	JUMLAH KENDARAAN			% Growth Prediksi (dev $\pm$ 2-5%)	Perbandingan Realisasi dengan Prediksi (%)
	2011 (1432 H)	Realisasi 2012 (1433H) (H-7 s.d. H+7)	Prediksi 2012 (1433 H) (H-7 s.d. H+7)		
MOBIL PRIBADI	1.520.150	1.657.457	1.605.299	5,60	3,1%
SEPEDA MOTOR	2.368.720	2.799.129	2.514.634	6,16	10,2%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran. 2012

Moda	JUMLAH PENUMPANG			% Growth Prediksi (dev $\pm$ 2-5%)	Perbandingan Realisasi dengan Prediksi (%)
	2011 (1432 H)	Realisasi 2012 (1433H) (H-7 s.d. H+7)	Prediksi 2012 (1433 H) (H-7 s.d. H+7)		
MOBIL PRIBADI	7,600,750	8,287,285	8,026,495	5.60	3.1%
SEPEDA MOTOR	4,737,440	5,598,258	5,029,268	6.16	10.2%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran. 2012

Keterangan : Asumsi 1 Mobil Pribadi = 5 Penumpang, 1 Sepeda Motor = 2 Penumpang

Berdasarkan data Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penggunaan kendaraan jenis **Sepeda Motor** dan **Mobil Pribadi** sampai dengan **H+7** adalah sebesar **10.2%** dan **3.1%** dibanding keseluruhan prediksi dari masa Angkutan Lebaran Tahun 2012 (1433 H).

II. ANALISA DAN EVALUASI ANGKUTAN NATAL 2012 DAN TAHUN BARU 2013

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Monitoring Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 adalah kegiatan rutin tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai bentuk monitoring dari Hari Raya Besar dan Libur Nasional dimana tingkat arus lalu lintas akan menjadi meningkat.

Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang khususnya angkutan darat, baik angkutan jalan maupun penyeberangan, maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui kondisi lapangan saat ini mengingat kondisi alam yang kurang bersahabat saat ini akan banyak terjadi bencana – bencana alam yang membahayakan sehingga apabila terjadi lonjakan permintaan angkutan, terjadi kemacetan lalu lintas, ataupun hal – hal lain yang dapat mengganggu tingkat keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat segera diketahui dan dicari alternatif pemecahannya.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan monitoring Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4459/KP.801/DRJD/2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Untuk kegiatan monitoring di daerah telah disampaikan surat ke masing-masing daerah, yaitu :
 - a. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE 16 Tahun 2012 tentang Persiapan Menghadapi Hari Natal Tahun 2012 dan Tahun Baru 2013.
 - b. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE 17 Tahun 2012 tentang Monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru 2013.
 - c. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE 18 Tahun 2012 tentang Peningkatan Keselamatan Angkutan Umum Di Jalan dan Persiapan Masa Angkutan Natal Tahun 2012 dan Tahun Baru 2013.

Maksud dari penyusunan laporan Monitoring Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 adalah untuk mengetahui tingkat permintaan jasa angkutan di Subsektor Perhubungan Darat baik Angkutan Jalan maupun Angkutan Penyeberangan, mengetahui kondisi lalu lintas dan angkutan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dilapangan.

Adapun tujuan dilakukan penyusunan laporan ini adalah untuk memperoleh masukan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan dan penyempurnaan langkah - langkah dalam hal pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan pada periode Natal dan Tahun Baru yang akan datang.

Pelaksanaan “Monitoring Harian Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013” dilakukan melalui pemantauan dan koordinasi dengan posko-posko Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Sumatera, Jawa, dan Bali serta terminal-terminal dan dermaga penyeberangan.

Dari Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota diperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Posko Monitoring Harian Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.

Terdapat 23 (dua puluh tiga) titik lokasi pemantau melalui *Closed Circuit Television* (CCTV) yaitu : Pintu Tol Cikampek, Simpang Jomin, Jembatan Timbang (JT) Balonggandu, JT Losarang, Pasar Tegal Gubug – Cirebon, JT Tanjung Brebes,

Pintu Tol Sadang, JT Kulwaru – Yogyakarta, Pelabuhan ASDP Merak, Pintu Tol Keluar Merak, JT Gentong, Sumpiuh, Pos Perlindungan KA Sumpiuh, Padalarang, Losari, Patrol, Nagrek, Comal, Karang Anyar, Pintu Tol Keluar Kanci, Pintu Tol Keluar Cileunyi, Ciamis, Pejagan, dan Cicalengka.

Pemantauan di Terminal Angkutan Jalan yaitu : Kampung Rambutan, Pulo Gadung, Kalideres, Lebak Bulus, Rawamangun, Yogyakarta, dan Surakarta.

Pemantauan di Pelabuhan Angkutan Penyeberangan yaitu : Merak – Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk, Padang Bai – Lembar, Bitung – Ternate, Sibolga – Gunung Sitoli, Kupang – Rote, Ambon (lintas Poka – Galala dan Hunimua – Waipirit).

Pelaksanaan Posko Monitoring Harian Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 oleh Dinas Perhubungan Provinsi/kabupaten/Kota bekerja sama dengan instansi terkait meliputi pemantauan terhadap kondisi arus lalu lintas khususnya pada ruas-ruas jalan dari dan ke tempat-tempat tujuan wisata yang selalu dipadati pengunjung pada saat liburan panjang dan liburan akhir tahun, serta kondisi angkutan pada terminal-terminal angkutan penumpang dan pelabuhan penyeberangan.

Pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 dilaksanakan mulai tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan 3 Januari 2013, dengan titik berat pemantauan di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Pulau Jawa (khususnya DKI Jakarta, DIY dan Jawa Timur), Bali dan Sulawesi Selatan, serta pemantauan sesuai kondisi yang ada pada beberapa Provinsi, yaitu : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Kegiatan monitoring dilakukan oleh petugas Posko Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertempat di Ruang Server *Road Transport and Traffic Management Centre* (RTTMC) Lantai VIII Gedung Karya Departemen Perhubungan mulai hari Rabu tanggal 21 Desember 2012 pukul 08.00 WIB terus menerus (termasuk hari besar/libur) sampai dengan hari Senin tanggal 3 Januari 2013 pukul 20.00 WIB.

B. REALISASI ANGKUTAN NATAL 2012 DAN TAHUN BARU 2013

1. Persiapan Penyelenggaraan

a. Angkutan Jalan

Pemantauan lalu lintas dan angkutan jalan pada tempat - tempat yang dipergunakan sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang (terminal) guna menunjang pelaksanaan Angkutan Natal 2012 dan Tahun

Baru 2013 ini berdasarkan hasil yang didapat hanya beberapa terminal di Pulau Jawa.

Untuk memantau kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah-daerah yang memiliki potensi kegiatan Natal dan Tahun Baru relatif tinggi, telah dibuka hubungan komunikasi radio dan atau telepon untuk memantau kondisi lapangan dan data-data yang dibutuhkan, yaitu pada beberapa provinsi, yaitu : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

b. *Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan*

Dalam menunjang operasional angkutan penyeberangan selama pelaksanaan Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013, pemantauan dilakukan di 12 (dua belas) pelabuhan penyeberangan meliputi 3 (tiga) lintasan utama Merak-Bakauheni, Ujung-Kamal dan Ketapang-Gilimanuk.

Sarana yang tersedia guna menunjang pelayanan jasa transportasi angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak – Bakauheni terdiri dari dua kapal penyeberangan yaitu Kapal Cepat dan Kapal Ro – Ro

Sedangkan sarana yang tersedia guna menunjang pelayanan jasa transportasi pengguna angkutan penyeberangan dipelabuhan Ujung-Kamal dan Ketapang-Gilimanuk hanya dilayani oleh satu kapal penyeberangan yaitu Kapal Ro – Ro.

2. Realisasi Penumpang Angkutan Jalan

Data yang berhasil dihimpun oleh petugas Monitoring Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 selama periode 21 Desember 2012 sampai dengan 3 Januari 2013 pada 6 terminal yaitu terminal Kampung Rambutan, Pulogadung, Kalideres Yogyakarta dan Surakarta **jumlah bus yang datang 46.304 unit** dan jumlah **penumpang datang** adalah **629.200 orang** sedangkan jumlah **bus yang berangkat 40.693 unit** dan jumlah **penumpang berangkat 719.872 orang** sebagaimana tabel sbb:

- a. Total keberangkatan bus dan penumpang dari 6 terminal dari Kalideres, Pulogadung, Rawamangun, Lebakbulus, Yogyakarta dan Surakarta adalah sebagai berikut :

No	Terminal	Penumpang	Bus
1	Jakarta	Kalideres	40,472
		Pulogadung	11,139
		Lebakbulus	28,167
		Rawamangun	24,517
2	Yogyakarta	364,335	11,176
3	Surakarta	251,242	19,510
Total		719,872	40,693

Sumber : hasil pemantauan Posko Ditjen Hubdat 2012

- b. Total kedatangan bus dan penumpang dari 6 terminal dari Kalideres, Pulogadung, Rawamangun, Lebakbulus, Yogyakarta dan Surakarta adalah sebagai berikut :

No	Terminal	Penumpang	Bus
1	Jakarta	Kalideres	35,027
		Pulogadung	17,654
		Lebakbulus	27,187
		Rawamangun	9,701
2	Yogyakarta	214,740	12,488
3	Surakarta	324,891	22,619
Total		629,200	46,304

Sumber : hasil pemantauan Posko Ditjen Hubdat 2012

3. Realisasi Penumpang Angkutan Penyeberangan

Secara umum kondisi arus lalu lintas angkutan penyeberangan berjalan lancar, selamat, aman, dan terkendali Monitoring Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 selama periode 21 Desember 2012 sampai dengan 3 Januari 2013 pada 4 pelabuhan yaitu pelabuhan merak, bakauheni, ketapang dan gilimanuk dengan jumlah kendaraan roda dua adalah 73.402 kendaraan (mengalami peningkatan sebesar 13.86 % dari tahun 2011) , jumlah kendaraan roda 4 adalah 166.461 kendaraan (mengalami peningkatan sebesar 88.13% dari tahun 2011) dan jumlah penumpang adalah 1.152.862 penumpang (mengalami peningkatan 2.85% dari tahun 2011) sebagaimana tabel sbb:

NO	PELABUHAN	2011			2012			% 2011/2012		
		R-2	R-4	PNP	R-2	R-4	PNP	R-2	R-4	PNP
1	MERAK	10833	26422	287271	11183	54227	286012	3.23%	105.23%	-0.44%
2	BAKAUHENI	10746	25459	317882	13034	60719	342110	21.29%	138.50%	7.62%
3	KETAPANG	16934	20700	250704	22718	36372	255373	34.16%	75.71%	1.86%
4	GILIMANUK	25954	15902	265032	26467	15143	269367	1.98%	-4.77%	1.64%
TOTAL		64467	88483	1120889	73402	166461	1152862	13.86%	88.13%	2.85%

Sumber : hasil pemantauan Posko Ditjen Hubdat 2012

C. PERMASALAHAN ANGKUTAN NATAL 2012 DAN TAHUN BARU 2013

Informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Monitoring Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 menunjukkan bahwa tidak terjadi lonjakan penumpang yang berarti baik untuk terminal – terminal utama yang dilakukan monitoring maupun di pelabuhan – pelabuhan utama yang dilakukan monitoring, tidak terjadi kekurangan armada angkutan, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan Monitoring Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013, diantaranya :

1. Banyak terjadi kemacetan – kemacetan di beberapa daerah tujuan wisata.
2. Masih terjadi kecelakaan selama pemantauan angkutan Natal dan tahun Baru yang melibatkan bus AKAP dan bus Pariwisata.
3. Pada tahun ini curah hujan relatif tinggi, di DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jawa Tengah sehingga mengakibatkan banjir pada beberapa ruas jalan (seperti di Rancaekek Subang, Ruas Jalan Tegal Pantura). Untuk wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Timur juga tidak mengalami gangguan banjir. Sedangkan tanah longsor terjadi di Tapanuli Selatan.

D. TINDAK LANJUT

Agar masalah tersebut tidak terulang setiap tahun maka untuk tahun – tahun yang akan datang masalah koordinasi antara pusat dan daerah serta instansi terkait hendaknya mendapat perhatian dari semua pihak.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Perlunya kordinasi yang lebih baik dengan Dinas Perhubungan / Dinas LLAJ Provinsi dan BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan untuk terciptanya keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas Angkutan Natal dan Tahun Baru.
- b. Perlunya keakuratan data untuk memudahkan Analisa dan Evaluasi serta langkah-langkah untuk pengambilan kebijakan dan persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru selanjutnya.

LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010-2014 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2010-2014 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2010-2014 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan tabel berikut:

Tabel Lampiran 2.1. Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
			Vol	Satuan
1	Menurunnya dampak sub sektor transportasi darat terhadap lingkungan melalui pengurangan konsumsi energi tak tergantikan dan emisi	Jumlah konsumsi energi tak tergantikan oleh angkutan umum sektor transportasi darat	1,39	Juta Liter / Tahun
		Jumlah produksi emisi gas buang dari sub sektor transportasi darat	3.238	Ton / Tahun
2	Peningkatan manfaat sub sektor transportasi darat terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan / pembangunan sarana dan prasarana	Prosentase peningkatan kontribusi transportasi darat terhadap PDRB	17	%
3	Meningkatnya keselamatan Transportasi Darat	Kejadian kecelakaan lalu lintas jalan dan SDP yang terkait dengan kewenangan Ditjen Hubdat	4.856	Kejadian
4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat sesuai SPM	Prosentase terpenuhinya frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan utama	100	%
		Prosentase kinerja pelayanan AKAP	74	%
5	Peningkatan penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di bidang transportasi darat	Jumlah lokasi yang memanfaatkan sarana transportasi darat berteknologi efisien dan ramah lingkungan	3	lokasi
		Jumlah prasarana transportasi jalan yang memanfaatkan teknologi efisien dan ramah lingkungan di jalan nasional	205	Unit
		Jumlahn pembangunan kenavigasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan	26	Unit
		Jumlah kota yang menerapkan ATCS dalam pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	15	Kota

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
			Vol	Satuan
		Jumlah kota yang memanfaatkan angkutan massal untuk pelayanan angkutan perkotaan	16	Kota
6	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	188	Trayek
		Jumlah trayek AKAP	2.343	Trayek
		Jumlah lintas penyeberangan perintis	163	Lintas
		Jumlah lintas penyeberangan komersil	49	Lintas
7	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat	Jumlah produksi angkutan penyeberangan	55.000.000	Penumpang/Tahun
			7.000.000	Kendaraan/Tahun
		Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan lebaran	6.221.563	Penumpang/Tahun
			3.300.000	Kendaraan/Tahun
		Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan natal	1.837.703	Penumpang/Tahun
			264.167	Kendaraan/Tahun
		Jumlah kapasitas penumpang angkutan umum massal di perkotaan	657.104.099	Penumpang/Tahun
8	Meningkatnya pemenuhan standar teknis dan standar operasional sarana dan prasarana transportasi darat	Prosentase penyelenggaraan operasional prasarana LLAJ yang memenuhi SPM	71	%
		Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	74	%
		Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan	100	%
		Prosentase kapal penyeberangan yang memenuhi SPM	100	%
9	Meningkatnya optimalisasi pengelolaan akuntabilitas kinerja anggaran dan BMN Ditjen Perhubungan Darat	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Darat	85	Nilai
		Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat	93	%
		Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi	11.527.543.414.208	Rp.
10	Peningkatan kualitas SDM	Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional	200	Sertifikat
		Jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat	302	Orang
11	Melanjutkan restrukturisasi kelembagaan di sub sektor transportasi darat	Jumlah kerja sama dengan Pemda/Swasta dibidang transportasi darat	3	Kerjasama
12	Melanjutkan reformasi regulasi	Jumlah tersusunnya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya	15	Peraturan

LAMPIRAN III

LAPORAN EVALUASI REALISASI DAYA SERAP DIPA TA. 2012

A. PAGU ANGGARAN

1. Total Pagu DIPA TA.2012 sebesar Rp. 2.482.792.346.000,- (PAGU AWAL)

- Rincian per Sumber Dana :

RM	:	Rp.	2.066.344.200.000,-	(98,72%)
PNBP	:	Rp.	1.800.570.000,-	(0,09 %)
PLN	:	Rp.	25.000.000.000,-	(1,19%)
- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	:	Rp.	37.719.908.000,-	(1,52 %)
Belanja Barang	:	Rp.	1.508.554.537.000,-	(60,76 %)
Belanja Modal	:	Rp.	936.517.901.000,-	(37,72 %)

2. Total Pagu DIPA TA.2012 (APBN-P) sebesar Rp. 2.807.415.673.000,-

- Rincian per Sumber Dana :

RM	:	Rp.	2.780.615.073.000,-	(99,05%)
PNBP	:	Rp.	1.800.600.000,-	(0,06 %)
PLN	:	Rp.	25.000.000.000,-	(0,89%)
- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	:	Rp.	40.813.468.000,-	(1,45 %)
Belanja Barang	:	Rp.	1.738.507.254.000,-	(61,93 %)
Belanja Modal	:	Rp.	1.028.094.951.000,-	(36,62 %)
- Rincian per sumber APBN-P :

Saldo Anggaran Lebih (SAL)	:	Rp.	314.000.000.000,-	
Penghargaan (Reward)	:	Rp.	10.623.327.000,-	

3. Total Pagu DIPA TA.2012 (Pemotongan dan Optimalisasi) sebesar Rp. 2.859.805.219.000,- (PAGU SAAT INI)

- Rincian per Sumber Dana :

RM	:	Rp.	2.833.004.619.000,-	(99,06%)
PNBP	:	Rp.	1.800.600.000,-	(0,06 %)
PLN	:	Rp.	25.000.000.000,-	(0,87%)
- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	:	Rp.	40.813.468.000,-	(1,43 %)
-----------------	---	-----	------------------	----------

Belanja Barang : Rp 1.813.495.255.000,- (63,41 %)

Belanja Modal : Rp. 1.005.496.496.000,- (35,16 %)

• Rincian per sumber Pemotongan dan Optimalisasi :

Pemotongan : Rp. 21.610.454.000,-

Optimalisasi non pendidikan : Rp74.000.000.000,-

B. Jumlah UPT/Satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat: 82UPT/Satker terdiri dari :

1. Program LLAJ :34Satker
2. Program LLASDP :35Satker
3. UPT :13 Kantor

C. Kegiatan yang dikontrakan di lingkunganDitjen Perhubungan Darat

1. Total rencanaKegiatandikontrakkan : 760 Paket,terdiri :

- a. Kegiatan Reguler : 709 Paket, terdiri :
 - 1) Kontrak Strategis : 395 Paket
 - 2) Non Kontrak Strategis : 314 Paket
- b. Kegiatan APBN-P : 46 Paket, terdiri :
Kontrak Strategis : 46 Paket
- c. Kegiatan Optimalisasi : 5 Paket, terdiri :
Kontrak Strategis : 5 Paket

2. Sudah Kontrak : 736 Paket(96,84%), terdiri :

- a. Kontrak Strategis : 423 Paket
- b. Non Kontrak Strategis : 313 Paket

3. Belum Kontrak : 24 Paket, terdiri :

- a. Kontrak Strategis : 23Paket
 - 1) Sudah lelang : 12 Paket
 - 2) Belum lelang : 11 Paket
- b. Non Kontrak Strategis : 1 Paket
 - 1) Sudah lelang : 1Paket
 - 2) Belum lelang : 0 Paket

4. Penjelasan Kegiatan Strategis yang tidak dilaksanakan sebanyak 23 Paket yaitu sudah lelang 12 paket dan belum lelang sebanyak 11 paket terdiri :

a. Kegiatan Strategis yang tidak dilaksanakan tetapi sudah lelang sebanyak 12 paket kegiatan sebesar Rp.68.000.000.000,- yaitu :

- 1) Kegiatan tidak dilaksanakan yang sudah lelang sebanyak 3 paket sebesar Rp.15.000.000.000,- yaitu :
 - ✓ IBRD 4834-IND untuk kegiatan *Strategic Road Infrastructure Project/SRIP* sebesar Rp.11.000.000.000,- pada Satker Direktorat Keselamatan Transportasi Darat
 - ✓ Studi lingkungan (UKL/UPL) pada Penyeberangan Tagulandang, Musi, Marampit sebesar Rp.1.500.000.000,- pada Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara
 - ✓ Pembangunan Jembatan Timbang Terantan Manuk Tahap IV sebesar Rp.2.500.000.000,- pada Satker Pengembangan LLAJ Riau
- 2) Kegiatan blokir/tanda bintang Reguler yang sudah lelang sebanyak 2 paket sebesar Rp.14.000.000.000,- yaitu :
 - ✓ Loan ADB (*Road Safety Awareness Campaign and Training*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - ✓ Loan ADB (*Integrated Vehicle Overloading Control Strategy*) sebesar Rp. 4.000.000.000,- pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 3) Kegiatan blokir/tanda bintang SAL yang sudah lelang sebanyak 7 paket sebesar Rp.39.000.000.000,- yaitu :
 - ✓ Pembangunan Kapal Penyeberangan (SAL) sebesar Rp.34.000.000.000,- (6 paket) pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - ✓ Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Th.I Lanjutan (termasuk supervisi) SAL sebesar Rp.5.000.000.000,- pada Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur

b. Kegiatan Strategis yang tidak dilaksanakan tetapi belum lelang sebanyak 11 paket kegiatan sebesar Rp.43.591.948.000,- yaitu :

- 1) Kegiatan tidak dilaksanakan yang belum lelang sebanyak 4 paket sebesar Rp.12.986.948.000,- yaitu :
 - ✓ Rehab. Dermaga Penyeberangan Saubabe Akibat Gempasebesar Rp.6.000.000.000,- Satker Pengembangan LLASDP Papua ,
 - ✓ Peningkatan Dermaga Cabang Sungai Way Seputih sebesar Rp.1.820.860.000,- Satker Pengembangan LLASDP Lampung,
 - ✓ Subsidi Operasional Perintis Penyeberangan Badaleonlts Namlea-Sanana sebesar Rp.1.916.088.000,- Satker Pengembangan Sarana LLASDP Maluku
 - ✓ Pengerukan Kolam Alur Pelabuhan Penyeberangan Merak sebesar Rp.3.250.000.000,- Satker Pengembangan Transportasi SDP.
- 2) Kegiatan blokir/tanda bintang Reguler yang belum lelang sebanyak 4 paket sebesar Rp.19.500.000.000,- yaitu :
 - ✓ Peningkatan/Rehabilitasi Terminal Kebumen sebesar Rp.7.000.000.000,- Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah,
 - ✓ Pembangunan Terminal Berkah/Kadubanensebesar Rp.5.000.000.000,- Satker Pengembangan LLAJ Banten,
 - ✓ Pembangunan Jembatan Timbang Gerem Merak sebesar Rp.5.000.000.000,- Satker Pengembangan LLAJ Banten
 - ✓ Pembangunan Terminal Kab. Simalungun sebesar Rp.2.500.000.000,- Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Utara.
- 3) Kegiatan blokir/tanda bintang SAL sebanyak 3 paket sebesar Rp.11.105.000.000,- yaitu :
 - ✓ Operasional Pelaksanaan MTQ sebesar Rp.1.200.000.000,- Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - ✓ Operasional Pelaksanaan Sail Morotai sebesar Rp.1.405.000.000,- Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan

- ✓ Subsidi Operasional Lintas Penyeberangan Perintis sebesar Rp.8.500.000.000,- Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

5. **Kegiatan Nonstrategis yang tidak dilaksanakan adalah** Pengadaan Peralatan Penyidikan Tindak Pelanggaran Bidang LLAJ sebesar Rp.500.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dikarenakan setelah dilakukan pelelangan ulang tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.

D. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 posisi 31 Desember 2012

Realisasi penyerapan DIPA TA.2012 terhadap pagu APBN-P sebesar Rp. 2.859.805.219.000,- posisi per 31 Desember 2012, Keuangan **Rp.2.589.876.430.000 (90,56 %)**; Fisik = 92,54%, terdiri dari :

- Rincian per Sumber Dana :

RM : Rp. 2.570.426.139.463 ,- (90,68 %)
 PNBP : Rp. 1.713.283.675,- (95,15 %)
 PLN : Rp. NIHIL

- Rincian per Jenis Belanja :

URAIAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE	REALISASI	PROSENTASE
		e-Mon	(%)	DJPB	(%)
Belanja Pegawai	40.813.468.000	35.880.106.913	87,91	35.163.530.000	86,16
Belanja Barang	1.813.495.255.000	1.580.150.533.090	87,13	1.646.522.910.000	90,79
Belanja Modal	1.005.496.496.000	911.369.676.099	90,64	908.190.000.000	90,32
Jumlah	2.859.805.219.000	2.527.400.316.102	88,38	2.589.876.440.000	90,56

E. Kegiatan yang bertanda bintang :

Terdapat 14 kegiatan yang diblokir/bertanda bintang sebesar Rp.91.480.081.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Output Cadangan (Operasional Satker UPT yang baru) sebesar Rp. 1.169.585.000,- pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan sisa selisih perhitungan pencairan.
2. Output Cadangan SAL sebesar Rp.6.000.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Operasional Pelaksanaan MTQ (SAL) sebesar Rp.1.200.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan dikarenakan menunggu hasil audit BPKP;

4. Operasional Pelaksanaan Sail Morotai (SAL) sebesar Rp.1.405.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan dikarenakan menunggu hasil audit BPKP;
5. Subsidi Operasional Lintas Penyeberangan Perintis (SAL) sebesar Rp.8.500.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dikarenakan menunggu hasil audit BPKP;
6. Pembangunan Kapal Penyeberangan (SAL) sebesar Rp.34.000.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
7. Peningkatan/Rehabilitasi Terminal Kebumen sebesar Rp. 7.000.000.000,- pada Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah dikarenakan status tanah / sertifikat lahan belum ada;
8. Pembangunan Terminal Berkah (Kadubanen) sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada Satker Pengembangan LLAJ Banten dikarenakan menunggu perbaikan / Revisi DED yang dilakukan oleh Pemda;
9. Pembangunan Jembatan Timbang Gerem Merak sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada Satker Pengembangan LLAJ Banten dikarenakan status tanah / sertifikat lahan belum ada;
10. Pembangunan Terminal Kab. Simalungun sebesar Rp. 2.500.000.000,- pada Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Utara dikarenakan status tanah / sertifikat lahan belum ada;
11. Subsidi Operasional Lintas Penyeberangan Perintis KMP Lohoraung Lts. Tagulandang-Biaro & Biaro-Likupang SAL sebesar Rp.705.496.000,- pada Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara dikarenakan sisa selisih perhitungan pencairan;
12. Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Th.I Lanjutan (termasuk supervisi) SAL sebesar Rp.5.000.000.000,- pada Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur;
13. Loan ADB (*Road Safety Awareness Campaign and Training*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan Loan Agreement belum aktif;
14. Loan ADB (*Integrated Vehicle Overloading Control Strategy*) sebesar Rp. 4.000.000.000,- pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan Loan Agreement belum aktif;

F. Prediksi Dana Tidak Terserap sebesar Rp.269.928.779.000,- terdiri dari:

1. Dana Blokir/Bertanda Bintang Reguler (7 kegiatan) sebesar

Rp.34.669.585.000,- terdiri :

- a. Output Cadangan (operasional Satker UPT baru) sebesar Rp.1.169.585.000,- pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan sisa selisih penghitungan pencairan;
- b. Peningkatan/Rehabilitasi Terminal Kebumen sebesar Rp. 7.000.000.000,- pada Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah dikarenakan status tanah / sertifikat lahan belum ada;
- c. Pembangunan Terminal Kab. Simalungun sebesar Rp. 2.500.000.000,- pada Satker LLAJ Sumatera Utara dikarenakan status tanah / sertifikat lahan belum ada;
- d. Pembangunan Terminal Berkah (Kadubanen) sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada Satker LLAJ Banten dikarenakan menunggu perbaikan / Revisi DED yang dilakukan oleh Pemda;
- e. Pembangunan Jembatan Timbang Gerem Merak sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada Satker LLAJ Banten dikarenakan status tanah / sertifikat lahan belum ada;
- f. Loan ADB (*Road Safety Awareness Campaign and Training*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan Loan Agreement belum aktif;
- g. Loan ADB (*Integrated Vehicle Overloading Control Strategy*) sebesar Rp. 4.000.000.000,- pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan Loan Agreement belum aktif.

2. Dana Blokir/Bertanda Bintang SAL (7 kegiatan) sebesar Rp.56.810.496.000,- terdiri :

- a. Output Cadangan SAL sebesar Rp.6.000.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. Operasional Pelaksanaan MTQ (SAL) sebesar Rp.1.200.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- c. Operasional Pelaksanaan Sail Morotai (SAL) sebesar Rp.1.405.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan;

- d. Subsidi Operasional Lintas Penyeberangan Perintis (SAL) sebesar Rp.8.500.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - e. Pembangunan Kapal Penyeberangan (SAL) sebesar Rp.34.000.000.000,- (6 Paket) pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - f. Subsidi Operasional Lintas Penyeberangan Perintis KMP Lohoraung Lts. Tagulandang-Biaro & Biaro-Likupang SAL sebesar Rp.705.496.000,- pada Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara dikarenakan sisa selisih penghitungan pencairan;
 - g. Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GT Th.I Lanjutan (termasuk supervisi) SAL sebesar Rp.5.000.000.000,- pada Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur.
3. **Kegiatan yang tidak dilaksanakan (8 kegiatan) sebesar Rp. 28.486.948.000,- terdiri :**
- a. Satker Pengembangan LLASDP Papua pada kegiatan Rehab. Dermaga Penyeberangan Saubabe Akibat Gempa sebesar Rp.6.000.000.000,- dikarenakan dibutuhkan biaya rehab. yang sangat besar sehingga disarankan untuk direlokasi.
 - b. IBRD 4834-IND untuk kegiatan *Strategic Road Infrastructure Project* (SRIP) sebesar Rp.11.000.000.000,- pada Satker Direktorat Keselamatan Transportasi Darat sesuai Surat Direktur Transportasi KPPN/Bappenas Nomor : 7581/D.6.2/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Hasil evaluasi pelaksanaan *technical assistance* IRSMS-1 : *Strategic Roads Infrastructure Project* (SRIP) IBRD Loan No.4834-IND (7786-ID) kegiatan tersebut sudah kurang relevan dan apabila tetap dilaksanakan dikhawatirkan tidak tepat waktu. Maka memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan lain yang lebih relevan dan mendesak untuk dilaksanakan saat ini.
 - c. Peningkatan Dermaga Cabang Sungai Way Seputih sebesar 1.820.860.000,- pada Satker Pengembangan LLASDP Lampung dikarenakan tidak dilaksanakan karena tanah yang dijanjikan akan disiapkan Pemda Lampung Tengah belum tersedia.
 - d. Pengerukan Kolam Alur Pelabuhan Penyeberangan Merak sebesar Rp.3.250.000.000,- pada Satker Pengembangan Transportasi SDP

dikarenakan tidak ada peserta dalam lelang ulang yang dinyatakan memenuhi syarat dan sesuai dengan Berita Acara Peninjauan Kembali No.09/PTSDP-BA/Kons-M/KRK-M/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012, disampaikan bahwa sisa waktu yang ada hingga Desember 2012 tidak mencukupi untuk dilaksanakannya pekerjaan tersebut.

- e. Pengadaan Peralatan Penyidikan Tindak Pelanggaran Bidang LLAJ sebesar Rp.500.000.000,- pada Satker Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dikarenakan setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap kegiatan pelelangan ulang tetap tidak ada peserta yang memasukan penawaran.
- f. Subsidi Operasional Perintis Penyeberangan Badaleonlts Namlea- Sanana sebesar Rp.1.916.088.000,- dikarenakan belum adanya surat ijin operasi dari Direktorat Teknis.
- g. Studi lingkungan (UKL/UPL) pada Penyeberangan Tagulandang, Musi, Marampit sebesar Rp.1.500.000.000,- pada Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara Dikarenakan Gagal Lelang (Peserta tidak memenuhi kualifikasi)
- h. Pembangunan Jembatan Timbang Terantan Manuk Tahap IV sebesar Rp.2.500.000.000,- pada Satker Pengembangan LLAJ Riau Dikarenakan Gagal Lelang (Peserta tidak memenuhi kualifikasi)

4. Sisa Dana Kegiatan sebesar Rp. 73.123.941.000,- terdiri :

- a. Satker Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat pada kegiatan Dana Transito sebesar Rp. 2.404.415.000,-
- b. Sisa Dana Belanja Pegawai sebesar Rp.3.260.117.000,-
- c. Sisa Dana Belanja Barang sebesar Rp. 54.518.483.000,-
- d. Sisa Dana Belanja Barang sebesar Rp. 12.940.926.000,-

5. Sisa Kontrak sebesar Rp. 76.837.810.000,- terdiri :

Sisa kontrak pada UPT/Satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat terdiri dari :

- a. Belanja Barang sebesar Rp.44.247.599.000,-
- b. Belanja Modal sebesar Rp.32.590.210.000,-

6. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran :

- a. Melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran satker untuk mengetahui progress kegiatan masing-masing satker secara terperinci;

- b. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi masing-masing satker ;
- c. Mendiskusikan masalah yang ditemukan untuk mencari solusi yang tepat dalam memecahkan masalah tersebut dengan Direktorat Teknis;
- d. Mengatur penyampaian SPM sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun;
- e. Me-review rencana penarik dana yang lebih realistis dengan tidak menumpuk penarikan dan pada akhir tahun anggaran dan melaksanakan rencana penarikan dan secara konsisten;
- f. Menerapkan ketentuan yang diatur dalam Permenkeu Nomor: 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja secara tertib dan konsekwen;
- g. Memerintahkan Penyedia Barang/Jasa yang mengadakan kontrak untuk segera mengajukan tagihan atas Pekerjaan/Jasa yang telah selesai.

7. Kendala dan Hambatan:

No.	KENDALA/HAMBATAN	TINDAK LANJUT
A	Adanya kegiatan yang bertanda bintang	1. Total blokir sebesar Rp.303.461.173.000,- terdiri dari : a. Blokir regular sebesar Rp.154.592.679.000,- b. Blokir SAL sebesar Rp.148.868.494.000,- 2. Telah cair I sebesar Rp.117.893.094.000,- 3. Telah cair II sebesar Rp.92.057.998.000,- 4. Blokir berkurang akibat pemotongan sebesar Rp.2.030.000,- 5. Sisa total kegiatan diblokir sebesar Rp.91.480.081.000,-
B	Adanya perubahan/revisi anggaran DIPA yang belum diusulkan POK	Ditjen Hubdat agar segera mengusulkan Revisi POK DI (Kanwil DJPB, Reward, SAL, Pemotongan dan Optimalisasi)
C	UPT/Satker kurang aktif meng-update e-monitoring dan reporting	Melakukan rekonsiliasi daya serap melalui <i>e-monitoring</i> dan <i>reporting</i>
D	Tidak mengindahkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran	Ditjen Hubdat telah menginstruksikan Percepatan Pelaksanaan TA. 2012 sesuai Surat No. KU.006/1/2/DJPD/2012 tgl 28 S No. KU. 002/12/9/DJPD/ 2012 tgl 27 November 2012



**Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan**